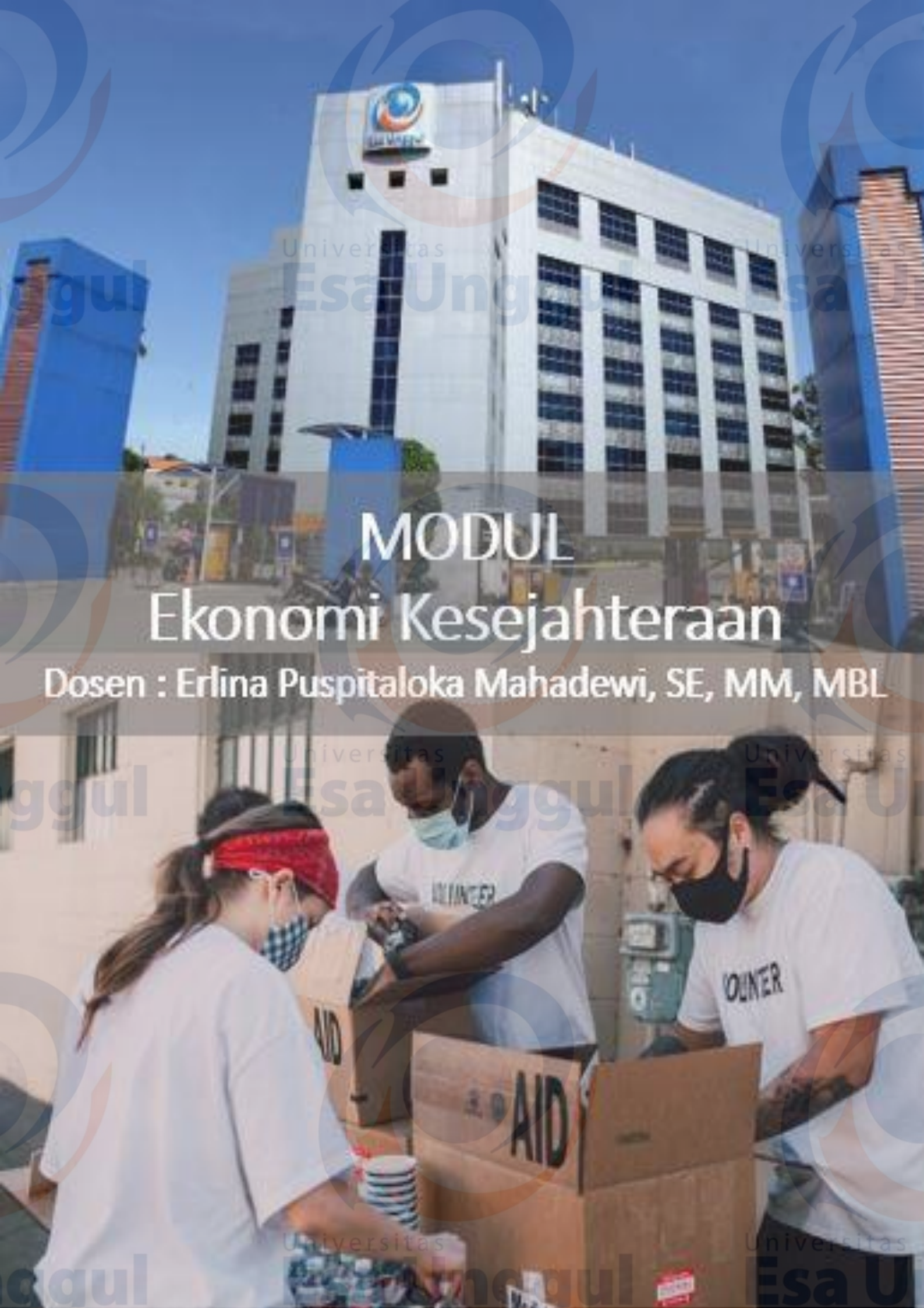


MODUL
Ekonomi Kesejahteraan

Dosen : Erlina Puspitaloka Mahadewi, SE, MM, MBL

MODUL EKONOMI KESEJAHTERAAN

(KAK 357)

MODUL 1

PENGANTAR EKONOMI KESEJAHTERAAN

(KONTRAK PEMBELAJARAN, DESKRIPSI & MANFAAT MATA KULIAH)

DISUSUN OLEH

Dosen: Erlina Puspitaloka Mahadewi, SE, MM, MBL (5661)

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2022

PENGANTAR

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu :

1. Mahasiswa mampu memahami definisi Ekonomi Kesejahteraan
2. Mahasiswa mampu memahami konsep Ekonomi Kesejahteraan
3. Mahasiswa mampu menjelaskan tipe dan macam teori dalam Ekonomi Kesejahteraan
4. Mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi model dalam imlementasi Ekonomi Kesejahteraan

A. Uraian dan Contoh

1. Visi dan Misi

Universitas Esa Unggul mempunyai visi menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Universitas Esa Unggul menetapkan misi-misi sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan
b. Menciptakan suasana akademik yang kondusif
c. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan

2. Topik Perkuliahan, Deskripsi & Kontrak Pembelajaran

Kesejahteraan ekonomi atau Ekonomi Kesejahteraan yang merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan antara Ekonomi, Kesejahteraan dan Kesehatan. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari pasar. Pada dasarnya kegiatan ekonomi lebih mementingkan sebuah keuntungan bagi pelaku ekonomi dari pasar tersebut.

Sehingga sangat sulit dalam menemukan ekonomi yang dapat menyejahterakan, apabila dilihat dari mekanisme pasar yang ada. Keadaan pasar yang begitu kompetitif untuk mencari keuntungan, merupakan salah satu hal yang menjadi penghambat untuk menuju kesejahteraan.

Topik mata kuliah Ekonomi Kesejahteraan terbagi menjadi 2 bagian, yakni bagian ke-1 terdiri dari topik-topik tentang Dasar dan Teori dari Ekonomi Kesejahteraan dan bagian ke-2 terdiri dari teori-teori dan model-model dalam ekonomi kesejahteraan sebelum ujian tengah semester (UTS), sedangkan topik-topik tentang permasalahan dalam Ekonomi Kesejahteraan beserta implikasinya, diselesaikan setelah UTS sampai dengan sebelum ujian akhir semester (UAS).

Adapun topik-topik perkuliahan sebelum UTS adalah :

a. Topik 1 – Pengantar Ekonomi Kesejahteraan
b. Topik 2 – Dasar Ekonomi Kesejahteraan
c. Topik 3 – Teori Ekonomi Kesejahteraan
d. Topik 4 – Teori Modal dan UU Kesejahteraan Ekonomi
e. Topik 5 – Pengertian dan Masalah2 Kesejahteraan
f. Topik 6 – Pengertian Ekonomi dalam Kesejahteraan (Metode Blum)
g. Topik 7 – Proses dalam Ekonomi Kesejahteraan

Untuk topik-topik perkuliahan sebelum UAS adalah :

a. Topik 08 - Pengertian & Implementasi Teori Kesejahteraan
b. Topik 09 – Index Mutu Hidup (IMH) dan Index Gini
c. Topik 10 - Pengertian dan Metode Index Gini
d. Topik 11 - Indikator Ekonomi Kesejahteraan
e. Topik 12 – Pengertian dan Masalah Kemiskinan
f. Topik 13 – Pengertian dan Metode dasar Edgeworth
g. Topik 14 - Latihan dan pendalaman kasus dengan Pareto

Mata kuliah ini memiliki tujuan perkuliahan yang harus diwujudkan dalam satu Semester perkuliahan. Adapun tujuan perkuliahan yang dimaksud adalah :

Setelah selesai pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu :

a. Menjelaskan pengertian Ekonomi Kesejahteraan
b. Menganalisis teori dasar Ekonomi dan Kesejahteraan

c. Mengidentifikasi langkah-langkah mendapatkan solusi dari Metode dan Model Kesejahteraan Ekonomi
d. Menyimpulkan teori menggunakan berbagai sumber yang berbeda
e. Mensintesis nilai-nilai yang berlaku dalam khasanah ilmu pengetahuan ekonomi dan sosial
f. Menggambarkan hakekat ekonomi, kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat
g. Membuat resume tentang model dan teori ekonomi kesejahteraan sebagai sarana berpikir ilmiah dan solusi permasalahan
h. Menggambarkan hakekat sebab akibatnya dalam ekonomi dan kesehatan

3. Buku Referensi dan Komponen Penilaian

Untuk mencapai tujuan tersebut, mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika menggunakan berbagai buku referensi tentang filsafat keilmuan. Ada beberapa buku yang direkomendasikan untuk dipelajari, yakni :

1. Sjahrir, Dr., Moneter, Perkreditan dan Neraca Pembayaran, Persoalan Ekonomi Kesejahteraan Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2015
2. Tambunan, Tulus T.H., Dr., Perekonomian dan Kesejahteraan Indonesia,, Teori dan temuan Empiris, Ghalia Indonesia, 2017
3. Boediono, Dr., Ekonomi Internasional dan Nasional, BPFE, Yogyakarta, 2014
4. Tamburan, Tulus T,H., Dr., Perekonomian Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016
5. Halwani, Hendra. Dra. M.H., dan Tjiptoharijanto, Prijono, H. Dr., Perdagangan Internasional, Pendekatan Ekonomi Kesejahteraan Makro & Mikro, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018
6. Kindleberger, Ekonomi Internasional, Terjemahan Drs. Rudy Sitompul, Edisi Ketujuh, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012

Untuk penilaian akhir, komponen nilai yang digunakan terdiri dari kehadiran, UTS, UAS dan penugasan. Dalam kuliah *online* komponen penugasan ditambah dengan kuis, sedangkan komponen kehadiran tidak diperhitungkan karena ditekankan pada aspek aktivitas di *website.*

Adapun proporsi penilaiannya sebagai berikut :

a. UTS = 30 %
b. UAS = 30 %
c. Kuis = 20 %
d. Tugas = 20 %

PENGANTAR EKONOMI KESEJAHTERAAN

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu :

1. Mahasiswa mampu memahami definisi Ekonomi Kesejahteraan
2. Mahasiswa mampu memahami konsep Ekonomi Kesejahteraan
3. Mahasiswa mampu menjelaskan tipe dan macam teori dalam Ekonomi Kesejahteraan
4. Mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi model dalam imlementasi Ekonomi Kesejahteraan

B. Uraian

1. Pengertian Ekonomi Kesejahteraan

Kesejahteraan ekonomi atau Ekonomi Kesejahteraan merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari pasar. Pada dasarnya kegiatan ekonomi lebih mementingkan sebuah keuntungan bagi pelaku ekonomi dari pasar tersebut. Sehingga sangat sulit dalam menemukan ekonomi yang dapat menyejahterakan, apabila dilihat dari mekanisme pasar yang ada. Keadaan pasar yang begitu kompetitif untuk mencari keuntungan, merupakan salah satu hal yang menjadi penghambat untuk menuju kesejahteraan.

2. Jenis-jenis Ekonomi Kesejahteraan

Terdapat dua jenis kesejahteraan ekonomi, yaitu kesejahteraan ekonomi konvensional dan kesejahteraaan ekonomi syariah.

A. Kesejahteraan Ekonomi Konvensional

Kesejahteraan ekonomi konvensional hanya menekankan pada kesejahteraan material, dengan mengabaikan kesejahteraan spiritual dan moral. Dimana

kesejahteraan ekonomi konvensional menggunakan dua pendekatan dalam menentukan kesejahteraan ekonomi, yaitu pendekatan Neo-Klasik dan pendekatan ekonomi kesejahteraan yang baru (modern). Pendekatan Neo-Klasik berasumsi bahwa nilai guna merupakan kardinal dan konsumsi tambahan itu menyediakan peningkatan yangsemakin kecil dalam nilai guna (*diminishing marginal utility*)[4].

Pendekatan Neo-Klasik lebih lanjut berasumsi bahwa semua individu mempunyai fungsi nilai guna yang serupa, oleh karena itu hal tersebut mempunyai makna untuk membandingkan nilai guna individu dengan nilai guna milik orang lain. Oleh karena asumsi ini, hal tersebut memungkinkan untuk membangun suatu fungsi kesejahteraan sosial dengan hanya menjumlahkan seluruh fungsi nilai guna individu. Pendekatan modern perkembangan dari neo klasik dimana perpaduan antara kesejahteraan tidak dapat diukur hanya dengan materi namun non materi juga dipertimbangkan dalam menentukan sebuah kesejahteraan. Sebab kesejahteraan meliputi jasamani yang besifat materil dan rohani yang bersifat non materil.

B. Kesejahteraan Ekonomi Syariah

Kesejahteraan ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep ekonomi kesejahteraan syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai moral dan spiritual, nilai sosial dan nilai politik Islami. Dalam pandangan syariah terdapat 3 segi sudut pandang dalam memahami kesejahteraan ekonomi yakni:

Pertama, dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari

segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian "Islam" yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Kedua, dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia (*hablum minallâh wa hablum minnan-nâs*). Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal saleh, yang di dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

1. Prinsip dan Faktor Kesejahteraan

Prinsip-prinsip kesejahteraan adalah:

a. Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu.
b. Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat.
c. Kerugian yang besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, hanya yang lebih kecil harus dapat diterima atau diambil untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mandapatkan manfaat yang lebih besar.

Kesejahteraan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain. Jadi menurut Al-Qur'an kesejahteraan meliputi faktor:

a. Keadilan dan Persaudaraan Menyeluruh.

b. Nilai-Nilai Sistem Perekonomian.

c. Keadilan Distribusi Pendapatan.

2. Indikator Kesejahteraan

Konsep kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empaat indikator yaitu :

a. rasa aman (*security*)

b. Kesejahteraan (*welfare*)

c. Kebebasan (*freedom*)

d. Jati diri (*Identity*)

Biro Pusat Statistik Indonesia[8] menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuruan, antara lain adalah :

a. Tingkat pendapatan keluarga

b. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan

c. Tingkat pendidikan keluarga

d. Tingkat kesehatan keluarga

e. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga Kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan

a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas

rumah, bahan pangan dan sebagianya;

b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya;
c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;
d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat beberapa factor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain :

a. Social ekonomi rumah tangga atau masyarakat,
b. Struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat,
c. Potensi regional (sumberdaya alam, lingkungan dan insfrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi,
d. Kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global

Secara lebih spesifik bahwa fungsi kesejahteraan W (*walfare*) dengan persamaan sebagai berikut: W = W (Y, I, P)

Dimana Y adalah pendapatan perkapital, I adalah ketimpangan dan P adalah kemiskinan absolut. Ketiga variabel ini mempunyai signifikan yang berbeda, dan harus dipertimbangkan secara menyeluruh untuk menilai kesejahteraan negara berkembang. Berkaitan dengan fungsi persamaan

kesejahteraan diatas, diasumsikan bahwa kesejahteraan sosial berhubungan positif dengan pendapatan perkapita, namun berhubungan negatif dengan kemiskinan.

3. Tingkatan Kesejahteraan Menurut Teori Pareto

Kebanyakan ahli ekonomi menggunakan efisiensi Pareto, sebagai tujuan efisiensi mereka. Menurut ukuran ini dari kesejahteraan sosial, suatu situasi adalah optimal hanya jika tidak ada individu dapat dibuat lebih baik tanpa membuat orang lain lebih buruk. Kondisi ideal ini hanya dapat dicapai jika empat kriteria dipenuhi. Rata-rata marginal substitusi dalam konsumsi harus identik untuk semua konsumen (tidak ada konsumen dapat dibuat lebih baik tanpa membuat konsumen yang lain lebih buruk).

Rata-rata transformasi di dalam produksi harus identik untuk semua produk (adalah mustahil meningkatkan produksi setiap barang baik tanpa mengurangi produksi dari barang-barang yang lain). Biaya sumber daya marginal harus sama dengan produk pendapatan marginal untuk semua proses produksi (produk fisik marginal dari suatu faktor harus sama dengan semua perusahaan yang memproduksi suatu barang). Rata-rata marginal substitusi konsumsi harus sama dengan rata-rata marginal transformasi dalam produksi (proses produksi harus sesuai dengan keinginan konsumen).

Ada sejumlah kondisi yang kebanyakan ahli ekonomi setuju untuk diperbolehkan tidak efisien meliputi: struktur pasar yang tidak sempurna (seperti monopoli, monopsoni, oligopoli, oligopsoni, dan persaingan monopolistik), alokasi faktor tidak, kegagalan pasar dan eksternalitas,

diskriminasi harga, penuruanan biaya rata-rata jangka panjang, beberapa jenis pajak dan tarif. Untuk menentukan apakah suatu aktivitas sedang menggerakkan ekonomi ke arah efisiensi Pareto dua uji kompensasi telah dikembangkan, setiap perubahan pada umumnya membuat sebagian orang lebih baik selama membuat orang yang lain tidak lebih buruk, maka uji inimenanyakan apa yang akan terjadi jika pemenang mengganti kompensasi kepada yang kalah.

Kriteria yang paling banyak digunakan dalam menilai ekonomi kesejahteraan adalah pareto criteria yang dikemukakan oleh ekonom berkebangsaan Italia bernama Vilfredo Pareto. Kriteria ini menyatakan bahwa suatu perubahan keadaan (*eg. Intervention*) dikatakan baik atau layak jika dengan perubahan tersebut ada (minimal satu) pihak yang diuntungkan dan tidak ada satu pihakpun yang dirugikan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pareto criteria adalah *pareto improvement* dan *pareto efficient*. Kedua hal ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan suatu kebijakan ekonomi. Adapun yang dimaksud dengan *pareto improvement* adalah jika keputusan perubahan masih dimungkinkan menghasilkan minimal satu pihak yang *better off* tanpa membuat pihak lain *worse off*. *Pareto efficient* adalah sebuah kondisi di mana tidak dimungkinkan lagi adanya perubahan yang dapat mengakibatkan pihak yang diuntungkan (*bettering off*) tanpa menyebabkan pihak lain dirugikan (*worsening off*). Dalam teori ekonomi mikro ada yang dikenal dengan teori Pareto yang menjelaskan tentang tiga jenis tingkatan kesejahteraan, yaitu pertama pareto optimal. Dalam tingkatan pareto optimal terjadinya

peningkatan kesejahteraan seseorang atau kelompok pasti akan mengurangi kesejahteraan orang atau kelompok lain.

Kedua pareto non-optimal, dalam kondisi pareto non-optimal terjadinya kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan orang lain. Ketiga, pareto superior. Dalam kondisi pareto superior terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan tertinggi dari orang lain. Menurut teori pareto tersebut, ketika kondisi kesejahteraan masyarakat sudah mencapai pada kondisi pareto optimal maka tidak ada lagi kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan.

4. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perekonomian

Upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dapat diwujudkan pada beberapa langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat pada sumber daya pembangunan serta menciptakan peluang bagi masyarakat tingkat bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga masyarakat bisa mengatasi keterbelakangan dan memperkuat daya saing perekonomiannya.

Selain dari pembangunanya, upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai kesejahteraan hidup salah satunya dengan berwirausaha ataupun mendirikan industri kecil. Tujuan dari berwirausaha ini akan menciptakan masyarakat yang mandiri sehingga mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan bisa tercapainya kesejahteraan hidup. Sedangkan pengertian industri kecil itu sendiri adalah kegiatan ekonomi dilakukan oleh perorangan, rumah tangga atau pun suatu badan

yang bertujuan untuk memproduksi barang maupun jasa untuk diperniagakan secara komersial dengan jumlah tenaga kerja dan modal kecil.

Dalam industri kecil mempunyai empat aspek yang mempengaruhi kinerja dan keberhasilan sektor industri kecil, ada pun aspek tersebut adalah

Aspek Ekonomi Kesejahteraan dan Pemasaran

Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan manusia yang diarahkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran[17]. Keberhasilan dalam berwirausaha ini tidak lepas dari adanya pemasaran yang baik. Pemasaran ini sangat penting bagi seseorang yang akan berwirausaha, apalagi untuk pengusaha kecil. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang dulunya berawal dari usaha kecil. Keberhasilan perusahaan tersebut salah satunya berkaitan dengan konsep pemasaran.

Dalam pemasaran terdapat beberapa konsep yaitu pertama konsep produksi, pada konsep ini mengatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia dimana pun dan harganya murah. Kedua konsep produk, dalam konsep ini berpendapat bahwa konsumen akan menyukai barang-barang yang berkualitas. Ketiga konsep pemasaran, kunci untuk mencapai tujuan adalah mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen. Keempat konsep pemasaran sosial, organisasi menentukan kebutuhan, keinginan pasar tetapi tetap memperhatikan kesejahteraan konsumen. Konsep pemasaran

perusahaan ini diharapkan mampu untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pasar sekaligus memenuhinya dan membuat apa yang dapat di jual bukan menjual apa yang dibuat oleh perusahaan.

Dalam konsep pemasaran ini terdapat tiga landasan pemasaran yaitu pertama konsumen dikelompokkan dalam segment pasar yang berbeda tergantung pada apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Kedua, konsumen pada segment pasar tertentu lebih tertarik pada apa yang ditawarkan perusahaan yang dapat langsung memenuhi kebutuhan mereka. ketiga, tugas perusahaan yaitu untuk meneliti dan memilih pasar dan berusaha mengembangkan produknya untuk dapat mempertahankan pelanggan.[18]

Melakukan pemasaran juga harus mengetahui beberapa strategi dalam pemasaran agar wirausahawan dapat bersaing dengan lebih baik, Menurut Zimmerer dan Scarborough yang dikutip oleh Rhenald Kasali dkk. Dalam bukunya yang berjudul modul kewirausahaan, ada beberapa strategi pemasaran diantaranya adalah sebagai berikut: pertama, strategi penetrasi pasar yaitu usaha untuk meningkatkan penjualan dari produk yang sama yang ada di pasar sekarang dengan meningkatkan usaha penjualan dan periklanan. Kedua, strategi pembangunan pasar ialah usaha dalam meningkatkan penjualan dengan memperkenalkan produk dan jasa yang sama pada pasar yang baru.

B. Latihan

a. Sebutkan Visi Universitas Esa Unggul ?
b. Sebutkan salah satu buku yang digunakan dalam perkuliahan Ekonomi Kesejahteraan ?
c. Apakah komponen yang digunakan dalam penilaian kuliah online mata kuliah ini ?

Kunci Jawaban

a. Visi Universitas Esa Unggul adalah menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi
b. Buku referensi yang digunakan dalam perkuliahan ini Kindleberger, Ekonomi Internasional, Terjemahan Drs. Rudy Sitompul, Edisi Ketujuh, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012
c. Komponen penilaian mata kuliah Ekonomi Kesejahteraan adalah UTS, UAS, Tugas dan Kuis.

C. Daftar Pustaka

1. Sjahrir, Dr., Moneter, Perkreditan dan Neraca Pembayaran, Persoalan Ekonomi Kesejahteraan Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2015
2. Tambunan, Tulus T.H., Dr., Perekonomian dan Kesejahteraan Indonesia,, Teori dan temuan Empiris, Ghalia Indonesia, 2017
3. Boediono, Dr., Ekonomi Internasional dan Nasional, BPFE, Yogyakarta, 2014
4. Tamburan, Tulus T,H., Dr., Perekonomian Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016
5. Halwani, Hendra. Dra. M.H., dan Tjiptoharijanto, Prijono, H. Dr., Perdagangan Internasional, Pendekatan Ekonomi Kesejahteraan Makro & Mikro, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013
6. Kindleberger, Ekonomi Internasional, Terjemahan Drs. Rudy Sitompul, Edisi Ketujuh, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012

MODUL EKONOMI KESEJAHTERAAN

(KAK 357)

MODUL 2

KONSEP, DASAR KESEJAHTERAAN & EKONOMI KESEJAHTERAAN

(PENGERTIAN, DEFINISI, TEORI EKONOMI)

DISUSUN OLEH

Erlina Puspitaloka Mahadewi, SE, MM, MBL (5661)

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2022

B. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari Modul ini, diharapkan Mahasiswa mampu :

1. Pengertian, definisi, teori Ekonomi Kesejahteraan
2. Menguraikan konsep dasar Kesejahteraan dan Ekonomi Kesejahteraan
3. Mengidentifikasi dasar-dasar pemikiran mata kuliah Ekonomi Kesejahteraan

C. Uraian dan Contoh

1. Visi dan Misi UEU

Universitas Esa Unggul mempunyai visi menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Universitas Esa Unggul menetapkan misi-misi sebagai berikut :

d. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan
e. Menciptakan suasana akademik yang kondusif
f. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan

2. **Topik Perkuliahan :** Dasar Ekonomi Kesejahteraan
   Sub Topik : Kesejahteraan, Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Kesejahteraan

D. Uraian

1. Dasar Kesejahteraan, Definisi dan Teori

Terdapat beberapa pendapat dan penelitian-penelitian terdahulu yang banyak menggunakan kesejahteraan sebagai konstuk dengan berbagai definisi dan ragam indikatornya. Salah satunya adalah Bradbury *et al.*, (1979) yang melakukan penelitian untuk menguji model hipotesis apakah perubahan jaminan pendapatan tambahan dan bantuan umum berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga dengan kepala keluarga wanita. Ukuran kesejahteraan

ekonomi menggunakan ukuran pendapatan yang kemudian digunakan dalam menentukan garis kemiskinan sebagai indikator kesejahteraan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan ukuran pendapatan dan garis kemiskinan, kesejahteraan ekonomi dengan kepala keluarga wanita dengan tanggungan anak adalah paling rendah jika dibandingkan dengan tanpa anak. Dunst dan Triviette (1988), meneliti hubungan dukungan sosial dan kesehatan serta kesejahteraan dengan menggunakan indeks kesejahteraan psikologi (Bradburn dan Caplovitz, 1965) dan indeks kesejahteraan individu (Dunst dan Triviette, 1986).

Kesejahteraan dapat didekati berdasarkan dua hal secara Ekonomi (Campbell, 1976; Sumawan dan Tahira, 1993; Milligan *et al*., 2006), yaitu:

1) kesejahteraan subjektif dan

2) kesejahteraan objektif.

Kesejahteraan dialamatkan bagi tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Teori ekonomi kesejahteraan adalah bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang. Pada tingkat individu, perasaan bahagia atau sedih, kedamaian atau kecemasan jiwa, dan kepuasan atau ketidakpuasan merupakan indikator subjektif dari kualitas hidup menurut Pingou (1960).

Pada tingkat keluarga, kecukupan kondisi perumahan (dibandingkan standar), seperti ada tidaknya air bersih, merupakan contoh indikator objektif. Kepuasan anggota keluarga mengenai kondisi rumah merupakan indikator subjektif. Pada tingkat masyarakat, beberapa contoh dari indikator objektif di antaranya adalah angka kematian bayi, angka pengangguran dan tuna wisma. Kesejahteraan subjektif diukur dari tingkat kebahagiaan dan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Pendekatan ini merupakan ukuran kesejahteraan yang banyak digunakan di negara maju juga berkembang. Tingkat kepuasan yang terkait emosional akan mempengaruhi aspek tingkah laku individu untuk menilai kepuasan pada variabel-variabel lainnya seperti kepuasan pada kualitas kehidupan (Currivan, 1999; Lambert *et al*., 2001; Robbins dan Judge, 2007; Falkenburg dan Schyns, 2007).

Fergusson *et al*., (1981); Martin (2006) menyatakan bahwa terminologi yang sering digunakan dalam penelitian yang membahas kesejahteraan adalah *standard living, well-being, welfare,* dan *quality of life*. Menurut Just *et al*., 1982, dalam kajian ekonomi kesejahteraan yang bertujuan untuk menolong masyarakat membuat pilihan yang lebih baik, kesejahteraan seseorang dilihat dari *willingness to pay* saat individu atau masyarakat berperan sebagai konsumen. Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut (Sawidak, 1985).

Nilai kepuasan emosional juga akan meningkatkan kinerja dan kontribusi individu pada lingkungannya (Lock, 1976; Viswesvaran dan Ones, 2000; Butler dan Rose, 2011). Sayogyo (1984) mengkaji kesejahteraan dan mendefinisikan kesejahteraan keluarga sebagai penjabaran delapan jalur pemerataan dalam trilogi pembangunan sejak Repelita III, yaitu:

1) peluang berusaha;

2) peluang bekerja;

3) tingkat pendapatan;

4) tingkat pangan, sandang, perumahan;

5) tingkat pendidikan dan kesehatan;

6) peran serta;

7) pemerataan antar daerah, desa/kota; dan

8) kesamaan dalam hukum.

Mirrowsky dan Ross (1989) mengkaji kajian kesejahteraan dengan penyakit, kesakitan, kesulitan ekonomi yang dihubungkan dengan depresi. Kepuasan hidup sebagai bagian dari dimensi kesejahteraan meliputi kesehatan, penerimaan terhadap kecukupan ekonomi, pertolongan (dukungan sosial), dan interaksi sosial. Penelitian Bane dan Ellwood (1994); Coward *et al*. (1994); Scott dan Buttler (1997), yang menganalisis kombinasi faktor-faktor yang

mempengaruhi kesejahteraan subjektif. Kesejahteraan subjektif digunakan dalam penelitian ini sebagai konstruk yang lebih global dikaitkan dengan beragam dimensi lingkungan yang melengkapi fasilitas dan pelayanan transportasi, pewaratan kesehatan, perumahan, jasa kesehatan mental, jasa ekonomi, dan kesempatan untuk menjadi relawan. Digunakan beragam indikator kesehatan mental (seperti moral dan depresi) yang menilai kualitas pengalaman individu (*the inner-experience*), sedangkan kompetensi personal berkaitan dengan aspek kesehatan, status keuangan, dan lingkungan yang memberikan dukungan pribadi.

Bryant (1990) menyatakan bahwa organisasi ekonomi analisis perilaku ekonomi rumah tangga (orang yang bertempat tinggal dalam atap yang sama dan pengelolaan keuangan yang sama, serta terdiri dari keluarga). Kajian organisasi ekonomi dalam keluarga menggunakan *demand* terhadap barang strategis sebagai indikator kesejahteraan. Ukuran lainnya kesejahteraan adalah proporsi pengeluaran untuk pangan. Menurut Bubolz dan Sontag (1993), kesejahteraan merupakan terminologi lain dari kualitas hidup manusia (*quality of human life*), yaitu suatu keadaan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasinya nilai-nilai hidup. Zeitlin *et al*., (1995) menggunakan istilah kesehatan sosial keluarga dan kesejahteraan sosial keluarga bagi keluarga yang dapat melahirkan individu (anak) dengan pertumbuhan dan perkembangan yang baik.

2. Kesejahteraan Sosial, Definisi dan Teori

Menurut Whithaker dan Federico (1997), pengertian kesejahteraan sosial merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut. Seseorang yang mempunyai kekurangan kemampuan mungkin memiliki kesejahteraan yang rendah, kurangnya kemampuan dapat berarti kurang mampu untuk mencapai fungsi tertentu sehingga kurang sejahtera. Terdapat beragam pengertian mengenai kesejahteraan, karena lebih bersifat subjektif dimana setiap orang dengan pedoman, tujuan dan cara hidupnya yang berbeda-beda akan memberikan nilai-nilai yang berbeda pula

tentang kesejahteraan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan (Sianipar, 1997).

Menurut Sumarti (1999), perbedaan status sosial budaya dan spesialisasi kerja akan menghasilkan persepsi kesejahteraan yang berbeda pula. Terdapat kelompok masyarakat yang menggunakan ukuran kesejahteraan bersumber pada simbol kekuasaan budaya-politik, sementara monetisasi ekonomi menghantarkan kalangan masyarakat pada umumnya untuk lebih menggunakan ukuran kesejahteraan ekonomi dibandingkan ukuran kesejahteraan sosial. Skoufias *et al*., (2000) menyatakan bahwa pengukuran kesejahteraan bersifat subjektif manakala berkaitan dengan aspek psikologis yaitu diukur dari kebahagiaan dan kepuasan. Mengukur kesejahteraan secara objektif menggunakan patokan tertentu yang relatif baku, seperti menggunakan pendapatan per kapita, dengan mengasumsikan terdapat tingkat kebutuhan fisik untuk semua orang hidup layak. Ukuran yang sering digunakan adalah kepemilikan uang, tanah, atau aset.

Pada prinsipnya aspek yang dapat diamati dalam menganalisis kesejahteraan hampir sama, yaitu mencakup dimensi: pendapatan, pengeluaran untuk konsumsi, status pekerjaan, kondisi kesehatan, serta kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan kebutuhan dasar (seperti air, sanitasi, perawatan kesehatan dan pendidikan). Sedang menurut Rambe (2004), kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warganegara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Berdasarkan tingkat ketergantungan dari dimensi standar hidup (*standard of living*) masyarakat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dibedakan kedalam satu sistem kesejahteraan (*well-being*) dan dua subsistem, yakni:

1) subsistem sosial; dan

2) subsistem ekonomi,

dengan beberapa faktor di antaranya kesejahteraan manusia, kesejahteraan sosial, konsumsi, tingkat kemiskinan, dan aktivitas ekonomi (World Bank: Santamarina

et al., 2004). Di negara-negara maju, seperti Canada menggunakan 19 indikator kualitas hidup masyarakat (*quality of life*) yang tersebar ke dalam empat subsistem, yakni:

1) Indikator ekonomi: a) GDP perkapita, b) pendapatan perkapita, c) inovasi, d) lapangan kerja, e) melek huruf; dan f) tingkat pendidikan;

2) Indikator kesehatan: a) usia harapan hidup, b) status kesehatan, c) tingkat kematian bayi (IMR), dan d) aktivitas fisik;

3) Indikator lingkungan: a) kualitas udara, b) kualitas air, c) *biodiversity*, dan d) lingkungan yang sehat; dan

4) Indikator keamanan dan keselamatan masyarakat: a) sukarela, b) *diversity*, c) berpartisipasi dalam aktivitas budaya, d) berpartisipasi dalam kegiatan politik, dan e) keamanan dan keselamatan (Sharpe, 2004).

Menurut penelitian Sugiharto (2007) indikator yang digunakan Biro Pusat Statistik (BPS) untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu: tinggi; b) sedang; c) rendah.

Indikator pengeluaran digolongkan menjadi 3 item yaitu:

a) tinggi;

b) sedang;

c) rendah.

Indikator tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

a) permanen;

b) semi permanen; dan

c) non permanen.

Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item, yaitu pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah. Dari 12 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

a) lengkap;

b) cukup; dan

c) kurang.

Indikator kesehatan anggota keluarga digolongkan menjadi 3 item yaitu:

a) bagus;

b) cukup; dan

c) kurang.

Indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari 5 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan, dan alat kontrasepsi. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

a) mudah;

b) cukup; dan

c) sulit.

Indikator kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan terdiri dari 3 item yaitu biaya sekolah, jarak ke sekolah, dan proses penerimaan. Dari 3 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

a) mudah;

b) cukup; dan

c) sulit.

Indikator kemudahan mendapatkan transportasi terdiri 3 item, yaitu ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan kendaraan. Dari 3 item tersebut kemudian akan di digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

a) mudah;

b) cukup; dan

c) sulit.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggunakan kriteria tahapan kesejahteraan keluarga untuk mengukur kesejahteraan (Sugiharto, 2007). Lima pengelompokkan tahapan keluarga sejahtera menurut BKKBN adalah sebagai berikut:

a) Keluarga pra sejahtera, adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai keluarga sejahtera tahap I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, sandang, pangan, papan, dan kesehatan;
b) Keluarga sejahtera tahap I, adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Indikator yang digunakan, yaitu :
    1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut.
    2. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
    3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
    4. Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.
    5. Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber-KB dibawa ke sarana/petugas kesehatan;

c) Keluarga sejahtera tahap II, yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera I, harus pula memenuhi syarat sosial psikologis 6 sampai 14 yaitu :
    6. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
    7. Paling kurang, sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk.

8. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru per tahun.
9. Luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi tiap penghuni rumah.
10. Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat.
11. Paling kurang 1 (satu) orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap.
12. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin.
13. Seluruh anak berusia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini.
14. Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih pasangan usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil);

d) Keluarga sejahtera tahap III, yaitu keluarga yang memenuhi syarat 1 sampai 14 dan dapat pula memenuhi syarat 15 sampai 21, syarat pengembangan keluarga yaitu :
15. Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
16. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.
17. Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.
18. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
19. Mengadakan rekreasi bersama diluar rumah paling kurang 1 kali/6 bulan.
20. Dapat memperoleh berita dari surat kabar/TV/majalah.
21. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai engan kondisi daerah setempat;

e) Keluarga sejahtera tahap III plus, yaitu keluarga yang dapat memenuhi

kriteria 1 sampai 21 dan dapat pula memenuhi kriteria 22 dan 23 kriteria pengembangan keluarganya yaitu:

22. Secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.
23. Kepala Keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan/yayasan/institusi masyarakat

3. Ekonomi Kesejahteraan

Penelitian Nurmawati (1994) menunjukkan bahwa keluarga dengan ekonomi sejahtera memiliki keragaan yang lebih baik dalam semua variabel penelitian dibandingkan keluarga pra-sejahtera. Besar keluarga sejahtera lebih sedikit dari keluarga pra- sejahtera, pendapatan per kapita keluarga pra-sejahtera lebih rendah dari keluarga sejahtera, pendapatan keluarga sejahtera dan pra sejahtera lebih tinggi dari kriteria kemiskinan.

Persentase pengeluaran pangan keluarga pra-sejahtera lebih besar dari keluarga sejahtera, pengetahuan gizi ibu dari keluarga pra-sejahtera lebih rendah dari keluarga sejahtera, status gizi balita baik dari keluarga sejahtera lebih baik dari status gizi balita keluarga pra-sejahtera. Febrero dan Schwartz (1995), mengkaji kesejahteraan dalam kaitannya dengan perilaku konsumsi di keluarga, khususnya menyoroti perilaku *altruistik* dari sebagian anggota keluarga dari sudut pandang ahli ekonomi terhadap perilaku konsumsi di keluarga. Anggota keluarga *altruistik* melakukan serangkaian perilaku pengorbanan yang menyebabkan peningkatan kesejahteraan bagi anggota lainnya dalam keluarga.

Hasil kajian sebaliknya menunjukkan bahwa peningkatan sumber daya bagi anggota keluarga yang egoistik berakibat terhadap penurunan kesejahteraan anggota keluarga lainnya, khususnya yang altruistik. Sedang Narayan *et al*. (2000), dalam bukunya "*Voices of The Poor. Can Anyone Hear Us*?" mengkaji kemiskinan (*poverty*) di berbagai negara serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam kajian tersebut digunakan beberapa konsep atau istilah

kesejahteraan sebagai sisi lain pengukuran kemiskinan seperti kesejahteraan material dan kesejahteraan psikologi.

Khomsan *et al*. (1997) melakukan penelitian identifikasi indikator kemiskinan dan menggunakan kriteria BKKBN dengan indikator keluarga sejahtera sebagai penentuan sampling dengan pertimbangan bersifat operasional, memperhatikan aspek kualitatif dan kuantitatif, data tersedia karena dilakukan pendataan secara reguler sehingga memudahkan untuk sampling penelitian. Hasil kajian menyimpulkan bahwa apapun indikator yang dipilih, akan mengandung misklasifikasi saat uji akurasi dengan menggunakan indikator lain sebagai acuan standarnya. Misklasifikasi tergantung dari definisi kemiskinan yang digunakan. Sebuah indikator akan tergantung dari definisi operasional yang digunakannya, dan terbuka bagi kritik yang dilakukan pihak lain karena menggunakan ruang lingkup definisi yang berbeda.

Pudjirahayu (1999) menggunakan indikator keluarga sejahtera BKKBN sebagai dasar sampling penelitian dengan menggunakan kriteria kemiskinan pendapatan rumah tangga, menunjukkan terdapat misklasifikasi rumah tangga miskin baik di pedesaan maupun perkotaan (versi BKKBN) menjadi tidak miskin menurut kriteria BPS. Namun ketika menggunakan kriteria BPS yaitu pengeluaran rumah tangga, menunjukkan tingkat kesesuaian 81-82 persen kriteria menurut BKKBN dan BPS.

Penelitian Rambe (2004), mengkaji akurasi (sensitifitas dan spesifisitas) empat indikator kemiskinan: BPS, BKKBN, pengeluaran pangan, dan ukuran subjektif. Hasil kajian menunjukkan bahwa dari keempat indikator kesejahteraan yang diteliti, indikator keluarga sejahtera BKKBN dianggap paling baik karena selain mudah dalam pengoperasiannya hingga ke level administrasi terendah dan dengan cepat dapat mengklasifikasikan keluarga miskin. Indikator KS dan indikator pengeluaran pangan memiliki spesifisitas yang tinggi (63,3 persen) dibandingkan indikator BPS dan indikator subjektif.

Dalam suatu penelitian, Cantril (1965) menemukan negara-negara dengan pendapatan per kapita yang berbeda jauh seperti Nigeria dan Jepang, atau Mesir dan Jerman Barat, tidak berbeda dalam tingkat rata-rata kepuasan hidup atau kesejahteraan subjektif yang diungkapkan oleh warga negara mereka. Sedang

Schneider (1975) melaporkan bahwa korelasi antara karakteristik objektif kota dan ukuran kesejahteraan subjektif survei pada warga masing-masing dapat dikatakan nol. Selanjutnya, dalam survei nasional yang dilakukan di USA selama periode antara 1957 dan 1972, ketika sebagian besar indikator ekonomi dan sosial bergerak naik, proporsi penduduk yang menggambarkan diri mereka sebagai "sangat senang" terus menurun. Hal tersebut menyimpulkan bahwa kesejahteraan objektif suatu negara, kelompok, atau seseorang tidak dapat hanya diperkirakan berdasarkan ukuran objektif. Kepuasan dan kebahagiaan jelas tergantung pada kemampuan untuk bertahan, tingkat kesehatan wajar, dan situasi yang mendukung tercapainya keinginan atau aspirasi (Henshaw, 1973).

Salah satu komponen kesejahteraan subjektif berhubungan dengan kepuasan. Kepuasan melibatkan perbandingan kondisi objektif untuk beberapa standar hidup (Cheng, 1988). Campbell *et al*. (1976); McKennell (1978); McKennell dan Andrews (1980), menyimpulkan kepuasan terkait dengan harapan dan perbandingan standar pada keadaan saat ini (*standard quality of life*/SQL). Sedang McKennell (1978), menyatakan bahwa pemahaman tentang SQL akan semakin maju ketika hubungan sebab akibatnya dapat dipahami.

Jika diminta untuk menggambarkan kesejahteraan, individu dapat merespon secara umum atau dengan membandingkan berdasarkan bagian dari pengalaman kehidupannya. Andrews dan Withey (1976) menegaskan bahwa orang bisa memisahkan kehidupan mereka menjadi bagian perbagian yang, meskipun tidak terisolasi, cukup terpisah untuk diidentifikasi dan dievaluasi sebagai bagian dari kehidupan. Bagian kehidupan yang terkait dengan kegiatan, peran, tempat, dan hubungan dengan orang-orang dalam kehidupan individu. Sejauh mana seseorang ingin dan membutuhkan dan merasa puas dalam bagian tertentu dalam kehidupannya adalah kesejahteraan subjektif untuk bagian tersebut; dengan demikian, kita bisa berbicara tentang kesejahteraan kerja, kesejahteraan keluarga (Rice, 1984).

Meskipun terkadang ukuran global digunakan bagi diri sendiri, kebanyakan pengukuran kesejahteraan subjektif berasal dari gabungan ukuran global dan ukuran individu yang berhubungan menjadi bagian dari kesejahteraan objektif secara keseluruhan (Andrews dan Withey, 1976; Baker dan Intagliata,

1982; Campbell *et al*., 1976). Penelitian lain telah meneliti hubungan antara ukuran global dengan kesejahteraan individu seperti situasi keuangan (Blishen dan Atkinson, 1980); Kepuasan lingkungan (Gutek *et al*., 1983); atau pekerjaan (Chacko, 1983; Hunt *et al*., 1977; Near *et al*., 1983, 1984).

Andrews dan Withey (1976) melakukan penelitian pada hal-hal yang bersifat lebih mendasar berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Sebaran responden yang lebih luas mencakup beragam lembaga nasional dan internasional. hasilnya dua belas dimensi dapat diidentifikasi dan digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan. Campbell *et al*. (1976) juga menentukan dimensi kesejahteraan atas dasar hasil penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk memberikan cakupan luas yang lebih luas dalam penerapannya ke populasi umum. Penelitian menampilkan beberapa dimensi tertentu yang akhirnya umum digunakan di sebagian besar studi, di antaranya: kerja, rekreasi, kesehatan, situasi keuangan, hubungan dengan anggota keluarga, hubungan dengan teman, lingkungan sosial dan fisik, dan aspek pemenuhan kebutuhan individu, Kesimpulan berdasarkan nilai kepuasan lebih sering digunakan untuk menilai kesejahteraan dari pada ukuran kebahagiaan. Dikarenakan penggunaan ukuran kebahagiaan tampaknya tidak sesuai untuk beberapa dimensi (Cheng, 1988), sehingga sulit untuk membangun skala dimensi.

Nilai kepuasan telah terbukti menimbulkan bias yang lebih rendah dalam pengukuran dimensi (Campbell *et al*., 1976). Bias akan muncul ketika ketika timbul penilaian tentang sesuatu yang baik lebih kepada perasaan individu tertentu dan tidak dapat mewakili standar objektif yang lebih luas. Kepuasan lebih dapat dijadikan standar penilaian ketika secara umum nilai kebahagiaan bisa menimbulkan perbandingan yang beragam seperti misalnya pengukuran pada hubungan pernikahan dan keluarga. Demikian pula, hasil penelitian Glatzer (1987) menunjukkan bahwa ada kecenderungan tingkat kepuasan yang lebih rendah pada dimensi kesejahteraan pada aspek individu dibandingkan aspek, hal tersebut mungkin muncul ketika pada penilaian aspek individu muncul sikap yang kurang kritis. Dimensi kesejahteraan yang digunakan mengikuti format Campbell *et al*. (1976).

Indikator penilaian biasanya akan mengikuti karakteristik khusus dari dimensi tersebut yang dapat dinilai dengan tingkat kepuasan. Ketika dimensi terkait dengan lingkungan responden, indikator yang dipergunakan kemungkinan seperti keamanan, hubungan antar ras, kualitas udara, status, dan kualitas sekolah, (Allen *et al*., 1985).

Setiap pengukuran dimensi juga akan cenderung untuk memasukkan beberapa indikator objektif, seperti misalnya status rumah berdasarkan sewa atau milik sendiri. Penelitian mendapatkan bahwa informasi yang diberikan oleh indikator subjektif dan objektif adalah saling melengkapi. Kekuatan dan kegunaan dari kedua jenis variabel tersebut dapat ditingkatkan dengan menggabungkan mereka (Cheng, 1988). Pemahaman tentang kesejahteraan subjektif dapat ditingkatkan berdasarkan kondisi objektif yang terkait, akan membawa dalam posisi yang lebih baik untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan sosial yang efektif (Bradburn, 1969).

Menurut Andrews dan Withey (1976), bahwa ketika kedua variabel (subjektif dan objektif) secara bersamaan diukur, akan mungkin untuk mengetahui bagaimana perubahan kondisi kehidupan mempengaruhi perasaan masyarakat tentang kualitas hidup. Sebaliknya, apakah perubahan kualitas hidup dapat dikaitkan dengan perubahan kondisi eksternal. Laporan kondisi sosial negara Jerman yang menganalisis kondisi hidup dan kesejahteraan subjektif telah memanfaatkan baik ukuran objektif maupun subjektif (Zapf, 1980; Glatzer, 1987).

Demikian pula, gugus tugas OECD pada kualitas hidup telah menyertakan ukuran objektif (Verwayen, 1980). Solomon *et al*. (1980) melaporkan bahwa program kualitas hidup UNESCO, menyatakan variabel subjektif harus diperhitungkan bersama dengan ukuran objektif. UNESCO menyarankan setiap upaya harus diarahkan untuk membandingkan distribusi pola variabel "pemuas" dengan kepuasan, dan analisa perbedaan dan mekanisme *mediating* di antara variabelnya adalah salah satu bidang yang paling penting dan paling berharga dari penelitian tentang kualitas hidup.

E. Latihan

1. Apakah yang dimaksud dengan Kesejahteraan menurut Furgeson dan Martin ?

2. Sebutkan ruang lingkup materi yang dipelajari dalam Teori Ekonomi Kesejahteraan
3. Jelaskan satu persatu definisi dari Kesejahteraan dari sisi Ekonomi tersebut!

F. Kunci Jawaban

1. Fergusson *et al*., (1981); Martin (2006) menyatakan bahwa terminologi yang sering digunakan dalam penelitian yang membahas kesejahteraan adalah *standard living*, *well-being*, *welfare*, dan *quality of life*.
2. Menurut Pigou (1960), teori ekonomi kesejahteraan adalah bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang. Pada tingkat individu, perasaan bahagia atau sedih, kedamaian atau kecemasan jiwa, dan kepuasan atau ketidakpuasan merupakan indikator subjektif dari kualitas hidup.
3. Salah satunya kesejahteraan adalah proporsi pengeluaran untuk pangan. Menurut Bubolz dan Sontag (1993)

G. Daftar Pustaka

(1) Boediono, Dr., Ekonomi Internasional dan Nasional, BPFE, Yogyakarta, 2014

(2) Halwani, Hendra. Dra. M.H., dan Tjiptoharijanto, Prijono, H. Dr., Perdagangan Internasional, Pendekatan Ekonomi Kesejahteraan Makro & Mikro, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.

(3) Tamburan, Tulus T,H., Dr., Perekonomian Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016

(4) Tambunan, Tulus T.H., Dr., Perekonomian dan Ekonomi Kesejahteraan Indonesia,, Teori dan temuan Empiris, Ghalia Indonesia, 2017

(5) https://www.scribd.com/doc/272224653/Dr-Euis-Sunarti-Indikator-Keluarga-Sejahtera, diakses 9 September 2020.

MODUL EKONOMI KESEJAHTERAAN
(KAK 357)

MODUL 3
DEFINISI & TEORI EKONOMI KESEJAHTERAAN
DALAM TINJAUAN & KLASIFIKASI DEMOGRAFI EKONOMI

DISUSUN OLEH
Erlina Puspitaloka Mahadewi, SE, MM, MBL (5661)

UNIVERSITAS ESA UNGGUL
2022

H. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari Modul ini, diharapkan Mahasiswa mampu :

1. Memahami dan mempelajari Teori Ekonomi Kesejahteraan dan Demografi
2. Menguraikan konsep dasar teori Kesejahteraan dan Ekonomi Kesejahteraan
3. Mengidentifikasi dasar-dasar pemikiran mata kuliah Ekonomi Kesejahteraan

I. Uraian dan Contoh

1. Visi dan Misi UEU

Universitas Esa Unggul mempunyai visi menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Universitas Esa Unggul menetapkan misi-misi sebagai berikut :

g. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan
h. Menciptakan suasana akademik yang kondusif
i. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan

2. **Topik Perkuliahan :** Teori Ekonomi Kesejahteraan
   Sub Topik : Ekonomi Kesejahteraan (secara Demografi Ekonomi)

J. Uraian

Ukuran umum yang mendasari perasaan masyarakat tentang kesejahteraan memiliki banyak hubungannya dengan perasaan individu tentang aspek kehidupan yang terkait. Secara logika, kita akan mengharapkan ukuran kesejahteraan lebih kepada imbal balik dan kekecewaan yang terkait dengan fitur kehidupan yang lebih spesifik seperti perumahan, situasi keuangan, atau persahabatan (Campbell *et al*., 1976). Sebagian orang lebih puas dan bahagia dengan beberapa aspek dari kehidupan mereka dibandingkan dengan orang lain, tetapi secara umum

diasumsikan bila semakin positif perasaan orang, semakin kuat tingkat kesejahteraan. Skala pada individu berguna untuk memberikan informasi dari kehidupan yang tidak ditangkap oleh penilaian umum (Cheng, 1988). Sejumlah penelitian dilakukan untuk menghasilkan daftar ukuran kesejahteraan. Penelitian Cantril (1965) di 13 negara untuk menentukan harapan mereka, ketakutan dan kekhawatiran, dan mengatakan kehidupan seperti apa yang mereka nilai sebagai "mungkin yang terbaik" atau "mungkin terburuk". Hasil akhir dari penelitian tersebut adalah daftar 18 dimensi kesejahteraan yang bisa dikatakan sepenuhnya mewakili masyarakat Amerika. Penelitian Flanagan (1978) pada hampir sejumlah 3000 orang dari berbagai usia, ras, latar belakang, dan wilayah negara, mengidentifikasi 15 indikator kesejahteraan yang dikelompokkan ke dalam lima dimensi, yaitu: 1) kesejahteraan fisik dan materi; hubungan dengan orang lain; 2) sosial, masyarakat, dan pemerintahan; 3) pemenuhan kebutuhan dan pengembangan individu; dan 5) hiburan.

Maka pada ada beberapa aspek dari pengalaman individu yang berarti bagi sebagian masyarakat (misalnya, ekspresi seni) tetapi sedikit berhubungan dengan masyarakat luas. Tapi merupakan hal yang tidak mungkin pula untuk mengidentifikasi semua ukuran. Maka sebagian besar penelitian lebih terkonsentrasi pada pengukuran yang cukup inklusif untuk memetakan kesejahteraan yang memiliki penerapan yang luas. Namun, ketika penelitian dibatasi pada populasi khusus, seperti pasien kesehatan mental atau orang tua, ukuran sering disesuaikan dengan tujuan penelitian yang spesifik dan populasi (Baker dan Intagliata, 1982).

Teori Sosial Demografi dalam Ekonomi Kesejahteraan

Menurut *United Nations* (1958) dan *International Union for the Scientific Study of Population*/IUSSP (1982), bahwa demografi sebagai studi ilmiah masalah penduduk yang berkaitan dengan jumlah, struktur, serta pertumbuhannya. Philip M. Hauser dan Otis Dudley Duncan (1959), bahwa demografi merupakan ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran teritorial, komposisi penduduk, serta

perubahannya dan sebab-sebab perubahan tersebut. Menurut George W. Brclay (1970), demografi sebagai ilmu yang memberikan gambaran secara statistik tentang penduduk secara menyeluruh bukan perorangan.

Menurut Iskandar (1994), demografi merupakan istilah yang berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu "*demos*" yang berarti rakyat atau penduduk dan "*graphein*" yang berarti menggambar atau menulis. Demografi dapat diartikan sebagai tulisan atau gambaran tentang penduduk. Menurut Johan Sussmilch (1762), demografi adalah ilmu yang mempelajari hukum Tuhan yang berhubungan dengan perubahan-perubahan pada umat manusia yang terlibat dari jumlah kelahiran, kematian, dan pertumbuhannya. Achille Guillard (1855) berpendapat demografi sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu dari keadaan dan sikap manusia yang dapat diukur, yaitu meliputi perubahan secara umum, fisiknya, peradabannya, intelektualitasnya, dan kondisi moralnya. David V. Glass (1953), bahwa demografi terbatas pada studi penduduk sebagai akibat pengaruh dari proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi.

Sejarah perkembangan demografi dimulai dari John Graunt (1620-1674), warga negara Inggris yang dikenal sebagai pelopor dalam bidang pencatatan statistik penduduk. Bukunya yang berjudul "*Natural and Political Observations Mentioned in a Following Index and Made Upon the Bills of Mortality*", berisi tentang analisis mortalitas, fertilitas, migrasi, perumahan, data keluarga, perbedaan antara kota dan negara, perbedaan jumlah penduduk laki-laki yang berada pada kelompok umur militer. Graunt menyarankan penelitian di bidang kependudukan bisa menekankan aspek komposisi penduduk menurut jenis kelamin, negara, umur, agama, dan sebagainya. Graunt melakukan analisis kematian dan kelahiran dengan menggunakan data dari catatan kematian yang diterbitkan oleh gereja setiap minggu. Dalam melakukan penelitiannya, Graunt sangat berhati-hati dalam pengumpulan data. Graunt mengambil sampel untuk melakukan estimasi. Dengan sikap kehati-hatiannya dalam meneliti serta didukung oleh topik-topik yang menarik membuat ilmu demografi lahir pada saat itu. Graunt mulai dikenal sebagai bapak demografi, dibantu oleh William Petty,

yang selanjutnya menyarankan agar didirikan *Central Statistical Office* (CSO) yang di Indonesia dikenal sebagai Biro Pusat Statistik (BPS).

Manfaat ilmu demografi, yaitu: 1) Mempelajari kuantitas, komposisi, dan distribusi penduduk dalam suatu daerah tertentu serta perubahan-perubahannya; 2) Menjelaskan pertumbuhan masa lampau dan mengestimasi pertumbuhan penduduk pada masa mendatang; 3) Mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dan bermacam-macam aspek pembangunan sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan, dan keamanan; dan 4) Mempelajari dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan konsekuensi pertumbuhan penduduk pada masa mendatang.

Beberapa pengamat membedakan demografi menjadi dua, yaitu: 1) Bersifat kuantitatif, yaitu membahas tentang jumlah, persebaran, serta komposisi penduduk; dan 2) Bersifat kualitatif, yaitu membahas masalah penduduk dari segi genetis dan biologi. Ilmu demografi dalam ekonomi kesejahteraan dibedakan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu sebagai berikut.

1) Demografi murni (*pure demography*)

   Adalah demografi formal yang menggunakan teknik perhitungan rumus statistik dan matematik untuk memperoleh gambaran penduduk dan variabel demografi. Namun belum bisa menjawab pertanyaan "*why*", contoh: hubungan antara naik turunnya tingkat fertilitas dengan struktur demografi di suatu daerah.

2) Demografi sosiologi (*sociological demography*)

   Sosiologi demografi memberikan pengertian terhadap pertanyaan ilmiah dalam bidang sosial yang ada hubungannya dengan sebab-musabab dari pola-pola penduduk dan proses kependudukan.

3) Studi kependudukan (*population studies*)

   Kependudukan sebagai studi yang bisa memberikan informasi yang lebih komperhensif mengenai sebab-akibat dan solusi pemecahan masalah dari munculnya fenomena demografi. Sehingga studi kependudukan membutuhkan disiplin ilmu lain seperti: sosiologi, psikologi, sosial-ekonomi, ekonomi, geografi (ilmu interdisipliner).

4) Sosial Demografi (*social demography*)

Adalah demografi sosial yang analisisnya berdasarkan kualitatif melalui aspek sosiologis, misalnya lembaga sosial seperti keluarga, ekonomi, dan agama mempengaruhi fertilitas, mortalitas, dan migrasi, serta interaksi pada suatu karakteristik sosial seperti distribusi usia.

Kotler dan Amstrong (2001) menyebutkan bahwa karakteristik sosial demografi adalah ciri yang menggambarkan perbedaan masyarakat berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, agama, suku bangsa, pendapatan, jenis keluarga, status perkawinan, lokasi geografis, dan kelas sosial.

2.1 Teori Modal Sosial

Konsep modal sosial yang dijadikan fokus penelitian ini pertama kali dikemukakan oleh Coleman (1988) yang mendefinisikannya sebagai aspek-aspek dari struktur hubungan antar-individu yang memungkinkan mereka menciptakan nilai-nilai baru. Coleman membedakan antara modal sosial (*social capital*), modal fisik (*physical capital*) dan modal manusia (*human capital*). Modal sosial menjadi topik perhatian dan perdebatan setelah penelitian Robert Putnam di Italia yang menemukan modal sosial berpengaruh terhadap perkembangan suatu wilayah, dengan kesimpulan bahwa modal sosial sebagai "*connections among individuals – social networks and the norms of reciprocity and trustworthiness that arise from them*" (Putnam, 1993a). Konsep ini kemudian lebih dikembangkan dalam beberapa penelitian seperti Ostrom (1992); Putnam (1993b; 1995; 1996; 2000); Fukuyama (1995); Adams dan Someshwar (1996); Miller (1997); Lappe dan Bois (1997); Wilson (1997); Bebbingtone (1998); Gittell dan Vidal (1998); Lang dan Hornburg (1998); Pretty dan Ward (1999); Krishna dan Uphoff (1999); Servon (1999); dan Rose (1999).

Coleman (1988), ahli sosiologi Amerika mengatakan bahwa modal sosial "*is not a single entity, but a variety of different entities, having two characteristics in common: they all consist of some aspect of a social structure, and they facilitate certain actions of individuals who are within the structure"*. Bourdieu (1980), ahli sosiologi Prancis mendefinisikan modal sosial sebagai "*the aggregate of the actual or potential resources which are linked to possession of a durable*

network of more or less institutionalised relationships of mutual acquaintance and recognition".

Menurut Fukuyama (1995), modal sosial adalah "*an instantiated informal norm that promotes co-operation between two or more individuals. By this definition, trust, networks, civil society, and the like, which have been associated with social capital, are all epiphenominal, arising as a result of social capital but not constituting social capital itself*".

Narayan (1999) mendefinisikan modal sosial sebagai "*the rules, the norms, obligations, reciprocity and trust embedded in social relations, social structure and society's institutional arrangements which enable members to achieve their individual and community objectives".*

Menurut *World Bank* (1998), "*Social capital refers to the institutions, relationships, and norms that shape the quality and quantity of a society's social interactions",* dan Uphoff (2000), menyatakan "*Social capital can be considered as an accumulation of various types of intangible social, psychological, cultural, institutional, and related assets that influence cooperative behavior*".

Menurut *World Bank* (1998), modal sosial tidaklah sesederhana hanya sebagai penjumlahan dari institusi-institusi yang dibentuk oleh masyarakat, tetapi juga merupakan perekat dan penguat yang menyatukan mereka secara bersama-sama. Berbeda dengan modal manusia yang menekankan segala sesuatunya lebih merujuk ke dimensi individual yaitu daya dan keahlian yang dimiliki oleh seorang individu, modal sosial lebih menekankan pada potensi kelompok dan pola-pola hubungan antar individu dalam suatu kelompok dan antar kelompok dengan ruang perhatian pada dimensi-dimensi modal sosial seperti jaringan sosial, norma, nilai, dan kepercayaan antar sesama yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok. Modal sosial mencakup *institutions, relationships, attitudes* dan *values* yang mengarahkan dan menggerakan interaksi-interaksi antar orang dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi.

Modal manusia dibagi dalam dua sudut pandang, yaitu dari perspektif sosial (komunitas) dan perspektif individu. Modal sosial dapat menjadi modal stimulan yang dimiliki oleh suatu populasi untuk mebuka potensi modal lainnya seperti sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya alam dan sumber daya finansial (Laola, 2011). Dari sudut pandang sosial, modal adalah semua aset

yang menghasilkan pendapatan secara kolektif. Sedangkan modal individu adalah sesuatu yang diharapkan pemiliknya akan memberikan penghasilan padanya. Hal tersebut merujuk pada pendapat Scoones (1998); Hancock (1999); Uphoff (2000); Ellis (2000); Hasbullah (2006); dan Salman (2012), maka modal komunitas adalah aset (individu maupun kolektif) yang diinvestasikan atau yang mendukung investasi secara langsung untuk menjadi sumber penghidupan bersama, yang terdiri atas modal: alam, fisik, keuangan, manusia dan sosial.

Menurut Lawang (2004), modal sosial menunjuk pada semua kekuatan kekuatan sosial komunitas yang dikontruksikan oleh individu atau kelompok dengan mengacu pada struktur sosial yang menurut penilaian mereka dapat mencapai tujuan individual dan/atau kelompok secara efisien dan efektif dengan modal-modal lainnya. Hakikat modal sosial adalah hubungan sosial yang terjalin dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat. Hubungan sosial mencerminkan hasil interaksi sosial dalam waktu yang relatif lama sehingga menghasilkan jaringan, pola kerjasama, pertukaran sosial, saling percaya, termasuk nilai dan norma yang mendasari hubungan sosial tersebut (Ibrahim, 2006).

Menurut Knack and Keefer (1997), modal sosial dapat menjadi identifikasi untuk mengukur kinerja ekonomi Pada level makro indikatornya adalah munculnya *trust, civic norms* dan aspek modal sosial sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi. Sebagaimana dinyatakan La Porta *et al*., (1997): "*...cross-country analyses are pointing to social capital as an importan ingredient in economic performance"*. Seperti diungkapkan oleh Busse (2001), dalam hidup keseharian, modal sosial atau hubungan antar individual merupakan salah satu sumber daya atau modal yang digunakan orang dalam strategi pemecahan persoalan kehidupan sehari-hari. Menurut Tonkiss (2000), modal sosial barulah bernilai ekonomis kalau dapat membantu individu atau kelompok misalnya untuk mengakses sumber-sumber keuangan, mendapatkan informasi, menemukan pekerjaan, merintis usaha dan meminimalkan biaya transaksi. Dalam laporan World Bank (2006), ada bukti yang nyata bahwa perdagangan pada level makro dipengaruhi oleh modal sosial.

Fafchamps dan Minten (1999), menyatakan bahwa akumulasi modal sosial terbukti memberikan peran yang sangat nyata dalam kegiatan ekonomi. Dengan

kata lain, *return to social capital* dalam kegiatan ekonomi cukup besar. Penelitian Brata (2004) di Yogyakarta menemukan bahwa modal sosial berupa jaringan bermanfaat dalam memperoleh bantuan atau pinjaman yang bersifat informal, ketika bantuan formal dari pemerintah sangat terbatas.

Keadaan ini sejalan dengan apa yang ditemukan oleh Bastelaer (2000), bahwa anggota masyarakat yang paling miskin yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas mikro-kredit, menjadikan jaringan-jaringan sosial sebagai elemen penting untuk memenuhi permodalannya. Menurut Kolopaking (2002), bahwa modal sosial berperan mulai dari kegiatan tahap awal dalam kegiatan di tingkat komunitas, dilanjutkan dengan memproduksi usaha kecil dan gurem dari komunitas ke organisasi desa, dan akhirnya menjadi unsur pengelolaan kolaborasi serta memelihara jejaring kolaborasi. Jejaring menjadi sarana untuk membentuk sinergi antara masyarakat dan pemerintah.

Beberapa penelitian mengenai modal sosial dalam kaitannya dengan berbagai kegiatan kolektif telah banyak dilakukan. Hasil penelitian Ohama (2001) di Luzon Tengah (Filipina), menemukan bahwa kerja kolektif tidak hanya mengentaskan komunitas petani dari perangkap kemiskinan, melainkan berhasil juga mengkreasi sebuah modal sosial (*social capital*) dalam bentuk berkembangnya organisasi rakyat *"Ugnayang Magsasakang San Siomon (UMSS)"*. Beberapa kasus lain di berbagai Negara Amerika Latin dan Karibia, seperti El Salvador, Jamaica, Venezuela, Columbia, Argentina, dan Bolivia menunjukkan adanya korelasi modal sosial dengan pengurangan jumlah rakyat miskin melalui program yang dinamai sebagai *"Government, Business, and Civic Partnerships for Poverty Reduction"* (Fiszbein dan Lowden, 1999).

Hasil penelitian yang dilakukan Lubis (2002) tentang modal sosial dalam pengelolaan sumberdaya milik bersama (lubuk larangan) di Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara; Penelitian Suhaeb (2007) yang meneliti hubungan modal sosial dengan kedinamisan penyuluh pertanian swakarsa; Laola (2011) meneliti hubungannya dengan perilaku ekonomi petani; Suhirman *et al*. (2012) mengenai modal sosial dengan pengelolaan sumberdaya hutan; Muspida (2007) dalam hubungannya dengan pengelolaaan hutan kemiri rakyat; Suandi (2007); Vipriyanti (2007) keterkaitan antara modal sosial dan pembangunan ekonomi

wilayah; Pranadji (2006) mengenai penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam pengelolaan agrosistem lahan kering; dan Wafa (2003), dalam penelitiannya melihat bagaimana modal sosial bermanfaat bagi kelompok tani "Mardi Utomo".

Terdapat banyak penelitian di Indonesia, yang meneliti tentang pengaruh pentingnya modal sosial jika dikembangkan dalam masyarakat. Penelitian Badaruddin (2003) terhadap komunitas nelayan menemukan bahwa salah satu fator penyebab sulitnya komunitas nelayan tradisional dan nelayan buruh keluar

dari perangkap kemiskinan adalah rendahnya atau tidak berkembangnya modal sosial dalam komunitas tersebut. Hasbullah (2006) menambahkan, masalah mendasar yang perlu dikaji tentang kegagalan program dan kebijakan terkait dengan kesejahteraan selama ini, adalah lengah dalam mengindentifikasi faktor yang sangat menentukan yaitu modal sosial masyarakat. Ibrahim (2006) menyebutkan bahwa modal sosial menjadi lebih berarti bila dikembangkan dengan modal lain yang dimiliki komunitas lokal.

Penelitian lainnya di antaranya, Pranadji (2006) tentang penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam pengelolaan agroekosistem lahan kering; Cahyono dan Adhiatma (2012) tentang peran modal sosial dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat petani tembakau di Kabupaten Wonosobo; Sukmana (2005); Sembiring dan Berutu (2005); Badaruddin (2006); Purnomo *et al*. (2007); Suandi (2007); Alfiasari *et al*. (2009); Inayah (2012); Satriawan dan Oktavianti (2012); Rustanto (2007); Pontoh (2010); Karmani (2012); Rokhani (2012); dan Primadona (2012).

Coleman (1988) mendefinisikan modal sosial sebagai variabel yang mencakup: a) struktur sosial; dan b) fasilitasi tindakan di dalam struktur. Komponen kedua cenderung menganggap bahwa modal sosial sama kedudukannya dengan modal material (*economic capital*) maupun modal sumber daya manusia (*human capital*), meski konsep modal sosial dianggap lebih abstrak dan mencakup hubungan/relasi sosial di dalamnya. Artinya, modal sosial dikembangkan melalui sikap saling tergantung, penerapan norma-norma, serta konsekuensi dari kepemilikan (Portes, 1998).

Putnam (1993) dan Fukuyama (1995) menyebutkan bahwa modal sosial tidak terletak pada individu, tetapi pada kelompok, komunitas, bahkan pada tingkat negara *(state).* Lebih lanjut Putnam menyebutkan bahwa hubungan sosial adalah cerminan dari kerjasama dan koordinasi antar warga yang didasari oleh ikatan sosial yang aktif dan bersifat resiprokal (timbal balik). Putnam juga menyebut bahwa kepercayaan, norma dan jaringan sosial cenderung saling memperkuat *(self reinforcing)* dan bersifat kumulatif. Ramon dan Schwartz (1995) berpendapat bahwa terdapat empat nilai yang melekat pada modal sosial yaitu: a) *universalism* yakni nilai tentang pemahaman terhadap orang lain, apresiasi, toleransi serta proteksi terhadap manusia dan makhluk ciptaan Tuhan lainnya; b) *benevolence* yakni nilai tentang pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan orang lain; c) *tradition* yakni nilai yang mengandung penghargaan, komitmen dan penerimaan terhadap tradisi dan gagasan budaya tradisional; dan d) *comformity* yakni nilai yang mengandung keselamatan, kehormatan, kestabilan masyarakat dalam berhubungan dengan orang lain dan memperlakukan diri.

Lebih lanjut Putnam (1993) menyebutkan bahwa modal sosial tersebut mengacu pada aspek-aspek utama dari organisasi sosial, seperti kepercayaan (*trust*), norma-norma (*norms*), dan jaringan-jaringan (*networks*) yang dapat meningkatkan efisiensi dalam suatu masyarakat melalui fasilitasi bagi tindakan-tindakan yang terkoordinasi. Menurut Putnam, kerjasama sukarela lebih mudah terjadi di dalam suatu komunitas yang telah mewarisi sejumlah modal sosial yang substansial dalam bentuk aturan-aturan, pertukaran timbal balik (*reciprocity*), dan jaringan-jaringan kesepakatan antar-warga. Fukuyama (1995) yang mengkaji bidang ekonomi menyebutkan bahwa modal sosial yang berintikan kepercayaan (*trust*) merupakan dimensi budaya dari kehidupan ekonomi (*cultural dimension of life*) yang sangat menentukan dalam keberhasilan pembangunan ekonomi.

Pretty dan Ward (1999) menyebut modal sosial sebagai "*the cohesiveness of people in their societies, and comprises relations of trust, reciprocity and exchanges between individuals that lubricate co-operation; the bandies of common rules, norms and sanctions mutually-agreed or hended-down: and connectedness, networks and groups*". Pengertian konsep modal sosial yang diberikan sejumlah peneliti akan lebih mudah dipahami dengan mengenal

dimensi-dimensi pokok yang dilekatkan kepadanya. Sedang Adams dan Someshwar (1996) merumuskan sebagai "*social capital refers to sustained social relations that facilitate cooperation within and between groups of individuals*". Menurut Saleh (2009), bahwa munculnya keragaman defenisi atas modal sosial adalah sesuatu yang lumrah ketika konsep ini semakin luas dikaji dan digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena.

Penelitian Mackie (1998) menyimpulkan bahwa kunci sukses pebisnis Cina dalam tataran global antara lain disebabkan oleh dua faktor, yaitu: (1) kepercayaan internasional pada *xinyong* (kepercayaan) yang berfungsi sebagai perekat yang mengikat transaksi perdagangan; dan (2) *guanxi* (hubungan pribadi) sebagai alat untuk mereduksi biaya transaksi dalam bisnis yang dilakukan dalam berbagai situasi dimana perlindungan hukum untuk pelaksanaan kontrak sering tidak dapat diandalkan. Bila dikaitkan dengan konsep modal sosial, maka kedua faktor tersebut merupakan dimensi-dimensi dari modal sosial.

Ini berarti pemanfaatan modal sosial merupakan salah satu kunci sukses pebisnis Cina dalam tataran global. Menurut World Bank (1998), *social capital* tidaklah sesederhana hanya sebagai penjumlahan dari institusi-institusi yang dibentuk oleh masyarakat, tetapi juga merupakan perekat dan penguat yang menyatukan mereka secara bersama-sama. *Social capital* meliputi *shared values* dan *rules* bagi perilaku sosial yang terekspresikan dalam hubungan-hubungan antar personal, *trust* dan *common sense* tentang tanggung jawab terhadap masyarakat, semua hal tersebut menjadikan masyarakat lebih dari sekedar kumpulan individu-individu. Secara inheren *social capital* mengandung *social sense*. Hampir semua bentuk *social capital* terbentuk dan tumbuh melalui gabungan atau kombinasi tindakan dari beberapa orang. Keputusan masing-masing pemain atau pelaku memiliki konsekuensi kepada semua anggota kelompok atau group.

Sehingga hal tersebut mencerminkan suatu atribut dari struktur sosial. Seperti dikemukakan oleh Dhesi (2000), bahwa *social capital* bukan merupakan *private property* dari orang yang mendapat manfaat darinya. Hal ini hanya akan muncul dan tumbuh kalau dilakukan secara bersama (*shared*). Sehingga *social capital* bisa dikatakan sebagai *property* dari *public good*. *Social capital* akan

tumbuh dan semakin berkembang kalau digunakan secara bersama dan sebaliknya akan mengalami kemunduran atau penurunan bahkan suatu kepunahan dan kematian kalau tidak digunakan atau dilembagakan secara bersama. *Social capital* tidak dapat diwariskan sepenuhnya secara otomatis dari generasi ke generasi seperti pewarisan genetik dalam pengertian biologi. Pewarisan *social capital* dan nilai- nilai yang menjadi atributnya memerlukan suatu proses adaptasi, pembelajaran serta pengalaman dalam praktek nyata. Proses ini akan tumbuh dan berkembang dalam waktu yang panjang melalui interaksi yang berulang-ulang yang memungkinkan susana untuk saling membangun kesepahaman, kepercayaan serta nilai dan aturan main yang disepakati bersama antar pelaku kerjasama.

Menurut Grootaert (1998), modal sosial mempunyai enam dimensi, yakni: 1) jumlah keanggotaan; 2) tingkat keberagaman anggota kelompok/organisasi; 3) intensitas pertemuan; 4) tingkat pengambilan keputusan; 5) besarnya tingkat kontribusi (uang dan tenaga); dan 6) orientasi masyarakat. Sedang *World Bank* dalam Grootaert (1999), melihat bahwa modal sosial memiliki dimensi, sebagai berikut: (1) jaringan/ikatan hubungan dan kelompok/organisasi; (2) solidaritas dan kepercayaan; (3) kegotong royongan (*collective action and cooperations*), (4) komunikasi dan informasi; (5) inklusi dan kohesi sosial dalam masyarakat; dan (6) kebijakan dan pemberdayaan. Krishna dan Uphoff (1999) membedakan modal sosial ke dalam dua dimensi komplementer yaitu dimensi struktural dan dimensi kognitif. Kedua dimensi tersebut memiliki elemen-elemen umum yang mendorong tingkah laku bekerjasama secara menguntungkan.

Winter (2000) mengidentifikasikan modal sosial menjadi enam dimensi, yakni: 1) kebiasaan (tipe perjanjian: formal dan informal); 2) tujuan bersama (antar institusi saling hormat menghormati); 3) hubungan dalam pergaulan *"bridging"* (*trust dan reciprocity*) saling membangun secara bersama; 4) modal sosial sebagai perantara (kepercayaan dapat membangun sistem kedekatan antar individu); 5) intensitas hubungan (intensitas hubungan antar individu merupakan kekayaan dan keuntungan ganda dalam masyarakat); dan 6) lokasi sosial (menjalin hubungan kekerabatan (tetangga) dengan baik dapat membangun sumber daya modal sosial). Haddad dan Maluccio (2000) membagi

modal sosial kedalam tiga dimensi, yakni: 1) tingkat partisipasi rumahtangga dalam kelompok; 2) fungsi kelompok bagi rumahtangga; dan 3) tingkat kepercayaan rumah tangga dalam kelompok.

Menurut Woolcock (2001), modal sosial dapat dilihat dari tiga tipe ikatan hubungan atau koneksi (*type of networks*). Pertama, modal kekerabatan, yaitu ikatan hubungan yang berkaitan dengan hubungan kekerabatan (emosional tinggi) yakni: hubungan antar anggota keluarga, teman dekat, dan tetangga. Kedua, modal pergaulan yaitu tingkat kekerabatan relatif lebih jauh seperti: teman kerja, dan kolega. Ketiga, hubungan kelembagaan, yaitu ikatan hubungan lebih renggang lagi dibandingkan kedua ikatan hubungan diatas. Hubungan kelembagaan hanya dapat terjadi pada ikatan hubungan secara formal *(formal institutions*) baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat luas.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan beberapa sarjana penelitian memberi pemahaman bahwa modal sosial tersebut berintikan elemen-elemen pokok yang mencakup: (1) saling percaya (*trust*), yang meliputi adanya kejujuran (*honesty*), kewajaran (*fairness*), sikap egaliter (*egalitarianism*), toleransi (*tolerance*) dan kemurahan hati (*generosity*); (2) jaringan sosial (*networks*), yang meliputi adanya partisipasi (*participations*), pertukaran timbal balik (*reciprocity*), solidaritas (*solidarity*), kerjasama (*colaboration/cooperation*), dan keadilan (*equity*); dan (3) pranata (institutions), yang meliputi nilai-nilai yang dimiliki bersama (*shared value*), norma-norma dan sanksi-sanksi (*norms and sanctions*), dan aturan-aturan (*rules*) (Lubis, 2002). Elemen-elemen pokok modal sosial tersebut bukanlah sesuatu yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya, melainkan harus dikreasikan dan ditransmisikan melalui mekanisme-mekanisme sosial budaya di dalam sebuah unit sosial seperti keluarga, komunitas, asosiasi sukarela, negara dan sebagainya.

Badaruddin (2003) dalam penelitian yang berjudul "Modal Sosial dan Reduksi Kemiskinan Nelayan di Propinsi Sumatera Utara" menyebutkan beberapa elemen pokok dari modal sosial sebagai hasil penelusuran para ahli. Elemen pokok modal sosial tersebut mencakup: 1) saling percaya *(trust*), yang meliputi; adanya kejujuran *(honesty*), kewajaran, *(fairness)*, sikap eqaliter

(eqaliteranism), toleransi dan kemurahan hati (generocity); 2) jaringan sosial (*networks*) yang meliputi; partisipasi, pertukaran timbal-balik *(reciprocity)*, solidaritas, kerjasama (*collaboration)*, dan keadilan; 3) pranata *(institutions)* yang meliputi; nilai-nilai yang dimiliki bersama *(share value)*, norma-norma dan sanksi-sanksi *(norms and sanctions)*, dan aturan-aturan *(rules)*. Sedang Hasbullah (2006) mengidentifikasi 6 dimensi modal sosial yaitu: 1) kehidupan assosiasi yang menyangkut hubungan-hubungan formal maupun informal dalam suatu urusan yang bersifat horizontal; 2) jaringan itu sendiri; 3) masyarakat politik yang menjadi penengah antara hubungan masyarakat dan negara; 4) institusi dan kerangka kebijakan yang melibatkan aturan-aturan formal; 5) norma-norma yang mengatur kehidupan publik; dan 6) nilai-nilai sosial.

Beberapa defenisi modal sosial menunjukkan bahwa modal sosial merupakan konstruk yang sangat menentukan bagi terbangunnya kerjasama antar individu atau kelompok atau terbangunnya suatu perilaku kerjasama kolektif. Berkaitan dengan penelitian ini, dalam modal sosial selalu tidak terlepas pada tiga elemen pokok yang ada pada modal sosial yang mencakup: 1) kepercayaan (*trust*) yang dapat dipersamakan dengan kejujuran, kewajaran, sikap egaliter, toleransi, dan kemurahan hati; 2) jaringan (*networks*) yang dapat dipersamakan dengan parisipasi, resiprositas, solidaritas, dan kerjasama; dan 3) norma (*norms*) yang dapat dipersamakan dengan nilai-nilai bersama, norma dan sanksi, dan aturan-aturan. Ketiga elemen pokok modal sosial di atas berikut aspek-aspeknya pada hakikatnya adalah elemen-elemen yang ada atau seharusnya ada dalam kehidupan sebuah kelompok sosial, apakah kelompok itu bernama komunitas, masyarakat, suku bangsa, atau kategori lainnya, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Kepercayaan (*Trust*)

Rasa percaya adalah dasar dari perilaku moral dimana modal sosial dibangun. Moralitas menyediakan arahan bagi kerjasama dan koordinasi sosial dari semua aktivitas sehingga manusia dapat hidup bersama dan berinteraksi satu dengan lainnya. Membangun rasa percaya adalah bagian dari proses kasih sayang yang dibangun sejak awal dalam suatu keluarga. Sepanjang adanya rasa percaya dalam perilaku dan hubungan kekeluargaan, maka akan terbangun prinsip-prinsip

resiprositas dan pertukaran (Bordieu, 1985). Lebih sempit lagi Dasgupta dan Serageldin (1999) melihat *trust* sebagai "*Individual forming expectations about action of others that have a bearing on this individual's choise of action, when that action must be chosen before he or she can observe the actions of those others".*

Trust atau rasa percaya (kepercayaan) adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, paling tidak. yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya (Putnam, 1993; 1995; 1996; 2000). Menurut Fukuyama (1995), *trust* didefinisikan sebagai "*the expectation that arises within a community of regular, honest, and cooperative behavior, based on commonly share norms, on the part of other members of that community*". Sementara Ostrom (1992), menggambarkan *trustworthiness* sebagai nilai yang tertanam dalam diri (*intrinsic values*) dan motivasi dalam diri (*intrinsic motivation*) seseorang untuk selalu bertindak secara kooperatif, selalu bekerja sama. Istilah "*trust*" di sini berhubungan dengan kejujuran dan kerjasama yang ada di antara orang-orang dalam sebuah komunitas. Dalam pandangan Fukuyama (1995), *trust* adalah sikap saling untuk mempercayai di masyarakat yang memungkinkan masyarakat tersebut saling bersatu dengan yang lain dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial. Sedang Pretty dan Ward (1999), mengemukakan adanya hubungan saling percaya merupakan unsur penting bagi terjadinya kerjasama. Hubungan-hubungan sosial yang dilandasi oleh prinsip resiprositas dan pertukaran akan menumbuhkan kepercayaan, karena setiap pertukaran akan dibayar kembali (*repaid and balanced*). Menurut Casson dan Godley (2000), mendefenisikan rasa percaya sebagai menerima dan mengabaikan kemungkinan bahwa sesuatu akan tidak benar. Rasa percaya memudahkan terjalinnya kerjasama. Semakin tebal rasa saling percaya semakin kuat kerjasama yang terbangun antar individu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2002), yang menyoroti bagaimana bekerjanya elemen modal sosial yakni kepercayaan dalam suatu populasi masyarakat etnis Cina. Dia melihat bahwa kepercayaan antar

anggota anggota merupakan perekat kuat untuk terjalinnya kerjasama yang lebih baik. Setiap anggota percaya kepada yang lainnya karena mereka jujur, bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan anggota (bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok individu). Beberapa indikator *trust* dikumpulkan datanya, yang menunjukkan perasaan saling mempercayai yang memberikan rasa aman yakni: a) Percaya meninggalkan rumah, untuk berpergian ke luar kota, bahwa rumah yang ditinggalkan akan aman; b) percaya bahwa tetangga akan ikut mengawasi keamanan rumah yang ditinggalkan; c) percaya bahwa tetangga semuanya adalah orang yang baik; d) perasaan aman berjalan sendiri di jalanan setelah malam hari;

e) persetujuan pada pendapat bahwa setiap orang dapat dipercaya; f) reputasi aman di area tempat tinggal; g) perasaan percaya pada pemerintah; h) perasaan percaya pada anggota legislatif; i) perasaan percaya pada pemimpin lokal; dan j) perasaan percaya pada tokoh agama yang ada dalam komunitas dan yang berada di luar komunitas.

Bentuk kepercayaan *(trust)* yang dimiliki setiap individu tidak hanya terdapat dalam kesamaan religi saja melainkan sudah menyebar pada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian kepercayaan *(trust)* yang

dimiliki oleh setiap individu baik itu pada pengusaha etnis Cina dalam komunitasnya akan memberikan kontribusi dalam strategi berbisnis.

Menurut Whithaker dan Federico (1997), pengertian kesejahteraan sosial merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut. Seseorang yang mempunyai kekurangan kemampuan mungkin memiliki kesejahteraan yang rendah, kurangnya kemampuan dapat berarti kurang mampu untuk mencapai fungsi tertentu sehingga kurang sejahtera. Terdapat beragam pengertian mengenai kesejahteraan, karena lebih bersifat subjektif dimana setiap orang dengan pedoman, tujuan dan cara hidupnya yang berbeda-beda akan memberikan nilai-nilai yang berbeda pula tentang kesejahteraan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan (Sianipar, 1997).

Menurut Sumarti (1999), perbedaan status sosial budaya dan spesialisasi kerja akan menghasilkan persepsi kesejahteraan yang berbeda pula. Terdapat kelompok masyarakat yang menggunakan ukuran kesejahteraan bersumber pada simbol kekuasaan budaya-politik, sementara monetisasi ekonomi menghantarkan kalangan masyarakat pada umumnya untuk lebih menggunakan ukuran kesejahteraan ekonomi dibandingkan ukuran kesejahteraan sosial. Skoufias *et al*., (2000) menyatakan bahwa pengukuran kesejahteraan bersifat subjektif manakala berkaitan dengan aspek psikologis yaitu diukur dari kebahagiaan dan kepuasan. Mengukur kesejahteraan secara objektif menggunakan patokan tertentu yang relatif baku, seperti menggunakan pendapatan per kapita, dengan mengasumsikan terdapat tingkat kebutuhan fisik untuk semua orang hidup layak. Ukuran yang sering digunakan adalah kepemilikan uang, tanah, atau aset.

Pada prinsipnya aspek yang dapat diamati dalam menganalisis kesejahteraan hampir sama, yaitu mencakup dimensi: pendapatan, pengeluaran untuk konsumsi, status pekerjaan, kondisi kesehatan, serta kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan kebutuhan dasar (seperti air, sanitasi, perawatan kesehatan dan pendidikan). Sedang menurut Rambe (2004), kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warganegara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Berdasarkan tingkat ketergantungan dari dimensi standar hidup (*standard of living*) masyarakat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dibedakan kedalam satu sistem kesejahteraan (*well-being*) dan dua subsistem, yakni: 1) subsistem sosial; dan 2) subsistem ekonomi,

K. Latihan

4. Apakah yang dimaksud dengan Kesejahteraan adalah tata kehidupan sosial ?
5. Sebutkan alasannya mengapa *trust* menjadi sangat dominan dalam perkembangan ekonomi social pada masa lalu?
6. Jelaskan satu persatu definisi dari Kesejahteraan dari sisi Demografi Ekonomi tersebut!

L. Kunci Jawaban

4. Rambe (2004), kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warganegara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Berdasarkan tingkat ketergantungan dari dimensi standar hidup (*standard of living*) masyarakat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dibedakan kedalam satu sistem kesejahteraan (*well-being*) dan dua subsistem, yakni: 1) subsistem sosial; dan 2) subsistem ekonomi,
5. Bentuk kepercayaan *(trust)* yang dimiliki setiap individu tidak hanya terdapat dalam kesamaan religi saja melainkan sudah menyebar pada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian kepercayaan *(trust)* yang dimiliki oleh setiap individu baik itu pada pengusaha etnis lainnya juga Cina dalam komunitasnya akan memberikan kontribusi dalam strategi berbisnis, menurut Lubis (2002).
6. Ekonomi Kesejahteraan dalam perspektif demografi terbagi menjadi dua, secara analisis yaitu: 1) bersifat kuantitatif, yaitu membahas tentang jumlah, persebaran, serta komposisi penduduk; dan 2) bersifat kualitatif, yaitu membahas masalah penduduk dari segi genetis dan biologi

M. Daftar Pustaka

(6) Characteristics of Demographic, Social, and Economic of Cash Conditional Transfer (PKH) Recipients Megawati Simanjuntak1* , Herien Puspitawati1 , MD Djamaludin1, https://www.researchgate.net/publication/314858631_Karakteristik_Demografi_Sosial_dan_Ekonomi_Keluarga_Penerima_Program_Keluarga_Harapan_PKH diakses tanggal 9 September 2020

(7) Boediono, Dr., Ekonomi Internasional dan Nasional, BPFE, Yogyakarta, 2014

(8) Halwani, Hendra. Dra. M.H., dan Tjiptoharijanto, Prijono, H. Dr., Perdagangan Internasional, Pendekatan Ekonomi Kesejahteraan Makro & Mikro, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.

(9) Tambunan, Tulus T.H., Dr., Perekonomian dan Ekonomi Kesejahteraan Indonesia,, Teori dan temuan Empiris, Ghalia Indonesia, 2017

MODUL EKONOMI KESEJAHTERAAN

(KAK 357)

MODUL 4

JENIS KESEJAHTERAAN, TEORI MODAL MANUSIA & UU KESEJAHTERAAN NASIONAL

DISUSUN OLEH

Erlina Puspitaloka Mahadewi, SE, MM, MBL (5661)

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2022

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari Modul ini, diharapkan Mahasiswa mampu :

1. Memahami dan mempelajari Teori Modal dalam Ekonomi Kesejahteraan
2. Menguraikan konsep dasar teori Modal Manusia di Ekonomi Kesejahteraan
3. Mengidentifikasi pemikiran mata kuliah Ekonomi Kesejahteraan dalam konteks *Human Capital*

B. Uraian dan Contoh

C. Visi dan Misi UEU

Universitas Esa Unggul mempunyai visi menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Universitas Esa Unggul menetapkan misi-misi sebagai berikut :

j. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan
k. Menciptakan suasana akademik yang kondusif
l. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan

D. Topik Perkuliahan : Teori Modal dalam Ekonomi Kesejahteraan & UU

Sub Topik : Jenis Kesejahteraan -Teori Modal Manusia

E. Uraian

Lawang (2004) menyebutkan bahwa inti kepercayaan antar manusia terdapat tiga hal yang saling terkait, yaitu: a) Hubungan sosial antara dua orang atau lebih, termasuk dalam hubungan ini adalah institusi yang dalam pengertian ini diwakili orang; b) Harapan yang akan terkandung dalam hubungan itu, yang kalau direalisasikan tidak akan merugikan salah satu atau kedua belah pihak; dan c) Interaksi sosial yang memungkinkan hubungan dan harapan itu terwujud.

Hasbullah (2006) mengatakan bahwa “rasa percaya adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosial yang didasari perasaan yakin bahwa orang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan selalu bertindak dalam suatu pola yang saling mendukung”. Rasa percaya menjadi pilar kekuatan dalam modal sosial.

2) Jaringan (*Networks*)

Menurut Coleman (1988; 1990), modal sosial melalui jaringan sosial dapat berperan dalam membentuk modal manusia dan ekonomi. Sedangkan Putnam (2000) menyatakan bahwa pemikiran dan teori tentang modal sosial memang didasarkan pada kenyataan bahwa “jaringan antara manusia” adalah bagian terpenting dari sebuah komunitas. Jaringan ini sama pentingnya dengan alat kerja (disebut juga modal fisik) atau pendidikan (disebut juga modal manusia). Secara bersama-sama, berbagai modal ini akan meningkatkan produktivitas dan efektivitas tindakan bersama.

Menurut Field (2003), hubungan manusia sangat berarti baginya sebagai individu. Dapat dikatakan bahwa kita, setidaknya sebagian, diartikan melalui siapa yang kita kenal. Secara lebih luas, ikatan-ikatan di antara manusia juga berperan sebagai dinding pembatas bagi struktur-struktur sosial yang lebih luas. Ide sentral dari modal sosial adalah bahwa jaringan-jaringan sosial merupakan suatu aset yang bernilai jaringan-jaringan menyediakan suatu basis bagi kohesi sosial karena menyanggupkan orang untuk bekerjasama satu sama lain dan bukan hanya dengan orang yang mereka kenal secara langsung agar saling menguntungkan.

Menurut Lawang (2004), dimensi jaringan (*networks*) dalam modal sosial lebih memfokuskan pada aspek ikatan antar simpul yang bisa berupa orang atau kelompok (organisasi). Dalam hal ini terdapat pengertian adanya hubungan sosial yang diikat oleh adanya kepercayaan (*trust*) yang mana kepercayaan itu dipertahankan dan dijaga oleh norma-norma (*norms*) yang ada. Pada konsep jaringan dalam modal sosial menunjuk pada semua hubungan dengan orang atau kelompok lain yang memungkinkan kegiatan dapat berjalan secara efisien dan efektif. Selanjutnya, jaringan itu sendiri dapat terbentuk dari hubungan antar

personal, antar individu dengan institusi, serta jaringan antar institusi. Sementara jaringan sosial (*networks*) merupakan dimensi yang bisa saja memerlukan dukungan dua dimensi lainnya karena kerjasama atau jaringan sosial tidak akan terwujud tanpa dilandasi norma (*norms*) dan rasa saling percaya (*trust*).

Dalam menganalisis jaringan dalam modal sosial, Granovetter (2005) mengetengahkan gagasan mengenai pengaruh struktur sosial terutama yang dibentuk berdasarkan jaringan terhadap manfaat ekonomis khususnya menyangkut kualitas informasi. Menurutnya terdapat empat prinsip utama yang melandasi pemikiran mengenai adanya hubungan antara jaringan sosial dengan manfaat ekonomi, yakni: 1) norma dan kepadatan jaringan (*network density*); 2) lemah atau kuatnya ikatan (*ties)* yakni manfaat ekonomi yang ternyata cenderung didapat dari jalinan ikatan yang lemah; 3) peran lubang struktur (*structural holes*) yang berada di luar ikatan lemah ataupun ikatan kuat yang ternyata berkontribusi untuk menjembatani relasi individu dengan pihak luar; dan 4) interpretasi terhadap tindakan ekonomi dan non ekonomi, yaitu adanya kegiatan-kegiatan non ekonomis yang dilakukan dalam kehidupan sosial individu yang ternyata memengaruhi tindakan ekonominya.

Jaringan sosial sebagai fungsi informatif diartikan pula media informasi atau jaringan informasi yang memungkinkan setiap *stakeholders* dalam jaringan dapat mengetahui informasi yang berhubungan dengan masalah, peluang, serta kegiatan usaha. Fungsi informasi seperti ini dapat dilihat sebagai fungsi pelumas *(lubricant*) (Anderson *et al*., 2004). Fungsi informatif ini bisa juga berfungsi peluang *(opportunity*), berfungsi katalisator, dan berfungsi akses terhadap keberhasilan suatu usaha produktif yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rakhmania (2006), pada etnis Cina di Jakarta maka didapati institusi keluarga dan ikatan kekerabatan adalah modal sosial yang menopang bisnis etnis Cina. Ikatan kekeluargaan menyediakan jaringan sosial di kalangan etnis Cina, di mana jaringan sosial ini berdasarkan kepercayaan. Melalui jaringan sosial tersebut bisnis mereka makin meningkat.

Dengan adanya modal sosial pada etnis Cina terjadilah perkembangan bisnis- bisnis. Di sini terlihat bagaimana modal sosial dapat berfungsi dan

bermanfaat bagi bisnis etnis Cina bila mereka mampu mempergunakan modal sosial sebaik- baiknya.

3) Norma-norma (*Norms*)

Menurut Andrain (1992), nilai-nilai itu memiliki enam ciri yaitu: bersifat umum dan abstrak, konsepsional mengandung kualitas moral, tidak selamanya realistik, bekerja dalam situasi kehidupan masyarakat yang nyata, nilai-nilai itu bersifat campuran dan bersifat stabil, dan sukar berubah. Norma terdiri dari pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, harapan-harapan dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang. Norma-norma dapat bersumber dari agama, panduan moral, maupun standar-standar sekuler seperti halnya kode etik profesional. Norma dibangun dan berkembang berdasarkan sejarah kerjasama di masa lalu dan diterapkan untuk mendukung iklim kerjasama. Norma dapat merupakan pra-kondisi maupun produk dari kepercayaan sosial (Putnam, 1993).

Menurut Blau (1964), norma (*norms*) tidak dapat dipisahkan dari jaringan (*networks*) dan kepercayaan (*trust*). Kalau struktur jaringan itu terbentuk karena pertukaran sosial yang terjadi, sifat norma muncul dari pertukaran yang saling menguntungkan. Karena itu norma yang muncul bukan hanya satu pertukaran saja tetapi dari beberapa kali pertukaran prinsip saling menguntungkan maka dari situlah muncul norma dalam bentuk kewajiban sosial. Norma bersifat resiprokal, artinya isinya menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak yang dapat menjamin keuntungan yang diperoleh dari suatu kegiatan tertentu. Jaringan yang terbina dan menjamin keuntungan, akan memunculkan norma keadilan dan yang melanggar prinsip keadilan akan dikenakan sanksi yang keras.

A. Teori Modal Social

Menurut Fukuyama (1999; 2005), norma adalah nilai bersama yag mengatur perilaku individu dalam suatu masyarakat atau kelompok. Modal sosial merupakan norma informal yang dapat mengembangkan kerjasama antar dua atau lebih individu. Norma yang merupakan modal sosial menentukan perilaku

bersama dalam suatu kelompok individu juga dipahami sebagai prinsip keadilan yang mengarahkan pelaku untuk berperilaku yang tidak mementingkan diri sendiri yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka.

Dimensi modal sosial tumbuh di dalam suatu masyarakat yang didalamnya berisi nilai dan norma serta pola-pola interaksi sosial dalam mengatur kehidupan ke seharian anggotanya (Woolcock dan Narayan, 2000). Oleh karena itu Adler dan Kwon (2000) menyatakan, dimensi modal sosial adalah merupakan gambaran dari keterikatan internal yang mewarnai struktur kolektif dan memberikan kohesifitas dan keuntungan-keuntungan bersama dari proses dinamika sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Dimensi modal sosial menggambarkan segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, serta didalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi (Dasgupta dan Serageldin, 1999).

Menurut Cohen dan Prusak (2001), modal sosial adalah sebagai setiap hubungan yang terjadi dan diikat oleh suatu kepercayaan (*trust*), saling pengertian (*mutual understanding*), dan nilai-nilai bersama (*shared value*) yang mengikat anggota kelompok untuk membuat kemungkinan aksi bersama dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Sependapat dengan hal tersebut, Hasbullah (2006) menjelaskan, modal sosial sebagai segala sesuatu hal yang berkaitan dengan kerja sama dalam masyarakat atau bangsa untuk mencapai kapasitas hidup yang lebih baik, ditopang oleh nilai-nilai dan norma yang menjadi unsur-unsur utamanya seperti *trust* (rasa saling mempercayai), timbal balik, aturan-aturan kolektif dalam suatu masyarakat atau bangsa dan sejenisnya. Sedangkan Cox (2005) mendefinisikan modal sosial sebagai suatu rangkaian proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, norma-norma, dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisien dan efektifnya koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan dan kebajikan bersama.

Bank Dunia (2005) meyakini modal sosial adalah sebagai sesuatu yang merujuk ke dimensi institusional, hubungan-hubungan yang tercipta, dan norma-norma yang membentuk kualitas serta kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat. Setiap kehidupan sosial senantiasa ditandai dengan adanya aturan-aturan pokok yang mengatur perilaku anggota-anggota masyarakat yang terdapat

di dalam lingkungan sosial tersebut yang merupakan pola hubungan tertata yang meliputi: a) segala sesuatu yang menjadi dasar tujuan kehidupan sosial yang ideal atas berdasar pada pola-pola yang terbentuk di dalam realitas sosial tersebut; dan b) sesuatu yang menjadi pola pedoman untuk mencapai tujuan dari kehidupan sosial, yang di dalamnya terdapat seperangkat perintah dan larangan berikut sanksinya yang dinamakan sistem norma.

B. Teori Modal Manusia

Secara khusus, modal manusia mengukur nilai ekonomi dari keahlian suatu individu, yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sikap dan pengalaman (Smith, 1776/1937; Mincer, 1958; Schultz, 1961, 1971; Becker, 1964; Heckman, 2000; Jaw *et al*., 2006). Menurut Daniels dan Mickel (2002), istilah "modal manusia" muncul di akhir 1950-an. Para pelopornya termasuk Theodore Schultz, Jacob Mincer, Milton Friedman, Sherwin Rosen, dan Gary Becker. Umumnya. Istilah modal manusia (*human capital*) mengacu pada kemampuan-kemampuan berproduktivitas dan pengetahuan yang berada pada setiap tenaga kerja, yang memiliki sifat nilai ekonomi berupa jasa di masa depan. Schultz (1981) mendefinisikan modal manusia sebagai "atribut kualitas individu yang diperoleh, yang bernilai, dan dapat meningkat dengan investasi yang tepat" yang merupakan ciri khas dari modal manusia (dibandingkan dengan bentuk lain dari modal seperti modal fisik dan keuangan) dan merupakan bagian dari manusia. Ini adalah manusia karena itu diwujudkan dalam manusia, itu adalah modal karena merupakan sumber kepuasan masa depan, atau manfaat masa depan, atau keduanya. Menurut Becker (1964), modal manusia termasuk kualitas yang meningkatkan pendapatan ekonomi dan fisik di masa depan dengan meningkatkan sumber daya pada manusia, dan kegiatan yang mempengaruhi pendapatan adalah investasi dalam modal manusia. Dengan kata lain, setiap tambahan kualitas dan kemampuan yang membantu individu dan kelompok menjadi lebih produktif secara ekonomi dapat dianggap sebagai modal manusia individu/kelompok.

Namun menurut Spengler (1977), konseptor di balik "modal manusia" dapat ditelusuri kembali ke Adam Smith (1776) yang menyatakan:

Adanya perbedaan karena bakat alami pada berbagai orang, dalam kenyataannya sangat sedikit kita sadari. Jenius yang muncul dengan perbedaan dibandingkan orang-orang lain seprofesinya, ketika tumbuh dewasa, tidak disebabkan oleh berbagai sebab. Perbedaan karakter yang sangat berbeda sekalipun, antara seorang filsuf dan seorang pekerja jalan umum misalnya, tampaknya tidak banyak muncul secara alami, tetapi dari kebiasaan, lingkungan, dan pendidikan. Ketika mereka lahir, dan selama enam atau delapan tahun pertama usia mereka, mereka mungkin sangat mirip, dan tidak orang tua mereka ataupun teman bermain mereka bisa melihat perbedaan yang luar biasa tersebut. Ketika usianya mencukupi, atau segera setelah itu, mereka akan mendapatkan kesempatan kerja yang sangat berbeda. Derajat perbedaan yang semakin melebar kemudian menjadi pusat perhatian, hingga peneliti kemudian mencari faktor penyebabnya.

Menurut Schultz (1971), baik modal fisik dan modal manusia sangat penting bagi produktivitas. Seiring dengan peningkatan modal fisik dan modal manusia, keuntungan akan meningkat. Melakukan tambahan pekerja pendidikan dan pelatihan keterampilan pada pekerja akan meningkatkan kinerja kerja. Modal manusia juga memiliki manfaat intrinsik untuk masa depan. Manfaat intrinsik dapat mempengaruhi kesejahteraan individu. Namun tidak seperti manfaat materi, kesejahteraan sulit untuk diidentifikasi dan digukur. Modal manusia dan modal fisik serupa dalam hal mereka penting bagi produktivitas. Namun dalam teori modal manusia, istilah "manusia" adalah kunci bahwa "modal" diwujudkan dalam manusia. Modal manusia dalam setiap individu terakumulasi waktu ke waktu, aset ini tidak bisa dipertukarkan atau sebagai produk untuk dijual (Schultz, 1971; Checchi, 2006). Penting untuk memahami istilah "modal" dalam konsep teori modal manusia. Modal didefinisikan sebagai suatu entitas yang dibeli atau dibuat dengan biaya tertentu yang menghasilkan output masa depan (misalnya, aliran pendapatan) (Morgan danDuncan, 1982). Dengan demikian modal fisik dan modal manusia dapat dapat dikatakan sebagai modal aset, karena investasi pada keduanya akan menghasilkan beberapa jenis output (Mincer, 1994).

Menurut Schultz (1993), pendapat Adam Smith berguna dalam memahami kesamaan antara modal fisik dan modal manusia, dimana Smith menyatakan:

"... pendidikan, penelitian, atau magang, merupakan pengeluaran biaya yang nyata, merupakan modal tetap dan akhirnya disadari berada dalam diri setiap manusia..., peningkatan ketrampilan seorang pekerja dapat dianggap seperti penambahan mesin atau alat produksi, yang menimbulkan biaya tertentu, akan dapat dibayar kembali dengan keuntungan yang akan didapat".

Modal manusia dan modal fisik mempunyai kemiripan dalam kaitannya dengan bagi produktivitas. Namun dalam teori modal manusia, istilah "manusia' adalah manifestasi "modal" yang diwujudkan dalam diri manusia (Schultz, 1971). Dalam setiap individu modal manusia berakumulasi dari waktu ke waktu, aset ini bukan sesuatu yang bisa dipertukarkan atau diberikan (Schultz, 1971; Checchi, 2006). Modal manusia mencakup kemampuan, keterampilan, kompetensi, dan atribut individu, sosial, dan kesejahteraan ekonomi (Rosenbaum, 1986; CERI, 2001). Hal-hal lain yang terbentuk dibangun di atas unsur-unsur tersebut meliputi motivasi dan perilaku, kesehatan fisik, emosional, dan mental individu (CERI, 2001). Setiap individu mulai mendapatkan modal manusia saat lahir. Kemudian dipertajam dengan kemampuan untuk berinvestasi dalam modal manusia melalui pendidikan formal, pelatihan kerja, dan setiap pergantian kerja yang berbeda untuk mencari pengalaman kerja ataupun mencari gaya hidup (Bryant, 1990; Becker, 1993). Dengan demikian, investasi dalam modal manusia terjadi selama siklus hidup dan menurun dari waktu ke waktu, seiring dengan penurunan manfaat dari investasi pada modal manusia (Mincer, 1974).

Pentingnya modal manusia secara ekonomi terletak pada kontribusinya terhadap penciptaan keunggulan kompetitif suatu negara dan pertumbuhan ekonominya (Nehru *et al*., 1995; Porter, 1998; Drucker, 1999;). Modal manusia mewakili kecerdasan dan pengetahuan selain faktor penentu lain dari pembangunan ekonomi suatu negara (misalnya, infrastruktur, lembaga-lembaga politik/hukum, supremasi hukum, iklim usaha, dan sebagainya).

Maka perlu pemahaman yang lebih baik dan dapat diandalkan mengenai modal manusia sebagai faktor penentu pertumbuhan sosial-ekonomi (Schneider dan Frey, 1985; ; Mankiw *et al*., 1992; Nehru *et al*., 1995; Barro dan Lee, 2000; Warner, 2002; Globerman dan Shapiro, 2002; Haveman *et al*., 2003; Baier *et al*., 2006). Teori modal manusia telah menjadi diterima sebagai salah satu teori dasar

pembangunan sosial-ekonomi, semakin memperoleh perhatian dengan sejalan berkembangnya ilmu ekonomi, dengan memanfaatkan disain-disain teknologi yang berkembang dalam realitas sehari-hari.

Peran modal manusia dalam memahami pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dalam suatu negara merupakan pengembangan dari adanya teori ekonomi modern yaitu model pertumbuhan endogen (*endogenous growth model*). Salah satu teori pertumbuhan endogen yang fokus membahas peran modal manusia yaitu Lucas (1988) dan Romer (1990), dalam model ini penambahan modal fisik dan tenaga kerja (yang tidak terdidik) serta adanya modal manusia sebagai input dalam fungsi produksi. Model dari Lucas (1988), menunjukkan bahwa modal manusia mempunyai efek produktifitas internal (*internal productivity effect*) dan efek produktifitas eksternal (*external productivity effect*). Menurut Mathur (1999), adanya efek eksternal dikarenakan tingkat pertumbuhan akan menjadi lebih tinggi pada daerah yang menginvestasikan lebih besar untuk akumulasi modal manusia. Menurut Shihe (2007), konsentrasi tinggi dari pekerja terampil dapat mempromosikan inovasi, difusi, akuisisi, dan akumulasi pengetahuan di seluruh pekerja baik secara individual, ruang geografis, dan waktu. Selain itu, menurut Karlsson *et al*. (2009), dapat diamati bahwa modal manusia yang diukur dengan individu yang memiliki pendidikan tingkat universitas cenderung terkelompok secara substansial pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan keseluruhan populasi.

Penelitian di Indonesia mengenai hubungan modal manusia dan pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan tetapi tidak memperhatikan aspek spasial. Penelitian Firdaus dan Yusop (2009), menunjukkan mengenai hubungan antara modal manusia dengan menggunakan level pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sementara Sodik (2006) mencoba menganalisis konvergensi regional pada provinsi di Indonesia tanpa menganalisis aspek spasial. Penelitian yang dilakukan (Vidyattama, 2012; Vidyattama, 2013) di Indonesia pada level provinsi menunjukkan hubungan antara adanya desentralisasi dengan konvergensi regional dan ketimpangan regional. Penelitian mengenai pengembangan modal manusia dan produktivitas daerah dilakukan dengan perbedaan cakupan dari level wilayah yang digunakan. Studi pada level individu

dan perkotaan misalnya dilakukan oleh Rauch (1993), Moretti (2004), dan Baeur dan Vorell (2010), menunjukkan bahwa terjadi konsentrasi modal manusia dan terjadinya efek limpahan modal manusia pada kota-kota tertentu yang menyebabkan peningkatan produktivitas pada kota lain dengan adanya efek dari pendidikan dan pengalaman.

Studi pada level daerah dengan menggunakan pendekatan spasial ditunjukkan pada penelitian Ramos *et al*. (2010) dan Fischer *et al*. (2009) yang menunjukkan adanya efek limpahan modal manusia terhadap tingkat produktivitas regional. Penelitian Brunow dan Hirte (2009), dengan mempertimbangkan komposisi populasi di Jerman menunjukkan adanya efek limpahan modal manusia dan transisi sosial demografi dari pekerja. Selain itu penelitian lebih lanjut juga dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi konvergensi pada daerah dengan mempertimbangkan aspek spasial pada level regional di Uni Eropa dan Spanyol (Fingleton dan López-Bazo, 2006; Ramos *et al*., 2010).

Modal manusia mencakup kemampuan, keterampilan, kompetensi, dan atribut yang memfasilitasi personal, sosial, dan kesejahteraan ekonomi (Rosenbaum, 1986; CERI, 2001). Hal lainnya mencakup atas unsur-unsur meliputi motivasi dan perilaku, kesehatan fisik, emosional, dan mental individu (CERI, 2001). Individu mulai mendapatkan modal manusia saat lahir; Namun beberapa satu memiliki kemampuan untuk berinvestasi dalam modal manusia melalui pendidikan formal, pelatihan kerja, dan berpindah tempat tinggal untuk mencari pekerjaan atau gaya hidup yang berbeda (Bryant, 1990; Becker, 1993). Dengan demikian, investasi dalam modal manusia terjadi selama siklus hidup dan menurun dari waktu ke waktu, seiring penurunan manfaat dari investasi tersebut (Mincer, 1974).

Ekonom percaya bahwa terdapat banyak manfaat dari investasi dalam modal manusia. Investasi dalam kemampuan, pendidikan, dan pelatihan disimpulkan mampu menghasilkan produktivitas individu yang lebih tinggi mengakibatkan peningkatan kompensasi (Morgan dan Duncan, 1982). Hal tersebut menyatakan bahwa peluang terbuka untuk orang-orang yang bersedia untuk berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan. Bryant (1990) mengemukakan bahwa alasan utama orang berinvestasi dalam modal manusia adalah untuk

meningkatkan pendapatan dan kekayaan di masa depan. Individu akan berinvestasi pada pendidikan hanya jika hasil yang didapat lebih besar dari atau sama dengan hasil dari investasi alternatif lainnya. Becker (1993) menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan adalah investasi yang paling penting dalam modal manusia.

Hipotesis ini berdasarkan fakta bahwa individu yang berpendidikan tinggi, mengerti Kesehatan, dan terampil akan mendapatkan lebih dari individu yang kurang berpendidikan dan terampil. Dalam hal ini, disimpulkan bahwa individu telah melakukan analisis biaya-manfaat mengenai pendidikan (Checchi, 2006). Biaya ini meliputi biaya langsung seperti biaya kuliah, buku, transportasi, dan biaya hidup, serta biaya tidak langsung atau peluang lainnya. Dengan demikian, individu akan berinvestasi dalam pendidikan hanya jika ada manfaat masa depan lebih besar daripada biaya tersebut.

Dalam satu penelitian di Amerika Serikat, Becker (1993) menemukan bahwa dengan menempuh perguruan tinggi meningkatkan tingkat pendapatan seseorang meski setelah memperhitungkan biaya langsung dan tidak langsung yang timbul, disesuaikan dengan latar belakang keluarga dan kemampuan individu. Becker berpendapat bahwa peningkatan pendapatan ini adalah hasil dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berpikir kritis diperoleh melalui kegiatan pendidikan. Namun, terdapat perbedaan yang jelas antara lulusan SMA dan lulusan perguruan tinggi, dimana lulusan perguruan tinggi menerima manfaat yang lebih besar karena tingkat pendidikan yang berbeda. Perbedaan juga terjadi antara lulusan perguruan tinggi dan putus kuliah. Becker menyimpulkan bahwa "putus kuliah" tidak memiliki kemampuan lebih besar dari lulusan SMA. Selanjutnya, menurut Becker, keuntungan dari lulus kuliah bervariasi di seluruh kelompok sosial demografis yang berbeda. Misalnya, ia menemukan bahwa tingkat pendapatan untuk penduduk perkotaan, putih, lulusan perguruan tinggi laki-laki lebih tinggi dari tingkat pendapatan untuk penduduk pedesaan, orang kulit berwarna, perempuan, dan putus kuliah.

Pelatihan merupakan komponen penting lain dari modal manusia. Keterampilan dan pengetahuan diperoleh dimulai saat lahir dan berlangsung seumur hidup. Pembelajaran terjadi melalui hubungan keluarga dan anak,

pendidikan formal dan pelatihan, pelatihan kerja, dan pembelajaran informal yang diperoleh melalui kerja dan bermasyarakat (Becker, 1993; CERI, 2001). Pengalaman menjadi dua kategori yaitu umum dan khusus. Pengalaman umum didefinisikan sebagai pengalaman yang menguntungkan pekerja tidak peduli di mana ia/dia bekerja, sedangkan pengalaman spesifik didapatkan di posisi yang paling menguntungkan pekerja (Bryant, 1990).

Juga disimpulkan bahwa pemberi kerja lebih bersedia untuk membayar untuk pelatihan khusus ketika perusahaan mengalami turnover yang lebih rendah (Blaug, 1976). Banyak ekonom percaya bahkan pekerjaan berupah rendahpun dapat memberikan pengalaman kerja yang berharga, yang mengarahkan pada pendapatan yang lebih tinggi di posisi berikutnya (Friedlander dan Burtless, 1995).

Samuelson dan Nordhaus (2004) menyebutkan bahwa input tenaga kerja terdiri dari kuantitas dan keterampilan tenaga kerja. Banyak ekonomi percaya bahwa kualitas input tenaga kerja yakni keterampilan, pengetahuan dan disiplin tenaga kerja merupakan elemen paling penting dalam pertumbuhan ekonomi. Suatu negara yang mampu membeli berbagai peralatan canggih tapi tidak mempekerjakan tenaga kerja terampil dan terlatih tidak akan dapat memanfaatkan barang-barang modal tersebut secara efektif. Peningkatan melek huruf, kesehatan dan disiplin serta kemampuan menggunakan komputer sangat meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Mankiw (2007), modal manusia adalah pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh oleh para pekerja melalui pendidikan mulai dari program untuk anak-anak sampai dengan pelatihan kerja (*on the job training*) untuk para pekerja dewasa. Seperti halnya dengan modal fisik, modal manusia meningkatkan kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa. Untuk meningkatkan level modal manusia dibutuhkan investasi dalam bentuk guru, perpustakaan dan waktu belajar. Lucas (1988) berargumen bahwa akumulasi modal manusia melalui investasi (misal meningkatkan waktu belajar) mendorong pertumbuhan endogen. Argumentasinya menekankan pada keuntungan yang disebabkan oleh eksternalitas dari modal manusia yang cenderung meningkatkan tingkat pengembalian modal manusia.

Beberapa peneliti (Ben-Porath, 1980; Psacharopoulos dan Woodhall, 1985; Griliches, 1997; Heckman, 1995, 2000; Heckman dan Cunha, 2007)

menyarankan bahwa untuk meningkatkan akurasi dalam mengukur modal manusia. Diperlukan langkah yang lebih komprehensif mencakup karakteristik lebih dari pendidikan sekolah di tingkat dasar dan tingkat melek huruf, untuk memberikan makna yang lebih luas dari modal manusia. Nehru *et al*. (1995) menyatakan bahwa meskipun banyak variabel telah diusulkan sebagai oleh para peneliti untuk membantu membentuk teori modal manusia.

Porter (1998) dan Harrison (1992) menyatakan bahwa sumber daya modal manusia suatu bangsa tidak hanya keterampilan, kesehatannya tetapi juga etos kerja. Schultz (1971) menyatakan bahwa modal bisa ditampilkan dalam bentuk yang berbeda. Menurutnya jika mungkin mengumpulkan semua bentuk yang berbeda dari modal manusia, itu akan melebihi semua lingkup modal bukan manusia. Peneliti lainnya (Sadie, 1960; Prizel, 1998; Shulman, 2005; Sapford dan Abbott, 2006) memakai peran kesadaran identitas nasional sebagai faktor yang berkontribusi terhadap modal manusia dari suatu bangsa. Ben-Porath (1980) menekankan pentingnya keluarga dalam pengembangan modal manusia dalam perspektif Ekonomi Kesejahteraan.

Keterampilan sebagian besar diperoleh melalui pengalaman, kompetensi mencerminkan kemampuan bawaan (CERI, 2001). Beberapa ahli menganggap kesehatan menjadi komponen modal manusia, sementara yang lainnya tidak. Telah ditemukan bahwa kesehatan, pendidikan, dan pengembangan intelektual semua berinteraksi satu sama lain (Bryant, 1990). Menurut Todaro dan Smith (2006), modal manusia dalam terminologi ekonomi sering digunakan untuk bidang pendidikan, kesehatan dan berbagai kapasitas manusia lainnya yang ketika bertambah dapat meningkatkan produktivitas. Pendidikan memainkan peran kunci dalam hal kemampuan suatu perekonomian untuk mengadopsi teknologi modern dan dalam membengun kapasitasnya bagi pembangunan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kesuksesan dalam pendidikan bergantung juga pada kecukupan kesehatan. Di samping itu, kesehatan merupakan prasayarat bagi peningkatan produktivitas. Dengan demikian kesehatan dan pendidikan dapat juga dilihat sebagai komponen vital dalam pertumbuhan dan pembangunan sebagai input bagi fungsi produksi agregat.

F. Latihan

1. Apakah yang dimaksud dengan Teori Modal Manusia dalam Ekonomi Kesejahteraan ?
2. Sebutkan alasannya mengapa Teori *tersebut* dominan dalam perkembangan ekonomi kesejahteraan ?
3. Jelaskan sisi Ekonomi Kesejahteraan hal tersebut!

G. Kunci Jawaban

d. Teori modal manusia, istilah "manusia' adalah manifestasi "modal" yang diwujudkan dalam diri manusia (Schultz, 1971). Dalam setiap individu modal manusia berakumulasi dari waktu ke waktu, aset ini bukan sesuatu yang bisa dipertukarkan atau diberikan (Schultz, 1971; Checchi, 2006). Modal manusia mencakup kemampuan, keterampilan, kompetensi, dan atribut individu, sosial, dan kesejahteraan ekonomi (Rosenbaum, 1986; CERI, 2001). Hal-hal lain yang terbentuk dibangun di atas unsur-unsur tersebut meliputi motivasi dan perilaku, kesehatan fisik, emosional, dan mental individu (CERI, 2001).

e. Pada prinsipnya teori modal manusia sebagai faktor penentu pertumbuhan sosial-ekonomi (Schneider dan Frey, 1985; ; Mankiw *et al*., 1992; Nehru *et al*., 1995; Barro dan Lee, 2000; Warner, 2002; Globerman dan Shapiro, 2002; Haveman *et al*., 2003; Baier *et al*., 2006). Teori modal manusia telah diterima sebagai salah satu teori dasar pembangunan sosial-ekonomi, semakin memperoleh perhatian dengan sejalan berkembangnya ilmu ekonomi, dengan memanfaatkan disain-disain teknologi yang berkembang dalam realitas sehari-hari.

f. Beberapa ahli menganggap kesehatan menjadi komponen modal manusia, sementara yang lainnya tidak. Telah ditemukan bahwa kesehatan, pendidikan, dan pengembangan intelektual semua berinteraksi satu sama lain (Bryant, 1990). Menurut Todaro dan Smith (2006), modal manusia dalam terminologi ekonomi sering digunakan untuk bidang pendidikan, kesehatan dan berbagai kapasitas manusia lainnya yang ketika bertambah

dapat meningkatkan produktivitas. Pendidikan memainkan peran kunci dalam hal kemampuan suatu perekonomian untuk mengadopsi teknologi modern dan dalam membengun kapasitasnya bagi pembangunan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

https://www.researchgate.net/publication/332755020_Pengukuran_Modal_Manusia_Suatu_Studi_LiteraturBoediono, Dr., Ekonomi Internasional dan Nasional, BPFE, Yogyakarta, 2014 diakses 9 September 2020

Halwani, Hendra. Dra. M.H., dan Tjiptoharijanto, Prijono, H. Dr., Perdagangan Internasional, Pendekatan Ekonomi Kesejahteraan Makro & Mikro, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.

Tambunan, Tulus T.H., Dr., Perekonomian dan Ekonomi Kesejahteraan Indonesia,, Teori dan temuan Empiris, Ghalia Indonesia, 2017

MODUL EKONOMI KESEJAHTERAAN

(KAK 357)

MODUL 5

PENGERTIAN DAN MASALAH KESEJAHTERAAN

(PENGANTAR TEORI BLUM)

DISUSUN OLEH

Erlina Puspitaloka Mahadewi, SE, MM, MBL (5661)

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2022

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari Modul ini, diharapkan Mahasiswa mampu :

1. Memahami dan mempelajari Teori Blum dalam Ekonomi Kesejahteraan
2. Menguraikan dan mempelajari permasalahan dalam Ekonomi Kesejahteraan
3. Mengidentifikasi pemikiran solusi permsalahan dalam Ekonomi Kesejahteraan

B. Uraian dan Contoh

C. Visi dan Misi UEU

Universitas Esa Unggul mempunyai visi menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Universitas Esa Unggul menetapkan misi-misi sebagai berikut :

m. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan
n. Menciptakan suasana akademik yang kondusif
o. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan

D. Topik Perkuliahan :

Pengertian dan Permasalahan Kesejahteraan
(Teori Modal Sosial dan Pengantar Teori Blum)

E. Uraian

Permasalahan dalam Kesejahteraan Ekonomi

Keterampilan sebagian besar diperoleh melalui pengalaman, kompetensi mencerminkan kemampuan bawaan (CERI, 2001). Beberapa ahli menganggap kesehatan menjadi komponen modal manusia, sementara yang lainnya tidak. Telah ditemukan bahwa kesehatan, pendidikan, dan pengembangan intelektual semua berinteraksi satu sama lain (Bryant, 1990). Menurut Todaro dan Smith (2006), modal manusia dalam terminologi ekonomi sering digunakan untuk

bidang pendidikan, kesehatan dan berbagai kapasitas manusia lainnya yang ketika bertambah dapat meningkatkan produktivitas. Pendidikan memainkan peran kunci dalam hal kemampuan suatu perekonomian untuk mengadopsi teknologi modern dan dalam membengun kapasitasnya bagi pembangunan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kesuksesan dalam pendidikan bergantung juga pada kecukupan kesehatan. Di samping itu, kesehatan merupakan prasayarat bagi peningkatan produktivitas. Dengan demikian kesehatan dan pendidikan dapat juga dilihat sebagai komponen vital dalam pertumbuhan dan pembangunan sebagai input bagi fungsi produksi agregat.

Samuelson dan Nordhaus (2004) menyebutkan bahwa input tenaga kerja terdiri dari kuantitas dan keterampilan tenaga kerja. Banyak ekonomi percaya bahwa kualitas input tenaga kerja yakni keterampilan, pengetahuan dan disiplin tenaga kerja merupakan elemen paling penting dalam pertumbuhan ekonomi. Suatu negara yang mampu membeli berbagai peralatan canggih tapi tidak mempekerjakan tenaga kerja terampil dan terlatih tidak akan dapat memanfaatkan barang-barang modal tersebut secara efektif. Peningkatan melek huruf, kesehatan dan disiplin serta kemampuan menggunakan komputer sangat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Sedangkan menurut Mankiw (2007), modal manusia adalah pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh oleh para pekerja melalui pendidikan mulai dari program untuk anak-anak sampai dengan pelatihan kerja (*on the job training*) untuk para pekerja dewasa. Seperti halnya dengan modal fisik, modal manusia meningkatkan kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa. Untuk meningkatkan level modal manusia dibutuhkan investasi dalam bentuk guru, perpustakaan dan waktu belajar. Lucas (1988) berargumen bahwa akumulasi modal manusia melalui investasi (misal meningkatkan waktu belajar) mendorong pertumbuhan endogen. Argumentasinya menekankan pada keuntungan yang disebabkan oleh eksternalitas dari modal manusia yang cenderung meningkatkan tingkat pengembalian modal manusia.

Beberapa peneliti (Ben-Porath, 1980; Psacharopoulos dan Woodhall, 1985; Griliches, 1997; Heckman, 1995, 2000; Heckman dan Cunha, 2007) menyarankan bahwa untuk meningkatkan akurasi dalam mengukur modal manusia. Diperlukan langkah yang lebih komprehensif mencakup karakteristik

lebih dari pendidikan sekolah di tingkat dasar dan tingkat melek huruf, untuk memberikan makna yang lebih luas dari modal manusia. Nehru *et al*. (1995) menyatakan bahwa meskipun banyak variabel telah diusulkan sebagai oleh para peneliti untuk membantu membentuk teori modal manusia. Porter (1998) dan Harrison (1992) menyatakan bahwa sumber daya modal manusia suatu bangsa tidak hanya keterampilan, tetapi juga etos kerja. Schultz (1971) menyatakan bahwa modal bisa ditampilkan dalam bentuk yang berbeda. Menurutnya jika mungkin mengumpulkan semua bentuk yang berbeda dari modal manusia, itu akan melebihi semua lingkup modal bukan manusia. Peneliti lainnya (Sadie, 1960; Prizel, 1998; Shulman, 2005; Sapford dan Abbott, 2006) memakai peran kesadaran identitas nasional sebagai faktor yang berkontribusi terhadap modal manusia dari suatu bangsa. Ben-Porath (1980) menekankan pentingnya keluarga dalam pengembangan modal manusia. Becker dan Tomes (1986) menekankan faktor peran kesehatan dan karakter kualitas emosional yang berkontribusi bagi modal manusia. Sebagai hasil dari penelitian-penelitian tersebut, indikator-indikator tambahan yang dimiliki modal manusia mencakup: a) kualitas karakter populasi; b) nilai budaya; c) nilai etika; d) keluarga; e) nilai kepercayaan; f)moral populasi; g) kesehatan emosional; h) kesadaran identitas nasional populasi; i) persatuan nasional; j) agama; k) keterampilan sosial; dan l) berbagai keterampilan non-kognitif/kemampuan beradaptasi sosial

Beberapa penelitian mendukung meningkatnya kesejahteraan karena naiknya hasil ekonomi akibat dari investasi modal manusia yang dilakukan. Penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mudah mendapatkan kesempatan kerja dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan yang tingkat pendidikannya lebih rendah (Zhan dan Pandey, 2004; Pandey *et al*. (2006); Dworsky dan Courtney, 2007; Kyoung dan Yoon, 2008).

Penelitian Scott *et al*. (2000) menemukan pentingnya untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang lebih tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi (Pandey *et al*., 2006). Hal tersebut sejalan dengan beberapa penelitian yang mendapatkan bahwa pendidikan yang lebih tinggi akan

berpeluang untuk mendapatkan tingkat pendapatan yang lebih tingggi dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan (Zhan dan Pandey, 2004; London, 2005, 2006: Zunz *et al*., 2005; Jones-DeWeever dan Gault, 2006; Cheng, 2007; Dworsky dan Courtney, 2007; Kyoung dan Yoon, 2008).

Permasalahan Kesempatan Kerja dalam Ekonomi Kesejahteraan

Adam Smith (1776) menganggap bahwa manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Sumber daya alam tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu bagi pertumbuhan ekonomi.

Berbagai sudut pandang ideologis eksis mengenai kesempatan kerja, dari teori ekonomi ortodoks, institusi, radikal atau Marxis, hingga neo-liberal (Gordon, 1972; Simmons *et al*., 2001). Teori ekonomi ortodoks menekankan pentingnya menangani modal manusia melalui pelatihan dan pendidikan (Simmons *et al*., 2001). Sudut pandang institusi menekankan pentingnya mengurangi hambatan pasar kerja bagi kesejahteraan tenaga kerja dan memperluas etika dan kestabilan kesempatan kerja di sektor publik. Pendekatan radikal atau marxis mendalilkan bahwa ketidaksetaraan antara angkatan kerja melekat dalam pembagian antara kaum borjuis dan kaum proletar (Marx, 1848). Dengan demikian, pekerja harus bergabung dalam suatu kekuatan ekonomi dan politik menggulingkan penguasa demi kesejahteraan (Marx, 1848; Simmons *et al*., 2001.). Pendekatan neo-liberal sangat relevan dengan reformasi kesejahteraan di Amerika Serikat saat ini, dimana teori ini menekankan pentingnya memasuki pasar kerja di usia muda (Alon *et al*., 2001). Menurut Sudarsono (1988), bahwa kesempatan kerja dapat diartikan sebagai partisipasi dalam pembangunan, baik dalam arti memikul beban pembangunan maupun dalam tanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan

ataupun di dalam menerima kembali hasil pembangunan tersebut. Sedang Sunindhia dan Widiyanti (1988), menyatakan bahwa salah satu faktor yang pada umumnya menghambat produksi di negara-negara berkembang adalah produktivitas yang rendah disertai dengan kurangnya penggunaan secara penuh terhadap angkatan kerja. Menurut Boediono (1999) model pertumbuhan ekonomi klasik didasari pada dua faktor utama, yaitu pertumbuhan *output* total dan pertumbuhan penduduk. Kedua faktor ini yang menjadi kekuatan dalam meningkatkan pertumbuhan.

Peningkatkan *output* dapat dilakukan dengan meningkatkan keterampilan pekerja dan penerapan sistem pembagian kerja yang tepat berdasarkan keterampilan pekerja. Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu perusahaan atau suatu instansi (Disnakertrans, 2002). Kebijaksanaan negara dalam kesempatan kerja meliputi upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan dan perluasan lapangan kerja di setiap daerah, perkembangan jumlah dan kualitas angkatan kerja yang tersedia agar dapat memanfaatkan seluruh potensi pembangunan di daerah masing-masing

Penelitian Feather dan Davenport (1981) bahwa kesempatan kerja dipengaruhi oleh kesimpulan akan keuntungan atau manfaat lain untuk memanfaatkan kesempatan kerja. Sejalan dengan penelitian Taris *et al*., (1995) yang menemukan bahwa manusia akan lebih berusaha untuk meningkatkan kesempatan kerja jika menemukan manfaat lebih dalam bekerja dibandingkan tidak bekerja. Winefield dan Tiggemann (1994) menemukan bahwa keadaan tidak bekerja akan meningkatkan rasa rendah diri, stres, dan depresi pada faktor psikologi manusia, dan pengalaman yang menyakitkan (Price *et al*., 2002; McKee-Ryan *et al*., 2005; Paul dan Moser, 2009).

Kondisi tidak bekerja secara umum memberikan pengaruh negatif, tetapi tingkat pengaruhnya akan berbeda-beda bagi setiap individu. Hal tersebut bergantung kepada penilaian negatif dan stigma yang diberikan lingkungan sosialnya pada individu yang tidak bekerja (Klein *et al*., 1992; Wanberg dan Marchese, 1994; Taris *et al*., 1995; Wanberg *et al*., 1996). Kebanyakan orang akan memanfaatkan setiap kesempatan kerja yang tersedia. Dibutuhkan kesempatan kerja yang cocok dan secara kualitatif baik.

Ketidaksesuaian antara individu dan karakteristik pekerjaannya dapat menyebabkan kepuasan kerja yang rendah dan penurunan produktivitas (Kristof, 1996). Pengaruh negatif dari ketidaksesuaian tersebut mirip dengan efek negatif dari keadaan tidak bekerja, seperti perasaan depresi dan kepuasan akan hidup yang rendah (Leana dan Feldman, 1995; Feldman dan Leana, 2000; McKee-Ryan *et al*., 2009).

Beberapa penelitian menemukan meskipun kondisi tidak bekerja secara umum memberikan pengaruh negatif, tetapi tingkat pengaruhnya akan berbeda-beda bagi setiap individu. Hal tersebut bergantung kepada penilaian negatif dan stigma yang diberikan lingkungan sosialnya pada individu yang tidak bekerja. Penilaian itu disebabkan apa penyebab individu tidak memanfaatkan kesempatan kerja seperti adanya pemutusan hubungan kerja karena faktor eksternal individu seperti penutupan perusahaan atau faktor internal individu seperti kemampuan, keahlian dan kurangnya pengalaman kerja (Klein *et al*., 1992; Wanberg dan Marchese, 1994; Taris *et al*., 1995; Wanberg *et al*., 1996).

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Frost dan Clayson (1994). Penelitian Fryer dan Pane (1986) menemukan bahwa populasi manusia yang mayoritas tidak bekerja akan meningkatkan ketegangan dan pemikiran negatif, dan akan menurunkan tingkat kebahagiaan, kepuasan akan kehidupan, rasa sukur akan nikmat kehidupan, dan pemikiran positif dibandingkan populasi manusia yang mayoritas bekerja. Edin dan Lein (1997b) menemukan bahwa kebanyakan manusia akan lebih memilih memanfaatkan kesempatan kerja daripada menerima bantuan dari lingkungan sosialnya. Sedangkan individu yang pernah berkerja sebelumnya akan berkeinginan untuk bekerja setelahnya untuk meningkatkan kesejahteraan. Hagen dan Lurie (1995) menyatakan bahwa populasi individu yang menerima bantuan lingkungannya, mempunyai keinginan kuat untuk memanfaatkan kesempatan kerja. Bahkan Opulente dan Mattaini (1997) menemukan bahwa kebanyakan individu menolak untuk dibantu, kebanyakan berkeinginan untuk bekerja, meskipun pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan kemampuannya. Beberapa penelitian menyarankan bahwa jika hal-hal negatif dan penghalang untuk memanfaatkan kesempatan kerja dapat diidentifikasi dan dikurangi bahkan mungkin dihilangkan, maka tidak hanya

keinginan individu akan meningkat tapi juga meningkatkan komitmen individu untuk mempertahankan kesempatan kerja (Dickinson, 1986; Caputo, 1989; Brooks dan Buckner, 1996; Carter *et al*., 1997; Edin dan Lein, 1997; Laabs, 1998; Opulente dan Mattaini, 1997; Stokes dan Brasch, 1997).

Kesempatan kerja pada saat ini dipengaruhi oleh peningkatan persaingan global dan perkembangan berbagai sektor produksi (Howard, 1995; Cooper, 1998). Sebagai hasil dari pengaruh tersebut terjadi perubahan berupa peningkatan tuntutan terhadap kualitas kepribadian individu terkait kesiapannya pada kesempatan kerja (Howard, 1995; Merllie dan Paoli, 2001). Tingginya tuntutan tersebut, pada gilirannya, dapat menyebabkan reaksi stres, kelelahan, dan depresi, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan ketidakmampuan bekerja dan penurunan produktivitas (Cooper, 1998; Schaufeli dan Enzmann, 1998).

Pada penelitian Peter dan Humphreys (2007), mendapatkan perubahan kesempatan kerja menuntut kesiapan individu untuk dapat beradaptasi dan kesanggupan untuk menghadapi perubahan yang terjadi. Hal tersebut menjadi faktor yang sangat penting dalam keluarga dan masyarakat cina. Menurut Schaefer dan Moos (1993); Cooper (1998), menyatakan bahwa hasil akhir dari ketidaksiapan individu dalam menghadapi kesempatan kerja telah diketahui sangat merugikan. Maka langkah sistematis untuk mengatasi hal tersebut sangat diperlukan. Upaya pencegahan dapat diambil secara substansial berdasarkan langkah-langkah konseptual yang terpadu yang berhubungan dengan kesiapan individu terkait tekanan dalam kesempatan kerja.

Menurut Kasl (1996) dan Parkes (1994), menyimpulkan bahwa karakteristik pribadi yang stabil yang terhubung dengan variabel kesempatan kerja adalah penting. Tidak cukup untuk mengetahui apa pengaruh karakteristik pribadi, tetapi juga penting mengetahui bagaimana karakteristik pribadi ini dipengaruhi. Efek aditif menyiratkan bahwa kesempatan kerja dan karakteristik pribadi secara langsung berhubungan. Efek *moderating* menyiratkan bahwa kategori individu tertentu lebih sensitif terhadap pengaruh kesempatan kerja dari yang lain. Besarnya atau arah hubungan antara kesempatan kerja dan hasilnya tergantung pada tingkat karakteristik pribadi (Parkes, 1994; Gaillard, 1996). Menurut Hackman dan Oldham (1980), menyatakan bahwa berkenaan dengan motivasi

bagi kesempatan kerja, karakteristik pribadi menjadi faktor yang sangat menjanjikan. Karakteristik pribadi yang stabil ini mengacu pada kebutuhan untuk belajar dan mengembangkan diri. Individu dengan nilai yang tinggi lebih mampu memposisikan dirinya untuk mengambil keuntungan dari kesempatan kerja yang ditawarkan kepada mereka daripada individu dengan nilai rendah. Terdapat beberapa penelitian mengenai efek aditif atau efek *moderating* karakteristik pribadi (Hackman dan Oldham, 1980; Fried dan Ferris, 1987). Efek aditif dari karakteristik pribadi menjadikan individu yang ingin belajar dan mengembangkan diri dalam hal apapun, sangat termotivasi untuk bekerja dan melakukan dengan baik (Janssen *et al*., 1996). Penelitian lain melaporkan efek *moderating* dari karateristik pribadi, antara karakteristik tugas dan motivasi dalam kesempatan kerja (Algera, 1990; Landeweerd *et al*., 1995; Janssen *et al*., 1999).

Kepribadian individu (sering diistilahkan dengan trait kepribadian) adalah prekursor relatif stabil dari perilaku individu, yang mendasari pola berkelanjutan pikiran, perasaan, dan tindakan (Hogan, 1991; McCrae dan Costa, 1997). Karakteristik kepribadian individu berhubungan dengan hasil kesempatan kerja dan pengembangannya. Hal tersebut telah melahirkan pengujian kepribadian berkaitan dengan kesempatan kerja. Sebagian besar disebabkan konsensus pada taksonomi dalam klasifikasi kepribadian (Mount dan Barrick, 1995). Terdapat beberapa penelitian kepribadian telah mencapai konsensus bahwa ada lima faktor dari karakteristik kepribadian, disebut sebagai "Lima Besar", dan dan cukup untuk menggambarkan dasar dimensi kepribadian normal. Hal tersebut terkait dengan banyaknya penelitian yang menyimpulkan hubungan empiris antara lima besar karakteristik kepribadian dengan ukuran kinerja individu dan keberhasilan dalam kesempatan kerja (Barrick dan Mount, 1991;. Tett *et al*., 1991).

Lima besar kepribadian mengacu kepada lima kepribadian yang luas dan dapat digunakan untuk merangkum keseluruhan kepribadian individu. Lima besar kepribadian bisa menggambarkan aspek paling penting dari kepribadian (Heller *et al*., 2002). Pendekatan yang digunakan adalah teori trait. Teori trait merupakan sebuah model untuk mengidentifikasi trait-trait dasar yang diperlukan untuk menggambarkan suatu kepribadian. Trait kepribadian didefinisikan sebagai suatu

dimensi yang menetap dari karakteristik kepribadian, hal tersebut yang membedakan individu dengan individu yang lain (Fieldman, 1993).

Feist dan Fesit (1998) mendefinisikan kepribadian sebagai sebuah pola yang relatif menetap, trait, disposisi atau karakteristik didalam individu yang memberikan beberapa ukuran yang konsisten tentang perilaku. Menurut Larsen dan Buss (2002) kepribadian merupakan sekumpulan trait psikologis dan mekanisme didalam individu yang diorganisasikan, relatif bertahan yang mempengaruhi interaksi dan adaptasi individu didalam lingkungan (meliputi lingkungan intrafisik, fisik dan lingkungan sosial). Sedang Barrick dan Ryan (2003), mendefinisikan kepribadian sebagai suatu organisasi dinamik dalam diri individu dan merupakan sistem psikopysikal yang menentukan penyesuaian diri individu secara unik terhadap lingkungan.

Trait kepribadian dianggap menjadi variabel kunci dalam memprediksi kualitas individu dalam kesempatan kerja (Schneider dan Bowen, 1985). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa individu dengan nilai trait kepribadian yang lebih tinggi akan melakukan peran mereka dengan lebih andal dan lebih efektif (Cran, 1994). Sementara Liu dan Chen (2006), menemukan bahwa trait kepribadian (yaitu kenuranian, neurotisme, kebersetujuan, dan kebutuhan untuk beraktivitas) secara signifikan berhubungan dengan orientasi individu terkait kesempatan kerja.

Indikator pengukuran lima besar kepribadian yang menggunakan trait sebagai item, dikembangkan oleh Paul T. Costa dan Robert R. McCrae (McCrae dan Costa, 1985; 1987; 1989; 1992; 1997). Faktor-faktor didalam lima besar kepribadian menurut Costa dan McCrae, meliputi: 1) Ekstraversi (diantaranya suka bersosialisasi, suka berteman, tegas, aktif bicara dan ambisius); 2) Kebersetujuan (di antaranya empatik, baik hati dan kooperatif); 3) Neurotisme (di antaranya bersikap cemas, depresi, emosional dan gugup); 4) Kenuranian (di antaranya dapat diandalkan, terpercaya, hati-hati dan seksama); dan 5) Keterbukaan pengalaman (di antaranya imajinatif, keingintahuan, asli dan berwawasan luas).

1) Ekstraversi

Ekstraversi dikaitkan dengan ketegasan dan berbeda terbalik dengan introversi (Digman, 1990). Arnold *et al*. (2006) menyatakan bahwa ekstraversi merupakan kecenderungan untuk percaya diri dan aktif. Ekstrovert menunjukkan emosi positif, intensitas dan frekuensi yang tinggi dari interaksi personal.

Ekstraversi berhubungan positif dengan kinerja kesempatan kerja (Hurley, 1998). individu ekstrovert lebih terlibat dalam berbagai kegiatan dan mencari lingkungan kerja yang menghargai pujian dan pengaruh di tempat kerja, di mana mereka didorong oleh imbalan yang sepadan dengan kinerja mereka (Furnham *et al*., 1999). Ekstraversi biasanya dilihat sebagai kualitas yang positif, dan terkait dengan respon positif untuk sosialisasi umum dan kebahagiaan (Heller *et al*., 2002). Ekstrovert cenderung menggunakan lingkungan kerja mereka dalam rangka untuk memenuhi aspirasi mereka dan mengekspresikan bakat mereka (Cooper, 2003). Ekstrovert memiliki gaji yang lebih tinggi, promosi lebih sering, dan lebih puas dengan karir mereka (Heller *et al*., 2002). Varca (2004) menganjurkan bahwa kepribadian dapat digunakan untuk menyimpulkan perilaku, seperti mekanisme sikap; individu ekstrovert mendahulukan kualitas layanan, dan individu ekstrovert bersedia menghabiskan lebih banyak waktu pada kesempaatan kerja. Penelitian terbaru menyimpulkan kegugupan berhubungan negatif terhadap kinerja dan motif. Jika pekerja bersifat ekstrovert, akan memiliki pengaruh yang sangat besar pada kinerja mereka (Cooper, 2003).

2) Kebersetujuan

Individu kerbersetujuan digambarkan sebagai sopan, fleksibel, terpercaya, baik hati, kooperatif, pemaaf, toleran, dan baik hati (Cooper, 2003). Seibert dan Kraimer (2001) menyebut faktor kebersetujuan sebagai kumpulan mulai dari berhati lembut, baik hati, dan menghindari untuk bersikap sinis, kasar, dan berkecurigaan. Individu kebersetujuan kurang mampu untuk mengelak disalahkan untuk kinerja yang buruk dan mengambil kredit untuk kinerja yang baik.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa karyawan kebersetujuan rendah lebih banyak melakukan kesalahan kerja (Cuttler dan Muchinsky, 2006).

3) Neurotisme

Neurotisme dikaitkan dengan ketegangan, mudah marah dan tingkat kecemasan yang tinggi. Individu dengan nilai neurotisisme tinggi lebih cepat puas dan murung (John dan Srivastava, 1999). Menurut Heller *et al*. (2002), orang yang lebih neurotik lebih memperhatikan peristiwa negatif dan akhirnya tampak terlihat mengalaminya lebih banyak dari yang lain. Neurotisme dikaitkan dengan kesempatan kerja yang berorientasi pada detail, meski umumnya dipandang sebagai trait negatif dan nilai neurotisisme tinggi digunakan untuk memprediksi ketidakbahagiaan pada kesempatan kerja (Seibert dan Kraimer, 2001).

4) Kenuranian

Kenuranian menunjukkan tingkat keterkaitan individu pada organisasi, ketekunan, dan motivasi untuk mencapai tujuan. Untuk memprediksi prestasi kerja, kenuranian dianggap sebagai trait yang paling penting dan penelitian terkait kesempatan kerja menemukan orang-orang yang mempunyai nurani tinggi akan bekerja lebih keras dan menghasilkan lebih banyak menyelesaikan tugas (Heller *et al*., 2002). Barrick dan Mount (1991) menemukan bahwa kenuranian terkait dengan kinerja kesempatan kerja. Hal yang senada, disampaikan Beth dan Sanders (2008), dalam trait lima besar kepribadian, kenuranian secara berkesinambungan terkait dengan ukuran kinerja kerja.

5) Keterbukaan pengalaman

Keterbukaan pengalaman digambarkan sebagai imajinatif, tidak konvensional, rasa penasaran, berwawasan luas, dan berbudaya (Clarke dan Robertson, 2005). Menurut Barrick dan Mount (1991), keterbukaan pengalaman memiliki hubungan kuat dengan kecerdasan. Individu dengan nilai tinggi pada trait ini memiliki intelektualitas untuk hal baru, sementara mereka dengan nilai rendah cenderung tertutup untuk pengalaman baru (Digman, 1990). Keterbukaan pengalaman berbasis tugas, dan individu imajinatif selalu mencoba mencari metode baru untuk menyelesaikan tugas (Stewart dan Nandkeolyar, 2006), sehingga memperkuat energi bekerja (Lounsbury *et al*., 2003).

Permasalahan Hubungan Sosial Demografi Terhadap Modal Sosial

Modal manusia dan modal fisik adalah karakteristik milik individu, modal sosial adalah karakteristik berkaitan dengan publik yang diikat hubungan dalam suatu jaringan. Putnam (2000) menyatakan modal sosial memiliki dua sisi yaitu sisi individu maupun sisi kolektif yang memberikan gambaran individu dan gambaran publik. Sisi individu membentuk karakteristik yang bermanfaat bagi individu itu, sedangkan modal sosial juga memiliki 'eksternalitas' yang mempengaruhi masyarakat luas, karenanya tidak semua penyebab dan manfaat dari hubungan sosial disebabkan oleh satu individu. Hubungan sosial berperan penting untuk aturan perilaku yang dipertahankan. Dalam jaringan melibatkan kewajiban timbal balik. Hubungan yang terjadi bukan disebabkan hanya ketertarikan melakukan kontak semata, Jaringan masyarakat menganut suatu aturan sebab akibat. Suatu perbuatan dilakukan untuk mengharapkan kemungkinan imbal baliknya.

Ada perbedaan pendapat untuk mendefinisikan modal sosial dalam berbagai bentuknya. Perwujudan operasional modal sosial telah bervariasi hingga tidak jelas apakah konstruk ini bahkan dapat diukur. Terlihat ketika modal sosial telah dibagi menjadi modal sosial primer dan modal sosial sekunder (Alfred dan Nanton, 2009). Modal sosial primer dikaitkan dengan keluarga, lembaga keagamaan, dan rekan/teman, sementara modal sosial sekunder berhubungan dengan dukungan terhadap kelompok-kelompok, tempat kerja, dan program pembelajaran. Sumber-sumber modal sosial primer sering dianggap permanen dan lebih memiliki pengaruh kuat dari pada sumber modal sosial sekunder (Harpham, 2008).

Ada resiko tersembunyi yang terkait dengan modal sosial. Misalnya, mereka yang berkuasa mungkin mengabaikan, membuat definisi berlebihan yang menguntungkan kelompoknya, membatasi kebebasan individu, atau berkontribusi pada gerakan di bawah norma (Alfred, 2009; Bedolla, 2007; Portes, 1998). Beberapa definisi dikritik karena kurangnya perhatian terhadap ketimpangan struktural berdasarkan status sosial ekonomi, jenis kelamin, dan ras (Alfred, 2009; Gidgenil dan O'Neill, 2006; Lowndes, 2000). Norris dan Inglehart (2006)

berpendapat bahwa ketidaksetaraan struktural ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam modal sosial, seperti pengetahuan dan uang. Kelompok marjinal berusaha memanfaatkan modal sosial dalam berbagai cara daripada kelompok dominan. Terbukti bahwa perempuan dan kaum muda lebih memilih jaringan informal, lokal, dan egaliter lebih dari jenis lain dari jaringan yang ada (Lowndes, 2000, 2006).

Selanjutnya, organisasi keagamaan yang ditemukan menjadi pusat modal sosial di masyarakat Amerika Afrika (Putnam, 2000). Studi telah menemukan bahwa negara-negara dengan keragaman yang lebih ras/etnis cenderung memiliki tingkat yang lebih rendah dari modal sosial dari negara- negara dengan homogenitas rasial (Putnam, 2000; Hero, 2003). Keragaman yang tinggi terkait dengan hasil pengaruh sosial lebih buruk, namun hal tersebut kurang berakibat bagi kaum minoritas (Hero, 2007). Kurangnya keanekaragaman jutru dikaitkan dengan hasil yang relatif lebih buruk bagi minoritas. Bahkan sub- kelompok dalam komunitas yang sama mungkin mengalami pengaruh modal sosial berbeda sebagai hasil dari ras, jenis kelamin, atau usia (Whitley, 2008). Oleh karena itu, mungkin perlu untuk mengukur modal sosial secara berbeda, tergantung pada perbedaan populasi. Bukti menunjukkan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah secara historis mengandalkan modal sosial ketika jenis modal yang lain kurang (Edin dan Lein, 1997). Namun, menyalahkan individu dikaitkan dengan modal sosial sangat berbahaya bila diterapkan pada program- program subsisi pemerintah. Kesalahan dapat diarahkan pada penerima program bukan pada sumber-sumber lain dari kelemahan ekonomi, seperti sumber daya ekonomi yang tidak mencukupi misalnya kurangnya lapangan pekerjaan yang memadai (Jennings, 2007).

Beberapa peneliti mengkategorikan modal sosial sebagai modal sosial struktural dan modal sosial kognitif. Modal sosial struktural mengacu pada tindakan yang diamati, sedangkan modal sosial kognitif mengacu pada pikiran dan nilai subjektifitas (Harpham, 2008). Peneliti lainnya mendefinisikan modal sosial sebagai cakupan dari dukungan sosial, *social leverage* (informasi yang berkaitan dengan akses ke pekerjaan, perawatan anak, dan sebagainya), kontrol sosial informal (kemampuan anggota masyarakat untuk menjaga ketertiban di

masyarakat), dan partisipasi dalam organisasi lingkungan untuk mengatasi masalah lingkungan (Carpiano, 2008).

Teori modal sosial telah dikritik karena banyaknya penafasiran mengenai definisi istilah, serta untuk kesulitan yang terkait pengukuran konstruk (Jennings, 2007). Putnam (2000) menciptakan indeks modal sosial yang lebih luas, yaitu: 1) kehidupan organisasi masyarakat (misalnya, bertugas di komite); 2) keterlibatan dalam urusan publik (misalnya, menentukan pilihan); 3) sebagai sukarelawan dalam program masyarakat; 4) sosialisasi informal (misalnya, mengunjungi teman-teman); dan 5) tingkat kepercayaan antar-individu (*trust*). Namun, banyak peneliti telah mengukur modal sosial menggunakan beberapa konstruksi ini, tetapi tidak semua. Selain itu, orang lain berbeda dalam jenis item yang dipilih untuk mengukur konstruk ini. Selain itu, ada ketidaksepakatan tentang apakah modal sosial harus diukur sebagai konstruk makro atau sebagai konstruk yang lebih mikro (Halpern, 2005; Smith dan Kulynych, 2007).

Model & Landasan Teori Blum

Landasan teori yang dijadikan sebagai acuan adalah teori Blum, atau yang dikenal dengan teori Blum (1974), ada 4 faktor yang dijadikan sebagai derajat kesehatan diantaranya faktor perilaku, faktor pelayanan kesehatan, faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor-faktor tersebut memiliki peranan yang sangat besar dalam meningkatkan status kesehatan baik individu maupun masyarakat.

Faktor pertama yaitu perilaku, perilaku seseorang memiliki peranan penting dalam menjaga status kesehatan, karena kesadaran dalam pribadi seseorang harus dimunculkan untuk mencapai budaya hidup bersih dan sehat sehingga terhindar dari berbagai penyakit seperti diare. Faktor kedua yaitu lingkungan, salah satu yang menjadi sumber berkembangnya suatu penyakit yaitu karena kondisi sanitasi lingkungan yang buruk dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat kita. Penumpukan sampah yang tidak dikelola dengan benar dapat menjadi penyebab.

Tempat pelayanan kesehatan sendiri memiliki beberapa program terkait dengan pemeliharaan sanitasi lingkungan untuk mencegah terjadinya berbagai penyakit seperti diare, namun masih terkendala dengan jumlah tenaga kesehatan lingkungan yang masih kurang memadai. Faktor ketiga yaitu pelayanan kesehatan yang menjadi penunjang dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terbaik sangat dibutuhkan masyarakat untuk mencegah dan menurunkan tingkat kematian yang disebabkan karena diare. Faktor keempat yaitu genetik, yang perlu

F. Latihan

7. Sebutkan alasannya mengapa Teori Blum dapat menjadi salah satu solusi perkembangan ekonomi kesejahteraan ?
8. Apakah yang mendominasi Teori Modal Manusia dalam Ekonomi Kesejahteraan ?
9. Jelaskan sisi permasalahan Ekonomi Kesejahteraan hal tersebut!

G. Kunci Jawaban

7. Landasan teori dan acuan teori Blum, atau yang dikenal dengan teori Blum (1974), ada 4 faktor yang dijadikan sebagai derajat kesehatan diantaranya faktor perilaku, faktor pelayanan kesehatan, faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor-faktor tersebut memiliki peranan yang sangat besar dalam meningkatkan status kesehatan baik individu maupun masyarakat. Beberapa ahli menganggap kesehatan menjadi komponen modal manusia, sementara yang lainnya tidak. Telah ditemukan bahwa kesehatan, pendidikan, dan pengembangan intelektual semua berinteraksi satu sama lain (Bryant, 1990).
8. Menurut Todaro dan Smith (2006), modal manusia dalam terminologi

ekonomi sering digunakan untuk bidang pendidikan, kesehatan dan berbagai kapasitas manusia lainnya yang ketika bertambah dapat meningkatkan produktivitas. Pendidikan memainkan peran kunci dalam hal kemampuan suatu perekonomian untuk mengadopsi teknologi modern dan dalam membengun kapasitasnya bagi pembangunan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. diperhatikan yaitu bagaimana cara meningkatkan kualitas generasi muda mendatang yang memiliki kompetensi dan kreatifitas tinggi. Mencapai tujuan tersebut, perlu diperhatikan status gizi Balita yang dapat meningkatkan perkembangan otak anak.

9. Pada kenyataannya di Indonesia masih banyak ditemukan kasus gizi buruk yang mengakibatkan risiko sakit pada anak. Pemeriksaan tumbuh kembang anak harus dilakukan secara rutin dan mendeteksi dini status gizi agar menghindari kasus gizi buruk maupun obesitas terjadi, hal ini memperlihatkan bahwa perilaku manusia mempunyai konstribusi yang besar (Notoatmodjo, 2003).

H. Daftar Pustaka

https://www.researchgate.net/publication/332755020_Pengukuran_Modal_Manusia_Suatu_Studi_Literatur

Boediono, Dr., Ekonomi Internasional dan Nasional, BPFE, Yogyakarta, 2014 diakses 9 September 2020

Halwani, Hendra. Dra. M.H., dan Tjiptoharijanto, Prijono, H. Dr., Perdagangan Internasional, Pendekatan Ekonomi Kesejahteraan Makro & Mikro, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.

Tambunan, Tulus T.H., Dr., Perekonomian dan Ekonomi Kesejahteraan Indonesia,, Teori dan temuan Empiris, Ghalia Indonesia, 2017

MODUL EKONOMI KESEJAHTERAAN

(KAK 357)

MODUL 6

PENGERTIAN EKONOMI DALAM KESEJAHTERAAN

(TEORI & METODE BLUM)

DISUSUN OLEH

Erlina Puspitaloka Mahadewi, SE, MM, MBL (5661)

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2022

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari Modul ini, diharapkan Mahasiswa mampu :

1. Memahami dan mempelajari Teori Blum dalam Ekonomi Kesejahteraan
2. Menguraikan konsep dasar Model Blum di Ekonomi Kesejahteraan
3. Mengidentifikasi pemikiran mata kuliah Ekonomi Kesejahteraan dalam konteks pemecahan permasalahannya

B. Uraian dan Contoh

1. Visi dan Misi UEU

Universitas Esa Unggul mempunyai visi menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Universitas Esa Unggul menetapkan misi-misi sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan
b. Menciptakan suasana akademik yang kondusif
c. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan

2. **Topik Perkuliahan :** Teori Modal Ekonomi dalam Ekonomi Kesejahteraan
   Sub Topik : Implementasi Teori Blum

C. Uraian

6.1. Penggunaan Teori Blum dengan kejadian Diare

Berdasarkan dengan model Blum yang digunakan sebagai acuan, analisis terhadap hubungan pola asuh ibu, berat lahir serta sanitasi lingkungan dengan kejadian diare juga mengacu pada hasil-hasil penelitian terdahulu

yang berkaitan dengan variabel-variabel pada model Blum seperti diuraikan di bawah ini.

6.2. Perilaku (Pola Asuh Ibu)

Berdasarkan beberapa hasil penelitian faktor yang menyebabkan kejadian diare dilaporkan berkaitan dengan variabel pola asuh ibu diantaranya yaitu pengolahan air minum, kebiasaan mencuci tangan, pemberian ASI Eksklusif dan pemberian imunisasi campak.

6.3. Pengolahan Air Minum

Air minum yaitu air yang dapat dikonsumsi langsung baik melalui proses pengolahan maupun tanpa melalui penolahan yang memenuhi syarat (Kep.Men.Kes RI No. 907/Menkes/SK/VII/2002). Air yang untuk diminum, baiknya perlu diolah terlebih dahulu dan wadah air yang digunakanpun harus bersih. Air yang tanpa pengolahan dengan standar pengelolaan air minum rumah tangga (PAM-RT) tentu dapat memunculkan berbagai penyakit (Dirjen P2PL, 2008).

Salah satu bentuk pengolahan air minum rumah tangga yang sederhana dan sering digunakan adalah dengan cara memasak. Memasak merupakan proses mematikan mikroorganisme (virus, bakteri, spora bakteri) penyebab penyakit dengan cara pemanasan (Depkes RI, 2008).

6.3. Kebiasaan mencuci tangan pakai sabun

Mencuci tangan merupakan suatu kebiasaan seseorang yang berkaitan langsung dengan kebersihan diri dalam penyebaran dan

penularan kuman diare. Kebiasaan yang dapat mengurangi penularan kuman diare yaitu mencuci tangan dengan menggunakan sabun baik sesudah buang air besar, sebelum menyuapi makan bayi dan anak (Depkes, 2005).

Hal ini didukung oleh hasil penelitian Riki (2013), yang menyatakan terdapat hubungan antara mencuci tangan sebelum kegiatan menyuapi anak makan dengan kasus diare pada bayi dimana nilai p= 0.015**.** Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan Anup (2012), yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah melakukan kegiatan (menyiapkan makanan pada saat makan, menyuapi anak selesai bekerja, dan selesai memandikan anak) dimana hanya 2% anak-anak ditemukan terinfeksi diare yang orang tuanya mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah melakukan kegiatan sedangkan 26 (20,5%) anak-anak ditemukan terinfeksi diare karena orang tua tidak mencuci tangan dengan sabun sebelum/sesudah melakukan kegiatan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Wahyuni (2014), yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara mencuci tangan dengan air bersih dan sabun dengan kejadian diare.

6.4. Pemberian ASI Eksklusif

Menurut WHO (2006), definisi ASI eksklusif adalah bayi hanya menerima ASI dari ibu atau pengasuh yang diminta memberikan ASI dari

ibu, tanpa penambahan cairan atau makanan padat lain, kecuali sirup yang berisi vitamin, suplemen mineral atau obat. Pemberian ASI eksklusif menurut Depkes (2003) adalah pemberian ASI saja tanpa diberi makanan atau minuman lain sejak lahir sampai usia 6 bulan, kecuali pemberian obat dan vitamin. Pemberian ASI eksklusif pada bayi adalah sebagai berikut setelah bayi dilahirkan segera diberikan ASI (dalam waktu ½-1 jam), memberikan kolostrum, tidak memberikan makanan atau minuman (seperti air kelapa, air tajin, air teh, madu, pisang) kepada bayi sebelum diberikan ASI, ASI diberikan sesuai kemauan bayi tanpa perlu dibatasi waktu dan frekuensi (pagi, siang dan malam hari) dan memberikan ASI saja sampai bayi berusia 6 bulan.

Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 33 Tahun 2012 bahwa ASI eksklusif yaitu ASI yang diberikan untuk bayi sejak baru lahir hingga usia 6 (enam) bulan, tanpa adanya minuman dan makanan tambahan. Menurut depkes (2005), ASI dapat memberikan perlindungan kepada bayi terhadap kuman diare yang diberikan penuh selama 6 bulan, sedangkan pada bayi yang tidak diberikan ASI untuk menderita diare terdapat risiko yang lebih besar dan hal tersebut dapat menyebabkan kemungkinan dehidrasi berat pada bayi. Bayi baru lahir yang diberikan ASI secara penuh tanpa disertai dengan susu formula memiliki tingkat imunitas 4 kali lebih besar terhadap penularan kuman diare.

Hal ini didukung pula dengan hasil penelitian Karki (2010), bahwa Balita yang mengkonsumsi susu formula selama 6 bulan di awal kelahiran memiliki 26,32% terkena diare dengan risiko terkena kejadia diare 1,95

kali dibandingkan dengan Balita yang mengkonsumsi ASI eksklusif, Sedangkan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Wahyuni, (2014), menyatakan tidak terdapat hubungan yang bermakna antara memberi bayi ASI eksklusif dengan kejadian diare pada Balita.

6.5. Pemberian imunisasi

Perawatan dasar terkait dengan aktivitas mencegah bayi jangan sakit, pencegahan dimaksudkan dengan memberi bayi imunisasi. Oleh sebab itu, dibutuhkan kemauan dan kemampuan ibu membawa bayi diimunisasi di posyandu atau tempat pelayanan kesehatan lainnya. Bayi usia 2 bulan atau lebih tapi kurang dari 14 bulan dan belum imunisasi, dapat diberi imunisasi dengan urutan dan interval pemberian serupa dengan bayi yang diberi imunisasi dengan jadwal tepat.

Imunisasi merupakan salah satu program pemerintah yang dijalankan untuk dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian (*morbiditas* dan *mortalitas*) akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi campak adalah imunisasi yang berkaitan erat dengan kejadiaan diare pada Balita. Penyakit diare akan diperparah oleh adanya penurunan kekebalan tubuh penderita, karena virus campak menyerang sistem mukosa tubuh dan dapat menyerang saluran cerna (Depkes RI, 2007).

Penyakit diare sering muncul dengan disetai campak, diare juga dapat dicegah dengan imunisasi campak yang diberikan pada anak pada

saat berumur 9 bulan hingga berumur 1 tahun. Anak harus diimunisasi terhadap campak secepat mungkin setelah usia 9 bulan. Diare dan disentri sering terjadi dan berakibat berat pada anak-anak yang sedang menderita campak dalam 4 mingggu terakhir. Hal ini sebagai akibat dari penurunan kekebalan tubuh penderita. Selain imunisasi campak, anak juga harus mendapat imunisasi dasar lainnya seperti imunisasi BCG untuk mencegah penyakit TBC, imunisasi DPT untuk mencegah penyakit diptheri, pertusis dan tetanus, serta imunisasi polio yang berguna dalam pencegahan penyakit polio.

Hasil penelitian Efrida (2001) menyatakan terdapat hubungan yang signifikan antara status imunisasi dengan kasus diare. Hal ini menyatakan bahwa Balita yang tidak melakukan imunisasi memiliki kemungkinan lebih besar untuk menderita diare. Sedangkan berdasarkan penelitian oleh Wahyuni, (2014), tidak terdapat hubungan yang bermakna antara status imunisasi dengan kejadian diare pada Balita.

Lingkungan (Ketersediaan Jamban Keluarga)

Kebiasaan buang air besar yang kurang sehat yang sering dilakukan masyarakat dapat meningkatkan risiko kejadian diare pada keluarga, hal tersebut disebabkan karena tidak adanya fasilitas jamban yang tersedia. Masalah *personal hygiene* pada masyarakat ditunjang juga dengan kondisi kebiasaan tidak sehat yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan sekitar terutama di daerah dengan permasalahan air, dengan demikian ketersedian jamban umum dapat menurunkan risiko kejadian diare pada keluarga (Simatupang, 2004).

Penelitian yang dilakukan Ratnawati (2006), menunjukkan bahwa risiko Balita terkena diare akut lebih besar pada penggunaan jamban dan penggunaan sarana air bersih yang tidak memenuhi syarat kesehatan dibandingkan dengan yang menggunakan jamban dan penggunaan sarana air bersih yang memenuhi syarat. Sedangkan, penelitian oleh Zubir (2006) yang berkaitan tentang faktor risiko kejadian diare pada anak 0-35 bulan menunjukkan bahwa jenis pembuangan tinja yang memenuhi syarat mempengaruhi kejadian diare pada anak dan penelitian oleh Wahyuni, (2014) juga menyatakan terdapat hubungan yang bermakna antara sanitasi/jamban dengan kejadian diare pada Balita.

Sarana air bersih

Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari akan menjadi air minum setelah dimasak terlebih dahulu. Sebagai batasannya, air bersih adalah air yang memenuhi persyaratan bagi sistem penyediaan air minum. Adapun persayaratan yang dimaksud adalah persyaratandari segi kualitas air yang meliputi kualitas fisik, kimia, biologi dan radiologis, sehingga apabila dikonsumsi tidak menimbulkan efek samping (Kep.Men.Kes RI No. 416/Menkes/Per/IX/1990).Sarana air bersih adalah banguan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menyediakan dan mendistribusikan air tersebut kepada masyarakat. Sarana air bersih harus memenuhi persyaratan kesehatan agar tidak mengalami pencemaran sehingga dapat diperoleh kualitas air yang baik sesuai dengan standar kesehatan.

Penelitian Dewi Ratnawati dkk (tahun 2006) di Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta dengan desain penelitian *case control*, menunjukkan bahwa penggunaan sarana air bersih yang tidak memenuhi syarat sanitasi akan meningkatkan risiko 1,310 kali lebih besar Balitanya untuk terkena diare akut. dibandingkan dengan penggunaan sarana air bersih yang memenuhi syarat namun secara statistik tidak bermakna.

Hasil penelitian Septian Bumulo (2012) menunjukkan bahwa responden yang sarana penyediaan air bersih tidak memenuhi syarat dan tidak diare yaitu sebanyak 52,7%, di samping itu diperoleh sebanyak 29,4% yang sarana penyediaan air bersih memenuhi syarat namun menyebabkan diare. Hal ini dikarenakan sebagian responden masih ada yang menampung air untuk keperluan minum dan masak dalam wadah terbuka.

Pengolahan sampah

Sampah merupakan sumber penyakit dan tempat berkembang biaknya vector penyakit seperti lalat, nyamuk, tikus, kecoa dsb. Selain itu sampah dapat mencemari tanah dan menimbulkan gangguan kenyamanan dan estetika seperti bau yang tidak sedap dan pemandangan yang enak dilihat. Oleh karena itu pengelolaan sampah sangat penting, untuk mencegah penularan penyakit tersebut. Tempat sampah harus disediakan, sampah harus dikumpulkan setiap hari dan dibuang ke tempat penampungan sementara. Bila tidak terjangkau oleh pelayanan pembuangan sementara.

Pengelolaan sampah sebagai bahan pencemar, memang dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun demikian, bila masih memungkinkan, upaya pencegahan jauh lebih baik dan efektif untuk dilaksanakan. Upaya pencegahan dapat dilakukan, bila kita semua memahami dampak negatif membuang sampah sembarangan, tidak hanya terhadap lingkungan tetapi juga terhadap kesehatan manusia (Tobing, 2005).

Faktor karakteristik responden terkait dengan kejadian diare

Karakteristik Ibu

Beberapa hasil penelitian faktor yang menyebabkan kejadian diare dilaporkan hasilnya yang berkaitan dengan variabel usia ibu, pendidikan dan pekerjaan

Umur

Adanya perbedaan dalam hasil penelitian serta dapat membantu untuk menentukan hubungan sebab akibat dalam hal kondisi cidera dan penyakit lainnya, hal tersebut dibawa karena sifat manusia. Umur menjadi variabel kuat yang digunakan dalam memprediksikan perbedaan kondisi,

hal penyakit, status kesehatan. Semakin tinggi pematangan seseorang tentu akan berbanding lurus dalam hal belajar, bertindak, berfikir dan tingkat kepercayaan orang (Widyastuti, 2005).

Hasil penelitian yang dilakukan Anjar (2009) menyatakan tidak ada hubungan antara kejadian diare dengan usia ibu, sedangkan penelitian lain yang dilakukan Kasman (2003), juga menyatakan bahwa antara umur ibu

dengan masalah diare pada bayi tidak memiliki hubungan yang signifikan.

Pendidikan

Jenjang pendidikan seseorang tentunya tidak dapat dilepas dalam menentukan status kesehatan masyarakat. Pemberian penyuluhan maupun konseling tentang kesehatan menjadi sulit dipahami apabila pendidikan masyarakat yang masih rendah seperti contoh masyarakat sulit diberi tahu tentang pentingnya menjaga sanitasi lingkungan sekitar dan *personal higyene* untuk mencegah terjadinya penyakit menular seperti diare, hal tersebut dapat menyebabkan rasa ketidakpedulian dalam upaya pencegahan penyakit menular (Sander, 2005).

Menurut Simatupang (2004), beberapa penyebab kejadian diare di Indonesia diantaranya yaitu karena faktor pendidikan, keadaan gizi, keadaan ekonomi dan perilaku masyarakat dapat mempengaruhi kejadian penyakit diare sehingga dapat meningkatkan tingginya angka kesakitan dan kematian. Penelitian Hayati (2005), juga menyatakan adanya hubungan tingkat pendidikan ibu dengan kejadian diare pada bayi, dimana semakin rendah tingkat pendidikan ibu semakin tinggi risiko kejadian diare pada bayi (p=0.00).

Pekerjaan

Jenis pekerjaan seseorang dapat menunjukkan status sosial, status ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan dan masalah kesehatan. Seseorang yang berstatus bekerja sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta memiliki pendidikan yang lebih tinggi apabila dibandingkan orang

yang bekerja hanya sebagai petani atau buruh. Akan tetapi ibu yang bekerja rela anaknya diasuh oleh orang lain, sehingga memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terpapar dengan penyakit diare (Simatupang, 2004). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hayati (2005), yang menunjukkan adanya hubungan bermakna antara status pekerjaan ibu, tempat ibu bekerja dan waktu bekerja ibu di luar rumah dengan kejadian diare pada anak.

Pengetahuan

Pengetahuan ibu sangat berpengaruh dalam terjadinya diare pada anak Balita. Bila pengetahuan ibu baik, ibu akan mengetahui cara merawat anak yang menderita diare di rumah dan berobat atau merujuk ke sarana kesehatan. Pengetahuan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang. Pengetahuan berpengaruh terhadap praktik, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui perantara sikap. Praktik seseorang dibentuk oleh interaksi individu dengan lingkungan, khususnya yang menyangkut pengetahuan dan sikap terhadap objek, sedangkan sikap merupakan salah satu faktor predisposisi yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Sikap merupakan perasaan seseorang untuk mendukung atau tidak mendukung terhadap objek tertentu (Rosiji, 2009).

Pengetahuan ibu mengenai diare meliputi pengertian, penyebab, gejala klinis, pencegahan, dan cara penanganan yang tepat dari penyakit diare pada Balita berperan penting dalam penurunan angka kematian dan pencegahan kejadian diare serta malnutrisi pada Balita. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaporkan oleh Pujiastuti (2006) di Karanganyar didapati

adanya hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan sikap ibu terhadap penanganan diare pada Balita (Rosiji, 2009).

Persepsi

Persepsi setiap orang terhadap suatu objek akan berbeda-beda. Oleh Karena itu persepsi memiliki sifat subjektif. Persepsi yang dibentuk seseorang dipengaruhi oleh pikiran dan lingkungan sekitarnya (Setiadi, 2003).

Aspek persepsi berperan penting dalam perilaku seseorang. Persepsi berhubungan dengan bagaimana individu menanggapi individu lain. Karakteristik penilai dan orang yang dinilai menunjukkan kompleksitas persepsi sosial. Seseorang harus menyadari bahwa persepsi mereka terhadap seseorang sangat dipengaruhi oleh karakteristik mereka sendiri dan karakteristik orang lain (Luthans, 2006).

Karakteristik Balita

Umur

Dilihat dari karakteristik umur Balita, menurut hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2008 menemukan bahwa semakin muda usia anak Balita semakin besar kecenderungan terkena penyakit diare, kecuali pada kelompok usia kurang dari enam bulan, yang disebabkan makanan bayi masih tergantung pada ASI. Tingginya angka diare pada anak Balita yang berusia semakin muda dikarenakan semakin rendah usia anak Balita daya tahan tubuhnya terhadap infeksi penyakit terutama penyakit diare semakin rendah, apalagi jika anak mengalami status gizinya kurang dan berada dalam lingkungan yang kurang memadai

(Suratmaja, 2007). Berdasarkan hasil penelitian oleh Desi (2015), ada hubungan antara umur Balita dengan kejadian diare pada Balita dengan nilai p=0,037 (P<0,10). Balita terbanyak yang mengalami diare berada pada usia >2-3 tahun yaitu sejumlah 65 Balita.

Jenis Kelamin

Dari hasil penelitian Desi (2015), di diketahui Balita yang mengalami diare terbanyak terdapat pada karakteristik Balita yang berjenis kelamin perempuan dan dari hasil analisis menjelaskantidak ada hubungan jenis kelamin dengan kejadian diare dengan nilai p=0,793 (p>0,10). Menurut kasus yang ditemukan dilapangan bahwa Balita usia 1-5 tahun telah mendapatkan perlakuan yang sama antara Balita laki-laki dan perempuan. Balita laki-laki maupun perempuan dari segala aktifitas fisik, nutrisi serta kebersihannya masih dalam kontrol orang tua. Sehingga didapatkan tidak adanya hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian diare pada Balita.

Berat Badan Lahir

Berat lahir adalah berat bayi yang ditimbang dalam 1 (satu) jam setelah lahir (IDAI, 2004). Berat lahir merupakan faktor risiko kejadian

sakit. Bayi dengan berat bayi lebih dari atau sama dengan 2500 gram termasuk berat lahir normal, sedangkan bayi yang lahir kurang dari 2500 gram digolongkan berat lahir rendah. Bayi dengan berat lahir rendah

memiliki pertumbuhan dan pematangan (maturasi) organ dan alat-alat tubuh belum sempurna, akibatnya bayi berat lahir rendah sering mengalami komplikasi dan infeksi yang berakhir dengan kematian. Secara keseluruhan, proporsi bayi berat lahir rendah di Indonesia sebesar 11,5% (Depkes, 2007).

Sebuah penelitian menunjukkan tren peningkatan frekuensi penyakit infeksi diare dan ISPA yang lebih besar pada bayi dengan berat badan lahir rendah daripada berat badan lahir normal (Salehah, 2002). Penelitian yang dilakukan Siti Fadilah (2009), yang melakukan analisis terhadap data Riskesdas 2007 menunjukkan Balita dengan berat lahir rendah memiliki risiko diare 1,061 kali lebih besar daripada Balita dengan berat lahir normal.

D. Latihan

1. Apakah yang dimaksud dengan Teori Blum dalam Ekonomi Kesejahteraan ?
2. Sebutkan alasannya mengapa Teori *dapat menjadi alternatif* dalam perkembangan ekonomi kesejahteraan ?

E. Kunci Jawaban

1. Berdasarkan dengan model Blum yang digunakan sebagai acuan, analisis terhadap hubungan pola asuh ibu, berat lahir serta sanitasi lingkungan dengan kejadian diare juga mengacu pada hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel-variabel pada model Blum

2. Landasan teori yang dijadikan sebagai acuan adalah teori Blum, dalam teori Blum (1974), ada 4 faktor yang dijadikan sebagai derajat kesehatan diantaranya faktor perilaku, faktor pelayanan kesehatan, faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor-faktor tersebut memiliki peranan yang sangat besar dalam meningkatkan status kesehatan baik individu maupun masyarakat. Faktor pertama yaitu perilaku, perilaku seseorang memiliki peranan penting dalam menjaga status kesehatan, karena kesadaran dalam pribadi seseorang harus dimunculkan untuk mencapai budaya hidup bersih dan sehat sehingga terhindar dari berbagai penyakit seperti diare. Faktor kedua yaitu lingkungan, salah satu yang menjadi sumber berkembangnya suatu penyakit yaitu karena kondisi sanitasi lingkungan yang buruk dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat kita. Penumpukan sampah yang tidak dikelola dengan benar dapat menjadi penyebab. Tempat pelayanan kesehatan sendiri memiliki beberapa program terkait dengan pemeliharaan sanitasi lingkungan untuk mencegah terjadinya berbagai penyakit seperti diare, namun masih terkendala dengan jumlah tenaga kesehatan lingkungan yang masih kurang memadai. Faktor ketiga yaitu pelayanan kesehatan yang menjadi penunjang dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terbaik sangat dibutuhkan masyarakat untuk mencegah dan menurunkan tingkat kematian yang disebabkan karena diare. Faktor keempat yaitu genetik, yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana cara meningkatkan kualitas generasi muda mendatang yang memiliki kompetensi dan kreatifitas tinggi. Mencapai tujuan tersebut, perlu diperhatikan status gizi Balita yang dapat meningkatkan perkembangan otak anak. Pada kenyataannya di Indonesia masih banyak ditemukan kasus gizi buruk yang mengakibatkan risiko sakit pada anak. Pemeriksaan tumbuh kembang anak harus

dilakukan secara rutin dan mendeteksi dini status gizi agar menghindari kasus gizi buruk maupun obesitas terjadi, hal ini memperlihatkan bahwa perilaku manusia mempunyai konstribusi yang besar (Notoatmodjo, 2003).

F. Daftar Pustaka

(1) Boediono, Dr., Ekonomi Internasional dan Nasional, BPFE, Yogyakarta, 2014 diakses 9 September 2020

(2) Halwani, Hendra. Dra. M.H., dan Tjiptoharijanto, Prijono, H. Dr., Perdagangan Internasional, Pendekatan Ekonomi Kesejahteraan Makro & Mikro, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.

(3) Tambunan, Tulus T.H., Dr., Perekonomian dan Ekonomi Kesejahteraan Indonesia,, Teori dan temuan Empiris, Ghalia Indonesia, 2017

MODUL EKONOMI KESEJAHTERAAN

(KAK 357)

MODUL 7

PENGERTIAN & PROSES EKONOMI KESEJAHTERAAN

(PERMASALAHAN KESEHATAN BERKAITAN DENGAN KESEJAHTERAAN)

DISUSUN OLEH

Erlina Puspitaloka Mahadewi, SE, MM, MBL (5661)

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2022

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari Modul ini, diharapkan Mahasiswa mampu :

1. Memahami dan mempelajari Permasalahan Ekonomi dan Kesehatan dalam Ekonomi Kesejahteraan
2. Menguraikan konsep dasar Kesehatan Manusia dalam Ekonomi Kesejahteraan
3. Mengidentifikasi pemikiran mata kuliah Ekonomi Kesejahteraan dalam konteks Kesehatan dan Ekonomi

B. Uraian dan Contoh

C. Visi dan Misi UEU

Universitas Esa Unggul mempunyai visi menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Universitas Esa Unggul menetapkan misi-misi sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan
b. Menciptakan suasana akademik yang kondusif
c. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan

Topik Perkuliahan : Pengertian & Proses Ekonomi Kesejahteraan

Sub Topik : Permasalahan Kesehatan dalam Ekonomi Kesejahteraan

D. Uraian

Hubungan Sosial Demografi Terhadap Kesempatan Kerja

Menurut Banks dan Henry (1993) bahwa usaha untuk meningkatkan kesempatan kerja ditentukan tingkat kepentingan individu untuk bekerja. Meskipun beberapa penelitian menyimpulkan situasi tidak bekerja akan berakibat negatif dan menyakitkan pada kondisi psikologis individu dan lingkungan

(Furnham, 1982; Liem dan Rayman, 1982; Vinokur dan Caplan, 1987; Dooley dan Catalano, 1988; Frost dan Clayson, 1991; Klein *et al*., 1992; Banks dan Henry, 1993; Wanberg dan Marchese, 1994; Sheeran *et al*., 1995; Vinokur dan Schul, 1997; Kinicki *et al*., 2000), beberapa peneliti menemukan bahwa individu tidak bekerja yang mendapakan bantungan dari lingkungan sosialnya cenderung untuk menjadi malas dan tidak sepenuhnya berkeinginan untuk meningkatkan kesempatan kerja (Tanner, 1995; Dickson dan Tannner, 1996; Casee, 1997). Beberapa penelitian juga menemukan bahwa keinginan untuk memanfaatkan kesempatan kerja akan meningkat jika ada kesempatan kerja yang memadai untuk meningkatkan pendapatan (Gueron, 1987; Hagen dan Lurie, 1995; Halter, 1996; Henly dan Danziger, 1996; Mills, 1996; Edin dan Lein, 1997; Opulente dan Mattaini, 1997; Schneider, 2000).

Becker (1993) dalam suatu penelitian di Amerika Serikat menemukan bahwa mengikuti pendidikan menengah dan pendidikan tinggi langsung meningkatkan tingkat pendapatan seseorang meskipun masih terdapat biaya langsung dan tidak langsung, menyesuaikan dengan latar belakang keluarga dan kemampuan individu. Becker berpendapat bahwa peningkatan pendapatan ini adalah hasil dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berpikir kritis diperoleh melalui kegiatan pendidikan. Namun, terdapat perbedaan yang jelas antara lulusan SMA dan lulusan perguruan tinggi dalam pendapatan karena tingkat pendidikan yang berbeda. Selain itu, perbedaan juga terjadi pada lulusan perguruan tinggi dan mereka yang putus kuliah. Becker (1993) menyimpulkan bahwa "putus kuliah" tidak memiliki kemampuan lebih besar dari lulusan SMA. Selanjutnya, menurut Becker, kemampuan dari yang lulus kuliah bervariasi di seluruh kelompok berdasarkan perbedaan sosial demografinya. Ia menemukan bahwa tingkat pendapatan untuk penduduk perkotaan, kulit putih, lulusan perguruan tinggi, dan laki-laki lebih tinggi dari tingkat pendapatan untuk penduduk pedesaan, kulit berwarna, perempuan, dan "putus kuliah."

Beberapa penelitian berkaitan dengan faktor-faktor hambatan memperoleh kesempatan kerja mendapatkan diantaranya mengasuh anak, transportasi, kesehatan yang buruk, kesehatan mental yang buruk, cacat fisik, kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan zat, dan pengaruh negatif dari teman sebaya,

bahkan ras sering dikutip sebagai penghalang untuk bekerja (Edin dan Lein, 1997). Sebuah studi Pearlmutter dan Bartle (2003) menemukan bahwa ibu-ibu bekerja marah tentang kurangnya pilihan mengasuh anak, terutama ibu-ibu yang bekerja di industri jasa yang kadang bekerja malam bahkan akhir pekan. Juga, banyak ibu membutuhkan merawat anak sakit atau merawat anak cacat (Lens, 2002). Menurut penelitian Zippay dan Rangarajan (2007), 78 persen ibu bekerja mengandalkan perawatan anak informal oleh keluarga atau teman. Mengasuh anak telah terbukti mempengaruhi jumlah jam kerja. Mengasuh anak mengakibatkan penurunan jumlah jam kerja (Press *et al*., 2005; Joo, 2008).

Dalam beberapa penelitian lainnya, pengalaman kerja (pekerjaan yang dilakukan tenaga kerja sebelumnya) dilaporkan menjadi prediktor kerja. Tahun yang dihabiskan di pekerjaan sebelumnya sangat penting untuk mendapatkan pekerjaan baru dan tetap bekerja (Cheng, 2002;. Lee *et al*., 2004). Selain itu, mereka yang bekerja di sektor pekerjaan informal yang kurang mungkin untuk dipekerjakan (Lee *et al*., 2004). Kemampuan untuk memiliki fasilitas yang mendukung, seperti telepon, transportasi, dan dukungan sosial juga penting untuk mencapai dan mempertahankan pekerjaan. Misalnya, individu yang tidak bekerja yang memiliki telepon lebih mungkin untuk dipekerjakan (Latimer, 2004). Kemungkinan dipekerjakan lebih rendah bagi mereka yang belum pernah bekerja, sementara kurangnya pengalaman kerja sebelumnya dikaitkan dengan pendapatan yang lebih rendah (Dworsky dan Courtney, 2007).

Transportasi juga ditemukan untuk menjadi penghalang untuk mencapai dan mempertahankan kerja (Brooks *et al*., 2001; Pandey *et al*., 2004). Selain itu, orang-orang dengan transportasi lebih mungkin untuk memiliki pekerjaan tetap, dan kepemilikan kendaraan bekerja adalah prediktor kerja (Latimer, 2004; Lee *et al*., 2004; Weaver *et al*., 2007). Satu studi menemukan bahwa berdasarkan rata-rata nasional, sebesar 91 persen rumah tangga pedesaan tidak memiliki kendaraan dari (Pandey *et al*., 2004). Bahkan pekerjaan entry-level yang terutama terletak di pinggiran kota tidak terjangkau transportasi umum (Lens, 2002). Hambatan lain untuk memperoleh kesempatan kerja meliputi kesehatan yang buruk dan kesehatan mental, cacat fisik, dan kekerasan dalam rumah tangga. Satu studi menemukan bahwa kesehatan bukanlah prediktor signifikan dari kesempatan

kerja, namun penelitian lain menemukan bahwa pekerja yang kesehatannya rendah kurang mungkin untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang lebih rendah dibandingkan dengan kesehatan baik (Dworsky dan Courtney, 2007; Weaver *et al*., 2007; Kyoung dan Yoon, 2008).

Selain itu, orang-orang dengan depresi kurang mungkin untuk dipekerjakan (Lee *et al*., 2004). Kecacatan juga ditemukan secara negatif terkait dengan pekerjaan dan penghasilan (Kim, 2000; Dworsky dan Courtney, 2007). Mereka yang cacat lebih mungkin untuk memiliki pekerjaan sementara meskipun dengan pendapatan yang lebih rendah (Latimer, 2004). Akhirnya, Lee *et al*. (2004) menemukan bahwa orang-orang dengan sejarah kekerasan dalam rumah tangga kurang mungkin untuk mendapatkan kesempatan kerja.

Hubungan Modal Sosial Terhadap Modal Manusia

Modal sosial merupakan potensi dasar yang dapat mengungkap dan mengungkit modal lainnya, bahkan modal sosial yang dimiliki oleh suatu komunitas dapat menjadi dasar dalam menyelesaikan masalah sosial. Kekuatan relasi dan koneksi yang dimiliki oleh modal sosial dapat mengoptimalkan modal manusia. Beberapa penelitian menggunakan istilah-istilah seperti modal sosial tertutup (*closed social capital*), modal sosial yang menjembatani (*bridging social capital*), modal sosial yang mengikat (*bonding social capital*), dan modal sosial yang menghubungkan (*linking social capital*). Schneider (2006) menggunakan modal sosial tertutup dan modal sosial yang menjembatani. Dia mendefinisikan modal sosial tertutup sebagai jaringan yang terjadi antara individu dari kategori identitas yang sama (misalnya, ras dan golongan), sementara modal sosial yang menjembatani saat batas identitas disilangkan, yang berarti bahwa jaringan akan terdiri dari orang-orang yang berbeda ras, kelas, dan sebagainya. CERI (2001) juga menggunakan istilah modal sosial yang menjembatani, modal sosial yang mengikat, dan modal sosial yang menghubungkan. Modal sosial menjembatani terjadi dengan teman-teman yang jauh dan rekan kerja/kolega, sedangkan modal sosial yang mengikat misalnya, jaringan berbasis pada keluarga atau identitas

etnis. Menurut Putnam (2000), penting untuk dicatat bahwa itu semua adalah istilah dalam modal sosial bukan kategori.

Modal manusia merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mengoptimalkan hidup dan kehidupannya baik selaku makhluk individu maupun sebagai mahkluk sosial. Melalui modal manusia yang dimiliki oleh seseorang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya dan berkontribusi untuk orang lain. Modal manusia meliputi; pendidikan dan keterampilan, kesehatan, kekuatan fisik, kecerdasan bahkan mental dan moral yang baik. Untuk menjelaskan relasi modal sosial terhadap modal manusia, maka beberapa kasus hasil penelitian dan tinjauan para ahli dalam melihat relasi tersebut. Hasil studi menunjukkan modal sosial dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui tiga cara: 1) peningkatan partisipasi individu dalam jaringan sosial sehingga mengurangi biaya transaksi, dalam rangka peningkatan penerimaan; 2) peningkatan partisipasi dalam jaringan lokal dan menurunkan perilaku mencari untung sendiri (*rent seeking*) untuk memfasilitasi tindakan bersama; dan 3) perluasan jaringan dan penguatan tingkat kepercayaan sosial sehingga orang desa mempunyai akses terhadap pendidikan, modal, dan layanan kesehatan.

Suatu komunitas yang memiliki modal sosial yang rendah hampir dapat dipastikan kualitas pembangunan manusianya akan jatuh tertinggal. Beberapa dimensi pembangunan manusia yang sangat dipengaruhi oleh modal sosial antara lain kemampuannya untuk menyelesaikan berbagai problem kolektif, mendorong roda perubahan yang cepat di tengah masyarakat memperluas kesadaran bersama bahwa banyak jalan yang bisa dilakukan oleh setiap anggota kelompok untuk memperbaiki nasib secara bersama-sama, memperbaiki mutu kehidupan seperti meningkatkan kesejahteraan, perkembangan anak dan banyak keuntungan lainnya yang dapat diperoleh.

Masyarakat yang memiliki modal sosial yang tinggi akan membuka kemungkinan menyelesaikan kompleksitas persoalan dengan lebih mudah. Hal ini memungkinkan terjadi terutama pada masyarakat yang terbiasa hidup dengan rasa saling mempercayai yang tinggi. Masyarakat yang bersatu dan memiliki hubungan-hubungan keluar lingkungan kelompoknya secara intensif dan dengan didukung oleh semangat kebajikan untuk hidup saling menguntungkan, akan

merefelksikan kekuatan masyarakat sendiri (Hasbullah, 2006). Modal sosial ibarat minyak pelumas yang bukan hanya memperlicin, tetapi juga akan terus mendorong roda kendaraan hidup yang memungkinkan masyarakat berkembang secara baik dan aman. Berkembangnya modal sosial ditengah masyarakat akan menciptakan suatu situasi masyarakat yang toleran, jauh dari sifat iri dan dengki serta merangsang tumbuhnya simpati dan empati terhadap kelompok masyarakat diluar kelompoknya.

Jaringan-jaringan sebagai wujud dari modal sosial akan memungkinkan lebih mudahnya saluran informasi dan ide dari luar yang merangsang perkembangan kelompok masyarakat. Mereka akan lebih mudah terhindar dari penyakit-penyakit kejiwaan seperti kecemasan, depresi dan akan hidup lebih sehat. Hal ini dapat terjadi karena di dalam masyarakat tersebut tumbuh kembang kepedulian bersama dalam berbagai aspek dan dimensi aktifitas kehidupan. Masyarakat saling memberi dan perhatian dan saling mempercayai. Situasi yang demikian akan mendorong tidak hanya ide dan kreatifitas, tetapi juga suasana hidup lebih damai, bersahabat dan tenteram.

Sebagai contoh, Putnam (2000) temuannya tentang dampak positif modal sosial terhadap perkembangan tumbuh kembang anak. Dalam suatu penelitiannya tentang masyarakat Amerika ditemukan bahwa pada masyarakat yang memiliki modal sosial yang kuat, perkembangan baik, kesehatan, pencapaian belajar dan situasi kejiwaan mereka lebih baik, dibanding yang memiliki modal sosial yang rendah. Rasa saling percaya, jaringan-jaringan pertemanan dan norma-norma yang merefeleksikan kebiasaan saling memberi dalam keluarga, di sekolah dan di komunitas yang lebih besar, berpengaruh positif pada pola tingkah laku anak dan pada perkembangan fisik mereka.

Modal sosial muncul sebagai pelengkap dari modal manusia (tingkat pendidikan dan keterampilan kerja individu yang ditawarkan kepada pemberi kerja). Modal sosial, seperti modal manusia, memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas dalam kesempatan kerja, tetapi secara khusus mengacu pada hubungan sosial daripada tingkat pendidikan atau keahlian teknis (Harris, 1993; Putnam, 1995; Schneider, 2006). Coleman (1988) menyatakan bahwa modal sosial dan modal manusia adalah kombinasi relasional yang

memungkinkan tercapainya tujuan tertentu dari keadaan tidak akan mungkin. Schneider (2002) mengacu pada modal sosial sebagai hubungan sosial dan pola kepercayaan yang memungkinkan orang untuk mendapatkan akses ke sumber daya seperti layanan pemerintah atau pekerjaan, sementara Li (2004) menunjukkan dalam bentuk pengaturan sosial sebagai sumber potensi yang dapat digunakan untuk mengejar tujuan ekonomi dan sosial. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa akumulasi modal sosial berpengaruh pada hasil sosial dan ekonomi yang positif. Contohnya, modal sosial yang tinggi telah meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, mengurangi kemiskinan dan konflik dalam keluarga, peningkatan tabungan dan aset, dan peningkatan akses investasi (Yusuf, 2008; Brisson, 2009; George dan Chaze, 2009).

Sejalan dengan hal tersebut, terdapat hubungan positif antara modal sosial dan kemajuan karir dan pemanfaatan teknologi (Manturuk *et al*., 2009). Modal sosial juga dikaitkan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan, modal sosial dapat membantu dalam upaya orang berpenghasilan rendah 'untuk meningkatkan kesejahteraan, mendapatkan pekerjaan yang aman dan manfaat lainnya seperti tunjangan anak dan pelayanan kesehatan (Lévesque, 2005; Parisi *et al*., 2003; Schneider, 2002). Modal sosial yang rendah terkait dengan rendahnya kesejahteraan dan kerawanan pangan (Henderson dan Tickamyer, 2008). Di sisi lain, Pichler dan Wallace (2009), serta Seo (2005), menunjukkan bahwa modal sosial memiliki sedikit pengaruh pada kesejahteraan ekonomi pada populasi yang diteliti. Penelitian lain (Livermore dan Neustrom, 2003: Adato *et al*., 2006; Chantarat dan Barrett, 2008) justru menghasilkan temuan bahwa modal sosial memiliki pengaruh yang merugikan pada berbagai indikator kesejahteraan ekonomi, termasuk mobilitas ekonomi, pekerjaan, dan produktivitas

Beberapa studi telah dilakukan yang menguji hubungan antara modal manusia dan modal sosial. Halpern (2005) menyimpulkan bahwa modal manusia dan modal sosial yang saling bergantung, yang berarti bahwa peningkatan modal manusia mendorong modal sosial dan modal sosial tampaknya menghasilkan peningkatan modal manusia. Lin (2001) menggunakan modal manusia sebagai variabel independen dan modal sosial sebagai variabel dependen, penelitian lain melihat modal sosial sebagai variabel independen atau mediasi dan modal

manusia sebagai variabel dependen (Ainsworth, 2002; Crowder dan South, 2003; Teachman *et al*., 1997). Sementara Mozumder dan Halim (2006) menyimpulkan modal sosial memupuk modal manusia di Bangladesh, Dinda (2008) menggunakan model pertumbuhan satu-sektor untuk menyimpulkan bahwa modal manusia menghasilkan peningkatan modal sosial.

Hubungan Modal Sosial Terhadap Kesempatan Kerja

Penelitian Aguilera (2002) juga menemukan hubungan yang positif antara modal sosial yang diukur berdasarkan struktur jaringan, kualitas jaringan, dan keragaman jaringan dengan kesempatan kerja dan jumlah jam kerja. Menurut (Halpern, 2005), ada tiga komponen modal sosial yaitu jaringan, norma, dan sanksi. Sanksi merupakan hukuman yang memberikan ketahanan terhadap norma sebaliknya imbalan muncul untuk memenuhi harapan. Jumlah anggota dalam suatu jaringan adalah penting, tapi juga kekuatan hubungan dan pengaruh satu sama lain antar anggota yang dimiliki oleh masing-masing anggota jaringan (Flap, 1991). Tidak hanya pengaruh yang ada sekarang, tetapi setiap anggota jaringan harus sadar pengaruh itu ada sebelum bergabung dan ikut memberikan pengaruh (Lin, 2001).

Terdapat beberapa studi ekonomi tentang pengaruh modal sosial pada kesempatan kerja. Studi ekonomi yang menganalisis efek teoritis hubungan sosial pada partisipasi angkatan kerja dan proses pencarian kerja dalam model pencocokan pekerjaan (Montgomery 1991; Cahuc dan Fontaine 2002). Masalah yang berhubungan dengan pengembangan pekerja dalam hal status pekerjaan dan upah (Calvo-Armengol dan Zenou, 2005). Menurut model tersebut, berbagai jenis dan pola jaringan sosial menyebabkan transisi yang lebih baik dari pengangguran untuk dapat bekerja dengan mengurangi biaya pencarian kerja baik bagi pekerja yang potensial maupun pemberi kerja, dan dengan menghasilkan kualitas kesesuaian pekerjaan yang lebih baik. Model menyimpulkan bahwa mendapatkan pekerjaan melalui jaringan dikaitkan dengan tingkat kesempatan kerja tingkat yang lebih tinggi (Holzer, 1987), turnover pekerja yang lebih rendah (Datcher, 1983), kepuasan akan pekerjaan yang lebih tinggi, meskipun upah tidak selalu

lebih tinggi (Granovetter, 1995), dan adanya efisiensi eksternalitas (Fontaine 2003).

Menurut Lin (1999), bahwa jaringan sosial ini dapat memiliki banyak efek. Modal sosial atau elemen kunci - misalnya jaringan - memainkan peran penting dalam proses integrasi pada kesempatan kerja. Akses kepada kesempatan kerja dan pengembangan karir kerja dapat difasilitasi oleh modal sosial. Peran modal sosial dalam pasar kerja telah banyak dikembangkan dalam ilmu sosiologi, meski terdapat keterbatasan pada bukti empiris. Hal tersebut karena adanya kesulitan konseptual dalam mengukur modal sosial dan keterbatasan data yang tersedia dalam perwujudan tindakan modal sosial.

Di sisi empiris, penelitian telah meneliti efisiensi jaringan dalam hal mencari pekerjaan dan kualitas pekerjaan terutama diukur dengan upah. Menurut Granovetter (1973), di awal pekerjaan menunjukkan modal sosial jaringan langsung yang kuat (seperti kerabat dan teman dekat) memiliki dampak pada asimilasi pekerjaan, hubungan yang lemah (hubungan yang jauh, misalnya rekan kerja) menghasilkan pengaruh yang berbeda bagi ikatan kerja diantara mereka dan upah. Sebaliknya, Montgomery (1992) menunjukkan bahwa jaringan memiliki dampak positif pada asimilasi pekerjaan, tapi ini tidak berarti upah yang lebih tinggi. Bukti menunjukkan bahwa modal sosial tidak mempengaruhi hasil pekerjaan, terutama pada proses asimilasi dengan pekerjaan. Meski peran modal sosial pada status pekerjaan dan penghasilan telah diidentifikasi secara empiris sebagai salah satu kekuatan pendorong dari perbedaan individu dalam hubungannya dengan modal manusia dan faktor eksternal. Penelitian Aguilera (2002) juga menemukan hubungan yang positif antara modal sosial yang diukur berdasarkan struktur jaringan, kualitas jaringan, dan keragaman jaringan dengan kesempatan kerja dan jumlah jam kerja.

Marger (2001), dalam penelitian pada imigran bisnis di Kanada menemukan pengaruh modal sosial dalam bentuk jaringan etnis dan ikatan keluarga untuk menjalankan perusahaan mereka, berdasarkan survei dari 70 pengusaha di Ontario antara tahun 1993 dan 1995. Meskipun penelitian berkaitan dengan modal sosial jaringan dapat dibedakan dari tipe (*bonding* dan *bridging*) seperti keluarga, persahabatan dan lingkungan hubungan (*bonding*) yang

membantu orang mendapatkan pekerjaan, sementara tumpang tindih dengan jaringan yang beragam (*bridging*) yang membantu orang menjadi lebih baik (Narayan, 1999; Woolcock, 2000). Namun, dalam konteks asimilasi imigran, belum ada banyak penelitian sejauh menunjukkan apakah modal sosial jaringan yang lebih heterogen cenderung menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan yang lebih homogen. Bauder (2005) menemukan bahwa imigran Asia Selatan mengembangkan jaringan etnis untuk mengatasi hambatan pasar kerja.

Beberapa penelitian lainnya terkait dengan karakteristik etnis atau lingkungan sebagai proxy untuk modal sosial. Borjas (1995) melihat modal etnis yang diukur dengan segregasi pemukiman kelompok etnis dan menemukan bahwa lingkungan etnis berpengaruh terhadap kinerja ekonomi imigran di Amerika Serikat. Chiswick dan Miller (1996) mengukur tingkat konsentrasi linguistik imigran di Amerika Serikat menyimpulkan bahwa konsentrasi bahasa rumah memiliki efek negatif pada pendapatan. Bertrand *et al*. (2000) mengungkap bukti bahwa jaringan pengaruh partisipasi kesejahteraan sosial di Amerika Serikat. Warman (2005) menemukan dampak negatif dari kantong-kantong berdasarkan negara kelahirannya pada pertumbuhan upah imigran di Kanada.

Beberapa penelitian lainnya yang berhubungan dengan modal sosial dan kesempatan kerja. Penelitian Giorgas (2000); Amuedo-Dorantes dan Mundra (2004) di Australia dan Amerika Serikat, menemukan bahwa etnisitas dan jejaring sosial berpengaruh positif bagi imigran pada umumnya bagi kesempatan kerja baru mereka. Modal sosial digunakan lebih efektif oleh kelompok-kelompok dengan budaya yang kuat. Modal sosial jaringan tidak hanya mempengaruhi kemungkinan menemukan pekerjaan, tetapi mereka juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi asimilasi ekonomi imigran Meksiko di Amerika Serikat dalam hal upah per jam lebih tinggi. Secara umum, modal sosial jaringan menyediakan penampungan sementara terhadap pengangguran untuk pendatang baru, dan ada perbedaan dampak modal sosial antara kelompok-kelompok imigran. Kunz (2005), menyimpulkan jaringan sosial memfasilitasi asimilasi imigran ke negara-negara tuan rumah mereka. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan ekonomi tidak cukup untuk menyebabkan hasil asimilasi positif, tapi modal sosial, yang didefinisikan sebagai "jaringan" yang berkaitan dengan

struktur dan kualitas interaksi sosial, memainkan peran penting pada proses asimilasi imigran.

Livingston (2006) menggunakan Proyek Migrasi Meksiko (MMP) Data untuk memeriksa efek modal sosial berbasis jaringan yang berbeda dalam mencari pekerjaan. Munshi (2003) mengidentifikasi efek modal sosial jaringan antara imigran Meksiko di pasar tenaga kerja Amerika Serikat. Dia menggunakan variasi dalam jaringan masing-masing asal-masyarakat dari waktu ke waktu untuk memeriksa efek jaringan. Sanders *et al*. (2002) melihat bagaimana ketergantungan pada hubungan interpersonal dalam mencari pekerjaan mempengaruhi kesempatan kerja pada imigran Asia. Beaman (2007) memberikan perhatian khusus kepada para pengungsi yang dimukimkan di Amerika Serikat, meneliti hubungan antara ukuran modal sosial jaringan, status pekerjaan anggota jaringan dan hasil kesempatan kerja.

Hubungan Modal Manusia Terhadap Kesempatan Kerja

Romer (1986) menyebutkan bahwa modal manusia merupakan input kunci pokok untuk sektor riset karena menyebabkan ditemukannya produk baru atau ide yang disadari sebagai pendorong perkembangan teknologi. Dengan demikian, negara-negara dengan stok awal modal manusia yang lebih tinggi, ekonominya tumbuh lebih cepat. Sedang Lucas (1988) berargumen bahwa akumulasi modal manusia melalui investasi (misal meningkatkan waktu belajar) mendorong pertumbuhan endogen. Argumentasinya menekankan pada keuntungan yang disebabkan oleh eksternalitas dari modal manusia yang cenderung meningkatkan tingkat pengembalian modal manusia.

Menurut teori pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh Lucas (1988) dan Romer (1986), pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Pendidikan menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang nantinya menghasilkan tenaga kerja yang lebih produktif. Tenaga kerja yang mempunyai produktivitas tinggi akan

menghasilkan *output* yang lebih banyak sehingga secara agregat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Belanter dan Jackson (1990), tenaga kerja adalah penduduk yang berumur di dalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda antara negara satu dengan yang lain. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia adalah minimum 15 tahun, tanpa batas umur maksimum. Tenaga kerja *(manpower)* dibagi pula ke dalam dua kelompok yaitu angkatan kerja *(laborforce)* dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk

dalam usia yang bekerja, atau yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan.

Angkatan kerja dibedakan pula menjadi dua subsektor yaitu kelompok pekerja dan penganggur. Yang dimaksud pekerja adalah orang-orang yang mempunyai pekerjaan, mencakup orang yang mempunyai pekerjaan, dan memang sedang bekerja, serta orang yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara waktu kebetulan sedang tidak bekerja. Adapun yang dimaksud penganggur adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, lengkapnya orang yang tidak bekerja dan masih mencari pekerjaan

Becker (1993) mengemukakan bahwa teori modal manusia telah menjadi pemikiran banyak pihak sejalan dengan berhasilnya umat manusia mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk, menanggapi kekuatiran Malthus akan adanya bencana bagi umat manusia bila penduduk terus bertambah. Teori modal manusia pada dasarnya membahas proses merumuskan bentuk-bentuk investasi yang bisa ditanamkan kepada manusia, sebab manusia diakui sebagai salah satu sumberdaya yang diperlukan dalam kegiatan produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Sedangkan Samuelson dan Nordhaus (2001) menyebutkan bahwa input tenaga kerja terdiri dari kuantitas dan keterampilan tenaga kerja. Banyak ekonomi percaya bahwa kualitas input tenaga kerja yakni keterampilan, pengetahuan dan disiplin tenaga kerja merupakan elemen paling penting dalam pertumbuhan ekonomi. Suatu negara yang mampu membeli berbagai peralatan canggih tapi

tidak mempekerjakan tenaga kerja terampil dan terlatih tidak akan dapat memanfaatkan barang-barang modal tersebut secara efektif. Peningkatan melek huruf, kesehatan dan disiplin serta kemampuan menggunakan komputer sangat meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Menurut Miller dan Meiners (2000), pembangunan ekonomi sangat tergantung pada dua jenis perbaikan, yaitu perbaikan dalam tingkat pengetahuan masyarakat dan perbaikan yang berupa usaha-usaha untuk menghapus penghambat pembangunan seperti adat istiadat, kepercayaan dan berpikir tradisional. Perbaikan dalam pendidikan, kemajuan dalam ilmu pengetahuan, perluasan spesialisasi dan perbaikan dalam organisasi produksi merupakan faktor yang penting yang akan memperbaiki mutu dan efisiensi faktor-faktor produksi dan akhirnya menciptakan pembangunan ekonomi. Faktor pendidikan melaksanakan dua fungsi yaitu: mempertinggi pengetahuan teknik masyarakat dan mempertinggi ilmu pengetahuan umum. Pendidikan dapat menciptakan pandangan-pandangan dan kebiasaan modern dan besar perannya untuk menentukan kemajuan ekonomi masyarakat.

World Bank (2005) dalam kertas kerjanya menyatakan bahwa pendidikan berfungsi sebagai *driving force* atau daya penggerak transformasi masyarakat untuk memutus rantai kemiskinan. Pendidikan membantu menurunkan kemiskinan melalui efeknya pada produktivitas tenaga kerja dan melalui jalur manfaat sosial, maka pendidikan merupakan sebuah tujuan pembangunan yang penting bagi bangsa. Pendidikan sebagai sarana untuk memperoleh wawasan, ilmu pengetahuan dan keterampilan agar peluang kerja lebih terbuka dan upah yang didapat juga lebih tinggi. Rahman (2006) menemukan adanya hubungan positif antara tingkat pendidikan dengan upah/gaji yang diterima oleh pekerja.

Menurut Todaro dan Smith (2006), modal manusia dalam terminologi ekonomi sering digunakan untuk untuk bidang pendidikan, kesehatan dan berbagai kapasitas manusia lainnya yang ketika bertambah dapat meningkatkan produktivitas. Pendidikan memainkan peran kunci dalam hal kemampuan suatu perekonomian untuk mengadopsi teknologi modern dan dalam membengun kapasitasnya bagi pembangunan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kesuksesan dalam pendidikan bergantung juga pada kecukupan kesehatan.

Disamping itu kesehatan merupakan prasayarat bagi peningkatan produktivitas. Dengan demikian kesehatan dan pendidikan dapat juga dilihat sebagai komponen vital dalam pertumbuhan dan pembangunan sebagai *input* bagi fungsi produksi agregat. Menurut Mankiw (2007), modal manusia adalah pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh oleh para pekerja melalui pendidikan mulai dari program untuk anak-anak sampai dengan pelatihan dalam pekerjaan (*on the job training*) untuk para pekerja dewasa. Seperti halnya dengan modal fisik, modal manusia meningkatkan kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa. Untuk meningkatkan level modal manusia dibutuhkan investasi dalam bentuk guru, perpustakaan dan waktu belajar.

Ekonom ortodoks meyakini bahwa terdapat banyak manfaat dari investasi dalam modal manusia. Dengan demikian, investasi dalam kemampuan, pendidikan, kesehatan dan pelatihan dihipotesiskan menghasilkan produktivitas individu yang lebih tinggi mengakibatkan peningkatan kompensasi pada setiap kesempatan kerja (Morgan dan Duncan, 1982).

E. Latihan

1. Apakah yang dimaksud dengan perbaikan ekonomi dalam Ekonomi Kesejahteraan ?
2. Sebutkan alasannya mengapa bisa terjadi dalam perkembangan ekonomi kesejahteraan ?
3. Jelaskan sisi Ekonomi Kesejahteraan hal tersebut!

F. Kunci Jawaban

1. Menurut Miller dan Meiners (2000), pembangunan ekonomi sangat tergantung pada dua jenis perbaikan, yaitu perbaikan dalam tingkat pengetahuan masyarakat dan perbaikan yang berupa usaha-usaha untuk menghapus penghambat pembangunan seperti adat istiadat, kepercayaan dan berpikir tradisional. Perbaikan dalam pendidikan, kemajuan dalam ilmu pengetahuan, perluasan spesialisasi dan perbaikan dalam organisasi produksi merupakan faktor yang penting yang akan memperbaiki mutu dan efisiensi faktor-faktor produksi dan akhirnya menciptakan pembangunan ekonomi. Faktor pendidikan melaksanakan dua fungsi yaitu: mempertinggi

pengetahuan teknik masyarakat dan mempertinggi ilmu pengetahuan umum. Pendidikan dapat menciptakan pandangan-pandangan dan kebiasaan modern dan besar perannya untuk menentukan kemajuan ekonomi masyarakat.

2. Dalam Teori modal manusia, istilah "manusia' adalah manifestasi "modal" yang diwujudkan dalam diri manusia (Schultz, 1971). Dalam setiap individu modal manusia berakumulasi dari waktu ke waktu, aset ini bukan sesuatu yang bisa dipertukarkan atau diberikan (Schultz, 1971; Checchi, 2006). Modal manusia mencakup kemampuan, keterampilan, kompetensi, dan atribut individu, sosial, dan kesejahteraan ekonomi (Rosenbaum, 1986; CERI, 2001). Hal-hal lain yang terbentuk dibangun di atas unsur-unsur tersebut meliputi motivasi dan perilaku, kesehatan fisik, emosional, dan mental individu (CERI, 2001). Pada prinsipnya teori modal manusia sebagai faktor penentu pertumbuhan sosial-ekonomi (Schneider dan Frey, 1985; ; Mankiw *et al*., 1992; Nehru *et al*., 1995; Barro dan Lee, 2000; Warner, 2002; Globerman dan Shapiro, 2002; Haveman *et al*., 2003; Baier *et al*., 2006). Teori modal manusia telah diterima sebagai salah satu teori dasar pembangunan sosial-ekonomi, semakin memperoleh perhatian dengan sejalan berkembangnya ilmu ekonomi, dengan memanfaatkan disain-disain teknologi yang berkembang dalam realitas sehari-hari.

3. Beberapa ahli menganggap bahwa kesehatan menjadi komponen modal manusia, sementara yang lainnya tidak. Telah ditemukan bahwa kesehatan, pendidikan, dan pengembangan intelektual semua berinteraksi satu sama lain (Bryant, 1990). Menurut Todaro dan Smith (2006), modal manusia dalam terminologi ekonomi sering digunakan untuk bidang pendidikan, kesehatan dan berbagai kapasitas manusia lainnya yang ketika bertambah dapat meningkatkan produktivitas. Pendidikan memainkan peran kunci dalam hal kemampuan suatu perekonomian untuk mengadopsi teknologi modern dan dalam membengun kapasitasnya bagi pembangunan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

G. Daftar Pustaka

Tambunan, Tulus T.H., Dr., Perekonomian dan Ekonomi Kesejahteraan Indonesia,, Teori dan temuan Empiris, Ghalia Indonesia, 2017

Boediono, Dr., Ekonomi Internasional dan Nasional, BPFE, Yogyakarta, 2014 diakses 9 September 2020

Halwani, Hendra. Dra. M.H., dan Tjiptoharijanto, Prijono, H. Dr., Perdagangan Internasional, Pendekatan Ekonomi Kesejahteraan Makro & Mikro, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.

(KAK 357)

MODUL 8
TEORI EKONOMI KESEJAHTERAAN
(PENGERTIAN DAN IMPLEMENTASI TEORI KESEJAHTERAAN)

DISUSUN OLEH

Erlina Puspitaloka Mahadewi, SE, MM, MBL (5661)

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2022

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari Modul ini, diharapkan Mahasiswa mampu :

4. Memahami dan mempelajari Pengertian Ekonomi Kesehatan dalam Ekonomi Kesejahteraan
5. Menguraikan konsep dasar Ekonomi Kesejahteraan
6. Mengidentifikasi pemikiran mata kuliah Ekonomi Kesejahteraan dalam konteks Kesehatan dan Ekonomi

B. Uraian dan Contoh

Visi dan Misi UEU

Universitas Esa Unggul mempunyai visi menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Universitas Esa Unggul menetapkan misi-misi sebagai berikut :

d. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan
e. Menciptakan suasana akademik yang kondusif
f. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan

Topik Perkuliahan : Teori Ekonomi Kesejahteraan

Sub Topik : Pengertian dan Implementasi Teori Kesejahteraan

C. Uraian

Ekonomi Kesejahteraan - tinjauan Definisi dan Teori Dasar

Fergusson *et al*., (1981); Martin (2006) menyatakan bahwa terminologi yang sering digunakan dalam penelitian yang membahas teori kesejahteraan adalah *standard living*, *well-being*, *welfare*, dan *quality of life*. Menurut Just *et al*., 1982, dalam kajian ekonomi kesejahteraan yang bertujuan untuk menolong

masyarakat membuat pilihan yang lebih baik, kesejahteraan seseorang dilihat dari *willingness to pay* saat individu atau masyarakat berperan sebagai konsumen. Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Menurut Pigou (1960), teori ekonomi kesejahteraan adalah bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang. Kesejahteraan dapat didekati berdasarkan dua hal (Campbell, 1976; Sumawan dan Tahira, 1993; Milligan *et al*., 2006), yaitu: 1) kesejahteraan subjektif dan 2) kesejahteraan objektif. Kesejahteraan dialamatkan bagi tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Pada tingkat individu, perasaan bahagia atau sedih, kedamaian atau kecemasan jiwa, dan kepuasan atau ketidakpuasan merupakan indikator subjektif dari kualitas hidup. Pada tingkat keluarga, kecukupan kondisi perumahan (dibandingkan standar), seperti ada tidaknya air bersih, merupakan contoh indikator objektif. Kepuasan anggota keluarga mengenai kondisi rumah merupakan indikator subjektif. Pada tingkat masyarakat, beberapa contoh dari indikator objektif di antaranya adalah angka kematian bayi, angka pengangguran dan tuna wisma. Kesejahteraan subjektif diukur dari tingkat kebahagiaan dan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Pendekatan ini merupakan ukuran kesejahteraan yang banyak digunakan di negara maju termasuk Amerika Serikat.

Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut (Sawidak, 1985). Tingkat kepuasan yang terkait emosional akan mempengaruhi aspek tingkah laku individu untuk menilai kepuasan pada variabel-variabel lainnya seperti kepuasan pada kualitas kehidupan (Currivan, 1999; Lambert *et al*., 2001; Robbins dan Judge,

2007; Falkenburg dan Schyns, 2007). Nilai kepuasan emosional juga akan meningkatkan kinerja dan kontribusi individu pada lingkungannya (Lock, 1976; Viswesvaran dan Ones, 2000; Butler dan Rose, 2011).

Sayogyo (1984) mengkaji kesejahteraan dan mendefinisikan kesejahteraan keluarga sebagai penjabaran delapan jalur pemerataan dalam trilogi pembangunan sejak Repelita III, yaitu: 1) peluang berusaha; 2) peluang bekerja; 3) tingkat pendapatan; 4) tingkat pangan, sandang, perumahan; 5) tingkat pendidikan dan kesehatan; 6) peran serta; 7) pemerataan antar daerah, desa/kota; dan 8) kesamaan dalam hukum. Mirrowsky dan Ross (1989) mengkaji kajian kesejahteraan dengan penyakit, kesakitan, kesulitan ekonomi yang dihubungkan dengan depresi. Kepuasan hidup sebagai bagian dari dimensi kesejahteraan meliputi kesehatan, penerimaan terhadap kecukupan ekonomi, pertolongan (dukungan sosial), dan interaksi sosial. Penelitian Bane dan Ellwood (1994); Coward *et al*. (1994); Scott dan Buttler (1997), yang menganalisis kombinasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif. Kesejahteraan subjektif digunakan dalam penelitian ini sebagai konstruk yang lebih global dikaitkan dengan beragam dimensi lingkungan yang melengkapi fasilitas dan pelayanan transportasi, pewaratan kesehatan, perumahan, jasa kesehatan mental, jasa ekonomi, dan kesempatan untuk menjadi relawan. Digunakan beragam indikator kesehatan mental (seperti moral dan depresi) yang menilai kualitas pengalaman individu (*the inner-experience*), sedangkan kompetensi personal berkaitan dengan aspek kesehatan, status keuangan, dan lingkungan yang memberikan dukungan pribadi.

Bryant (1990) menyatakan bahwa organisasi ekonomi analisis perilaku ekonomi rumah tangga (orang yang bertempat tinggal dalam atap yang sama dan pengelolaan keuangan yang sama, serta terdiri dari keluarga). Kajian organisasi

ekonomi dalam keluarga menggunakan *demand* terhadap barang strategis sebagai indikator kesejahteraan. Ukuran lainnya kesejahteraan adalah proporsi pengeluaran untuk pangan. Menurut Bubolz dan Sontag (1993), kesejahteraan merupakan terminologi lain dari kualitas hidup manusia (*quality of human life*), yaitu suatu keadaan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasinya nilai-nilai hidup. Zeitlin *et al*., (1995) menggunakan istilah kesehatan sosial keluarga dan kesejahteraan sosial keluarga bagi keluarga yang dapat melahirkan individu (anak) dengan pertumbuhan dan perkembangan yang baik.

Menurut Whithaker dan Federico (1997), pengertian kesejahteraan sosial merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut. Seseorang yang mempunyai kekurangan kemampuan mungkin memiliki kesejahteraan yang rendah, kurangnya kemampuan dapat berarti kurang mampu untuk mencapai fungsi tertentu sehingga kurang sejahtera. Terdapat beragam pengertian mengenai kesejahteraan, karena lebih bersifat subjektif dimana setiap orang dengan pedoman, tujuan dan cara hidupnya yang berbeda-beda akan memberikan nilai-nilai yang berbeda pula tentang kesejahteraan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan (Sianipar, 1997).

Menurut Sumarti (1999), perbedaan status sosial budaya dan spesialisas kerja akan menghasilkan persepsi kesejahteraan yang berbeda pula. Terdapat kelompok masyarakat yang menggunakan ukuran kesejahteraan bersumber pada simbol kekuasaan budaya-politik, sementara monetisasi ekonomi menghantarkan kalangan masyarakat pada umumnya untuk lebih menggunakan ukuran kesejahteraan ekonomi dibandingkan ukuran kesejahteraan sosial. Skoufias *et al*.,

(2000) menyatakan bahwa pengukuran kesejahteraan bersifat subjektif manakala berkaitan dengan aspek psikologis yaitu diukur dari kebahagiaan dan kepuasan. Mengukur kesejahteraan secara objektif menggunakan patokan tertentu yang relatif baku, seperti menggunakan pendapatan per kapita, dengan mengasumsikan terdapat tingkat kebutuhan fisik untuk semua orang hidup layak. Ukuran yang sering digunakan adalah kepemilikan uang, tanah, atau aset. Pada prinsipnya aspek yang dapat diamati dalam menganalisis kesejahteraan hampir sama, yaitu mencakup dimensi: pendapatan, pengeluaran untuk konsumsi, status pekerjaan, kondisi kesehatan, serta kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan kebutuhan dasar (seperti air, sanitasi, perawatan kesehatan dan pendidikan). Sedang menurut Rambe (2004), kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warganegara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Berdasarkan tingkat ketergantungan dari dimensi standar hidup (*standard of living*) masyarakat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dibedakan kedalam satu sistem kesejahteraan (*well-being*) dan dua subsistem, yakni: 1) subsistem sosial; dan 2) subsistem ekonomi, dengan beberapa faktor di antaranya kesejahteraan manusia, kesejahteraan sosial, konsumsi, tingkat kemiskinan, dan aktivitas ekonomi (World Bank: Santamarina *et al*., 2004). Di negara-negara maju, seperti Canada menggunakan 19 indikator kualitas hidup masyarakat (*quality of life*) yang tersebar ke dalam empat subsistem, yakni: 1) Indikator ekonomi: a) GDP perkapita, b) pendapatan perkapita, c) inovasi, d) lapangan kerja, e) melek huruf; dan f) tingkat pendidikan; 2) Indikator kesehatan: a) usia harapan hidup, b) status

kesehatan, c) tingkat kematian bayi (IMR), dan d) aktivitas fisik; (3) Indikator lingkungan: a) kualitas udara, b) kualitas air, c) *biodiversity*, dan d) lingkungan yang sehat; dan 4) Indikator keamanan dan keselamatan masyarakat: a) sukarela, b) *diversity*, c) berpartisipasi dalam aktivitas budaya, d) berpartisipasi dalam kegiatan politik, dan e) keamanan dan keselamatan (Sharpe, 2004).

Menurut penelitian Sugiharto (2007) indikator yang digunakan Biro Pusat Statistik (BPS) untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu: a) tinggi; b) sedang; c) rendah. Indikator pengeluaran digolongkan menjadi 3 item yaitu: a) tinggi; b) sedang; c) rendah. Indikator tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) permanen; b) semi Permanen; dan c) non permanen. Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item, yaitu pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah. Dari 12 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) lengkap; b) cukup; dan c) kurang. Indikator kesehatan anggota keluarga digolongkan menjadi 3 item yaitu: a) bagus; b; cukup; dan c) kurang. Indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari 5 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan, dan alat

kontrasepsi. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) mudah; b) cukup; dan c) sulit. Indikator kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan terdiri dari 3 item yaitu biaya sekolah, jarak ke sekolah, dan proses penerimaan. Dari 3 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) mudah; b) cukup; dan c) sulit. Indikator kemudahan mendapatkan transportasi terdiri 3 item, yaitu ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan kendaraan. Dari 3 item tersebut kemudian akan di digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) mudah; b) cukup; dan c) sulit. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggunakan kriteria tahapan kesejahteraan keluarga untuk mengukur kesejahteraan (Sugiharto, 2007). Lima pengelompokkan tahapan keluarga sejahtera menurut BKKBN adalah sebagai berikut:

a) Keluarga pra sejahtera, adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai keluarga sejahtera tahap I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, sandang, pangan, papan, dan kesehatan;
b) Keluarga sejahtera tahap I, adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Indikator yang digunakan, yaitu :
    1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut.
    2. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
    3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di

rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.

4. Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.

5. Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber-KB dibawa ke sarana/petugas kesehatan;

c) Keluarga sejahtera tahap II, yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera I, harus pula memenuhi syarat sosial psikologis 6 sampai 14 yaitu :

6. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.

7. Paling kurang, sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk.

8. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru per tahun.

9. Luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi tiap penghuni rumah.

10. Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat.

11. Paling kurang 1 (satu) orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap.

12. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin.

13. Seluruh anak berusia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini.

14. Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih pasangan usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil);

d) Keluarga sejahtera tahap III, yaitu keluarga yang memenuhi syarat 1 sampai 14 dan dapat pula memenuhi syarat 15 sampai 21, syarat

pengembangan keluarga yaitu :

15. Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
16. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.
17. Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.
18. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
19. Mengadakan rekreasi bersama diluar rumah paling kurang 1 kali/6 bulan.
20. Dapat memperoleh berita dari surat kabar/TV/majalah.
21. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai engan kondisi daerah setempat

e) Keluarga sejahtera tahap III plus, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kriteria 1 sampai 21 dan dapat pula memenuhi kriteria 22 dan 23 kriteria pengembangan keluarganya yaitu:

22. Secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.
23. Kepala Keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan/yayasan/institusi masyarakat

Terdapat beberapa penelitian menggunakan kesejahteraan sebagai konstuk dengan berbagai definisi dan ragam indikatornya. Bradbury *et al*., (1979) melakukan penelitian untuk menguji model hipotesis apakah perubahan jaminan pendapatan tambahan dan bantuan umum berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga dengan kepala keluarga wanita. Ukuran kesejahteraan ekonomi menggunakan ukuran pendapatan yang kemudian digunakan dalam menentukan garis kemiskinan sebagai indikator kesejahteraan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan ukuran pendapatan dan garis kemiskinan, kesejahteraan ekonomi dengan kepala keluarga wanita dengan tanggungan anak adalah paling rendah jika dibandingkan dengan tanpa anak. Dunst dan Triviette (1988), meneliti hubungan dukungan sosial dan kesehatan serta kesejahteraan dengan menggunakan indeks kesejahteraan psikologi (Bradburn dan Caplovitz, 1965) dan indeks kesejahteraan individu (Dunst dan Triviette, 1986).

Penelitian Nurmawati (1994) menunjukkan bahwa keluarga sejahtera memiliki keragaan yang lebih baik dalam semua variabel penelitian dibandingkan keluarga pra-sejahtera. Besar keluarga sejahtera lebih sedikit dari keluarga pra-sejahtera, pendapatan per kapita keluarga pra-sejahtera lebih rendah dari keluarga sejahtera, pendapatan keluarga sejahtera dan pra sejahtera lebih tinggi dari kriteria kemiskinan. Persentase pengeluaran pangan keluarga pra-sejahtera lebih besar dari keluarga sejahtera, pengetahuan gizi ibu dari keluarga pra-sejahtera lebih rendah dari keluarga sejahtera, status gizi balita baik dari keluarga sejahtera lebih baik dari status gizi balita keluarga pra-sejahtera. Febrero dan Schwartz (1995), mengkaji kesejahteraan dalam kaitannya dengan perilaku konsumsi di keluarga, khususnya menyoroti perilaku *altruistik* dari sebagian anggota keluarga dari sudut pandang ahli ekonomi terhadap perilaku konsumsi di keluarga. Anggota keluarga

altruistik melakukan serangkaian perilaku pengorbanan yang menyebabkan peningkatan kesejahteraan bagi anggota lainnya dalam keluarga. Hasil kajian sebaliknya menunjukkan bahwa peningkatan sumber daya bagi anggota keluarga yang egoistik berakibat terhadap penurunan kesejahteraan anggota keluarga lainnya, khususnya yang altruistik. Sedang Narayan *et al*. (2000), dalam bukunya "*Voices of The Poor*. *Can Anyone Hear Us*?" mengkaji kemiskinan (*poverty*) di berbagai negara serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam kajian tersebut digunakan beberapa konsep atau istilah kesejahteraan sebagai sisi lain pengukuran kemiskinan seperti kesejahteraan material dan kesejahteraan psikologi. Khomsan *et al*. (1997) melakukan penelitian identifikasi indikator kemiskinan dan menggunakan kriteria BKKBN dengan indikator keluarga sejahtera sebagai penentuan sampling dengan pertimbangan bersifat operasional, memperhatikan aspek kualitatif dan kuantitatif, data tersedia karena dilakukan pendataan secara reguler sehingga memudahkan untuk sampling penelitian. Hasil kajian menyimpulkan bahwa apapun indikator yang dipilih, akan mengandung

misklasifikasi saat uji akurasi dengan menggunakan indikator lain sebagai acuan standarnya. Misklasifikasi tergantung dari definisi kemiskinan yang digunakan. Sebuah indikator akan tergantung dari definisi operasional yang digunakannya, dan terbuka bagi kritik yang dilakukan pihak lain karena menggunakan ruang lingkup definisi yang berbeda.

Pudjirahayu (1999) menggunakan indikator keluarga sejahtera BKKBN sebagai dasar sampling penelitian dengan menggunakan kriteria kemiskinan pendapatan rumah tangga, menunjukkan terdapat misklasifikasi rumah tangga miskin baik di pedesaan maupun perkotaan (versi BKKBN) menjadi tidak miskin

menurut kriteria BPS. Namun ketika menggunakan kriteria BPS yaitu pengeluaran rumah tangga, menunjukkan tingkat kesesuaian 81-82 persen kriteria menurut BKKBN dan BPS. Penelitian Rambe (2004), mengkaji akurasi (sensitifitas dan spesifisitas) empat indikator kemiskinan: BPS, BKKBN, pengeluaran pangan, dan ukuran subjektif. Hasil kajian menunjukkan bahwa dari keempat indikator kesejahteraan yang diteliti, indikator keluarga sejahtera BKKBN dianggap paling baik karena selain mudah dalam pengoperasiannya hingga ke level administrasi terendah dan dengan cepat dapat mengklasifikasikan keluarga miskin. Indikator KS dan indikator pengeluaran pangan memiliki spesifisitas yang tinggi (63,3 persen) dibandingkan indikator BPS dan indikator subjektif.

Hubungan Sosial Demografi Terhadap Kesempatan Kerja

Menurut Banks dan Henry (1993) bahwa usaha untuk meningkatkan kesempatan kerja ditentukan tingkat kepentingan individu untuk bekerja. Meskipun beberapa penelitian menyimpulkan situasi tidak bekerja akan berakibat negatif dan menyakitkan pada kondisi psikologis individu dan lingkungan (Furnham, 1982; Liem dan Rayman, 1982; Vinokur dan Caplan, 1987; Dooley dan Catalano, 1988; Frost dan Clayson, 1991; Klein *et al*., 1992; Banks dan Henry, 1993; Wanberg dan Marchese, 1994; Sheeran *et al*., 1995; Vinokur dan Schul, 1997; Kinicki *et al*., 2000), beberapa peneliti menemukan bahwa individu tidak bekerja yang mendapakan bantungan dari lingkungan sosialnya cenderung untuk menjadi malas dan tidak sepenuhnya berkeinginan untuk meningkatkan kesempatan kerja (Tanner, 1995; Dickson dan Tannner, 1996; Casee, 1997). Beberapa penelitian juga menemukan bahwa keinginan untuk memanfaatkan kesempatan kerja akan meningkat jika ada kesempatan kerja yang memadai untuk meningkatkan pendapatan (Gueron, 1987; Hagen dan Lurie, 1995; Halter, 1996; Henly dan Danziger, 1996; Mills, 1996; Edin dan Lein, 1997; Opulente dan Mattaini, 1997; Schneider, 2000).

Becker (1993) dalam suatu penelitian di Amerika Serikat menemukan bahwa mengikuti pendidikan menengah dan pendidikan tinggi langsung meningkatkan tingkat pendapatan seseorang meskipun masih terdapat biaya langsung dan tidak langsung, menyesuaikan dengan latar belakang keluarga dan kemampuan individu. Becker berpendapat bahwa peningkatan pendapatan ini adalah hasil dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berpikir kritis diperoleh melalui kegiatan pendidikan. Namun, terdapat perbedaan yang jelas antara lulusan SMA dan lulusan perguruan tinggi dalam pendapatan karena tingkat pendidikan yang berbeda. Selain itu, perbedaan juga terjadi pada lulusan perguruan tinggi dan mereka yang putus kuliah. Becker (1993) menyimpulkan bahwa "putus kuliah" tidak memiliki kemampuan lebih besar dari lulusan SMA. Selanjutnya, menurut Becker, kemampuan dari yang lulus kuliah bervariasi di seluruh kelompok berdasarkan perbedaan sosial demografinya. Ia menemukan bahwa tingkat pendapatan untuk penduduk perkotaan, kulit putih, lulusan perguruan tinggi, dan laki-laki lebih tinggi dari tingkat pendapatan untuk penduduk pedesaan, kulit berwarna, perempuan, dan "putus kuliah."

Beberapa penelitian berkaitan dengan faktor-faktor hambatan memperoleh kesempatan kerja mendapatkan diantaranya mengasuh anak, transportasi, kesehatan yang buruk, kesehatan mental yang buruk, cacat fisik, kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan zat, dan pengaruh negatif dari teman sebaya, bahkan ras sering dikutip sebagai penghalang untuk bekerja (Edin dan Lein, 1997). Sebuah studi Pearlmutter dan Bartle (2003) menemukan bahwa ibu-ibu bekerja marah tentang kurangnya pilihan mengasuh anak, terutama ibu-ibu yang bekerja di industri jasa yang kadang bekerja malam bahkan akhir pekan. Juga, banyak ibu membutuhkan merawat anak sakit atau merawat anak cacat (Lens, 2002). Menurut penelitian Zippay dan Rangarajan (2007), 78 persen ibu bekerja mengandalkan perawatan anak informal oleh keluarga atau teman. Mengasuh anak telah terbukti mempengaruhi jumlah jam kerja. Mengasuh anak mengakibatkan penurunan jumlah jam kerja (Press *et al*., 2005; Joo, 2008).

Dalam beberapa penelitian lainnya, pengalaman kerja (pekerjaan yang dilakukan tenaga kerja sebelumnya) dilaporkan menjadi prediktor kerja. Tahun yang dihabiskan di pekerjaan sebelumnya sangat penting untuk mendapatkan pekerjaan baru dan tetap bekerja (Cheng, 2002;. Lee *et al*., 2004). Selain itu,

mereka yang bekerja di sektor pekerjaan informal yang kurang mungkin untuk dipekerjakan (Lee *et al*., 2004). Kemampuan untuk memiliki fasilitas yang mendukung, seperti telepon, transportasi, dan dukungan sosial juga penting untuk mencapai dan mempertahankan pekerjaan. Misalnya, individu yang tidak bekerja yang memiliki telepon lebih mungkin untuk dipekerjakan (Latimer, 2004). Kemungkinan dipekerjakan lebih rendah bagi mereka yang belum pernah bekerja, sementara kurangnya pengalaman kerja sebelumnya dikaitkan dengan pendapatan yang lebih rendah (Dworsky dan Courtney, 2007).

Transportasi juga ditemukan untuk menjadi penghalang untuk mencapai dan mempertahankan kerja (Brooks *et al*., 2001; Pandey *et al*., 2004). Selain itu, orang-orang dengan transportasi lebih mungkin untuk memiliki pekerjaan tetap, dan kepemilikan kendaraan bekerja adalah prediktor kerja (Latimer, 2004; Lee *et al*., 2004; Weaver *et al*., 2007). Satu studi menemukan bahwa berdasarkan rata-rata nasional, sebesar 91 persen rumah tangga pedesaan tidak memiliki kendaraan dari (Pandey *et al*., 2004). Bahkan pekerjaan entry-level yang terutama terletak di pinggiran kota tidak terjangkau transportasi umum (Lens, 2002). Hambatan lain untuk memperoleh kesempatan kerja meliputi kesehatan yang buruk dan kesehatan mental, cacat fisik, dan kekerasan dalam rumah tangga. Satu studi menemukan bahwa kesehatan bukanlah prediktor signifikan dari kesempatan kerja, namun penelitian lain menemukan bahwa pekerja yang kesehatannya rendah kurang mungkin untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang lebih rendah dibandingkan dengan kesehatan baik (Dworsky dan Courtney, 2007; Weaver *et al*., 2007; Kyoung dan Yoon, 2008).

Selain itu, orang-orang dengan depresi kurang mungkin untuk dipekerjakan (Lee *et al*., 2004). Kecacatan juga ditemukan secara negatif terkait dengan pekerjaan dan penghasilan (Kim, 2000; Dworsky dan Courtney, 2007). Mereka yang cacat lebih mungkin untuk memiliki pekerjaan sementara meskipun dengan pendapatan yang lebih rendah (Latimer, 2004). Akhirnya, Lee *et al*. (2004) menemukan bahwa orang-orang dengan sejarah kekerasan dalam rumah tangga mungkin untuk mendapatkan kesempatan kerja.

Suatu komunitas yang memiliki modal sosial yang rendah hampir dapat dipastikan kualitas pembangunan manusianya akan jatuh tertinggal. Beberapa dimensi pembangunan manusia yang sangat dipengaruhi oleh modal sosial antara

lain kemampuannya untuk menyelesaikan berbagai problem kolektif, mendorong roda perubahan yang cepat di tengah masyarakat memperluas kesadaran bersama bahwa banyak jalan yang bisa dilakukan oleh setiap anggota kelompok untuk memperbaiki nasib secara bersama-sama, memperbaiki mutu kehidupan seperti meningkatkan kesejahteraan, perkembangan anak dan banyak keuntungan lainnya yang dapat diperoleh.

Masyarakat yang memiliki modal sosial yang tinggi akan membuka kemungkinan menyelesaikan kompleksitas persoalan dengan lebih mudah. Hal ini memungkinkan terjadi terutama pada masyarakat yang terbiasa hidup dengan rasa saling mempercayai yang tinggi. Masyarakat yang bersatu dan memiliki hubungan-hubungan keluar lingkungan kelompoknya secara intensif dan dengan didukung oleh semangat kebajikan untuk hidup saling menguntungkan, akan merefelksikan kekuatan masyarakat sendiri (Hasbullah, 2006). Modal sosial ibarat minyak pelumas yang bukan hanya memperlicin, tetapi juga akan terus mendorong roda kendaraan hidup yang memungkinkan masyarakat berkembang secara baik dan aman. Berkembangnya modal sosial ditengah masyarakat akan menciptakan suatu situasi masyarakat yang toleran, jauh dari sifat iri dan dengki serta merangsang tumbuhnya simpati dan empati terhadap kelompok masyarakat diluar kelompoknya.

Jaringan-jaringan sebagai wujud dari modal sosial akan memungkinkan lebih mudahnya saluran informasi dan ide dari luar yang merangsang perkembangan kelompok masyarakat. Mereka akan lebih mudah terhindar dari penyakit-penyakit kejiwaan seperti kecemasan, depresi dan akan hidup lebih sehat. Hal ini dapat terjadi karena di dalam masyarakat tersebut tumbuh kembang kepedulian bersama dalam berbagai aspek dan dimensi aktifitas kehidupan. Masyarakat saling memberi dan perhatian dan saling mempercayai. Situasi yang demikian akan mendorong tidak hanya ide dan kreatifitas, tetapi juga suasana hidup lebih damai, bersahabat dan tenteram.

Sebagai contoh, Putnam (2000) temuannya tentang dampak positif modal sosial terhadap perkembangan tumbuh kembang anak. Dalam suatu penelitiannya tentang masyarakat Amerika ditemukan bahwa pada masyarakat yang memiliki modal sosial yang kuat, perkembangan baik, kesehatan, pencapaian belajar dan situasi kejiwaan mereka lebih baik, dibanding yang memiliki modal sosial yang

rendah. Rasa saling percaya, jaringan-jaringan pertemanan dan norma-norma yang merefeleksikan kebiasaan saling memberi dalam keluarga, di sekolah dan di komunitas yang lebih besar, berpengaruh positif pada pola tingkah laku anak dan pada perkembangan fisik mereka.

Modal sosial muncul sebagai pelengkap dari modal manusia (tingkat pendidikan dan keterampilan kerja individu yang ditawarkan kepada pemberi kerja). Modal sosial, seperti modal manusia, memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas dalam kesempatan kerja, tetapi secara khusus mengacu pada hubungan sosial daripada tingkat pendidikan atau keahlian teknis (Harris, 1993; Putnam, 1995; Schneider, 2006). Coleman (1988) menyatakan bahwa modal sosial dan modal manusia adalah kombinasi relasional yang memungkinkan tercapainya tujuan tertentu dari keadaan tidak akan mungkin. Schneider (2002) mengacu pada modal sosial sebagai hubungan sosial dan pola kepercayaan yang memungkinkan orang untuk mendapatkan akses ke sumber daya seperti layanan pemerintah atau pekerjaan, sementara Li (2004) menunjukkan dalam bentuk pengaturan sosial sebagai sumber potensi yang dapat digunakan untuk mengejar tujuan ekonomi dan sosial. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa akumulasi modal sosial berpengaruh pada hasil sosial dan ekonomi yang positif. Contohnya, modal sosial yang tinggi telah meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, mengurangi kemiskinan dan konflik dalam keluarga, peningkatan tabungan dan aset, dan peningkatan akses investasi (Yusuf, 2008; Brisson, 2009; George dan Chaze, 2009).

Sejalan dengan hal tersebut, terdapat hubungan positif antara modal sosial dan kemajuan karir dan pemanfaatan teknologi (Manturuk *et al*., 2009). Modal sosial juga dikaitkan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan, modal sosial dapat membantu dalam upaya orang berpenghasilan rendah 'untuk meningkatkan kesejahteraan, mendapatkan pekerjaan yang aman dan manfaat lainnya seperti tunjangan anak dan pelayanan kesehatan (Lévesque, 2005; Parisi *et al*., 2003; Schneider, 2002). Modal sosial yang rendah terkait dengan rendahnya kesejahteraan dan kerawanan pangan (Henderson dan Tickamyer, 2008). Di sisi lain, Pichler dan Wallace (2009), serta Seo (2005), menunjukkan bahwa modal sosial memiliki sedikit pengaruh pada kesejahteraan ekonomi pada populasi yang diteliti. Penelitian lain (Livermore dan Neustrom, 2003: Adato *et al*., 2006;

Chantarat dan Barrett, 2008) justru menghasilkan temuan bahwa modal sosial memiliki pengaruh yang merugikan pada berbagai indikator kesejahteraan ekonomi, termasuk mobilitas ekonomi, pekerjaan, dan produktivitas

D. Latihan

1. Apakah yang dimaksud dengan Teori Ekonomi Kesejahteraan ?
2. Sebutkan alasannya mengapa bisa terjadi dalam perkembangan teori ekonomi kesejahteraan ?

E. Kunci Jawaban

1. Menurut Pigou (1960), teori ekonomi kesejahteraan adalah bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang. Kesejahteraan dapat didekati berdasarkan dua hal (Campbell, 1976; Sumawan dan Tahira, 1993; Milligan *et al*., 2006), yaitu: 1) kesejahteraan subjektif dan 2) kesejahteraan objektif. Kesejahteraan dialamatkan bagi tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Pada tingkat individu, perasaan bahagia atau sedih, kedamaian atau kecemasan jiwa, dan kepuasan atau ketidakpuasan merupakan indikator subjektif dari kualitas hidup. Pada tingkat keluarga, kecukupan kondisi perumahan (dibandingkan standar), seperti ada tidaknya air bersih, merupakan contoh indikator objektif. Miller dan Meiners (2000), pembangunan ekonomi sangat tergantung pada dua jenis perbaikan, yaitu perbaikan dalam tingkat pengetahuan masyarakat dan perbaikan yang berupa usaha-usaha untuk menghapus penghambat pembangunan seperti adat istiadat, kepercayaan dan berpikir tradisional. Perbaikan dalam pendidikan, kemajuan dalam ilmu pengetahuan, perluasan spesialisasi dan perbaikan dalam organisasi produksi merupakan faktor yang penting yang akan memperbaiki mutu dan efisiensi faktor-faktor produksi dan akhirnya menciptakan pembangunan ekonomi. Faktor pendidikan melaksanakan dua fungsi yaitu: mempertinggi pengetahuan teknik masyarakat dan mempertinggi ilmu pengetahuan umum. Pendidikan dapat menciptakan pandangan-pandangan dan kebiasaan modern dan besar perannya untuk menentukan kemajuan ekonomi masyarakat.

Menurut Whithaker dan Federico (1997), pengertian kesejahteraan sosial merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut. Seseorang yang mempunyai kekurangan kemampuan mungkin memiliki kesejahteraan yang rendah, kurangnya kemampuan dapat berarti kurang mampu untuk mencapai fungsi tertentu sehingga kurang sejahtera. Terdapat beragam pengertian mengenai kesejahteraan, karena lebih bersifat subjektif dimana setiap orang dengan pedoman, tujuan dan cara hidupnya yang berbeda-beda akan memberikan nilai-nilai yang berbeda pula tentang kesejahteraan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan (Sianipar, 1997).

2. Menurut Sumarti (1999), perbedaan status sosial budaya dan spesialisas kerja akan menghasilkan persepsi kesejahteraan yang berbeda pula. Terdapat kelompok masyarakat yang menggunakan ukuran kesejahteraan bersumber pada simbol kekuasaan budaya-politik, sementara monetisasi ekonomi menghantarkan kalangan masyarakat pada umumnya untuk lebih menggunakan ukuran kesejahteraan ekonomi dibandingkan ukuran kesejahteraan sosial. Skoufias *et al*., (2000) menyatakan bahwa pengukuran kesejahteraan bersifat subjektif manakala berkaitan dengan aspek psikologis yaitu diukur dari kebahagiaan dan kepuasan. Mengukur kesejahteraan secara objektif menggunakan patokan tertentu yang relatif baku, seperti menggunakan pendapatan per kapita, dengan mengasumsikan terdapat tingkat kebutuhan fisik untuk semua orang hidup layak. Ukuran yang sering digunakan adalah kepemilikan uang, tanah, atau aset. Pada prinsipnya aspek yang dapat diamati dalam menganalisis kesejahteraan hampir sama, yaitu mencakup dimensi: pendapatan, pengeluaran untuk konsumsi, status pekerjaan, kondisi kesehatan, serta kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan kebutuhan dasar (seperti air, sanitasi, perawatan kesehatan dan pendidikan). Sedang menurut Rambe (2004), kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warganegara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

Daftar Pustaka

Boediono, Dr., Ekonomi Internasional dan Nasional, BPFE, Yogyakarta, 2014 diakses 9 September 2020

Halwani, Hendra. Dra. M.H., dan Tjiptoharijanto, Prijono, H. Dr., Perdagangan Internasional, Pendekatan Ekonomi Kesejahteraan Makro & Mikro, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.

Tambunan, Tulus T.H., Dr., Perekonomian dan Ekonomi Kesejahteraan Indonesia,, Teori dan temuan Empiris, Ghalia Indonesia, 2017

MODUL EKONOMI KESEJAHTERAAN

(KAK 357)

MODUL 9
PENGERTIAN INDEX MUTU HIDUP
(DALAM EKONOMI KESEJAHTERAAN)

DISUSUN OLEH

Erlina Puspitaloka Mahadewi, SE, MM, MBL (5661)

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2022

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari Modul ini, diharapkan Mahasiswa mampu :

1. Memahami dan mempelajari Defnisi Index Mutu Hidup dalam Ekonomi Kesejahteraan
2. Menguraikan konsep dasar Index Mutu Hidup dalam Ekonomi Kesejahteraan

B. Uraian dan Contoh

Visi dan Misi UEU

Universitas Esa Unggul mempunyai visi menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Universitas Esa Unggul menetapkan misi-misi sebagai berikut :

g. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan
h. Menciptakan suasana akademik yang kondusif
i. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan

Topik Perkuliahan : Pengertian Index Mutu Hidup

Sub Topik : Pengertian dan Implementasi Dalam Ekonomi Kesejahteraan

Uraian

Index Mutu Hidup – Pengertian dan Implementasi Dalam Ekonomi Kesejahteraan

Gambaran mengenai sumber daya manusia dapat diperoleh dengan menggunakan alat ukur berupa indikator komposit objektif yang dikenal luas dengan Indeks Mutu Hidup (IMH). IMH mencerminkan tingkat pendidikan dan kesehatan yang terdiri dari tiga komponen yaitu : Pertama, angka melek huruf. Kedua, angka harapan hidup. Ketiga, angka kematian bayi. Selain itu gambaran

mengenai kualitas sumber daya manusia sebagai faktor yang paling dominan dalam pembangunan dapat diukur juga dengan menggunakan pendekatan Indeks

Kualitas sumber daya manusia tidak terlepas dari produktifitas kerja dari sumber daya manusia tersebut, karena sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari produktifitas kerjanya (Siregar, 2009). Terjadinya peningkatan kualitas masyarakat akan berdampak terhadap peningkatan produktifitas mereka. Hidayat dalam Delyuzer (2012) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia sebagai subjek pembangunan disamping dapat menentukan tinggi rendahnya produktifitas juga akan menentukan keberhasilan pembangunan dan produktifitas adalah motor penggerak bagi pembangunan ekonomi. Jadi dapat dikatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dicerminkan pada kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Menurut Tjiptoherijanto (2008), Faktor yang mempengaruhi kualitas masyarakat secara luas adalah faktor pendapatan, faktor pendidikan dan faktor kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan pendapatan memberikan gambaran pada peningkatan kualitas masyarakat secara signifikan.

Pembangunan Manusia (IPM). IPM ini terdiri dari tiga komponen yaitu : Pertama, pendidikan, yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama bersekolah. Kedua, derajat kesehatan yang terbaca dari angka harapan hidup. Ketiga, pendapatan penduduk yang diukur dengan tingkat daya beli masyarakat (purchasing power parity). Komponen pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi dalam sumber daya manusia yang memberikan sumbangan langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ketrampilan dan produktifitas karena pendidikan berfungsi menyiapkan salah satu input dalam proses produksi yaitu tenaga kerja agar dapat kerja dengan produktif karena

kualitasnya dan pada umumnya orang yang mempunyai pendidikan lebih tinggi akan mempunyai wawasan yang lebih luas terutama penghayatan akan pentingnya produktivitas. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia haruslah dimulai dari bawah, yaitu dari pendidikan dasar sehingga sejak dini manusia mempunyai otonomi berfikir sendiri dan mampu bersikap mandiri. Berdasarkan penilaian UNDP (1990) kualitas SDM Indonesia atau tingkat Provinsi juga diukur melalui IPM (human development index).

Komponen kesehatan juga menjadi salah satu dimensi penting sebagai refleksi kualitas sumber daya manusia. Sehingga sangat memungkinkan sekali apabila derajat kesehatan diperbaiki akan berpengaruh secara langsung terhadap kemampuan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan derajat kesehatan suatu penduduk tercermin dari penurunan angka kematian bayi, perbaikan status gizi serta peningkatan umur harapan hidup penduduk karena semakin tinggi kesadaran mereka akan pentingnya hidup sehat, pada akhirnya akan memperpanjang usia harapan hidup. Angka harapan hidup di Provinsi Jambi mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2002 dari 63,5 tahun meningkat pada tahun 2014 menjadi 69,6 tahun. Dan angka kematian bayi di Provinsi Jambi turun dari 56 jiwa per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2002 menjadi 21 jiwa per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2014. Hal ini mencerminkan derajat kesehatan penduduk Jambi yang kian membaik. Komponen Pendapatan masyarakat yang diukur dengan tingkat daya beli masyarakat (purchasing power parity) akan mempengaruhi kemampuan manusia dalam mengakses kehidupan yang layak atau melakukan pengeluaran untuk kesehatan, pendidikan ketrampilan serta pemenuhan kebutuhan fisik minimum. Dengan kata lain akan menggambarkan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Semakin meningkatnya konsumsi rill

perkapita maka daya beli masyarakat juga semakin tinggi. Hal ini menunjukan adanya peningkatan kualitas masyarakat karena peningkatan daya beli dan konsumsi memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan lebih baik lagi. Akibat lain dari tidak terpenuhinya kebutuhan SDM yang berkualitas adalah masuknya SDM dari wilayah lain diluar Provinsi Jambi yang dapat membuat tersingkirnya SDM lokal karena kalah dalam bersaing. Penduduk yang tidak berkualitas relative sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, bahkan kurang beruntung mendapatkan pekerjaan (pengangguran). Oleh sebab itu, perlu campur tangan pemerintah untuk meningkatkan kualitas penduduk, melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kondisi faktor-faktor dari Indeks Mutu Hidup Masyarakat.

Menurut Wijaya Kuslin (2008) peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Provinsi Jambi seluruhnya mencakup pembangunan manusia, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pembangunan manusia sebagai insan, menekankan harkat, martabat, hak dan kewajiban manusia, yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia. lndeks Mutu Hidup (Physical Quality of Life Indexes) Pada tahun 1979, Morris D. Morris dalam Lincolin Arsyad (2010) memperkenalkan satu indikator alternatif dalam mengukur kinerja pembangunan suatu negara yaitu Indeks Mutu Hidup (IMH) atau Physical Quality of Life Indexes (PQLI). Ada tiga indikator utama yang dijadikan acuan pada indeks ini yaitu a) Angka Kematian Bayi, b) Angka Harapan Hidup suatu umur, dan c) Angka Melek Huruf Orang Dewasa. Berdasarkan setiap indikator tersebut

dilakukan pemeringkatan terhadap kinerja pembangunan suatu negara, kinerja tersebut diberi skor antara 1 sampai 100, angka 1 melambangkan kinerja terburuk dan angka 100 melambangkan kinerja terbaik. Untuk indikator harapan hidup, batas atas (upper limit) 100 ditetapkan 80 tahun (harapan hidup tertinggi pada saat studi tersebut dilakukan dicapai oleh swedia). Sedangkan batas bawah (lower limit) adalah 28 tahun (tingkat harapan hidup terendah di Guinea-Bissau pada tahun 1950). Antara batas atas dan batas bawah itulah, tingkat harapan hidup suatu negara diperingkatkan dengan skor antara 1 sampai 100. Demikian pula untuk tingkat kematian bayi, batas atasnya 9 kematian per 1000 kelahiran (juga dicapai Swedia pada tahun 1973). Sedangkan batas bawahnya adalah 229 kematian per 1000 kelahiran (tingkat kematian bayi tertinggi, di Gabon). Komponen ketiga IMH yakni Angka Melek Huruf, Merupakan indikator yang penting karena merupakan ukuran kesejahteraan dan taraf keterampilan yang diperlukan dalam proses pembangunan. Jadi keseluruhannya itu paling penting kaitannya adalah dengan kemampuannya berproduksi yang bermuara pada pendapatan secara khusus dan dengan pertumbuhan ekonomi secara umum. Dalam melihat kualitas sumber daya manusia perlu kiranya dijelaskan beberapa pengertian dan istilah yang digunakan dalam komponen IMH, yaitu sebagai berikut : 1. Angka kematian bayi (IMR) yaitu sebesar probabilita bayi meninggal sebelum usia satu tahun per 1000 kelahiran hidup. Untuk indeks IMR diperoleh dengan rumus: 22,2 229 IMR IKB Dimana : IKB = Indeks Kematian Bayi IMR = Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup 229 = Tingkat kematian bayi maksimum 2,22 = pembagi yang jika terdapat tingkat kematian bayi terendah yaitu 9 bayi per 1000 kelahiran, maka akan didapatkan indeks = 100 2. Angka Harapan Hidup (Eo) yaitu data yang digunakan adalah data umur harapan hidup.

Untuk mencari indeks harapan hidup suatu umur digunakan rumus. Dimana: IHH = Indeks Harapan Hidup Eo = Angka harapan hidup suatu umur 28 = Tingkat harapan hidup terendah 0,39 = Angka yang menunjukkan bahwa bila terjadi kenaikan umur harapan hidup sebesar 0,39 tahun, maka akan menghasilkan 1 poin angka indeks 3. Angka Melek Huruf yaitu menunjukan angka perbandingan antara persentase penduduk usia dewasa (15 tahun keatas) yang melek huruf terhadap jumlah penduduk Usia Dewasa (15 Tahun keatas). Indeks Melek Huruf digunakan rumus lain.

Fergusson *et al*., (1981); Martin (2006) menyatakan bahwa terminologi yang sering digunakan dalam penelitian yang membahas teori kesejahteraan adalah *standard living, well-being, welfare,* dan *quality of life*. Menurut Just *et al*., 1982, dalam kajian ekonomi kesejahteraan yang bertujuan untuk menolong masyarakat membuat pilihan yang lebih baik, kesejahteraan seseorang dilihat dari *willingness to pay* saat individu atau masyarakat berperan sebagai konsumen. Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Menurut Pigou (1960), teori ekonomi kesejahteraan adalah bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang. Kesejahteraan dapat didekati berdasarkan dua hal (Campbell, 1976; Sumawan dan Tahira, 1993; Milligan *et al*., 2006), yaitu: 1) kesejahteraan subjektif dan 2) kesejahteraan objektif. Kesejahteraan dialamatkan bagi tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Pada tingkat individu, perasaan bahagia atau sedih, kedamaian atau kecemasan jiwa, dan kepuasan atau ketidakpuasan merupakan indikator subjektif dari kualitas hidup. Pada tingkat keluarga, kecukupan kondisi perumahan (dibandingkan standar), seperti ada tidaknya air bersih, merupakan contoh

indikator objektif. Kepuasan anggota keluarga mengenai kondisi rumah merupakan indikator subjektif. Pada tingkat masyarakat, beberapa contoh dari indikator objektif di antaranya adalah angka kematian bayi, angka pengangguran dan tuna wisma. Kesejahteraan subjektif diukur dari tingkat kebahagiaan dan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Pendekatan ini merupakan ukuran kesejahteraan yang banyak digunakan di negara maju termasuk Amerika Serikat.

Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut (Sawidak, 1985). Tingkat kepuasan yang terkait emosional akan mempengaruhi aspek tingkah laku individu untuk menilai kepuasan pada variabel-variabel lainnya seperti kepuasan pada kualitas kehidupan (Currivan, 1999; Lambert *et al*., 2001; Robbins dan Judge, 2007; Falkenburg dan Schyns, 2007). Nilai kepuasan emosional juga akan meningkatkan kinerja dan kontribusi individu pada lingkungannya (Lock, 1976; Viswesvaran dan Ones, 2000; Butler dan Rose, 2011).

Sayogyo (1984) mengkaji kesejahteraan dan mendefinisikan kesejahteraan keluarga sebagai penjabaran delapan jalur pemerataan dalam trilogi pembangunan sejak Repelita III, yaitu: 1) peluang berusaha; 2) peluang bekerja; 3) tingkat pendapatan; 4) tingkat pangan, sandang, perumahan; 5) tingkat pendidikan dan kesehatan; 6) peran serta; 7) pemerataan antar daerah, desa/kota; dan 8) kesamaan dalam hukum. Mirrowsky dan Ross (1989) mengkaji kajian kesejahteraan dengan penyakit, kesakitan, kesulitan ekonomi yang dihubungkan dengan depresi. Kepuasan hidup sebagai bagian dari dimensi kesejahteraan meliputi kesehatan, penerimaan terhadap kecukupan ekonomi, pertolongan (dukungan sosial), dan interaksi sosial. Penelitian Bane dan Ellwood (1994); Coward *et al*. (1994); Scott

dan Buttler (1997), yang menganalisis kombinasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif. Kesejahteraan subjektif digunakan dalam penelitian ini sebagai konstruk yang lebih global dikaitkan dengan beragam dimensi lingkungan yang melengkapi fasilitas dan pelayanan transportasi, pewaratan kesehatan, perumahan, jasa kesehatan mental, jasa ekonomi, dan kesempatan untuk menjadi relawan. Digunakan beragam indikator kesehatan mental (seperti moral dan depresi) yang menilai kualitas pengalaman individu (*the inner-experience*), sedangkan kompetensi personal berkaitan dengan aspek kesehatan, status keuangan, dan lingkungan yang memberikan dukungan pribadi.

Bryant (1990) menyatakan bahwa organisasi ekonomi analisis perilaku ekonomi rumah tangga (orang yang bertempat tinggal dalam atap yang sama dan pengelolaan keuangan yang sama, serta terdiri dari keluarga). Kajian organisasi ekonomi dalam keluarga menggunakan *demand* terhadap barang strategis sebagai indikator kesejahteraan. Ukuran lainnya kesejahteraan adalah proporsi pengeluaran untuk pangan. Menurut Bubolz dan Sontag (1993), kesejahteraan merupakan terminologi lain dari kualitas hidup manusia (*quality of human life*), yaitu suatu keadaan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasinya nilai-nilai hidup. Zeitlin *et al*., (1995) menggunakan istilah kesehatan sosial keluarga dan kesejahteraan sosial keluarga bagi keluarga yang dapat melahirkan individu (anak) dengan pertumbuhan dan perkembangan yang baik.

Menurut Whithaker dan Federico (1997), pengertian kesejahteraan sosial merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut. Seseorang yang mempunyai kekurangan kemampuan mungkin memiliki kesejahteraan yang rendah, kurangnya

kemampuan dapat berarti kurang mampu untuk mencapai fungsi tertentu sehingga kurang sejahtera. Terdapat beragam pengertian mengenai kesejahteraan, karena lebih bersifat subjektif dimana setiap orang dengan pedoman, tujuan dan cara hidupnya yang berbeda-beda akan memberikan nilai-nilai yang berbeda pula tentang kesejahteraan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan (Sianipar, 1997).

Menurut Sumarti (1999), perbedaan status sosial budaya dan spesialisas kerja akan menghasilkan persepsi kesejahteraan yang berbeda pula. Terdapat kelompok masyarakat yang menggunakan ukuran kesejahteraan bersumber pada simbol kekuasaan budaya-politik, sementara monetisasi ekonomi menghantarkan kalangan masyarakat pada umumnya untuk lebih menggunakan ukuran kesejahteraan ekonomi dibandingkan ukuran kesejahteraan sosial. Skoufias *et al*., (2000) menyatakan bahwa pengukuran kesejahteraan bersifat subjektif manakala berkaitan dengan aspek psikologis yaitu diukur dari kebahagiaan dan kepuasan. Mengukur kesejahteraan secara objektif menggunakan patokan tertentu yang relatif baku, seperti menggunakan pendapatan per kapita, dengan mengasumsikan terdapat tingkat kebutuhan fisik untuk semua orang hidup layak. Ukuran yang sering digunakan adalah kepemilikan uang, tanah, atau aset. Pada prinsipnya aspek yang dapat diamati dalam menganalisis kesejahteraan hampir sama, yaitu mencakup dimensi: pendapatan, pengeluaran untuk konsumsi, status pekerjaan, kondisi kesehatan, serta kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan kebutuhan dasar (seperti air, sanitasi, perawatan kesehatan dan pendidikan). Sedang menurut Rambe (2004), kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warganegara

untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Berdasarkan tingkat ketergantungan dari dimensi standar hidup (*standard of living*) masyarakat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dibedakan kedalam satu sistem kesejahteraan (*well-being*) dan dua subsistem, yakni: 1) subsistem sosial; dan 2) subsistem ekonomi, dengan beberapa faktor di antaranya kesejahteraan manusia, kesejahteraan sosial, konsumsi, tingkat kemiskinan, dan aktivitas ekonomi (World Bank: Santamarina *et al*., 2004). Di negara-negara maju, seperti Canada menggunakan 19 indikator kualitas hidup masyarakat (*quality of life*) yang tersebar ke dalam empat subsistem, yakni: 1) Indikator ekonomi: a) GDP perkapita, b) pendapatan perkapita, c) inovasi, d) lapangan kerja, e) melek huruf; dan f) tingkat pendidikan; 2) Indikator kesehatan: a) usia harapan hidup, b) status kesehatan, c) tingkat kematian bayi (IMR), dan d) aktivitas fisik; (3) Indikator lingkungan: a) kualitas udara, b) kualitas air, c) *biodiversity*, dan d) lingkungan yang sehat; dan 4) Indikator keamanan dan keselamatan masyarakat: a) sukarela, b) *diversity*, c) berpartisipasi dalam aktivitas budaya, d) berpartisipasi dalam kegiatan politik, dan e) keamanan dan keselamatan (Sharpe, 2004).

Menurut penelitian Sugiharto (2007) indikator yang digunakan Biro Pusat Statistik (BPS) untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu: a) tinggi; b) sedang; c) rendah. Indikator pengeluaran digolongkan menjadi 3 item yaitu: a) tinggi; b) sedang; c) rendah. Indikator tempat tinggal

yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) permanen; b) semi Permanen; dan c) non permanen. Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item, yaitu pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah. Dari 12 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) lengkap; b) cukup; dan c) kurang. Indikator kesehatan anggota keluarga digolongkan menjadi 3 item yaitu: a) bagus; b; cukup; dan c) kurang. Indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari 5 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan, dan alat kontrasepsi. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) mudah; b) cukup; dan c) sulit. Indikator kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan terdiri dari 3 item yaitu biaya sekolah, jarak ke sekolah, dan proses penerimaan. Dari 3 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) mudah; b) cukup; dan c) sulit. Indikator kemudahan mendapatkan transportasi terdiri 3 item, yaitu ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan kendaraan. Dari 3 item tersebut kemudian akan di digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) mudah; b) cukup; dan c) sulit. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggunakan kriteria tahapan kesejahteraan keluarga untuk mengukur kesejahteraan (Sugiharto, 2007). Lima pengelompokkan tahapan keluarga sejahtera menurut BKKBN adalah sebagai berikut:

f) Keluarga pra sejahtera, adalah keluarga yang belum dapat memenuhi

salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai keluarga sejahtera tahap I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, sandang, pangan, papan, dan kesehatan;

g) Keluarga sejahtera tahap I, adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Indikator yang digunakan, yaitu :

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut.
2. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
4. Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.
5. Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber-KB dibawa ke sarana/petugas kesehatan;

h) Keluarga sejahtera tahap II, yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera I, harus pula memenuhi syarat sosial psikologis 6 sampai 14 yaitu :

24. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
25. Paling kurang, sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk.
26. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru per tahun.
27. Luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi tiap

penghuni rumah.

28. Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat.
29. Paling kurang 1 (satu) orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap.
30. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin.
31. Seluruh anak berusia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini.
32. Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih pasangan usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil);

i) Keluarga sejahtera tahap III, yaitu keluarga yang memenuhi syarat 1 sampai 14 dan dapat pula memenuhi syarat 15 sampai 21, syarat pengembangan keluarga yaitu :

33. Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
34. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.
35. Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.
36. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
37. Mengadakan rekreasi bersama diluar rumah paling kurang 1 kali/6 bulan.
38. Dapat memperoleh berita dari surat kabar/TV/majalah.
39. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang

sesuai engan kondisi daerah setempat;

j) Keluarga sejahtera tahap III plus, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kriteria 1 sampai 21 dan dapat pula memenuhi kriteria 22 dan 23 kriteria pengembangan keluarganya yaitu:

a. Secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.

b. Kepala Keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan/yayasan/institusi masyarakat

Terdapat beberapa penelitian menggunakan kesejahteraan sebagai konstuk dengan berbagai definisi dan ragam indikatornya. Bradbury *et al*., (1979) melakukan penelitian untuk menguji model hipotesis apakah perubahan jaminan pendapatan tambahan dan bantuan umum berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga dengan kepala keluarga wanita. Ukuran kesejahteraan ekonomi menggunakan ukuran pendapatan yang kemudian digunakan dalam menentukan garis kemiskinan sebagai indikator kesejahteraan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan ukuran pendapatan dan garis kemiskinan, kesejahteraan ekonomi dengan kepala keluarga wanita dengan tanggungan anak adalah paling rendah jika dibandingkan dengan tanpa anak. Dunst dan Triviette (1988), meneliti hubungan dukungan sosial dan kesehatan serta kesejahteraan dengan menggunakan indeks kesejahteraan psikologi (Bradburn dan Caplovitz, 1965) dan indeks kesejahteraan individu (Dunst dan Triviette, 1986).

Penelitian Nurmawati (1994) menunjukkan bahwa keluarga sejahtera memiliki keragaan yang lebih baik dalam semua variabel penelitian dibandingkan keluarga pra-sejahtera. Besar keluarga sejahtera lebih sedikit dari keluarga pra-

sejahtera, pendapatan per kapita keluarga pra-sejahtera lebih rendah dari keluarga sejahtera, pendapatan keluarga sejahtera dan pra sejahtera lebih tinggi dari kriteria kemiskinan. Persentase pengeluaran pangan keluarga pra-sejahtera lebih besar dari keluarga sejahtera, pengetahuan gizi ibu dari keluarga pra-sejahtera lebih rendah dari keluarga sejahtera, status gizi balita baik dari keluarga sejahtera lebih baik dari status gizi balita keluarga pra-sejahtera. Febrero dan Schwartz (1995), mengkaji kesejahteraan dalam kaitannya dengan perilaku konsumsi di keluarga, khususnya menyoroti perilaku *altruistik* dari sebagian anggota keluarga dari sudut pandang ahli ekonomi terhadap perilaku konsumsi di keluarga. Anggota keluarga *altruistik* melakukan serangkaian perilaku pengorbanan yang menyebabkan peningkatan kesejahteraan bagi anggota lainnya dalam keluarga. Hasil kajian sebaliknya menunjukkan bahwa peningkatan sumber daya bagi anggota keluarga yang egoistik berakibat terhadap penurunan kesejahteraan anggota keluarga lainnya, khususnya yang altruistik. Sedang Narayan *et al*. (2000), dalam bukunya "*Voices of The Poor. Can Anyone Hear Us*?" mengkaji kemiskinan (*poverty*) di berbagai negara serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam kajian tersebut digunakan beberapa konsep atau istilah kesejahteraan sebagai sisi lain pengukuran kemiskinan seperti kesejahteraan material dan kesejahteraan psikologi. Khomsan *et al*. (1997) melakukan penelitian identifikasi indikator kemiskinan dan menggunakan kriteria BKKBN dengan indikator keluarga sejahtera sebagai penentuan sampling dengan pertimbangan bersifat operasional, memperhatikan aspek kualitatif dan kuantitatif, data tersedia karena dilakukan pendataan secara reguler sehingga memudahkan untuk sampling penelitian. Hasil kajian menyimpulkan bahwa apapun indikator yang dipilih, akan mengandung

misklasifikasi saat uji akurasi dengan menggunakan indikator lain sebagai acuan standarnya. Misklasifikasi tergantung dari definisi kemiskinan yang digunakan. Sebuah indikator akan tergantung dari definisi operasional yang digunakannya, dan terbuka bagi kritik yang dilakukan pihak lain karena menggunakan ruang lingkup definisi yang berbeda.

Pudjirahayu (1999) menggunakan indikator keluarga sejahtera BKKBN sebagai dasar sampling penelitian dengan menggunakan kriteria kemiskinan pendapatan rumah tangga, menunjukkan terdapat misklasifikasi rumah tangga miskin baik di pedesaan maupun perkotaan (versi BKKBN) menjadi tidak miskin menurut kriteria BPS. Namun ketika menggunakan kriteria BPS yaitu pengeluaran rumah tangga, menunjukkan tingkat kesesuaian 81-82 persen kriteria menurut BKKBN dan BPS. Penelitian Rambe (2004), mengkaji akurasi (sensitifitas dan spesifisitas) empat indikator kemiskinan: BPS, BKKBN, pengeluaran pangan, dan ukuran subjektif. Hasil kajian menunjukkan bahwa dari keempat indikator kesejahteraan yang diteliti, indikator keluarga sejahtera BKKBN dianggap paling baik karena selain mudah dalam pengoperasiannya hingga ke level administrasi terendah dan dengan cepat dapat mengklasifikasikan keluarga miskin. Indikator KS dan indikator pengeluaran pangan memiliki spesifisitas yang tinggi (63,3 persen) dibandingkan indikator BPS dan indikator subjektif.

Hubungan Sosial Demografi Terhadap Kesempatan Kerja

Menurut Banks dan Henry (1993) bahwa usaha untuk meningkatkan kesempatan kerja ditentukan tingkat kepentingan individu untuk bekerja.

Meskipun beberapa penelitian menyimpulkan situasi tidak bekerja akan berakibat negatif dan menyakitkan pada kondisi psikologis individu dan lingkungan (Furnham, 1982; Liem dan Rayman, 1982; Vinokur dan Caplan, 1987; Dooley dan Catalano, 1988; Frost dan Clayson, 1991; Klein *et al*., 1992; Banks dan Henry, 1993; Wanberg dan Marchese, 1994; Sheeran *et al*., 1995; Vinokur dan Schul, 1997; Kinicki *et al*., 2000), beberapa peneliti menemukan bahwa individu tidak bekerja yang mendapakan bantungan dari lingkungan sosialnya cenderung untuk menjadi malas dan tidak sepenuhnya berkeinginan untuk meningkatkan kesempatan kerja (Tanner, 1995; Dickson dan Tannner, 1996; Casee, 1997). Beberapa penelitian juga menemukan bahwa keinginan untuk memanfaatkan kesempatan kerja akan meningkat jika ada kesempatan kerja yang memadai untuk

meningkatkan pendapatan (Gueron, 1987; Hagen dan Lurie, 1995; Halter, 1996; Henly dan Danziger, 1996; Mills, 1996; Edin dan Lein, 1997; Opulente dan Mattaini, 1997; Schneider, 2000).

Becker (1993) dalam suatu penelitian di Amerika Serikat menemukan bahwa mengikuti pendidikan menengah dan pendidikan tinggi langsung meningkatkan tingkat pendapatan seseorang meskipun masih terdapat biaya langsung dan tidak langsung, menyesuaikan dengan latar belakang keluarga dan kemampuan individu. Becker berpendapat bahwa peningkatan pendapatan ini adalah hasil dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berpikir kritis diperoleh melalui kegiatan pendidikan. Namun, terdapat perbedaan yang jelas antara lulusan SMA dan lulusan perguruan tinggi dalam pendapatan karena tingkat pendidikan yang berbeda. Selain itu, perbedaan juga terjadi pada lulusan perguruan tinggi dan mereka yang putus kuliah. Becker (1993) menyimpulkan bahwa "putus kuliah" tidak memiliki kemampuan lebih besar dari lulusan SMA. Selanjutnya, menurut Becker, kemampuan dari yang lulus kuliah bervariasi di seluruh kelompok berdasarkan perbedaan sosial demografinya. Ia menemukan bahwa tingkat pendapatan untuk penduduk perkotaan, kulit putih, lulusan perguruan tinggi, dan laki-laki lebih tinggi dari tingkat pendapatan untuk penduduk pedesaan, kulit berwarna, perempuan, dan "putus kuliah."

Beberapa penelitian berkaitan dengan faktor-faktor hambatan memperoleh kesempatan kerja mendapatkan diantaranya mengasuh anak, transportasi, kesehatan yang buruk, kesehatan mental yang buruk, cacat fisik, kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan zat, dan pengaruh negatif dari teman sebaya, bahkan ras sering dikutip sebagai penghalang untuk bekerja (Edin dan Lein, 1997). Sebuah studi Pearlmutter dan Bartle (2003) menemukan bahwa ibu-ibu bekerja marah tentang kurangnya pilihan mengasuh anak, terutama ibu-ibu yang bekerja di industri jasa yang kadang bekerja malam bahkan akhir pekan. Juga, banyak ibu membutuhkan merawat anak sakit atau merawat anak cacat (Lens, 2002). Menurut penelitian Zippay dan Rangarajan (2007), 78 persen ibu bekerja mengandalkan perawatan anak informal oleh keluarga atau teman. Mengasuh anak telah terbukti mempengaruhi jumlah jam kerja. Mengasuh anak mengakibatkan penurunan jumlah jam kerja (Press *et al*., 2005; Joo, 2008).

Dalam beberapa penelitian lainnya, pengalaman kerja (pekerjaan yang dilakukan tenaga kerja sebelumnya) dilaporkan menjadi prediktor kerja. Tahun yang dihabiskan di pekerjaan sebelumnya sangat penting untuk mendapatkan pekerjaan baru dan tetap bekerja (Cheng, 2002;. Lee *et al*., 2004). Selain itu, mereka yang bekerja di sektor pekerjaan informal yang kurang mungkin untuk dipekerjakan (Lee *et al*., 2004). Kemampuan untuk memiliki fasilitas yang mendukung, seperti telepon, transportasi, dan dukungan sosial juga penting untuk mencapai dan mempertahankan pekerjaan. Misalnya, individu yang tidak bekerja yang memiliki telepon lebih mungkin untuk dipekerjakan (Latimer, 2004). Kemungkinan dipekerjakan lebih rendah bagi mereka yang belum pernah bekerja, sementara kurangnya pengalaman kerja sebelumnya dikaitkan dengan pendapatan yang lebih rendah (Dworsky dan Courtney, 2007).

Transportasi juga ditemukan untuk menjadi penghalang untuk mencapai dan mempertahankan kerja (Brooks *et al*., 2001; Pandey *et al*., 2004). Selain itu, orang-orang dengan transportasi lebih mungkin untuk memiliki pekerjaan tetap, dan kepemilikan kendaraan bekerja adalah prediktor kerja (Latimer, 2004; Lee *et al*., 2004; Weaver *et al*., 2007). Satu

studi menemukan bahwa berdasarkan rata- rata nasional, sebesar 91 persen rumah tangga pedesaan tidak memiliki kendaraan dari (Pandey *et al*., 2004). Bahkan pekerjaan entry-level yang terutama terletak di pinggiran kota tidak terjangkau transportasi umum (Lens, 2002). Hambatan lain untuk memperoleh kesempatan kerja meliputi kesehatan yang buruk dan kesehatan mental, cacat fisik, dan kekerasan dalam rumah tangga. Satu studi menemukan bahwa kesehatan bukanlah prediktor signifikan dari kesempatan kerja, namun penelitian lain menemukan bahwa pekerja yang kesehatannya rendah kurang mungkin untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang lebih rendah dibandingkan dengan kesehatan baik (Dworsky dan Courtney, 2007; Weaver *et al*., 2007; Kyoung dan Yoon, 2008).

Selain itu, orang-orang dengan depresi kurang mungkin untuk dipekerjakan (Lee *et al*., 2004). Kecacatan juga ditemukan secara negatif terkait dengan pekerjaan dan penghasilan (Kim, 2000; Dworsky dan Courtney, 2007). Mereka yang cacat lebih mungkin untuk memiliki pekerjaan sementara meskipun dengan pendapatan yang lebih rendah (Latimer, 2004). Akhirnya, Lee *et al*. (2004) menemukan bahwa orang-orang dengan sejarah kekerasan dalam rumah tangga mungkin untuk mendapatkan kesempatan kerja.

Suatu komunitas yang memiliki modal sosial yang rendah hampir dapat dipastikan kualitas pembangunan manusianya akan jatuh tertinggal. Beberapa dimensi pembangunan manusia yang sangat dipengaruhi oleh modal sosial antara lain kemampuannya untuk menyelesaikan berbagai problem kolektif, mendorong roda perubahan yang cepat di tengah masyarakat memperluas kesadaran bersama bahwa banyak jalan yang bisa dilakukan oleh setiap anggota kelompok untuk memperbaiki nasib secara bersama-sama, memperbaiki mutu kehidupan seperti meningkatkan kesejahteraan, perkembangan anak dan banyak keuntungan lainnya yang dapat diperoleh.

Masyarakat yang memiliki modal sosial yang tinggi akan membuka kemungkinan menyelesaikan kompleksitas persoalan dengan lebih mudah. Hal ini memungkinkan terjadi terutama pada masyarakat yang terbiasa hidup

dengan rasa saling mempercayai yang tinggi. Masyarakat yang bersatu dan memiliki hubungan-hubungan keluar lingkungan kelompoknya secara intensif dan dengan didukung oleh semangat kebajikan untuk hidup saling menguntungkan, akan merefelksikan kekuatan masyarakat sendiri (Hasbullah, 2006). Modal sosial ibarat minyak pelumas yang bukan hanya memperlicin, tetapi juga akan terus mendorong roda kendaraan hidup yang memungkinkan masyarakat berkembang secara baik dan aman. Berkembangnya modal sosial ditengah masyarakat akan menciptakan suatu situasi masyarakat yang toleran, jauh dari sifat iri dan dengki serta merangsang tumbuhnya simpati dan empati terhadap kelompok masyarakat diluar kelompoknya.

Jaringan-jaringan sebagai wujud dari modal sosial akan memungkinkan lebih mudahnya saluran informasi dan ide dari luar yang merangsang perkembangan kelompok masyarakat. Mereka akan lebih mudah terhindar dari penyakit-penyakit kejiwaan seperti kecemasan, depresi dan akan hidup lebih sehat. Hal ini dapat terjadi karena di dalam masyarakat tersebut tumbuh kembang kepedulian bersama dalam berbagai aspek dan dimensi aktifitas kehidupan. Masyarakat saling memberi dan perhatian dan saling mempercayai. Situasi yang demikian akan mendorong tidak hanya ide dan kreatifitas, tetapi juga suasana hidup lebih damai, bersahabat dan tenteram.

Sebagai contoh, Putnam (2000) temuannya tentang dampak positif modal sosial terhadap perkembangan tumbuh kembang anak. Dalam suatu penelitiannya tentang masyarakat Amerika ditemukan bahwa pada masyarakat yang memiliki modal sosial yang kuat, perkembangan baik, kesehatan, pencapaian belajar dan situasi kejiwaan mereka lebih baik, dibanding yang memiliki modal sosial yang rendah. Rasa saling percaya, jaringan-jaringan pertemanan dan norma-norma yang merefeleksikan kebiasaan saling memberi dalam keluarga, di sekolah dan di komunitas yang lebih besar, berpengaruh positif pada pola tingkah laku anak dan pada perkembangan fisik mereka.

Modal sosial muncul sebagai pelengkap dari modal manusia (tingkat pendidikan dan keterampilan kerja individu yang ditawarkan kepada pemberi kerja). Modal sosial, seperti modal manusia, memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas dalam kesempatan kerja, tetapi secara khusus mengacu pada hubungan sosial daripada tingkat pendidikan atau keahlian teknis (Harris, 1993; Putnam, 1995; Schneider, 2006). Coleman (1988) menyatakan bahwa modal sosial dan modal manusia adalah kombinasi relasional yang memungkinkan tercapainya tujuan tertentu dari keadaan tidak akan mungkin. Schneider (2002) mengacu pada modal sosial sebagai hubungan sosial dan pola kepercayaan yang memungkinkan orang untuk mendapatkan akses ke sumber daya seperti layanan pemerintah atau pekerjaan, sementara Li (2004) menunjukkan dalam bentuk pengaturan sosial sebagai sumber potensi yang dapat digunakan untuk mengejar tujuan ekonomi dan sosial. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa akumulasi modal sosial berpengaruh pada hasil sosial dan ekonomi yang positif. Contohnya, modal sosial yang tinggi telah meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, mengurangi kemiskinan dan konflik dalam keluarga, peningkatan tabungan dan aset, dan peningkatan akses investasi (Yusuf, 2008; Brisson, 2009; George dan Chaze, 2009).

Sejalan dengan hal tersebut, terdapat hubungan positif antara modal sosial dan kemajuan karir dan pemanfaatan teknologi (Manturuk *et al*., 2009). Modal sosial juga dikaitkan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan, modal sosial dapat membantu dalam upaya orang berpenghasilan rendah 'untuk meningkatkan kesejahteraan, mendapatkan pekerjaan yang aman dan manfaat lainnya seperti tunjangan anak dan pelayanan kesehatan (Lévesque, 2005; Parisi *et al*., 2003; Schneider, 2002). Modal sosial yang rendah terkait dengan rendahnya kesejahteraan dan kerawanan pangan (Henderson dan Tickamyer, 2008). Di sisi lain, Pichler dan Wallace (2009), serta Seo (2005), menunjukkan bahwa modal sosial memiliki sedikit pengaruh pada kesejahteraan ekonomi pada populasi yang diteliti. Penelitian lain (Livermore dan Neustrom, 2003: Adato *et al*., 2006; Chantarat dan Barrett, 2008) justru menghasilkan temuan bahwa modal sosial memiliki pengaruh yang

merugikan pada berbagai indikator kesejahteraan ekonomi, termasuk mobilitas ekonomi, pekerjaan, dan produktivitas

3. Latihan

1. Apakah yang dimaksud dengan Index Mutu Hidup dalam Ekonomi Kesejahteraan ?
2. Sebutkan alasannya mengapa bisa terjadi dalam perkembangan teori ekonomi kesejahteraan ?

Kunci Jawaban

3. IMH mencerminkan tingkat pendidikan dan kesehatan yang terdiri dari tiga komponen yaitu : Pertama, angka melek huruf. Kedua, angka harapan hidup. Ketiga, angka kematian bayi. Selain itu gambaran mengenai kualitas sumber daya manusia sebagai faktor yang paling dominan dalam pembangunan dapat diukur juga dengan menggunakan pendekatan Indeks Kualitas sumber daya manusia tidak terlepas dari produktifitas kerja dari sumber daya manusia tersebut, karena sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari produktifitas kerjanya (Siregar, 2009). Terjadinya peningkatan kualitas masyarakat akan berdampak terhadap peningkatan produktifitas mereka. Hidayat dalam Delyuzer (2012) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia sebagai subjek pembangunan disamping dapat menentukan tinggi rendahnya produktifitas juga akan menentukan keberhasilan pembangunan dan produktifitas adalah motor penggerak bagi pembangunan ekonomi. Jadi dapat dikatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dicerminkan pada kontribusi

terhadap pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Menurut Tjiptoherijanto (2008), Faktor yang mempengaruhi kualitas masyarakat secara luas adalah faktor pendapatan, faktor pendidikan dan faktor kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan pendapatan memberikan gambaran pada peningkatan kualitas masyarakat secara signifikan.

4. Skoufias *et al*., (2000) menyatakan bahwa pengukuran kesejahteraan bersifat subjektif manakala berkaitan dengan aspek psikologis yaitu diukur dari kebahagiaan dan kepuasan. Mengukur kesejahteraan secara objektif menggunakan patokan tertentu yang relatif baku, seperti menggunakan pendapatan per kapita, dengan mengasumsikan terdapat tingkat kebutuhan fisik untuk semua orang hidup layak. Ukuran yang sering digunakan adalah kepemilikan uang, tanah, atau aset. Pada prinsipnya aspek yang dapat diamati dalam menganalisis kesejahteraan hampir sama, yaitu mencakup dimensi: pendapatan, pengeluaran untuk konsumsi, status pekerjaan, kondisi kesehatan, serta kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan kebutuhan dasar (seperti air, sanitasi, perawatan kesehatan dan pendidikan). Sedang menurut Rambe (2004), kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warganegara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Menurut Sumarti (1999), perbedaan status sosial budaya dan spesialisas kerja akan menghasilkan persepsi kesejahteraan yang berbeda pula. Terdapat kelompok masyarakat yang menggunakan ukuran kesejahteraan bersumber pada simbol kekuasaan budaya-politik, sementara monetisasi ekonomi menghantarkan kalangan masyarakat pada umumnya untuk lebih menggunakan ukuran kesejahteraan ekonomi dibandingkan ukuran kesejahteraan sosial.

Daftar Pustaka

Boediono, Dr., Ekonomi Internasional dan Nasional, BPFE, Yogyakarta, 2014 diakses 9 September 2020

Halwani, Hendra. Dra. M.H., dan Tjiptoharijanto, Prijono, H. Dr., Perdagangan Internasional, Pendekatan Ekonomi Kesejahteraan Makro & Mikro, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.

Tambunan, Tulus T.H., Dr., Perekonomian dan Ekonomi Kesejahteraan Indonesia,, Teori dan temuan Empiris, Ghalia Indonesia, 2017

MODUL EKONOMI KESEJAHTERAAN

(KAK 357)

MODUL 10

INDEX GINI DAN INDEX MUTU HIDUP

(DALAM EKONOMI KESEJAHTERAAN)

DISUSUN OLEH

Erlina Puspitaloka Mahadewi, SE, MM, MBL (5661)

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2022

G. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari Modul ini, diharapkan Mahasiswa mampu :

1. Memahami dan mempelajari definisi Index Gini dan Index Mutu Hidup dalam Ekonomi Kesejahteraan
2. Menguraikan konsep dasar Index Gini dan Index Mutu Hidup dalam Ekonomi Kesejahteraan

H. Uraian dan Contoh

1. Visi dan Misi UEU

Universitas Esa Unggul mempunyai visi menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Universitas Esa Unggul menetapkan misi-misi sebagai berikut :

j. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan
k. Menciptakan suasana akademik yang kondusif
l. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan

Topik Perkuliahan : Index Gini dan Index Mutu Hidup

Sub Topik : Pengertian dan Implementasi Dalam Ekonomi Kesejahteraan

I. Uraian

Index Gini dan Index Mutu Hidup Dalam Ekonomi Kesejahteraan

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk atau rasio gini (*gini ratio*) di Indonesia pada Maret 2020 mencapai 0,381 atau melebar ketimbang rasio gini September 2019 sebesar 0,380. BPS menyatakan bahwa ingkat ketimpangan pengeluaran sebenarnya membaik bila dibandingkan dengan rasio gini Maret 2019 sebesar 0,382. Meski begitu, realisasi rasio gini Maret 2020 tetap perlu menjadi perhatian. Selama periode Maret 2015 hingga Maret 2019 telah terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia. Namun, *gini ratio* naik lagi pada Maret 2020. Untuk diketahui, angka koefisien rasio gini berkisar 0 hingga 1. Koefisien 0 menandakan tingkat pengeluaran merata sempurna, sedangkan koefisien

I menunjukkan ketimpangan yang sempurna, rasio gini di daerah perkotaan pada Maret 2020 tercatat 0,393. Angka rasio itu itu meningkat ketimbang rasio gini September 2019 sebesar 0,391 dan Maret 2019 sebesar 0,392. Rasio gini pada daerah pedesaan juga melebar menjadi 0,317 pada Maret 2020 dibandingkan dengan September 2019 sebesar 0,315. Meski begitu, nilai rasio gini tersebut tidak berubah bila disbandingkan dengan Maret 2019 sebesar 0,317. Berdasarkan provinsi, rasio gini tertinggi Maret 2020 berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebesar 0,434. Sementara itu, rasio gini terendah tercatat di Provinsi Bangka Belitung sebesar 0,262. BPS juga mencatat setidaknya terdapat delapan provinsi dengan angka rasio gini lebih tinggi ketimbang rasio gini nasional di antaranya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,434. Kemudian, Gorontalo sebesar 0,408, Jawa Barat 0,403, dan DKI Jakarta 0,399. Selain itu, ada Papua dengan rasio gini sebesar 0,392, Sulawesi Tenggara 0,389, Sulawesi Selatan 0,389, dan Papua Barat sebesar 0,382. Namun, ketika pada akhir tahun 1990-an Krisis Finansial Asia terjadi, tingkat kemiskinan di Indonesia melejit tinggi, dari 11 persen menjadi 19.9 persen di akhir tahun 1998, yang berarti prestasi yang sudah diraih Orde Baru hancur seketika. Tabel berikut ini memperlihatkan angka kemiskinan di Indonesia, baik relatif maupun absolut (untuk membaca analisis mengenai Gini Rasio silakan lanjut baca di bagian bawah halaman situs ini):

Statistik Kemiskinan dan Ketidaksetaraan di Indonesia:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kemiskinan Relatif (% dari populasi)	11.5	11.0	11.2	10.7	10.1	9.8[1]
Kemiskinan Absolut (dalam jutaan)	28.6	27.7	28.5	27.8	26.6	26.0[1]
Koefisien Gini/ Rasio Gini	0.41	0.41	0.41	0.40	0.39	0.39[1]

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kemiskinan Relatif (% dari populasi)	16.6	15.4	14.2	13.3	12.5	11.7
Kemiskinan Absolut (dalam jutaan)	37	35	3.25	31.0	30.0	28.7
Koefisien Gini/ Rasio Gini	0.35	0.35	0.37	0.38	0.41	0.41

[1] Maret 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia

Tabel di atas menunjukkan penurunan kemiskinan nasional secara perlahan dan konsisten. Namun, pemerintah Indonesia menggunakan persyaratan yang tidak ketat mengenai definisi garis kemiskinan, sehingga yang tampak adalah gambaran yang lebih positif dari kenyataannya. Tahun 2016 pemerintah Indonesia mendefinisikan garis kemiskinan dengan perdapatan per bulannya (per kapita) sebanyak Rp. 354,386 (atau sekitar USD

$25) yang dengan demikian berarti standar hidup yang sangat rendah, juga buat pengertian orang Indonesia sendiri. Namun jika kita menggunakan nilai garis kemiskinan yang digunakan Bank Dunia, yang mengklasifikasikan persentase penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari USD $1.25 per hari sebagai mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan (dengan kata lain *miskin*), maka persentase tabel di atas akan kelihatan tidak akurat karena nilainya seperti dinaikkan beberapa persen. Lebih lanjut lagi, menurut Bank Dunia, kalau kita menghitung angka penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari USD $2 per hari angkanya akan meningkat lebih tajam lagi. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia hidup hampir di bawah garis kemiskinan. Laporan lebih anyar lagi di media di Indonesia menginformasikan bahwa sekitar seperempat jumlah penduduk Indonesia (sekitar 65 juta jiwa) hidup hanya sedikit saja di atas garis kemiskinan nasional. Dalam beberapa tahun belakangan ini angka kemiskinan di Indonesia memperlihatkan penurunan yang signifikan. Meskipun demikian, diperkirakan penurunan ini akan melambat di masa depan. Mereka yang dalam beberapa tahun terakhir ini mampu keluar dari kemiskinan adalah mereka yang hidup di ujung garis kemiskinan yang berarti tidak diperlukan sokongan yang kuat untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Namun sejalan dengan berkurangnya kelompok tersebut, kelompok yang berada di bagian paling bawah garis kemiskinanlah yang sekarang harus dibantu untuk bangkit dan keluar dari kemiskinan. Ini lebih rumit dan akan menghasilkan angka penurunan tingkat kemiskinan yang berjalan lebih lamban dari sebelumnya. Gambaran mengenai sumber daya manusia dapat diperoleh dengan menggunakan alat ukur berupa indikator komposit objektif yang dikenal luas dengan Indeks Mutu Hidup (IMH). IMH mencerminkan tingkat pendidikan dan kesehatan yang terdiri dari tiga komponen yaitu : Pertama, angka melek huruf. Kedua, angka harapan hidup. Ketiga, angka kematian bayi. Selain itu gambaran mengenai kualitas sumber daya manusia sebagai faktor yang paling dominan dalam pembangunan dapat diukur juga dengan menggunakan pendekatan Indeks

Kualitas sumber daya manusia tidak terlepas dari produktifitas kerja dari sumber daya manusia tersebut, karena sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari produktifitas kerjanya (Siregar, 2009). Terjadinya peningkatan kualitas masyarakat akan berdampak terhadap peningkatan produktifitas mereka. Hidayat dalam Delyuzer (2012) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia sebagai subjek pembangunan disamping dapat menentukan tinggi rendahnya produktifitas juga akan menentukan keberhasilan pembangunan dan produktifitas adalah motor penggerak bagi pembangunan ekonomi. Jadi dapat dikatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dicerminkan pada kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Menurut Tjiptoherijanto (2008), Faktor yang mempengaruhi kualitas masyarakat secara luas adalah faktor pendapatan, faktor pendidikan dan faktor kesehatan. Peningkatan

derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan pendapatan memberikan gambaran pada peningkatan kualitas masyarakat secara signifikan.

Pembangunan Manusia (IPM). IPM ini terdiri dari tiga komponen yaitu : Pertama, pendidikan, yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama bersekolah. Kedua, derajat kesehatan yang terbaca dari angka harapan hidup. Ketiga, pendapatan penduduk yang diukur dengan tingkat daya beli masyarakat (purchasing power parity). Komponen pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi dalam sumber daya manusia yang memberikan sumbangan langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ketrampilan dan produktifitas karena pendidikan berfungsi menyiapkan salah satu input dalam proses produksi yaitu tenaga kerja agar dapat kerja dengan produktif karena kualitasnya dan pada umumnya orang yang mempunyai pendidikan lebih tinggi akan mempunyai wawasan yang lebih luas terutama penghayatan akan pentingnya produktivitas. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia haruslah dimulai dari bawah, yaitu dari pendidikan dasar sehingga sejak dini manusia mempunyai otonomi berfikir sendiri dan mampu bersikap mandiri. Berdasarkan penilaian UNDP (1990) kualitas SDM Indonesia atau tingkat Provinsi juga diukur melalui IPM (human development index).

Komponen kesehatan juga menjadi salah satu dimensi penting sebagai refleksi kualitas sumber daya manusia. Sehingga sangat memungkinkan sekali apabila derajat kesehatan diperbaiki akan berpengaruh secara langsung terhadap kemampuan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan derajat kesehatan suatu penduduk tercermin dari penurunan angka kematian bayi, perbaikan status gizi serta peningkatan umur harapan hidup penduduk karena semakin tinggi kesadaran mereka akan pentingnya hidup sehat, pada akhirnya akan memperpanjang usia harapan hidup. Angka harapan hidup di Provinsi Jambi mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2002 dari 63,5 tahun meningkat pada tahun 2014 menjadi 69,6 tahun. Dan angka kematian bayi di Provinsi Jambi turun dari 56 jiwa per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2002 menjadi 21 jiwa per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2014. Hal ini mencerminkan derajat kesehatan penduduk Jambi yang kian membaik. Komponen Pendapatan masyarakat yang diukur dengan tingkat daya beli masyarakat (purchasing power parity) akan mempengaruhi kemampuan manusia dalam mengakses kehidupan yang layak atau melakukan pengeluaran untuk kesehatan, pendidikan ketrampilan serta pemenuhan kebutuhan fisik minimum. Dengan kata lain akan menggambarkan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Semakin meningkatnya konsumsi rill perkapita maka daya beli masyarakat juga semakin tinggi. Hal ini menunjukan adanya peningkatan kualitas masyarakat karena peningkatan daya beli dan konsumsi memungkinkan masyarakat untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya dengan lebih baik lagi. Akibat lain dari tidak terpenuhinya kebutuhan SDM yang berkualitas adalah masuknya SDM dari wilayah lain diluar Provinsi Jambi yang dapat membuat tersingkirnya SDM lokal karena kalah dalam bersaing. Penduduk yang tidak berkualitas relative sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, bahkan kurang beruntung mendapatkan pekerjaan (pengangguran). Oleh sebab itu, perlu campur tangan pemerintah untuk meningkatkan kualitas penduduk, melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kondisi faktor-faktor dari Indeks Mutu Hidup Masyarakat.

Menurut Wijaya Kuslin (2008) peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Provinsi Jambi seluruhnya mencakup pembangunan manusia, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pembangunan manusia sebagai insan, menekankan harkat, martabat, hak dan kewajiban manusia, yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia. lndeks Mutu Hidup (Physical Quality of Life Indexes) Pada tahun 1979, Morris D. Morris dalam Lincolin Arsyad (2010) memperkenalkan satu indikator alternatif dalam mengukur kinerja pembangunan suatu negara yaitu Indeks Mutu Hidup (IMH) atau Physical Quality of Life Indexes (PQLI). Ada tiga indikator utama yang dijadikan acuan pada indeks ini yaitu a) Angka Kematian Bayi, b) Angka Harapan Hidup suatu umur, dan c) Angka Melek Huruf Orang Dewasa. Berdasarkan setiap indikator tersebut dilakukan pemeringkatan terhadap kinerja pembangunan suatu negara, kinerja tersebut diberi skor antara 1 sampai 100, angka 1 melambangkan kinerja terburuk dan angka 100 melambangkan kinerja terbaik. Untuk indikator harapan hidup, batas atas (upper limit) 100 ditetapkan 80 tahun (harapan hidup tertinggi pada saat studi tersebut dilakukan dicapai oleh swedia). Sedangkan batas bawah (lower limit) adalah 28 tahun (tingkat harapan hidup terendah di Guinea-Bissau pada tahun 1950). Antara batas atas dan batas bawah itulah, tingkat harapan hidup suatu negara diperingkatkan dengan skor antara 1 sampai 100. Demikian pula untuk tingkat kematian bayi, batas atasnya 9 kematian per 1000 kelahiran (juga dicapai Swedia pada tahun 1973). Sedangkan batas bawahnya adalah 229 kematian per 1000 kelahiran (tingkat kematian bayi tertinggi, di Gabon). Komponen ketiga IMH yakni Angka Melek Huruf, Merupakan indikator yang penting karena merupakan ukuran kesejahteraan dan taraf keterampilan yang diperlukan dalam proses pembangunan. Jadi keseluruhannya itu paling penting kaitannya adalah dengan kemampuannya berproduksi yang bermuara pada pendapatan secara khusus dan dengan pertumbuhan ekonomi secara umum. Dalam melihat kualitas sumber daya manusia perlu kiranya dijelaskan beberapa pengertian

dan istilah yang digunakan dalam komponen IMH, yaitu sebagai berikut : 1. Angka kematian bayi (IMR) yaitu sebesar probabilita bayi meninggal sebelum usia satu tahun per 1000 kelahiran hidup. Untuk indeks IMR diperoleh dengan rumus: 22,2 229 IMR IKB Dimana : IKB = Indeks Kematian Bayi IMR = Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup 229 = Tingkat kematian bayi maksimum 2,22 = pembagi yang jika terdapat tingkat kematian bayi terendah yaitu 9 bayi per 1000 kelahiran, maka akan didapatkan indeks = 100 2. Angka Harapan Hidup (Eo) yaitu data yang digunakan adalah data umur harapan hidup. Untuk mencari indeks harapan hidup suatu umur digunakan rumus. Dimana: IHH = Indeks Harapan Hidup Eo = Angka harapan hidup suatu umur 28 = Tingkat harapan hidup terendah 0,39 = Angka yang menunjukkan bahwa bila terjadi kenaikan umur harapan hidup sebesar 0,39 tahun, maka akan menghasilkan 1 poin angka indeks 3. Angka Melek Huruf yaitu menunjukan angka perbandingan antara persentase penduduk usia dewasa (15 tahun keatas) yang melek huruf terhadap jumlah penduduk Usia Dewasa (15 Tahun keatas). Indeks Melek Huruf digunakan rumus lain.

Fergusson *et al*., (1981); Martin (2006) menyatakan bahwa terminologi yang sering digunakan dalam penelitian yang membahas teori kesejahteraan adalah *standard living*, *well-being*, *welfare*, dan *quality of life*. Menurut Just *et al*., 1982, dalam kajian ekonomi kesejahteraan yang bertujuan untuk menolong masyarakat membuat pilihan yang lebih baik, kesejahteraan seseorang dilihat dari *willingness to pay* saat individu atau masyarakat berperan sebagai konsumen. Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Menurut Pigou (1960), teori ekonomi kesejahteraan adalah bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang. Kesejahteraan dapat didekati berdasarkan dua hal (Campbell, 1976; Sumawan dan Tahira, 1993; Milligan *et al*., 2006), yaitu: 1) kesejahteraan subjektif dan 2) kesejahteraan objektif. Kesejahteraan dialamatkan bagi tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Pada tingkat individu, perasaan bahagia atau sedih, kedamaian atau kecemasan jiwa, dan kepuasan atau ketidakpuasan merupakan indikator subjektif dari kualitas hidup. Pada tingkat keluarga, kecukupan kondisi perumahan (dibandingkan standar), seperti ada tidaknya air bersih, merupakan contoh indikator objektif. Kepuasan anggota keluarga mengenai kondisi rumah merupakan indikator subjektif. Pada tingkat masyarakat, beberapa contoh dari indikator objektif di antaranya adalah angka kematian bayi, angka pengangguran dan tuna wisma. Kesejahteraan subjektif diukur dari tingkat kebahagiaan dan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Pendekatan ini merupakan ukuran kesejahteraan yang banyak digunakan di negara maju termasuk Amerika Serikat.

Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut (Sawidak, 1985). Tingkat kepuasan yang terkait emosional akan mempengaruhi aspek tingkah laku individu untuk menilai kepuasan pada variabel-variabel lainnya seperti kepuasan pada kualitas kehidupan (Currivan, 1999; Lambert *et al*., 2001; Robbins dan Judge, 2007; Falkenburg dan Schyns, 2007). Nilai kepuasan emosional juga akan meningkatkan kinerja dan kontribusi individu pada lingkungannya (Lock, 1976; Viswesvaran dan Ones, 2000; Butler dan Rose, 2011).

Sayogyo (1984) mengkaji kesejahteraan dan mendefinisikan kesejahteraan keluarga sebagai penjabaran delapan jalur pemerataan dalam trilogi pembangunan sejak Repelita III, yaitu: 1) peluang berusaha; 2) peluang bekerja; 3) tingkat pendapatan; 4) tingkat pangan, sandang, perumahan; 5) tingkat pendidikan dan kesehatan; 6) peran serta; 7) pemerataan antar daerah, desa/kota; dan 8) kesamaan dalam hukum. Mirrowsky dan Ross (1989) mengkaji kajian kesejahteraan dengan penyakit, kesakitan, kesulitan ekonomi yang dihubungkan dengan depresi. Kepuasan hidup sebagai bagian dari dimensi kesejahteraan meliputi kesehatan, penerimaan terhadap kecukupan ekonomi, pertolongan (dukungan sosial), dan interaksi sosial. Penelitian Bane dan Ellwood (1994); Coward *et al*. (1994); Scott dan Buttler (1997), yang menganalisis kombinasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif. Kesejahteraan subjektif digunakan dalam penelitian ini sebagai konstruk yang lebih global dikaitkan dengan beragam dimensi lingkungan yang melengkapi fasilitas dan pelayanan transportasi, pewaratan kesehatan, perumahan, jasa kesehatan mental, jasa ekonomi, dan kesempatan untuk menjadi relawan. Digunakan beragam indikator kesehatan mental (seperti moral dan depresi) yang menilai kualitas pengalaman individu (*the inner-experience*), sedangkan kompetensi personal berkaitan dengan aspek kesehatan, status keuangan, dan lingkungan yang memberikan dukungan pribadi.

Bryant (1990) menyatakan bahwa organisasi ekonomi analisis perilaku ekonomi rumah tangga (orang yang bertempat tinggal dalam atap yang sama dan pengelolaan keuangan yang sama, serta terdiri dari keluarga). Kajian organisasi ekonomi dalam keluarga menggunakan *demand* terhadap barang strategis sebagai indikator kesejahteraan. Ukuran lainnya kesejahteraan adalah proporsi pengeluaran untuk pangan. Menurut Bubolz dan Sontag (1993), kesejahteraan merupakan terminologi lain dari kualitas hidup manusia (*quality of human life*), yaitu suatu keadaan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasinya nilai- nilai hidup. Zeitlin *et al*., (1995) menggunakan istilah kesehatan sosial keluarga dan kesejahteraan

sosial keluarga bagi keluarga yang dapat melahirkan individu (anak) dengan pertumbuhan dan perkembangan yang baik.

Menurut Whithaker dan Federico (1997), pengertian kesejahteraan sosial merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut. Seseorang yang mempunyai kekurangan kemampuan mungkin memiliki kesejahteraan yang rendah, kurangnya kemampuan dapat berarti kurang mampu untuk mencapai fungsi tertentu sehingga kurang sejahtera. Terdapat beragam pengertian mengenai kesejahteraan, karena lebih bersifat subjektif dimana setiap orang dengan pedoman, tujuan dan cara hidupnya yang berbeda-beda akan memberikan nilai-nilai yang berbeda pula tentang kesejahteraan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan (Sianipar, 1997).

Menurut Sumarti (1999), perbedaan status sosial budaya dan spesialisas kerja akan menghasilkan persepsi kesejahteraan yang berbeda pula. Terdapat kelompok masyarakat yang menggunakan ukuran kesejahteraan bersumber pada simbol kekuasaan budaya-politik, sementara monetisasi ekonomi menghantarkan kalangan masyarakat pada umumnya untuk lebih menggunakan ukuran kesejahteraan ekonomi dibandingkan ukuran kesejahteraan sosial. Skoufias *et al*., (2000) menyatakan bahwa pengukuran kesejahteraan bersifat subjektif manakala berkaitan dengan aspek psikologis yaitu diukur dari kebahagiaan dan kepuasan. Mengukur kesejahteraan secara objektif menggunakan patokan tertentu yang relatif baku, seperti menggunakan pendapatan per kapita, dengan mengasumsikan terdapat tingkat kebutuhan fisik untuk semua orang hidup layak. Ukuran yang sering digunakan adalah kepemilikan uang, tanah, atau aset. Pada prinsipnya aspek yang dapat diamati dalam menganalisis kesejahteraan hampir sama, yaitu mencakup dimensi: pendapatan, pengeluaran untuk konsumsi, status pekerjaan, kondisi kesehatan, serta kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan kebutuhan dasar (seperti air, sanitasi, perawatan kesehatan dan pendidikan). Sedang menurut Rambe (2004), kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warganegara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Berdasarkan tingkat ketergantungan dari dimensi standar hidup (*standard of living*) masyarakat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dibedakan kedalam satu sistem kesejahteraan (*well-being*) dan dua subsistem, yakni: 1) subsistem sosial; dan 2) subsistem ekonomi, dengan beberapa faktor di antaranya kesejahteraan manusia,

kesejahteraan sosial, konsumsi, tingkat kemiskinan, dan aktivitas ekonomi (World Bank: Santamarina *et al*., 2004). Di negara-negara maju, seperti Canada menggunakan 19 indikator kualitas hidup masyarakat (*quality of life*) yang tersebar ke dalam empat subsistem, yakni: 1) Indikator ekonomi: a) GDP perkapita, b) pendapatan perkapita, c) inovasi, d) lapangan kerja, e) melek huruf; dan f) tingkat pendidikan; 2) Indikator kesehatan: a) usia harapan hidup, b) status kesehatan, c) tingkat kematian bayi (IMR), dan d) aktivitas fisik; (3) Indikator lingkungan: a) kualitas udara, b) kualitas air, c) *biodiversity*, dan d) lingkungan yang sehat; dan 4) Indikator keamanan dan keselamatan masyarakat: a) sukarela,

b) *diversity*, c) berpartisipasi dalam aktivitas budaya, d) berpartisipasi dalam kegiatan politik, dan e) keamanan dan keselamatan (Sharpe, 2004).

Menurut penelitian Sugiharto (2007) indikator yang digunakan Biro Pusat Statistik (BPS) untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu: a) tinggi; b) sedang; c) rendah. Indikator pengeluaran digolongkan menjadi 3 item yaitu: a) tinggi; b) sedang; c) rendah. Indikator tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) permanen; b) semi Permanen; dan c) non permanen. Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item, yaitu pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah. Dari 12 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) lengkap; b) cukup; dan c) kurang. Indikator kesehatan anggota keluarga digolongkan menjadi

3 item yaitu: a) bagus; b; cukup; dan c) kurang. Indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari 5 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan, dan alat kontrasepsi. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) mudah; b) cukup; dan c) sulit. Indikator kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan terdiri dari 3 item yaitu biaya sekolah,

jarak ke sekolah, dan proses penerimaan. Dari 3 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) mudah; b) cukup; dan c) sulit. Indikator kemudahan mendapatkan transportasi terdiri 3 item, yaitu ongkos

kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan kendaraan. Dari 3 item tersebut kemudian akan di digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) mudah; b) cukup; dan c) sulit. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggunakan kriteria tahapan kesejahteraan keluarga untuk mengukur kesejahteraan (Sugiharto, 2007). Lima pengelompokkan tahapan keluarga sejahtera menurut BKKBN adalah sebagai berikut:

k) Keluarga pra sejahtera, adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai keluarga sejahtera tahap I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, sandang, pangan, papan, dan kesehatan;

l) Keluarga sejahtera tahap I, adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Indikator yang digunakan, yaitu :

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut.
2. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
4. Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.
5. Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber-KB dibawa ke sarana/petugas kesehatan;

m) Keluarga sejahtera tahap II, yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera I, harus pula memenuhi syarat sosial psikologis 6 sampai 14 yaitu :

40. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
41. Paling kurang, sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk.
42. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru per tahun.
43. Luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi tiap penghuni rumah.
44. Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat.
45. Paling kurang 1 (satu) orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap.
46. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa

membaca tulisan latin.

47. Seluruh anak berusia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini.
48. Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih pasangan usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil);

n) Keluarga sejahtera tahap III, yaitu keluarga yang memenuhi syarat 1 sampai 14 dan dapat pula memenuhi syarat 15 sampai 21, syarat pengembangan keluarga yaitu :

49. Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
50. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.
51. Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.
52. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
53. Mengadakan rekreasi bersama diluar rumah paling kurang 1 kali/6 bulan.
54. Dapat memperoleh berita dari surat kabar/TV/majalah.
55. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai engan kondisi daerah setempat;

o) Keluarga sejahtera tahap III plus, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kriteria 1 sampai 21 dan dapat pula memenuhi kriteria 22 dan 23 kriteria pengembangan keluarganya yaitu:

56. Secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.
57. Kepala Keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan/yayasan/institusi masyarakat

Terdapat beberapa penelitian menggunakan kesejahteraan sebagai konstuk dengan berbagai definisi dan ragam indikatornya. Bradbury *et al*., (1979) melakukan penelitian untuk menguji model hipotesis apakah perubahan jaminan pendapatan tambahan dan bantuan umum berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga dengan kepala keluarga wanita. Ukuran kesejahteraan ekonomi menggunakan ukuran pendapatan yang kemudian digunakan dalam menentukan garis kemiskinan sebagai indikator kesejahteraan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan ukuran pendapatan dan garis kemiskinan, kesejahteraan ekonomi

dengan kepala keluarga wanita dengan tanggungan anak adalah paling rendah jika dibandingkan dengan tanpa anak. Dunst dan Triviette (1988), meneliti hubungan dukungan sosial dan kesehatan serta kesejahteraan dengan menggunakan indeks kesejahteraan psikologi (Bradburn dan Caplovitz, 1965) dan indeks kesejahteraan individu (Dunst dan Triviette, 1986).

Penelitian Nurmawati (1994) menunjukkan bahwa keluarga sejahtera memiliki keragaan yang lebih baik dalam semua variabel penelitian dibandingkan keluarga pra-sejahtera. Besar keluarga sejahtera lebih sedikit dari keluarga pra- sejahtera, pendapatan per kapita keluarga pra-sejahtera lebih rendah dari keluarga sejahtera, pendapatan keluarga sejahtera dan pra sejahtera lebih tinggi dari kriteria kemiskinan. Persentase pengeluaran pangan keluarga pra-sejahtera lebih besar dari keluarga sejahtera, pengetahuan gizi ibu dari keluarga pra-sejahtera lebih rendah dari keluarga sejahtera, status gizi balita baik dari keluarga sejahtera lebih baik dari status gizi balita keluarga pra-sejahtera. Febrero dan Schwartz (1995), mengkaji kesejahteraan dalam kaitannya dengan perilaku konsumsi di keluarga, khususnya menyoroti perilaku *altruistik* dari sebagian anggota keluarga dari sudut pandang ahli ekonomi terhadap perilaku konsumsi di keluarga. Anggota keluarga *altruistik* melakukan serangkaian perilaku pengorbanan yang menyebabkan peningkatan kesejahteraan bagi anggota lainnya dalam keluarga.

Hasil kajian sebaliknya menunjukkan bahwa peningkatan sumber daya bagi anggota keluarga yang egoistik berakibat terhadap penurunan kesejahteraan anggota keluarga lainnya, khususnya yang altruistik. Sedang Narayan *et al*. (2000), dalam bukunya "*Voices of The Poor. Can Anyone Hear Us*?" mengkaji kemiskinan (*poverty*) di berbagai negara serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam kajian tersebut digunakan beberapa konsep atau istilah kesejahteraan sebagai sisi lain pengukuran kemiskinan seperti kesejahteraan material dan kesejahteraan psikologi. Khomsan *et al*. (1997) melakukan penelitian identifikasi indikator kemiskinan dan menggunakan kriteria BKKBN dengan indikator keluarga sejahtera sebagai penentuan sampling dengan pertimbangan bersifat operasional, memperhatikan aspek kualitatif dan kuantitatif, data tersedia karena dilakukan

pendataan secara reguler sehingga memudahkan untuk sampling penelitian. Hasil kajian menyimpulkan bahwa apapun indikator yang dipilih, akan mengandung misklasifikasi saat uji akurasi dengan menggunakan indikator lain sebagai acuan standarnya. Misklasifikasi tergantung dari definisi kemiskinan yang digunakan. Sebuah indikator akan tergantung dari definisi operasional yang digunakannya, dan terbuka bagi kritik yang dilakukan pihak lain karena menggunakan ruang lingkup definisi yang berbeda.

Pudjirahayu (1999) menggunakan indikator keluarga sejahtera BKKBN sebagai dasar sampling penelitian dengan menggunakan kriteria kemiskinan pendapatan rumah tangga, menunjukkan terdapat misklasifikasi rumah tangga miskin baik di pedesaan maupun perkotaan (versi BKKBN) menjadi tidak miskin menurut kriteria BPS. Namun ketika menggunakan kriteria BPS yaitu pengeluaran rumah tangga, menunjukkan tingkat kesesuaian 81-82 persen kriteria menurut BKKBN dan BPS. Penelitian Rambe (2004), mengkaji akurasi (sensitifitas dan spesifisitas) empat indikator kemiskinan: BPS, BKKBN, pengeluaran pangan, dan ukuran subjektif. Hasil kajian menunjukkan bahwa dari keempat indikator kesejahteraan yang diteliti, indikator keluarga sejahtera BKKBN dianggap paling baik karena selain mudah dalam pengoperasiannya hingga ke level administrasi terendah dan dengan cepat dapat mengklasifikasikan keluarga miskin. Indikator KS dan indikator pengeluaran pangan memiliki spesifisitas yang tinggi (63,3 persen) dibandingkan indikator BPS dan indikator subjektif.

Menurut Banks dan Henry (1993) bahwa usaha untuk meningkatkan kesempatan kerja ditentukan tingkat kepentingan individu untuk bekerja. Meskipun beberapa penelitian menyimpulkan situasi tidak bekerja akan berakibat negatif dan menyakitkan pada kondisi psikologis individu dan lingkungan (Furnham, 1982; Liem dan Rayman, 1982; Vinokur dan Caplan, 1987; Dooley dan Catalano, 1988; Frost dan Clayson, 1991; Klein *et al*., 1992; Banks dan Henry, 1993; Wanberg dan Marchese, 1994; Sheeran *et al*., 1995; Vinokur dan Schul, 1997; Kinicki *et al*., 2000), beberapa peneliti menemukan bahwa individu tidak bekerja yang mendapakan bantungan dari lingkungan sosialnya cenderung untuk menjadi malas dan tidak sepenuhnya

berkeinginan untuk meningkatkan kesempatan kerja (Tanner, 1995; Dickson dan Tannner, 1996; Casee, 1997). Beberapa penelitian juga menemukan bahwa keinginan untuk memanfaatkan kesempatan kerja akan meningkat jika ada kesempatan kerja yang memadai untuk meningkatkan pendapatan (Gueron, 1987; Hagen dan Lurie, 1995; Halter, 1996; Henly dan Danziger, 1996; Mills, 1996; Edin dan Lein, 1997; Opulente dan Mattaini, 1997; Schneider, 2000).

Becker (1993) dalam suatu penelitian di Amerika Serikat menemukan bahwa mengikuti pendidikan menengah dan pendidikan tinggi langsung meningkatkan tingkat pendapatan seseorang meskipun masih terdapat biaya langsung dan tidak langsung, menyesuaikan dengan latar belakang keluarga dan kemampuan individu. Becker berpendapat bahwa peningkatan pendapatan ini adalah hasil dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berpikir kritis diperoleh melalui kegiatan pendidikan. Namun, terdapat perbedaan yang jelas antara lulusan SMA dan lulusan perguruan tinggi dalam pendapatan karena tingkat pendidikan yang berbeda. Selain itu, perbedaan juga terjadi pada lulusan perguruan tinggi dan mereka yang putus kuliah. Becker (1993) menyimpulkan bahwa "putus kuliah" tidak memiliki kemampuan lebih besar dari lulusan SMA.

Selanjutnya, menurut Becker, kemampuan dari yang lulus kuliah bervariasi di seluruh kelompok berdasarkan perbedaan sosial demografinya. Ia menemukan bahwa tingkat pendapatan untuk penduduk perkotaan, kulit putih, lulusan perguruan tinggi, dan laki-laki lebih tinggi dari tingkat pendapatan untuk penduduk pedesaan, kulit berwarna, perempuan, dan putus kuliah. Beberapa penelitian berkaitan dengan faktor-faktor hambatan memperoleh kesempatan kerja mendapatkan diantaranya mengasuh anak, transportasi, kesehatan yang buruk, kesehatan mental yang buruk, cacat fisik, kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan zat, dan pengaruh negatif dari teman sebaya, bahkan ras sering dikutip sebagai penghalang untuk bekerja (Edin dan Lein, 1997). Sebuah studi Pearlmutter dan Bartle (2003) menemukan bahwa ibu-ibu bekerja marah tentang kurangnya pilihan mengasuh anak, terutama ibu-ibu yang bekerja di industri jasa yang kadang

bekerja malam bahkan akhir pekan. Juga, banyak ibu membutuhkan merawat anak sakit atau merawat anak cacat (Lens, 2002). Menurut penelitian Zippay dan Rangarajan (2007), 78 persen ibu bekerja mengandalkan perawatan anak informal oleh keluarga atau teman. Mengasuh anak telah terbukti mempengaruhi jumlah jam kerja. Mengasuh anak mengakibatkan penurunan jumlah jam kerja (Press *et al*., 2005; Joo, 2008). Dalam beberapa penelitian lainnya, pengalaman kerja (pekerjaan yang dilakukan tenaga kerja sebelumnya) dilaporkan menjadi prediktor kerja. Tahun yang dihabiskan di pekerjaan sebelumnya sangat penting untuk mendapatkan pekerjaan baru dan tetap bekerja (Cheng, 2002;. Lee *et al*., 2004). Selain itu, mereka yang bekerja di sektor pekerjaan informal yang kurang mungkin untuk dipekerjakan (Lee *et al*., 2004). Kemampuan untuk memiliki fasilitas yang mendukung, seperti telepon, transportasi, dan dukungan sosial juga penting untuk mencapai dan mempertahankan pekerjaan. Misalnya, individu yang tidak bekerja yang memiliki telepon lebih mungkin untuk dipekerjakan (Latimer, 2004). Kemungkinan dipekerjakan lebih rendah bagi mereka yang belum pernah bekerja, sementara kurangnya pengalaman kerja sebelumnya dikaitkan dengan pendapatan yang lebih rendah (Dworsky dan Courtney, 2007).

Modal sosial muncul sebagai pelengkap dari modal manusia (tingkat pendidikan dan keterampilan kerja individu yang ditawarkan kepada pemberi kerja). Modal sosial, seperti modal manusia, memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas dalam kesempatan kerja, tetapi secara khusus mengacu pada hubungan sosial daripada tingkat pendidikan atau keahlian teknis (Harris, 1993; Putnam, 1995; Schneider, 2006). Coleman (1988) menyatakan bahwa modal sosial dan modal manusia adalah kombinasi relasional yang memungkinkan tercapainya tujuan tertentu dari keadaan tidak akan mungkin. Schneider (2002) mengacu pada modal sosial sebagai hubungan sosial dan pola kepercayaan yang memungkinkan orang untuk mendapatkan akses ke sumber daya seperti layanan pemerintah atau pekerjaan, sementara Li (2004) menunjukkan dalam bentuk pengaturan sosial sebagai sumber potensi yang dapat digunakan untuk mengejar tujuan ekonomi dan sosial. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa akumulasi modal sosial

berpengaruh pada hasil sosial dan ekonomi yang positif. Contohnya, modal sosial yang tinggi telah meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, mengurangi kemiskinan dan konflik dalam keluarga, peningkatan tabungan dan aset, dan peningkatan akses investasi (Yusuf, 2008; Brisson, 2009; George dan Chaze, 2009).

Sejalan dengan hal tersebut, terdapat hubungan positif antara modal sosial dan kemajuan karir dan pemanfaatan teknologi (Manturuk *et al*., 2009). Modal sosial juga dikaitkan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan, modal sosial dapat membantu dalam upaya orang berpenghasilan rendah 'untuk meningkatkan kesejahteraan, mendapatkan pekerjaan yang aman dan manfaat lainnya seperti tunjangan anak dan pelayanan kesehatan (Lévesque, 2005; Parisi *et al*., 2003; Schneider, 2002). Modal sosial yang rendah terkait dengan rendahnya kesejahteraan dan kerawanan pangan (Henderson dan Tickamyer, 2008). Di sisi lain, Pichler dan Wallace (2009), serta Seo (2005), menunjukkan bahwa modal sosial memiliki sedikit pengaruh pada kesejahteraan ekonomi pada populasi yang diteliti. Penelitian lain (Livermore dan Neustrom, 2003: Adato *et al*., 2006; Chantarat dan Barrett, 2008) justru menghasilkan temuan bahwa modal sosial memiliki pengaruh yang merugikan pada berbagai indikator kesejahteraan ekonomi, termasuk mobilitas ekonomi, pekerjaan, dan produktivitas

Transportasi juga ditemukan untuk menjadi penghalang untuk mencapai dan mempertahankan kerja (Brooks *et al*., 2001; Pandey *et al*., 2004). Selain itu, orang-orang dengan transportasi lebih mungkin untuk memiliki pekerjaan tetap, dan kepemilikan kendaraan bekerja adalah prediktor kerja (Latimer, 2004; Lee *et al*., 2004; Weaver *et al*., 2007). Satu studi menemukan bahwa berdasarkan rata- rata nasional, sebesar 91 persen rumah tangga pedesaan tidak memiliki kendaraan dari (Pandey *et al*., 2004). Bahkan pekerjaan entry-level yang terutama terletak di pinggiran kota tidak terjangkau transportasi umum (Lens, 2002). Hambatan lain untuk memperoleh kesempatan kerja meliputi kesehatan yang buruk dan kesehatan mental, cacat fisik, dan kekerasan dalam rumah tangga. Satu studi menemukan bahwa kesehatan bukanlah prediktor signifikan dari kesempatan

kerja, namun penelitian lain menemukan bahwa pekerja yang kesehatannya rendah kurang mungkin untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang lebih rendah dibandingkan dengan kesehatan baik (Dworsky dan Courtney, 2007; Weaver *et al*., 2007; Kyoung dan Yoon, 2008).

Selain itu, orang-orang dengan depresi kurang mungkin untuk dipekerjakan (Lee *et al*., 2004). Kecacatan juga ditemukan secara negatif terkait dengan pekerjaan dan penghasilan (Kim, 2000; Dworsky dan Courtney, 2007). Mereka yang cacat lebih mungkin untuk memiliki pekerjaan sementara meskipun dengan pendapatan yang lebih rendah (Latimer, 2004). Akhirnya, Lee *et al*. (2004) menemukan bahwa orang-orang dengan sejarah kekerasan dalam rumah tangga mungkin untuk mendapatkan kesempatan kerja.

Suatu komunitas yang memiliki modal sosial yang rendah hampir dapat dipastikan kualitas pembangunan manusianya akan jatuh tertinggal. Beberapa dimensi pembangunan manusia yang sangat dipengaruhi oleh modal sosial antara lain kemampuannya untuk menyelesaikan berbagai problem kolektif, mendorong roda perubahan yang cepat di tengah masyarakat memperluas kesadaran bersama bahwa banyak jalan yang bisa dilakukan oleh setiap anggota kelompok untuk memperbaiki nasib secara bersama-sama, memperbaiki mutu kehidupan seperti meningkatkan kesejahteraan, perkembangan anak dan banyak keuntungan lainnya yang dapat diperoleh.

Masyarakat yang memiliki modal sosial yang tinggi akan membuka kemungkinan menyelesaikan kompleksitas persoalan dengan lebih mudah. Hal ini memungkinkan terjadi terutama pada masyarakat yang terbiasa hidup dengan rasa saling mempercayai yang tinggi. Masyarakat yang bersatu dan memiliki hubungan-hubungan keluar lingkungan kelompoknya secara intensif dan dengan didukung oleh semangat kebajikan untuk hidup saling menguntungkan, akan merefelksikan kekuatan masyarakat sendiri (Hasbullah, 2006). Modal sosial ibarat minyak pelumas yang bukan hanya memperlicin, tetapi juga akan terus mendorong roda kendaraan hidup yang memungkinkan masyarakat berkembang secara baik dan aman. Berkembangnya modal sosial

ditengah masyarakat akan menciptakan suatu situasi masyarakat yang toleran, jauh dari sifat iri dan dengki serta merangsang tumbuhnya simpati dan empati terhadap kelompok masyarakat diluar kelompoknya.

Jaringan-jaringan sebagai wujud dari modal sosial akan memungkinkan lebih mudahnya saluran informasi dan ide dari luar yang merangsang perkembangan kelompok masyarakat. Mereka akan lebih mudah terhindar dari penyakit-penyakit kejiwaan seperti kecemasan, depresi dan akan hidup lebih sehat. Hal ini dapat terjadi karena di dalam masyarakat tersebut tumbuh kembang kepedulian bersama dalam berbagai aspek dan dimensi aktifitas kehidupan. Masyarakat saling memberi dan perhatian dan saling mempercayai. Situasi yang demikian akan mendorong tidak hanya ide dan kreatifitas, tetapi juga suasana hidup lebih damai, bersahabat dan tenteram. Sebagai contoh, Putnam (2000) temuannya tentang dampak positif modal sosial terhadap perkembangan tumbuh kembang anak. Dalam suatu penelitiannya tentang masyarakat Amerika ditemukan bahwa pada masyarakat yang memiliki modal sosial yang kuat, perkembangan baik, kesehatan, pencapaian belajar dan situasi kejiwaan mereka lebih baik, dibanding yang memiliki modal sosial yang rendah. Rasa saling percaya, jaringan-jaringan pertemanan dan norma-norma yang merefeleksikan kebiasaan saling memberi dalam keluarga, di sekolah dan di komunitas yang lebih besar, berpengaruh positif pada pola tingkah laku anak dan pada perkembangan fisik mereka.

J. Latihan

1. Apakah perbedaan Index Gini dengan Index Mutu Hidup dalam Ekonomi Kesejahteraan ?
2. Sebutkan alasannya mengapa bisa keduanya terjadi dalam perkembangan teori ekonomi kesejahteraan ?

K. Kunci Jawaban

1. IMH mencerminkan tingkat pendidikan dan kesehatan yang terdiri dari tiga komponen yaitu : Pertama, angka melek huruf. Kedua, angka harapan hidup. Ketiga, angka kematian bayi. Selain itu gambaran mengenai kualitas sumber daya manusia sebagai faktor yang paling dominan dalam pembangunan dapat diukur juga dengan menggunakan pendekatan Indeks Kualitas sumber daya manusia tidak terlepas dari produktifitas kerja dari sumber daya manusia tersebut, karena sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari produktifitas kerjanya (Siregar, 2009). Terjadinya peningkatan kualitas masyarakat akan berdampak terhadap peningkatan produktifitas mereka. Hidayat dalam Delyuzer (2012) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia sebagai subjek pembangunan disamping dapat menentukan tinggi rendahnya produktifitas juga akan menentukan keberhasilan pembangunan dan produktifitas adalah motor penggerak bagi pembangunan ekonomi. Jadi dapat dikatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dicerminkan pada kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Menurut Tjiptoherijanto (2008), Faktor yang mempengaruhi kualitas masyarakat secara luas adalah faktor pendapatan, faktor pendidikan dan faktor kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan pendapatan memberikan gambaran pada peningkatan kualitas masyarakat secara signifikan.

2. Menurut Rambe (2004), kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan,

kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warganegara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Menurut Sumarti (1999), perbedaan status sosial budaya dan spesialisas kerja akan menghasilkan persepsi kesejahteraan yang berbeda pula. Terdapat kelompok masyarakat yang menggunakan ukuran kesejahteraan bersumber pada simbol kekuasaan budaya-politik, sementara monetisasi ekonomi menghantarkan kalangan masyarakat pada umumnya untuk lebih menggunakan ukuran kesejahteraan ekonomi dibandingkan ukuran kesejahteraan sosial. Skoufias *et al*., (2000) menyatakan bahwa pengukuran kesejahteraan bersifat subjektif manakala berkaitan dengan aspek psikologis yaitu diukur dari kebahagiaan dan kepuasan. Mengukur kesejahteraan secara objektif menggunakan patokan tertentu yang relatif baku, seperti menggunakan pendapatan per kapita, dengan mengasumsikan terdapat tingkat kebutuhan fisik untuk semua orang hidup layak. Ukuran yang sering digunakan adalah kepemilikan uang, tanah, atau aset. Pada prinsipnya aspek yang dapat diamati dalam menganalisis kesejahteraan hampir sama, yaitu mencakup dimensi: pendapatan, pengeluaran untuk konsumsi, status pekerjaan, kondisi kesehatan, serta kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan kebutuhan dasar (seperti air, sanitasi, perawatan kesehatan dan pendidikan).

L. Daftar Pustaka

1) Boediono, Dr., Ekonomi Internasional dan Nasional, BPFE, Yogyakarta, 2014 diakses 9 September 2020
2) Halwani, Hendra. Dra. M.H., dan Tjiptoharijanto, Prijono, H. Dr., Perdagangan Internasional, Pendekatan Ekonomi Kesejahteraan Makro & Mikro, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
3) Tambunan, Tulus T.H., Dr., Perekonomian dan Ekonomi Kesejahteraan Indonesia,, Teori dan temuan Empiris, Ghalia Indonesia, 2017

MODUL EKONOMI KESEJAHTERAAN

(KAK 357)

MODUL 11
INDIKATOR EKONOMI KESEJAHTERAAN DAN JENIS KESEJAHTERAAN

DISUSUN OLEH

Erlina Puspitaloka Mahadewi, SE, MM, MBL (5661)

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2022

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari Modul ini, diharapkan Mahasiswa mampu :

a. Memahami dan mempelajari definisi Indikator Ekonomi Kesejahteran dan Jenis Kesejahteraan dalam Ekonomi Kesejahteraan
b. Menguraikan konsep dasar Indikator Ekonomi Kesejahteran dan Jenis Kesejahteraan dalam Ekonomi Kesejahteraan

B. Uraian dan Contoh

Visi dan Misi UEU

Universitas Esa Unggul mempunyai visi menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Universitas Esa Unggul menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan
2. Menciptakan suasana akademik yang kondusif
3. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan

Topik Perkuliahan : Indikator Ekonomi Kesejahteran dan Jenis Kesejahteraan

Sub Topik : Pengertian dan Implementasi Dalam Ekonomi Kesejahteraan

C. Uraian Indikator Ekonomi Kesejahteran dan Jenis Kesejahteraan

Pertumbuhan ekonomi secara umum dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Ragional Bruto (PDRB), Investasi,Inflasi,pajak dan retribusi, pinjaman dan pelayanan bidang ekonomi. Khusus untuk nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB.

Sehingga selain PDRB ada indikator lain untuk mengukur tingkat kesejahteraan umum dan PDRB menjadi bagian dari ukuran ini. Ukuran ini menjelaskan pelbagai indikator yang ada, ukuran itu adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) paling tepat dipakai untuk mengukur profil kesejahteraan umum. Indeks pembangunan Manusia (IPM) adalah Indeks yang digunakan untuk menggambarkan capaian disektor kesejahteraan masyarakat secara agregat, karena indeks ini menangkap perkembangan di sektor ekonomi dan sektor sosial sekaligus. Di dalam indeks ini, kesejahteraan tidak hanya ditilik melalui perspektif ekonomi semata sebagaimana lazim terekam dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, tetapi juga diteropong via capaian disektor sosial, yakni pemdidikan dan kesehatan. Dalam hal yang terakhir, Tingkat Melek huruf (TMH) dan Tingkat Harapan Hidup (THH) adalah dua indikator yang lazim termaktub dalam konstruksi IPM. Sebagai Pemerintah baik pusat maupun daerah tidak terkecuali Pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka ingin mencapai peningkatan IPM (Indeks pembangunana Manusia) ini telah membuat fokus fokus pekerjaan sehingga berbagai macam program dan kegiatan bisa dibuat dan dilaksanakan. Fokus-fokus itu adalah : Pertama, Fokus Kesejahteraan dan pemerataan Ekonomi yang memiliki Indikator ; Pertumbuhan Ekonomi, Pengendalian Inflasi, PDRB Perkapita, Indeks Gini yang rendah, Pemerataan Pendapatan, Penurunan penduduk miskin dan Kriminalitas yang semakin menurun. Kesemua Indikator ini memiliki ukurannya masing masing dan bisa dijadikan sarana evaluasi apakah Pemerintah sukses atau gagal dalam mengurus rakyatnya. Fokus yang kedua adalah Fokus Kesejahteraan Masyarakat. Fokus yang kedua ini juga memiliki Indikator yaitu ; Angka Melek Huruf, Angka rata-rata lama sekolah, Angka partisipasi kasar, Angka pendidikan yang ditamatkan dan Angka Partisipasi Murni. Indikator ini tergabung dalam Fokus Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Pendidikan. Selanjutnya Fokus Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Kesehatan memiliki Indikator ; Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Angka Usia Harapan Hidup,

Persentase balita gizi buruk. Fokus yang ketiga adalah Fokus Seni Budaya dan Olahraga yang memiliki Indikator Jumlah grup kesenian yang ada, jumlah gedung kesenian yang ada, jumlah klub olahraga yang ada dan jumlah gedung olahraga yang ada. Indikator indicator ini sangat luas dan menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam artikel-artikel berikutnya. Namun ada yang sedikit menarik dan menggelitik ketika kita melihat mengapa ada Fokus Seni Budaya dan Olahraga yang juga termasuk dalam ukuran ukuran kesejahteraan. Jawabanya cukup panjang dan mungkin menarik untuk sedikit kita diskusikan pada tulisan ini. Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Secara mudah dapat kita gambarkan ketika kita melihat Negara-negara maju yang masyarakatnya relatif sudah sejahatera dalam hal ini sebagai contoh adalah Negara Negara Eropa barat dan skandinavia. Biasanya Negara tersebut masyarakatnya sangat mengapresiasi seni. Hal ini dibuktikan dengan begitu banyaknya galeri seni, gedung kesenian, teater

dan festival-festival kesenian yang dilaksanakan sepanjang tahun. Selain tinggi apresiasi seninya biasanya mereka juga memiliki prestasi dibidang olahraga pada level ditingkat dunia. Kenyataan lain yang bisa kita lihat masyarakat sejahtera tersebut sudah tidak memikirkan lagi untuk pemenuhan kebutuhan pokok karena sudah terpenuhi. Oleh karena itu waktu yang tersedia bisa disediakan sebahagian untuk menikmati kesenian dan olahraga. Diharapkan dengan fokus terhadap 3 (tiga) bidang tersebut dengan berbgai indicator indicator tersebut maka pendapatan masyarakat akan meningkat, Tingkat Melek huruf (TMH) juga meningkat dan Tingkat Harapan Hidup (THH) juga akan terus naik. sehingga ketika konstruksi IPM ini sebagai ukuran kesejahteraan meningkat IPM juga akan meningkat. Paradigma yang mengatakan bahwa kesejahteraan itu hanya ditangkap disektor ekonomi saja otomatis gugur karena indeks pembangunan manusia (IPM) telah menjawabnya dengan menggambarkan capaian disektor kesejahteraan masyrakat secara agregat. Sektor ekonomi dan sektor sosial sekaligus digambarkan dalam indeks ini sehingga kesejahteraan umum dapat diukur dengan cakupan yang luas. Indeks pembangunan manusia (IPM) juga mampu menjelaskan ukuran-ukuran dalam infrastruktur dan kelembagaan yang dibentuk oleh pemerintah hal inilah yang menyebabkan IPM mampu mendapatkan gambaran capaian pembangunan dalam sector ekonomi dan sosial. Bukankah kesejahteraan adalah amanah dari konstitusi dan tujuan dari Negara ini, dimana “Mencerdaskan Kehidupan bangsa” & “Memajukan Kesejahteraan Umum” akan selalu terpatri dan abadi dalam pembukaan konstitusi Negara ini. Ketika Indikator telah dirumuskan, tantangan berikutnya adalah eksekusi dan Implemtasinya

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk atau rasio gini (*gini ratio*) di Indonesia pada Maret 2020 mencapai 0,381 atau melebar ketimbang rasio gini September 2019 sebesar 0,380. BPS menyatakan bahwa ingkat ketimpangan pengeluaran sebenarnya membaik bila dibandingkan dengan rasio gini Maret 2019 sebesar 0,382. Meski begitu, realisasi rasio gini Maret 2020 tetap perlu menjadi perhatian. Selama periode Maret 2015 hingga Maret 2019 telah terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia. Namun, *gini ratio* naik lagi pada Maret 2020. Untuk diketahui, angka koefisien rasio gini berkisar 0 hingga 1. Koefisien 0 menandakan tingkat pengeluaran merata sempurna, sedangkan koefisien I menunjukkan ketimpangan yang sempurna, rasio gini di daerah perkotaan pada Maret 2020 tercatat 0,393. Angka rasio itu itu meningkat ketimbang rasio gini September 2019 sebesar 0,391 dan Maret 2019 sebesar 0,392. Rasio gini pada daerah pedesaan juga melebar menjadi 0,317 pada Maret 2020 dibandingkan dengan September 2019 sebesar 0,315. Meski begitu, nilai rasio gini tersebut tidak berubah bila disbandingkan dengan Maret 2019 sebesar 0,317. Berdasarkan provinsi, rasio gini tertinggi Maret 2020 berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebesar 0,434. Sementara itu, rasio gini terendah tercatat di Provinsi Bangka Belitung sebesar 0,262. BPS juga mencatat setidaknya terdapat delapan provinsi dengan angka rasio gini lebih tinggi ketimbang rasio gini nasional di antaranya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,434.

Kemudian, Gorontalo sebesar 0,408, Jawa Barat 0,403, dan DKI Jakarta 0,399. Selain itu, ada Papua dengan rasio gini sebesar 0,392, Sulawesi Tenggara 0,389, Sulawesi Selatan 0,389, dan Papua Barat sebesar 0,382.

Kualitas sumber daya manusia tidak terlepas dari produktifitas kerja dari sumber daya manusia tersebut, karena sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari produktifitas kerjanya (Siregar, 2009). Terjadinya peningkatan kualitas masyarakat akan berdampak terhadap peningkatan produktifitas mereka. Hidayat dalam Delyuzer (2012) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia sebagai subjek pembangunan disamping dapat menentukan tinggi rendahnya produktifitas juga akan menentukan keberhasilan pembangunan dan produktifitas adalah motor penggerak bagi pembangunan ekonomi. Jadi dapat dikatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dicerminkan pada kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Menurut Tjiptoherijanto (2008), Faktor yang mempengaruhi kualitas masyarakat secara luas adalah faktor pendapatan, faktor pendidikan dan faktor kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan pendapatan memberikan gambaran pada peningkatan kualitas masyarakat secara signifikan.

Pembangunan Manusia (IPM). IPM ini terdiri dari tiga komponen yaitu : Pertama, pendidikan, yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama bersekolah. Kedua, derajat kesehatan yang terbaca dari angka harapan hidup. Ketiga, pendapatan penduduk yang diukur dengan tingkat daya beli masyarakat (purchasing power parity). Komponen pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi dalam sumber daya manusia yang memberikan sumbangan langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ketrampilan dan produktifitas karena pendidikan berfungsi menyiapkan salah satu input dalam proses produksi yaitu tenaga kerja agar dapat kerja dengan produktif karena kualitasnya dan pada umumnya orang yang mempunyai pendidikan lebih tinggi akan mempunyai wawasan yang lebih luas terutama penghayatan akan pentingnya produktivitas. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia haruslah dimulai dari bawah, yaitu dari pendidikan dasar sehingga sejak dini manusia mempunyai otonomi berfikir sendiri dan mampu bersikap mandiri. Berdasarkan penilaian UNDP (1990) kualitas SDM Indonesia atau tingkat Provinsi juga diukur melalui IPM (human development index).

Komponen kesehatan juga menjadi salah satu dimensi penting sebagai refleksi kualitas sumber daya manusia. Sehingga sangat memungkinkan sekali apabila derajat kesehatan diperbaiki akan berpengaruh secara langsung terhadap kemampuan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan derajat kesehatan suatu penduduk tercermin dari penurunan angka kematian bayi,

perbaikan status gizi serta peningkatan umur harapan hidup penduduk karena semakin tinggi kesadaran mereka akan pentingnya hidup sehat, pada akhirnya akan memperpanjang usia harapan hidup. Angka harapan hidup di Provinsi Jambi mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2002 dari 63,5 tahun meningkat pada tahun 2014 menjadi 69,6 tahun. Dan angka kematian bayi di Provinsi Jambi turun dari 56 jiwa per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2002 menjadi 21 jiwa per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2014. Hal ini mencerminkan derajat kesehatan penduduk Jambi yang kian membaik. Komponen Pendapatan masyarakat yang diukur dengan tingkat daya beli masyarakat (purchasing power parity) akan mempengaruhi kemampuan manusia dalam mengakses kehidupan yang layak atau melakukan pengeluaran untuk kesehatan, pendidikan ketrampilan serta pemenuhan kebutuhan fisik minimum. Dengan kata lain akan menggambarkan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Semakin meningkatnya konsumsi rill perkapita maka daya beli masyarakat juga semakin tinggi. Hal ini menunjukan adanya peningkatan kualitas masyarakat karena peningkatan daya beli dan konsumsi memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan lebih baik lagi. Akibat lain dari tidak terpenuhinya kebutuhan SDM yang berkualitas adalah masuknya SDM dari wilayah lain diluar Provinsi Jambi yang dapat membuat tersingkirnya SDM lokal karena kalah dalam bersaing. Penduduk yang tidak berkualitas relative sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, bahkan kurang beruntung mendapatkan pekerjaan (pengangguran). Oleh sebab itu, perlu campur tangan pemerintah untuk meningkatkan kualitas penduduk, melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kondisi faktor-faktor dari Indeks Mutu Hidup Masyarakat.

Menurut Wijaya Kuslin (2008) peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Provinsi Jambi seluruhnya mencakup pembangunan manusia, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pembangunan manusia sebagai insan, menekankan harkat, martabat, hak dan kewajiban manusia, yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia. lndeks Mutu Hidup (Physical Quality of Life Indexes) Pada tahun 1979, Morris D. Morris dalam Lincolin Arsyad (2010) memperkenalkan satu indikator alternatif dalam mengukur kinerja pembangunan suatu negara yaitu Indeks Mutu Hidup (IMH) atau Physical Quality of Life Indexes (PQLI). Ada tiga indikator utama yang dijadikan acuan pada indeks ini yaitu a) Angka Kematian Bayi, b) Angka Harapan Hidup suatu umur, dan c) Angka Melek

Huruf Orang Dewasa. Berdasarkan setiap indikator tersebut dilakukan pemeringkatan terhadap kinerja pembangunan suatu negara, kinerja tersebut diberi skor antara 1 sampai 100, angka 1 melambangkan kinerja terburuk dan angka 100 melambangkan kinerja terbaik. Untuk indikator harapan hidup, batas atas (upper limit) 100 ditetapkan 80 tahun (harapan hidup tertinggi pada saat studi tersebut dilakukan dicapai oleh swedia). Sedangkan batas bawah (lower limit) adalah 28 tahun (tingkat harapan hidup terendah di Guinea-Bissau pada tahun 1950). Antara batas atas dan batas bawah itulah, tingkat harapan hidup suatu negara diperingkatkan dengan skor antara 1 sampai 100. Demikian pula untuk tingkat kematian bayi, batas atasnya 9 kematian per 1000 kelahiran (juga dicapai Swedia pada tahun 1973). Sedangkan batas bawahnya adalah 229 kematian per 1000 kelahiran (tingkat kematian bayi tertinggi, di Gabon). Komponen ketiga IMH yakni Angka Melek Huruf, Merupakan indikator yang penting karena merupakan ukuran kesejahteraan dan taraf keterampilan yang diperlukan dalam proses pembangunan. Jadi keseluruhannya itu paling penting kaitannya adalah dengan kemampuannya berproduksi yang bermuara pada pendapatan secara khusus dan dengan pertumbuhan ekonomi secara umum. Dalam melihat kualitas sumber daya manusia perlu kiranya dijelaskan beberapa pengertian dan istilah yang digunakan dalam komponen IMH, yaitu sebagai berikut : 1. Angka kematian bayi (IMR) yaitu sebesar probabilita bayi meninggal sebelum usia satu tahun per 1000 kelahiran hidup. Untuk indeks IMR diperoleh dengan rumus: 22,2 229 IMR IKB Dimana : IKB = Indeks Kematian Bayi IMR = Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup 229 = Tingkat kematian bayi maksimum 2,22 = pembagi yang jika terdapat tingkat kematian bayi terendah yaitu 9 bayi per 1000 kelahiran, maka akan didapatkan indeks = 100 2. Angka Harapan Hidup (Eo) yaitu data yang digunakan adalah data umur harapan hidup. Untuk mencari indeks harapan hidup suatu umur digunakan rumus. Dimana: IHH = Indeks Harapan Hidup Eo = Angka harapan hidup suatu umur 28 = Tingkat harapan hidup terendah 0,39 = Angka yang menunjukkan bahwa bila terjadi kenaikan umur harapan hidup sebesar 0,39 tahun, maka akan menghasilkan 1 poin angka indeks 3. Angka Melek Huruf yaitu menunjukan angka perbandingan antara persentase penduduk usia dewasa (15 tahun keatas) yang melek huruf terhadap jumlah penduduk Usia Dewasa (15 Tahun keatas). Indeks Melek Huruf digunakan rumus lain.

Suatu komunitas yang memiliki modal sosial yang rendah hampir dapat dipastikan kualitas pembangunan manusianya akan jatuh tertinggal. Beberapa dimensi pembangunan manusia yang sangat dipengaruhi oleh modal sosial antara lain kemampuannya untuk menyelesaikan berbagai

problem kolektif, mendorong roda perubahan yang cepat di tengah masyarakat memperluas kesadaran bersama bahwa banyak jalan yang bisa dilakukan oleh setiap anggota kelompok untuk memperbaiki nasib secara bersama-sama, memperbaiki mutu kehidupan seperti meningkatkan kesejahteraan, perkembangan anak dan banyak keuntungan lainnya yang dapat diperoleh.

Masyarakat yang memiliki modal sosial yang tinggi akan membuka kemungkinan menyelesaikan kompleksitas persoalan dengan lebih mudah. Hal ini memungkinkan terjadi terutama pada masyarakat yang terbiasa hidup dengan rasa saling mempercayai yang tinggi. Masyarakat yang bersatu dan memiliki hubungan-hubungan keluar lingkungan kelompoknya secara intensif dan dengan didukung oleh semangat kebajikan untuk hidup saling menguntungkan, akan merefelksikan kekuatan masyarakat sendiri (Hasbullah, 2006). Modal sosial ibarat minyak pelumas yang bukan hanya memperlicin, tetapi juga akan terus mendorong roda kendaraan hidup yang memungkinkan masyarakat berkembang secara baik dan aman. Berkembangnya modal sosial ditengah masyarakat akan menciptakan suatu situasi masyarakat yang toleran, jauh dari sifat iri dan dengki serta merangsang tumbuhnya simpati dan empati terhadap kelompok masyarakat diluar kelompoknya.

Jaringan-jaringan sebagai wujud dari modal sosial akan memungkinkan lebih mudahnya saluran informasi dan ide dari luar yang merangsang perkembangan kelompok masyarakat. Mereka akan lebih mudah terhindar dari penyakit-penyakit kejiwaan seperti kecemasan, depresi dan akan hidup lebih sehat. Hal ini dapat terjadi karena di dalam masyarakat tersebut tumbuh kembang kepedulian bersama dalam berbagai aspek dan dimensi aktifitas kehidupan. Masyarakat saling memberi dan perhatian dan saling mempercayai. Situasi yang demikian akan mendorong tidak hanya ide dan kreatifitas, tetapi juga suasana hidup lebih damai, bersahabat dan tenteram. Sebagai contoh, Putnam (2000) temuannya tentang dampak positif modal sosial terhadap perkembangan tumbuh kembang anak. Dalam suatu penelitiannya tentang masyarakat Amerika ditemukan bahwa pada masyarakat yang memiliki modal sosial yang kuat, perkembangan baik,

kesehatan, pencapaian belajar dan situasi kejiwaan mereka lebih baik, dibanding yang memiliki modal sosial yang rendah. Rasa saling percaya, jaringan-jaringan pertemanan dan norma-norma yang merefeleksikan kebiasaan saling memberi dalam keluarga, di sekolah dan di komunitas yang lebih besar, berpengaruh positif pada pola tingkah laku anak dan pada perkembangan fisik mereka.

Fergusson *et al*., (1981); Martin (2006) menyatakan bahwa terminologi yang sering digunakan dalam penelitian yang membahas teori kesejahteraan adalah *standard living*, *well-being*, *welfare*, dan *quality of life*. Menurut Just *et al*., 1982, dalam kajian ekonomi kesejahteraan yang bertujuan untuk menolong masyarakat membuat pilihan yang lebih baik, kesejahteraan seseorang dilihat dari *willingness to pay* saat individu atau masyarakat berperan sebagai konsumen. Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Menurut Pigou (1960), teori ekonomi kesejahteraan adalah bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang. Kesejahteraan dapat didekati berdasarkan dua hal (Campbell, 1976; Sumawan dan Tahira, 1993; Milligan *et al*., 2006), yaitu: 1) kesejahteraan subjektif dan 2) kesejahteraan objektif. Kesejahteraan dialamatkan bagi tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Pada tingkat individu, perasaan bahagia atau sedih, kedamaian atau kecemasan jiwa, dan kepuasan atau ketidakpuasan merupakan indikator subjektif dari kualitas hidup. Pada tingkat keluarga, kecukupan kondisi perumahan (dibandingkan standar), seperti ada tidaknya air bersih, merupakan contoh indikator objektif. Kepuasan anggota keluarga mengenai kondisi rumah merupakan indikator subjektif. Pada tingkat masyarakat, beberapa contoh dari indikator objektif di antaranya adalah angka kematian bayi, angka pengangguran dan tuna wisma. Kesejahteraan subjektif diukur dari tingkat kebahagiaan dan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Pendekatan ini merupakan ukuran kesejahteraan yang banyak digunakan di negara maju termasuk Amerika Serikat.

Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut (Sawidak, 1985). Tingkat kepuasan yang terkait emosional akan mempengaruhi aspek tingkah laku individu untuk menilai kepuasan pada variabel-variabel lainnya seperti kepuasan pada kualitas kehidupan (Currivan, 1999; Lambert *et al*., 2001; Robbins dan Judge, 2007; Falkenburg dan Schyns, 2007). Nilai kepuasan emosional juga akan meningkatkan kinerja dan kontribusi individu pada

lingkungannya (Lock, 1976; Viswesvaran dan Ones, 2000; Butler dan Rose, 2011).

Sayogyo (1984) mengkaji kesejahteraan dan mendefinisikan kesejahteraan keluarga sebagai penjabaran delapan jalur pemerataan dalam trilogi pembangunan sejak Repelita III, yaitu: 1) peluang berusaha; 2) peluang bekerja; 3) tingkat pendapatan; 4) tingkat pangan, sandang, perumahan; 5) tingkat pendidikan dan kesehatan; 6) peran serta; 7) pemerataan antar daerah, desa/kota; dan 8) kesamaan dalam hukum. Mirrowsky dan Ross (1989) mengkaji kajian kesejahteraan dengan penyakit, kesakitan, kesulitan ekonomi yang dihubungkan dengan depresi. Kepuasan hidup sebagai bagian dari dimensi kesejahteraan meliputi kesehatan, penerimaan terhadap kecukupan ekonomi, pertolongan (dukungan sosial), dan interaksi sosial. Penelitian Bane dan Ellwood (1994); Coward *et al*. (1994); Scott dan Buttler (1997), yang menganalisis kombinasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif. Kesejahteraan subjektif digunakan dalam penelitian ini sebagai konstruk yang lebih global dikaitkan dengan beragam dimensi lingkungan yang melengkapi fasilitas dan pelayanan transportasi, pewaratan kesehatan, perumahan, jasa kesehatan mental, jasa ekonomi, dan kesempatan untuk menjadi relawan. Digunakan beragam indikator kesehatan mental (seperti moral dan depresi) yang menilai kualitas pengalaman individu (*the inner-experience*), sedangkan kompetensi personal berkaitan dengan aspek kesehatan, status keuangan, dan lingkungan yang memberikan dukungan pribadi.

Bryant (1990) menyatakan bahwa organisasi ekonomi analisis perilaku ekonomi rumah tangga (orang yang bertempat tinggal dalam atap yang sama dan pengelolaan keuangan yang sama, serta terdiri dari keluarga). Kajian organisasi ekonomi dalam keluarga menggunakan *demand* terhadap barang strategis sebagai indikator kesejahteraan. Ukuran lainnya kesejahteraan adalah proporsi pengeluaran untuk pangan. Menurut Bubolz dan Sontag (1993), kesejahteraan merupakan terminologi lain dari kualitas hidup manusia (*quality of human life*), yaitu suatu keadaan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasinya nilai- nilai hidup. Zeitlin *et al*., (1995) menggunakan istilah kesehatan sosial keluarga dan kesejahteraan sosial keluarga bagi keluarga yang dapat melahirkan individu (anak) dengan pertumbuhan dan perkembangan yang baik.

Menurut Whithaker dan Federico (1997), pengertian kesejahteraan sosial merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut. Seseorang yang mempunyai kekurangan kemampuan mungkin memiliki kesejahteraan yang rendah, kurangnya kemampuan dapat berarti kurang

mampu untuk mencapai fungsi tertentu sehingga kurang sejahtera. Terdapat beragam pengertian mengenai kesejahteraan, karena lebih bersifat subjektif dimana setiap orang dengan pedoman, tujuan dan cara hidupnya yang berbeda-beda akan memberikan nilai-nilai yang berbeda pula tentang kesejahteraan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan (Sianipar, 1997).

Menurut Sumarti (1999), perbedaan status sosial budaya dan spesialisas kerja akan menghasilkan persepsi kesejahteraan yang berbeda pula. Terdapat kelompok masyarakat yang menggunakan ukuran kesejahteraan bersumber pada simbol kekuasaan budaya-politik, sementara monetisasi ekonomi menghantarkan kalangan masyarakat pada umumnya untuk lebih menggunakan ukuran kesejahteraan ekonomi dibandingkan ukuran kesejahteraan sosial. Skoufias *et al*., (2000) menyatakan bahwa pengukuran kesejahteraan bersifat subjektif manakala berkaitan dengan aspek psikologis yaitu diukur dari kebahagiaan dan kepuasan. Mengukur kesejahteraan secara objektif menggunakan patokan tertentu yang relatif baku, seperti menggunakan pendapatan per kapita, dengan mengasumsikan terdapat tingkat kebutuhan fisik untuk semua orang hidup layak. Ukuran yang sering digunakan adalah kepemilikan uang, tanah, atau aset. Pada prinsipnya aspek yang dapat diamati dalam menganalisis kesejahteraan hampir sama, yaitu mencakup dimensi: pendapatan, pengeluaran untuk konsumsi, status pekerjaan, kondisi kesehatan, serta kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan kebutuhan dasar (seperti air, sanitasi, perawatan kesehatan dan pendidikan). Sedang menurut Rambe (2004), kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warganegara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Berdasarkan tingkat ketergantungan dari dimensi standar hidup (*standard of living*) masyarakat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dibedakan kedalam satu sistem kesejahteraan (*well-being*) dan dua subsistem, yakni: 1) subsistem sosial; dan 2) subsistem ekonomi, dengan beberapa faktor di antaranya kesejahteraan manusia, kesejahteraan sosial, konsumsi, tingkat kemiskinan, dan aktivitas ekonomi (World Bank: Santamarina *et al*., 2004). Di negara-negara maju, seperti Canada menggunakan 19 indikator kualitas hidup masyarakat (*quality of life*) yang tersebar ke dalam empat subsistem, yakni: 1) Indikator ekonomi: a) GDP perkapita, b) pendapatan perkapita, c) inovasi, d) lapangan kerja, e) melek huruf; dan f) tingkat pendidikan; 2) Indikator kesehatan: a) usia harapan hidup, b) status kesehatan, c) tingkat kematian bayi (IMR), dan d) aktivitas fisik; (3) Indikator lingkungan: a) kualitas udara, b) kualitas air, c) *biodiversity*, dan d) lingkungan yang sehat; dan 4) Indikator keamanan dan

keselamatan masyarakat: a) sukarela, b) *diversity*, c) berpartisipasi dalam aktivitas budaya, d) berpartisipasi dalam kegiatan politik, dan e) keamanan dan keselamatan (Sharpe, 2004).

Menurut penelitian Sugiharto (2007) indikator yang digunakan Biro Pusat Statistik (BPS) untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu: a) tinggi; b) sedang; c) rendah. Indikator pengeluaran digolongkan menjadi 3 item yaitu: a) tinggi; b) sedang; c) rendah. Indikator tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) permanen; b) semi Permanen; dan c) non permanen. Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item, yaitu pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah. Dari 12 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) lengkap; b) cukup; dan c) kurang. Indikator kesehatan anggota keluarga digolongkan menjadi

3 item yaitu: a) bagus; b; cukup; dan c) kurang. Indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari 5 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan, dan alat kontrasepsi. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) mudah; b) cukup; dan c) sulit. Indikator kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan terdiri dari 3 item yaitu biaya sekolah,

jarak ke sekolah, dan proses penerimaan. Dari 3 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) mudah; b) cukup; dan c) sulit. Indikator kemudahan mendapatkan transportasi terdiri 3 item, yaitu ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan kendaraan. Dari 3 item tersebut kemudian akan di digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) mudah; b) cukup; dan c) sulit. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggunakan kriteria tahapan kesejahteraan keluarga untuk mengukur kesejahteraan (Sugiharto, 2007). Lima pengelompokkan tahapan keluarga sejahtera menurut BKKBN adalah sebagai berikut:

p) Keluarga pra sejahtera, adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai keluarga sejahtera tahap I, seperti kebutuhan akan

pengajaran agama, sandang, pangan, papan, dan kesehatan;

q) Keluarga sejahtera tahap I, adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Indikator yang digunakan, yaitu :

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut.
2. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
4. Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.
5. Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber-KB dibawa ke sarana/petugas kesehatan;

r) Keluarga sejahtera tahap II, yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera I, harus pula memenuhi syarat sosial psikologis 6 sampai 14 yaitu :

58. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
59. Paling kurang, sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk.
60. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru per tahun.
61. Luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi tiap penghuni rumah.
62. Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat.
63. Paling kurang 1 (satu) orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap.
64. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin.
65. Seluruh anak berusia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini.
66. Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih pasangan usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil);

s) Keluarga sejahtera tahap III, yaitu keluarga yang memenuhi syarat 1 sampai 14 dan dapat pula memenuhi syarat 15 sampai 21, syarat pengembangan keluarga yaitu :

67. Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
68. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.
69. Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan

kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.

70. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
71. Mengadakan rekreasi bersama diluar rumah paling kurang 1 kali/6 bulan.
72. Dapat memperoleh berita dari surat kabar/TV/majalah.
73. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai engan kondisi daerah setempat;

t) Keluarga sejahtera tahap III plus, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kriteria 1 sampai 21 dan dapat pula memenuhi kriteria 22 dan 23 kriteria pengembangan keluarganya yaitu:

74. Secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.
75. Kepala Keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan/yayasan/institusi masyarakat

Terdapat beberapa penelitian menggunakan kesejahteraan sebagai konstuk dengan berbagai definisi dan ragam indikatornya. Bradbury *et al*., (1979) melakukan penelitian untuk menguji model hipotesis apakah perubahan jaminan pendapatan tambahan dan bantuan umum berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga dengan kepala keluarga wanita. Ukuran kesejahteraan ekonomi menggunakan ukuran pendapatan yang kemudian digunakan dalam menentukan garis kemiskinan sebagai indikator kesejahteraan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan ukuran pendapatan dan garis kemiskinan, kesejahteraan ekonomi dengan kepala keluarga wanita dengan tanggungan anak adalah paling rendah jika dibandingkan dengan tanpa anak. Dunst dan Triviette (1988), meneliti hubungan dukungan sosial dan kesehatan serta kesejahteraan dengan menggunakan indeks kesejahteraan psikologi (Bradburn dan Caplovitz, 1965) dan indeks kesejahteraan individu (Dunst dan Triviette, 1986).

Penelitian Nurmawati (1994) menunjukkan bahwa keluarga sejahtera memiliki keragaan yang lebih baik dalam semua variabel penelitian dibandingkan keluarga pra-sejahtera. Besar keluarga sejahtera lebih sedikit dari keluarga pra- sejahtera, pendapatan per kapita keluarga pra-sejahtera lebih rendah dari keluarga sejahtera, pendapatan keluarga sejahtera dan pra sejahtera lebih tinggi dari kriteria kemiskinan. Persentase pengeluaran pangan keluarga pra-sejahtera lebih besar dari keluarga sejahtera, pengetahuan gizi ibu dari keluarga pra-sejahtera lebih rendah dari keluarga sejahtera, status gizi balita baik dari keluarga sejahtera lebih baik dari status gizi balita keluarga

pra-sejahtera. Febrero dan Schwartz (1995), mengkaji kesejahteraan dalam kaitannya dengan perilaku konsumsi di keluarga, khususnya menyoroti perilaku *altruistik* dari sebagian anggota keluarga dari sudut pandang ahli ekonomi terhadap perilaku konsumsi di keluarga. Anggota keluarga *altruistik* melakukan serangkaian perilaku pengorbanan yang menyebabkan peningkatan kesejahteraan bagi anggota lainnya dalam keluarga.

Hasil kajian sebaliknya menunjukkan bahwa peningkatan sumber daya bagi anggota keluarga yang egoistik berakibat terhadap penurunan kesejahteraan anggota keluarga lainnya, khususnya yang altruistik. Sedang Narayan *et al*. (2000), dalam bukunya "*Voices of The Poor. Can Anyone Hear Us*?" mengkaji kemiskinan (*poverty*) di berbagai negara serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam kajian tersebut digunakan beberapa konsep atau istilah kesejahteraan sebagai sisi lain pengukuran kemiskinan seperti kesejahteraan material dan kesejahteraan psikologi. Khomsan *et al*. (1997) melakukan penelitian identifikasi indikator kemiskinan dan menggunakan kriteria BKKBN dengan indikator keluarga sejahtera sebagai penentuan sampling dengan pertimbangan bersifat operasional, memperhatikan aspek kualitatif dan kuantitatif, data tersedia karena dilakukan pendataan secara reguler sehingga memudahkan untuk sampling penelitian. Hasil kajian menyimpulkan bahwa apapun indikator yang dipilih, akan mengandung misklasifikasi saat uji akurasi dengan menggunakan indikator lain sebagai acuan standarnya. Misklasifikasi tergantung dari definisi kemiskinan yang digunakan. Sebuah indikator akan tergantung dari definisi operasional yang digunakannya, dan terbuka bagi kritik yang dilakukan pihak lain karena menggunakan ruang lingkup definisi yang berbeda.

Pudjirahayu (1999) menggunakan indikator keluarga sejahtera BKKBN sebagai dasar sampling penelitian dengan menggunakan kriteria kemiskinan pendapatan rumah tangga, menunjukkan terdapat misklasifikasi rumah tangga miskin baik di pedesaan maupun perkotaan (versi BKKBN) menjadi tidak miskin menurut kriteria BPS. Namun ketika menggunakan kriteria BPS yaitu pengeluaran rumah tangga, menunjukkan tingkat kesesuaian 81-82 persen kriteria menurut BKKBN dan BPS. Penelitian Rambe (2004), mengkaji akurasi (sensitifitas dan spesifisitas) empat indikator kemiskinan: BPS, BKKBN, pengeluaran pangan, dan ukuran subjektif. Hasil kajian menunjukkan bahwa dari keempat indikator kesejahteraan yang diteliti, indikator keluarga sejahtera BKKBN dianggap paling baik karena selain mudah dalam pengoperasiannya hingga ke level administrasi terendah dan dengan cepat dapat mengklasifikasikan keluarga miskin. Indikator KS dan indikator pengeluaran pangan memiliki spesifisitas yang tinggi (63,3 persen) dibandingkan indikator BPS dan indikator subjektif.

Menurut Banks dan Henry (1993) bahwa usaha untuk meningkatkan kesempatan kerja ditentukan tingkat kepentingan individu untuk bekerja. Meskipun beberapa penelitian menyimpulkan situasi tidak bekerja akan berakibat negatif dan menyakitkan pada kondisi psikologis individu dan lingkungan (Furnham, 1982; Liem dan Rayman, 1982; Vinokur dan Caplan, 1987; Dooley dan Catalano, 1988; Frost dan Clayson, 1991; Klein *et al*., 1992; Banks dan Henry, 1993; Wanberg dan Marchese, 1994; Sheeran *et al*., 1995; Vinokur dan Schul, 1997; Kinicki *et al*., 2000), beberapa peneliti menemukan bahwa individu tidak bekerja yang mendapakan bantungan dari lingkungan sosialnya cenderung untuk menjadi malas dan tidak sepenuhnya berkeinginan untuk meningkatkan kesempatan kerja (Tanner, 1995; Dickson dan Tannner, 1996; Casee, 1997). Beberapa penelitian juga menemukan bahwa keinginan untuk memanfaatkan kesempatan kerja akan meningkat jika ada kesempatan kerja yang memadai untuk meningkatkan pendapatan (Gueron, 1987; Hagen dan Lurie, 1995; Halter, 1996; Henly dan Danziger, 1996; Mills, 1996; Edin dan Lein, 1997; Opulente dan Mattaini, 1997; Schneider, 2000).

Becker (1993) dalam suatu penelitian di Amerika Serikat menemukan bahwa mengikuti pendidikan menengah dan pendidikan tinggi langsung meningkatkan tingkat pendapatan seseorang meskipun masih terdapat biaya langsung dan tidak langsung, menyesuaikan dengan latar belakang keluarga dan kemampuan individu. Becker berpendapat bahwa peningkatan pendapatan ini adalah hasil dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berpikir kritis diperoleh melalui kegiatan pendidikan. Namun, terdapat perbedaan yang jelas antara lulusan SMA dan lulusan perguruan tinggi dalam pendapatan karena tingkat pendidikan yang berbeda. Selain itu, perbedaan juga terjadi pada lulusan perguruan tinggi dan mereka yang putus kuliah. Becker (1993) menyimpulkan bahwa "putus kuliah" tidak memiliki kemampuan lebih besar dari lulusan SMA.

Selanjutnya, menurut Becker, kemampuan dari yang lulus kuliah bervariasi di seluruh kelompok berdasarkan perbedaan sosial demografinya. Ia menemukan bahwa tingkat pendapatan untuk penduduk perkotaan, kulit putih, lulusan perguruan tinggi, dan laki-laki lebih tinggi dari tingkat pendapatan untuk penduduk pedesaan, kulit berwarna, perempuan, dan putus kuliah. Beberapa penelitian berkaitan dengan faktor-faktor hambatan memperoleh kesempatan kerja mendapatkan diantaranya mengasuh anak, transportasi, kesehatan yang buruk, kesehatan mental yang buruk, cacat fisik, kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan zat, dan pengaruh negatif dari teman sebaya, bahkan ras sering dikutip sebagai penghalang untuk bekerja (Edin dan Lein, 1997). Sebuah studi Pearlmutter dan Bartle (2003) menemukan bahwa ibu-ibu bekerja marah tentang kurangnya pilihan

mengasuh anak, terutama ibu-ibu yang bekerja di industri jasa yang kadang bekerja malam bahkan akhir pekan. Juga, banyak ibu membutuhkan merawat anak sakit atau merawat anak cacat (Lens, 2002). Menurut penelitian Zippay dan Rangarajan (2007), 78 persen ibu bekerja mengandalkan perawatan anak informal oleh keluarga atau teman. Mengasuh anak telah terbukti mempengaruhi jumlah jam kerja. Mengasuh anak mengakibatkan penurunan jumlah jam kerja (Press *et al*., 2005; Joo, 2008).

Dalam beberapa penelitian lainnya, pengalaman kerja (pekerjaan yang dilakukan tenaga kerja sebelumnya) dilaporkan menjadi prediktor kerja. Tahun yang dihabiskan di pekerjaan sebelumnya sangat penting untuk mendapatkan pekerjaan baru dan tetap bekerja (Cheng, 2002;. Lee *et al*., 2004). Selain itu, mereka yang bekerja di sektor pekerjaan informal yang kurang mungkin untuk dipekerjakan (Lee *et al*., 2004). Kemampuan untuk memiliki fasilitas yang mendukung, seperti telepon, transportasi, dan dukungan sosial juga penting untuk mencapai dan mempertahankan pekerjaan. Misalnya, individu yang tidak bekerja yang memiliki telepon lebih mungkin untuk dipekerjakan (Latimer, 2004). Kemungkinan dipekerjakan lebih rendah bagi mereka yang belum pernah bekerja, sementara kurangnya pengalaman kerja sebelumnya dikaitkan dengan pendapatan yang lebih rendah (Dworsky dan Courtney, 2007). Modal sosial muncul sebagai pelengkap dari modal manusia (tingkat pendidikan dan keterampilan kerja individu yang ditawarkan kepada pemberi kerja). Modal sosial, seperti modal manusia, memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas dalam kesempatan kerja, tetapi secara khusus mengacu pada hubungan sosial daripada tingkat pendidikan atau keahlian teknis (Harris, 1993; Putnam, 1995; Schneider, 2006). Coleman (1988) menyatakan bahwa modal sosial dan modal manusia adalah kombinasi relasional yang memungkinkan tercapainya tujuan tertentu dari keadaan tidak akan mungkin. Schneider (2002) mengacu pada modal sosial sebagai hubungan sosial dan pola kepercayaan yang memungkinkan orang untuk mendapatkan akses ke sumber daya seperti layanan pemerintah atau pekerjaan, sementara Li (2004) menunjukkan dalam bentuk pengaturan sosial sebagai sumber potensi yang dapat digunakan untuk mengejar tujuan ekonomi dan sosial. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa akumulasi modal sosial berpengaruh pada hasil sosial dan ekonomi yang positif. Contohnya, modal sosial yang tinggi telah meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, mengurangi kemiskinan dan konflik dalam keluarga, peningkatan tabungan dan aset, dan peningkatan akses investasi (Yusuf, 2008; Brisson, 2009; George dan Chaze, 2009).

Sejalan dengan hal tersebut, terdapat hubungan positif antara modal sosial dan kemajuan karir dan pemanfaatan teknologi (Manturuk *et al*., 2009). Modal sosial juga dikaitkan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan,

modal sosial dapat membantu dalam upaya orang berpenghasilan rendah 'untuk meningkatkan kesejahteraan, mendapatkan pekerjaan yang aman dan manfaat lainnya seperti tunjangan anak dan pelayanan kesehatan (Lévesque, 2005; Parisi *et al*., 2003; Schneider, 2002). Modal sosial yang rendah terkait dengan rendahnya kesejahteraan dan kerawanan pangan (Henderson dan Tickamyer, 2008). Di sisi lain, Pichler dan Wallace (2009), serta Seo (2005), menunjukkan bahwa modal sosial memiliki sedikit pengaruh pada kesejahteraan ekonomi pada populasi yang diteliti. Penelitian lain (Livermore dan Neustrom, 2003: Adato *et al*., 2006; Chantarat dan Barrett, 2008) justru menghasilkan temuan bahwa modal sosial memiliki pengaruh yang merugikan pada berbagai indikator kesejahteraan ekonomi, termasuk mobilitas ekonomi, pekerjaan, dan produktivitas

Transportasi juga ditemukan untuk menjadi penghalang untuk mencapai dan mempertahankan kerja (Brooks *et al*., 2001; Pandey *et al*., 2004). Selain itu, orang-orang dengan transportasi lebih mungkin untuk memiliki pekerjaan tetap, dan kepemilikan kendaraan bekerja adalah prediktor kerja (Latimer, 2004; Lee *et al*., 2004; Weaver *et al*., 2007). Satu studi menemukan bahwa berdasarkan rata- rata nasional, sebesar 91 persen rumah tangga pedesaan tidak memiliki kendaraan dari (Pandey *et al*., 2004). Bahkan pekerjaan entry-level yang terutama terletak di pinggiran kota tidak terjangkau transportasi umum (Lens, 2002). Hambatan lain untuk memperoleh kesempatan kerja meliputi kesehatan yang buruk dan kesehatan mental, cacat fisik, dan kekerasan dalam rumah tangga. Satu studi menemukan bahwa kesehatan bukanlah prediktor signifikan dari kesempatan kerja, namun penelitian lain menemukan bahwa pekerja yang kesehatannya rendah kurang mungkin untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang lebih rendah dibandingkan dengan kesehatan baik (Dworsky dan Courtney, 2007; Weaver *et al*., 2007; Kyoung dan Yoon, 2008).

Selain itu, orang-orang dengan depresi kurang mungkin untuk dipekerjakan (Lee *et al*., 2004). Kecacatan juga ditemukan secara negatif terkait dengan pekerjaan dan penghasilan (Kim, 2000; Dworsky dan Courtney, 2007). Mereka yang cacat lebih mungkin untuk memiliki pekerjaan sementara meskipun dengan pendapatan yang lebih rendah (Latimer, 2004). Akhirnya, Lee *et al*. (2004) menemukan bahwa orang-orang dengan sejarah kekerasan dalam rumah tangga mungkin untuk mendapatkan kesempatan kerja.

D. Latihan

4. Apakah perbedaan Jenis Kesejahteraan dalam Ekonomi Kesejahteraan ?
5. Sebutkan alasannya mengapa bisa keduanya terjadi dalam perkembangan teori ekonomi kesejahteraan ?

E. Kunci Jawaban

3. Terjadinya peningkatan kualitas masyarakat akan berdampak terhadap peningkatan produktifitas mereka. Hidayat dalam Delyuzer (2012) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia sebagai subjek pembangunan disamping dapat menentukan tinggi rendahnya produktifitas juga akan menentukan keberhasilan pembangunan dan produktifitas adalah motor penggerak bagi pembangunan ekonomi. Jadi dapat dikatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dicerminkan pada kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Menurut Tjiptoherijanto (2008), Faktor yang mempengaruhi kualitas masyarakat secara luas adalah faktor pendapatan, faktor pendidikan dan faktor kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan pendapatan memberikan gambaran pada peningkatan kualitas masyarakat secara signifikan.

4. Menurut Sumarti (1999), perbedaan status sosial budaya dan spesialisas kerja akan menghasilkan persepsi kesejahteraan yang berbeda pula. Terdapat kelompok masyarakat yang menggunakan ukuran kesejahteraan bersumber pada simbol kekuasaan budaya-politik, sementara monetisasi ekonomi menghantarkan kalangan masyarakat pada umumnya untuk lebih menggunakan ukuran kesejahteraan ekonomi dibandingkan ukuran kesejahteraan sosial. Skoufias *et al*., (2000) menyatakan bahwa pengukuran kesejahteraan bersifat subjektif manakala berkaitan dengan aspek psikologis yaitu diukur dari kebahagiaan dan kepuasan. Mengukur kesejahteraan secara objektif menggunakan patokan tertentu yang relatif baku, seperti menggunakan pendapatan per kapita, dengan mengasumsikan terdapat tingkat kebutuhan fisik untuk semua orang hidup layak. Ukuran yang sering digunakan adalah kepemilikan uang, tanah, atau aset.

F. Daftar Pustaka

Boediono, Dr., Ekonomi Internasional dan Nasional, BPFE, Yogyakarta, 2014 diakses 9 September 2020

Halwani, Hendra. Dra. M.H., dan Tjiptoharijanto, Prijono, H. Dr., Perdagangan Internasional, Pendekatan Ekonomi Kesejahteraan Makro & Mikro, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.

Tambunan, Tulus T.H., Dr., Perekonomian dan Ekonomi Kesejahteraan Indonesia,, Teori dan temuan Empiris, Ghalia Indonesia, 2017

MODUL EKONOMI KESEJAHTERAAN

(KAK 357)

MODUL 12

PENGERTIAN DAN MASALAH KEMISKINAN

DISUSUN OLEH

Erlina Puspitaloka Mahadewi, SE, MM, MBL (5661)

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2022

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari Modul ini, diharapkan Mahasiswa mampu :

2. Memahami dan mempelajari definisi Kemiskinan dalam Ekonomi Kesejahteran
3. Menguraikan konsep dasar Pengertian, dan Permasalahan Kemiskinan dalam Ekonomi Kesejahteran dan Jenis Kesejahteraan dalam Ekonomi Kesejahteraan

B. Uraian dan Contoh

Visi dan Misi UEU

Universitas Esa Unggul mempunyai visi menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Universitas Esa Unggul menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan
2. Menciptakan suasana akademik yang kondusif
3. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan

Topik Perkuliahan : Pengertian dan Permasalan Kemiskinan

C. Latar Belakang tentang Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Kemiskinan merupakan gambaran kehidupan di banyak negara berkembang yang mencakup lebih dari satu milyar penduduk dunia. Kemiskinan merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi nasional suatu negara dan situasi global. Globalisasi ekonomi dan bertambahnya ketergantungan antar negara, tidak hanya merupakan tantangan dan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi serta pembangunan suatu negara, tetapi juga mengandung resiko dan ketidakpastian masa depan perekonomian dunia. Menurut Kunarjo dalam Badrul Munir (2002:10), suatu negara dikatakan miskin biasanya ditandai dengan tingkat pendapatan perkapita rendah, mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi (lebih dari 2 persen per tahun), sebagian besar tenaga kerja bergerak di sektor pertanian dan terbelenggu dalam lingkaran setan kemiskinan.

Kemiskinan juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah negara indonesia, dewasa ini pemerintah belum mampu menghadapi atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Kondisi kemiskinan Indonesia semakin parah akibat krisis ekonomi yang menerjang Indonesia pada tahun 1998, jumlah

penduduk miskin di Indonesia bertambah pesat, padahal sebelumnya jumlah penduduk miskin terus berkurang. Secara absolut dan presentase penduduk miskin meningkat sangat tajam dari 22,5 juta orang atau 11,34% pada tahun 1996 menjadi 49,5 juta jiwa atau 20,30% pada tahun 1998. Pada saat krisis terjadi penambahan penduduk miskin (banyak penduduk menjadi miskin mendadak) sebanyak 27 juta jiwa atau 120%, suatu jumlah yang luar biasa besar. Jumlah penduduk miskin ini secara absolut hampir mendekati jumlah penduduk miskin pada tahun 1976 yang berjumlah 54,2 juta jiwa. Meskipun krisis ekonomi telah berlalu, namun pada tahun 2003 jumlahnya tetap naik, yaitu 37,3 juta jiwa atau 17,42% dari jumlah penduduk Indonesia (Mahri, 2006)

Pemerintah sendiri selalu mencanangkan upaya penanggulangan kemiskinan dari tahun ketahun. Namun jumlah penduduk miskin Indonesia tidak juga mengalami penurunan yang signifikan, walaupun data di BPS menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskin, secara kualitatif belum menampakkan dampak perubahan yang nyata malahan kondisinya semakin memprihatinkan tiap tahunnya (Wongdesmiwati, 2009).

D. Usaha pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan sangatlah serius, bahkan merupakan salah satu program prioritas termasuk bagi pemerintah provinsi Jawa Tengah. Upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah dilaksanakan melalui lima pilar yang disebut "*Grand Strategy*". *Pertama*, perluasan kesempatan kerja, ditujukan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan. *Kedua*, pemberdayaan masyarakat, dilakukan untuk mempercepat kelembagaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat serta memperluas partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin kehormatan, perlindungan, dan pemenuhan hakhak dasar. *Ketiga*, peningkatan kapasitas, dilakukan untuk pengembangan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan. *Keempat*, perlindungan sosial, dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan yang disebabkan antara lain oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial. *Kelima*, kemitraan regional, dilakukan untuk pengembangan dan menata ulang hubungan dan kerjasama lokal, regional, nasional, dan internasional guna mendukung pelaksanaan ke empat strategi diatas (Bappeda Jateng, 2007).

Proses pembangunan memerlukan pendapatan nasional yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Di banyak negara syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan yang tetap adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi merupakan sesuatu yang dibutuhkan. Walaupun begitu pertumbuhan ekonomi yang bagus menjadi tidak akan berarti bagi penurunan masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan adanya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Wongdesmiwati, 2009).

Inflasi merupakan indikator yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Inflasi akan menimbulkan beberapa akibat buruk kepada individu, masyarakat dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Salah satu akibat penting dari inflasi adalah cenderung menurunkan taraf kemakmuran segolongan besar masyarakat. Sebagian besar para pelaku kegiatan ekonomi terdiri dari para pekerja yang bergaji tetap. Inflasi biasanya berlaku lebih cepat dari kenaikan upah para pekerja. Oleh sebab itu upah riil para pekerja akan merosot disebabkan oleh inflasi dan keadaan ini berarti tingkat kemakmuran segolongan besar masyarakat mengalami kemerosotan (Sukirno, 2002).

Faktor lain yang juga mempengaruhi kemiskinan adalah pengangguran. Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Pengangguran mengurangi pendapatan masyarakat, dan ini mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, maka akan menimbulkan efek yang buruk juga kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek ekonomi dalam jangka panjang (Sukirno, 2002).

Kebijakan upah minimum juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Upah minimum adalah upah bulanan yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Kebijakan upah minimum merupakan salah satu strategi pemerintah menanggulangi kemiskinan, dengan menghitung kebutuhan dasar seperti, pangan, sandang, dan perumahan, sekaligus sebagai jaring pengaman sosial dengan menghitung kebutuhan pendidikan dasar dan jasa transportasi.

Gagasan upah minimum yang sudah dimulai dan dikembangkan sejak awal tahun 1970-an bertujuan untuk mengusahakan agar dalam jangka panjang besarnya upah minimum paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL). Kebutuhan hidup layak adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, nonfisik maupun sosial untuk satu bulan. Sebagaimana diatur dalam Permenakertrans No 17 Tahun 2005, sehingga diharapkan dapat menjamin tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta keluarga sekaligus dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan buruh. Jika kebutuhan hidup layak dapat terpenuhi, maka kesejahteraan pekerja meningkat dan terbebas dari masalah kemiskinan (Sumarsono, 2003). Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multi dimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (M. Nasir, dkk 2008). Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat sebagai pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan. Adanya permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenaiPertumbuhan ekonomi secara umum dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Ragional Bruto (PDRB), Investasi,Inflasi,pajak dan retribusi, pinjaman dan pelayanan bidang ekonomi. Khusus untuk nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit

produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB. Sehingga selain PDRB ada indikator lain untuk mengukur tingkat kesejahteraan umum dan PDRB menjadi bagian dari ukuran ini. Ukuran ini menjelaskan pelbagai indikator yang ada, ukuran itu adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) paling tepat dipakai untuk mengukur profil kesejahteraan umum. Indeks pembangunan Manusia (IPM) adalah Indeks yang digunakan untuk menggambarkan capaian disektor kesejahteraan masyarakat secara agregat, karena indeks ini menangkap perkembangan di sektor ekonomi dan sektor sosial sekaligus. Di dalam indeks ini, kesejahteraan tidak hanya ditilik melalui perspektif ekonomi semata sebagaimana lazim terekam dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, tetapi juga diteropong via capaian disektor sosial, yakni pemdidikan dan kesehatan. Dalam hal yang terakhir, Tingkat Melek huruf (TMH) dan Tingkat Harapan Hidup (THH) adalah dua indikator yang lazim termaktub dalam konstruksi IPM. Sebagai Pemerintah baik pusat maupun daerah tidak terkecuali Pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka ingin mencapai peningkatan IPM (Indeks pembangunana Manusia) ini telah membuat fokus fokus pekerjaan sehingga berbagai macam program dan kegiatan bisa dibuat dan dilaksanakan. Fokus-fokus itu adalah : Pertama, Fokus Kesejahteraan dan pemerataan Ekonomi yang memiliki Indikator ; Pertumbuhan Ekonomi, Pengendalian Inflasi, PDRB Perkapita, Indeks Gini yang rendah, Pemerataan Pendapatan, Penurunan penduduk miskin dan Kriminalitas yang semakin menurun. Kesemua Indikator ini memiliki ukurannya masing masing dan bisa dijadikan sarana evaluasi apakah Pemerintah sukses atau gagal dalam mengurus rakyatnya. Fokus yang kedua adalah Fokus Kesejahteraan Masyarakat. Fokus yang kedua ini juga memiliki Indikator yaitu ; Angka Melek Huruf, Angka rata-rata lama sekolah, Angka partisipasi kasar, Angka pendidikan yang ditamatkan dan Angka Partisipasi Murni. Indikator ini tergabung dalam Fokus Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Pendidikan. Selanjutnya Fokus Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Kesehatan memiliki Indikator ; Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Angka Usia Harapan Hidup, Persentase balita gizi buruk. Fokus yang ketiga adalah Fokus Seni Budaya dan Olahraga yang memiliki Indikator Jumlah grup kesenian yang ada, jumlah gedung kesenian yang ada, jumlah klub olahraga yang ada dan jumlah gedung olahraga yang ada. Indikator indicator ini sangat luas dan menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam artikel-artikel berikutnya. Namun ada yang sedikit menarik dan menggelitik ketika kita melihat mengapa ada Fokus Seni Budaya dan Olahraga yang juga termasuk dalam ukuran ukuran kesejahteraan. Jawabanya cukup panjang dan mungkin menarik untuk sedikit kita diskusikan pada tulisan ini. Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Secara mudah dapat kita gambarkan ketika kita melihat

Negara-negara maju yang masyarakatnya relatif sudah sejahatera dalam hal ini sebagai contoh adalah Negara Negara Eropa barat dan skandinavia. Biasanya Negara tersebut masyarakatnya sangat mengapresiasi seni. Hal ini dibuktikan dengan begitu banyaknya galeri seni, gedung kesenian, teater dan festival-festival kesenian yang dilaksanakan sepanjang tahun. Selain tinggi apresiasi seninya biasanya mereka juga memiliki prestasi dibidang olahraga pada level ditingkat dunia. Kenyataan lain yang bisa kita lihat masyarakat sejahtera tersebut sudah tidak memikirkan lagi untuk pemenuhan kebutuhan pokok karena sudah terpenuhi. Oleh karena itu waktu yang tersedia bisa disediakan sebahagian untuk menikmati kesenian dan olahraga. Diharapkan dengan fokus terhadap 3 (tiga) bidang tersebut dengan berbgai indicator indicator tersebut maka pendapatan masyarakat akan meningkat, Tingkat Melek huruf (TMH) juga meningkat dan Tingkat Harapan Hidup (THH) juga akan terus naik. sehingga ketika konstruksi IPM ini sebagai ukuran kesejahteraan meningkat IPM juga akan meningkat. Paradigma yang mengatakan bahwa kesejahteraan itu hanya ditangkap disektor ekonomi saja otomatis gugur karena indeks pembangunan manusia (IPM) telah menjawabnya dengan menggambarkan capaian disektor kesejahteraan masyrakat secara agregat. Sektor ekonomi dan sektor sosial sekaligus digambarkan dalam indeks ini sehingga kesejahteraan umum dapat diukur dengan cakupan yang luas. Indeks pembangunan manusia (IPM) juga mampu menjelaskan ukuran-ukuran dalam infrastruktur dan kelembagaan yang dibentuk oleh pemerintah hal inilah yang menyebabkan IPM mampu mendapatkan gambaran capaian pembangunan dalam sector ekonomi dan sosial. Bukankah kesejahteraan adalah amanah dari konstitusi dan tujuan dari Negara ini, dimana “Mencerdaskan Kehidupan bangsa” & “Memajukan Kesejahteraan Umum” akan selalu terpatri dan abadi dalam pembukaan konstitusi Negara ini. Ketika Indikator telah dirumuskan, tantangan berikutnya adalah eksekusi dan Implemtasinya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk atau rasio gini (*gini ratio*) di Indonesia pada Maret 2020 mencapai 0,381 atau melebar ketimbang rasio gini September 2019 sebesar 0,380. BPS menyatakan bahwa ingkat ketimpangan pengeluaran sebenarnya membaik bila dibandingkan dengan rasio gini Maret 2019 sebesar 0,382. Meski begitu, realisasi rasio gini Maret 2020 tetap perlu menjadi perhatian. Selama periode Maret 2015 hingga Maret 2019 telah terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia. Namun, *gini ratio* naik lagi pada Maret 2020. Untuk diketahui, angka koefisien rasio gini berkisar 0 hingga 1. Koefisien 0 menandakan tingkat pengeluaran merata sempurna, sedangkan koefisien I menunjukkan ketimpangan yang sempurna, rasio gini di daerah perkotaan pada Maret 2020 tercatat 0,393. Angka rasio itu itu meningkat ketimbang rasio gini September 2019 sebesar 0,391 dan Maret 2019 sebesar 0,392. Rasio gini pada daerah pedesaan juga melebar menjadi 0,317 pada Maret 2020 dibandingkan dengan September 2019 sebesar 0,315. Meski begitu, nilai rasio gini tersebut tidak berubah bila disbandingkan dengan Maret 2019 sebesar 0,317. Berdasarkan provinsi, rasio gini tertinggi Maret 2020 berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebesar 0,434. Sementara itu, rasio gini terendah tercatat di Provinsi Bangka Belitung sebesar 0,262. BPS juga

mencatat setidaknya terdapat delapan provinsi dengan angka rasio gini lebih tinggi ketimbang rasio gini nasional di antaranya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,434. Kemudian, Gorontalo sebesar 0,408, Jawa Barat 0,403, dan DKI Jakarta 0,399. Selain itu, ada Papua dengan rasio gini sebesar 0,392, Sulawesi Tenggara 0,389, Sulawesi Selatan 0,389, dan Papua Barat sebesar 0,382. Kualitas sumber daya manusia tidak terlepas dari produktifitas kerja dari sumber daya manusia tersebut, karena sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari produktifitas kerjanya (Siregar, 2009). Terjadinya peningkatan kualitas masyarakat akan berdampak terhadap peningkatan produktifitas mereka. Hidayat dalam Delyuzer (2012) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia sebagai subjek pembangunan disamping dapat menentukan tinggi rendahnya produktifitas juga akan menentukan keberhasilan pembangunan dan produktifitas adalah motor penggerak bagi pembangunan ekonomi. Jadi dapat dikatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dicerminkan pada kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Menurut Tjiptoherijanto (2008), Faktor yang mempengaruhi kualitas masyarakat secara luas adalah faktor pendapatan, faktor pendidikan dan faktor kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan pendapatan memberikan gambaran pada peningkatan kualitas masyarakat secara signifikan.

Pembangunan Manusia (IPM). IPM ini terdiri dari tiga komponen yaitu : Pertama, pendidikan, yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama bersekolah. Kedua, derajat kesehatan yang terbaca dari angka harapan hidup. Ketiga, pendapatan penduduk yang diukur dengan tingkat daya beli masyarakat (purchasing power parity). Komponen pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi dalam sumber daya manusia yang memberikan sumbangan langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ketrampilan dan produktifitas karena pendidikan berfungsi menyiapkan salah satu input dalam proses produksi yaitu tenaga kerja agar dapat kerja dengan produktif karena kualitasnya dan pada umumnya orang yang mempunyai pendidikan lebih tinggi akan mempunyai wawasan yang lebih luas terutama penghayatan akan pentingnya produktivitas. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia haruslah dimulai dari bawah, yaitu dari pendidikan dasar sehingga sejak dini manusia mempunyai otonomi berfikir sendiri dan mampu bersikap mandiri. Berdasarkan penilaian UNDP (1990) kualitas SDM Indonesia atau tingkat Provinsi juga diukur melalui IPM (human development index).

Komponen kesehatan juga menjadi salah satu dimensi penting sebagai refleksi kualitas sumber daya manusia. Sehingga sangat memungkinkan sekali apabila derajat kesehatan diperbaiki akan berpengaruh secara langsung terhadap kemampuan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan derajat kesehatan suatu penduduk tercermin dari penurunan angka kematian bayi, perbaikan status gizi serta peningkatan umur harapan hidup penduduk karena semakin tinggi kesadaran mereka akan pentingnya hidup sehat, pada akhirnya akan memperpanjang usia harapan hidup. Angka harapan hidup di Provinsi Jambi mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2002 dari 63,5 tahun meningkat pada tahun 2014 menjadi 69,6 tahun. Dan angka kematian bayi di Provinsi Jambi turun dari 56 jiwa per 1000 kelahiran hidup

pada tahun 2002 menjadi 21 jiwa per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2014. Hal ini mencerminkan derajat kesehatan penduduk Jambi yang kian membaik. Komponen Pendapatan masyarakat yang diukur dengan tingkat daya beli masyarakat (purchasing power parity) akan mempengaruhi kemampuan manusia dalam mengakses kehidupan yang layak atau melakukan pengeluaran untuk kesehatan, pendidikan ketrampilan serta pemenuhan kebutuhan fisik minimum. Dengan kata lain akan menggambarkan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Semakin meningkatnya konsumsi rill perkapita maka daya beli masyarakat juga semakin tinggi. Hal ini menunjukan adanya peningkatan kualitas masyarakat karena peningkatan daya beli dan konsumsi memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan lebih baik lagi. Akibat lain dari tidak terpenuhinya kebutuhan SDM yang berkualitas adalah masuknya SDM dari wilayah lain diluar Provinsi Jambi yang dapat membuat tersingkirnya SDM lokal karena kalah dalam bersaing. Penduduk yang tidak berkualitas relative sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, bahkan kurang beruntung mendapatkan pekerjaan (pengangguran). Oleh sebab itu, perlu campur tangan pemerintah untuk meningkatkan kualitas penduduk, melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kondisi faktor-faktor dari Indeks Mutu Hidup Masyarakat.

Menurut Wijaya Kuslin (2008) peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Provinsi Jambi seluruhnya mencakup pembangunan manusia, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pembangunan manusia sebagai insan, menekankan harkat, martabat, hak dan kewajiban manusia, yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia. lndeks Mutu Hidup (Physical Quality of Life Indexes) Pada tahun 1979, Morris D. Morris dalam Lincolin Arsyad (2010) memperkenalkan satu indikator alternatif dalam mengukur kinerja pembangunan suatu negara yaitu Indeks Mutu Hidup (IMH) atau Physical Quality of Life Indexes (PQLI). Ada tiga indikator utama yang dijadikan acuan pada indeks ini yaitu a) Angka Kematian Bayi, b) Angka Harapan Hidup suatu umur, dan c) Angka Melek Huruf Orang Dewasa. Berdasarkan setiap indikator tersebut dilakukan pemeringkatan terhadap kinerja pembangunan suatu negara, kinerja tersebut diberi skor antara 1 sampai 100, angka 1 melambangkan kinerja terburuk dan angka 100 melambangkan kinerja terbaik. Untuk indikator harapan hidup, batas atas (upper limit) 100 ditetapkan 80 tahun (harapan hidup tertinggi pada saat studi tersebut dilakukan dicapai oleh swedia). Sedangkan batas bawah (lower limit) adalah 28 tahun (tingkat harapan hidup terendah di Guinea-Bissau pada tahun 1950). Antara batas atas dan batas bawah itulah, tingkat harapan hidup suatu negara diperingkatkan dengan skor antara 1 sampai 100. Demikian pula untuk tingkat kematian bayi, batas atasnya 9 kematian per 1000 kelahiran (juga dicapai Swedia pada tahun 1973). Sedangkan batas bawahnya adalah 229 kematian per 1000 kelahiran (tingkat kematian bayi tertinggi, di Gabon).

Komponen ketiga IMH yakni Angka Melek Huruf, Merupakan indikator yang penting karena merupakan ukuran kesejahteraan dan taraf keterampilan yang diperlukan dalam proses pembangunan. Jadi keseluruhannya itu paling penting kaitannya adalah dengan kemampuannya berproduksi yang bermuara pada pendapatan secara khusus dan dengan pertumbuhan ekonomi secara umum. Dalam melihat kualitas sumber daya manusia perlu kiranya dijelaskan beberapa pengertian dan istilah yang digunakan dalam komponen IMH, yaitu sebagai berikut : 1. Angka kematian bayi (IMR) yaitu sebesar probabilita bayi meninggal sebelum usia satu tahun per 1000 kelahiran hidup. Untuk indeks IMR diperoleh dengan rumus: 22,2 229 IMR IKB. Dimana : IKB = Indeks Kematian Bayi IMR = Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup 229 = Tingkat kematian bayi maksimum 2,22 = pembagi yang jika terdapat tingkat kematian bayi terendah yaitu 9 bayi per 1000 kelahiran, maka akan didapatkan indeks = 100 2. Angka Harapan Hidup (Eo) yaitu data yang digunakan adalah data umur harapan hidup. Untuk mencari indeks harapan hidup suatu umur digunakan rumus. Dimana: IHH = Indeks Harapan Hidup Eo = Angka harapan hidup suatu umur 28 = Tingkat harapan hidup terendah 0,39 = Angka yang menunjukkan bahwa bila terjadi kenaikan umur harapan hidup sebesar 0,39 tahun, maka akan menghasilkan 1 poin angka indeks 3. Angka Melek Huruf yaitu menunjukan angka perbandingan antara persentase penduduk usia dewasa (15 tahun keatas) yang melek huruf terhadap jumlah penduduk Usia Dewasa (15 Tahun keatas). Indeks Melek Huruf digunakan rumus lain.

Suatu komunitas yang memiliki modal sosial yang rendah hampir dapat dipastikan kualitas pembangunan manusianya akan jatuh tertinggal. Beberapa dimensi pembangunan manusia yang sangat dipengaruhi oleh modal sosial antara lain kemampuannya untuk menyelesaikan berbagai problem kolektif, mendorong roda perubahan yang cepat di tengah masyarakat memperluas kesadaran bersama bahwa banyak jalan yang bisa dilakukan oleh setiap anggota kelompok untuk memperbaiki nasib secara bersama-sama, memperbaiki mutu kehidupan seperti meningkatkan kesejahteraan, perkembangan anak dan banyak keuntungan lainnya yang dapat diperoleh.

Masyarakat yang memiliki modal sosial yang tinggi akan membuka kemungkinan menyelesaikan kompleksitas persoalan dengan lebih mudah. Hal ini memungkinkan terjadi terutama pada masyarakat yang terbiasa hidup dengan rasa saling mempercayai yang tinggi. Masyarakat yang bersatu dan memiliki hubungan-hubungan keluar lingkungan kelompoknya secara intensif dan dengan didukung oleh semangat kebajikan untuk hidup saling menguntungkan, akan merefelksikan kekuatan masyarakat sendiri (Hasbullah, 2006). Modal sosial ibarat minyak pelumas yang bukan hanya memperlicin, tetapi juga akan terus mendorong roda kendaraan hidup yang memungkinkan masyarakat berkembang secara baik dan aman. Berkembangnya modal sosial ditengah masyarakat akan menciptakan suatu situasi masyarakat yang toleran, jauh dari sifat iri dan dengki serta merangsang tumbuhnya simpati dan empati terhadap kelompok masyarakat diluar kelompoknya.

Jaringan-jaringan sebagai wujud dari modal sosial akan memungkinkan lebih mudahnya saluran informasi dan ide dari luar yang merangsang perkembangan kelompok masyarakat. Mereka akan lebih mudah terhindar dari penyakit-penyakit

kejiwaan seperti kecemasan, depresi dan akan hidup lebih sehat. Hal ini dapat terjadi karena di dalam masyarakat tersebut tumbuh kembang kepedulian bersama dalam berbagai aspek dan dimensi aktifitas kehidupan. Masyarakat saling memberi dan perhatian dan saling mempercayai. Situasi yang demikian akan mendorong tidak hanya ide dan kreatifitas, tetapi juga suasana hidup lebih damai, bersahabat dan tenteram. Sebagai contoh, Putnam (2000) temuannya tentang dampak positif modal sosial terhadap perkembangan tumbuh kembang anak. Dalam suatu penelitiannya tentang masyarakat Amerika ditemukan bahwa pada masyarakat yang memiliki modal sosial yang kuat, perkembangan baik, kesehatan, pencapaian belajar dan situasi kejiwaan mereka lebih baik, dibanding yang memiliki modal sosial yang rendah. Rasa saling percaya, jaringan-jaringan pertemanan dan norma-norma yang merefeleksikan kebiasaan saling memberi dalam keluarga, di sekolah dan di komunitas yang lebih besar, berpengaruh positif pada pola tingkah laku anak dan pada perkembangan fisik mereka.

Fergusson *et al*., (1981); Martin (2006) menyatakan bahwa terminologi yang sering digunakan dalam penelitian yang membahas teori kesejahteraan adalah *standard living, well-being, welfare*, dan *quality of life*. Menurut Just *et al*., 1982, dalam kajian ekonomi kesejahteraan yang bertujuan untuk menolong masyarakat membuat pilihan yang lebih baik, kesejahteraan seseorang dilihat dari *willingness to pay* saat individu atau masyarakat berperan sebagai konsumen. Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Menurut Pigou (1960), teori ekonomi kesejahteraan adalah bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang. Kesejahteraan dapat didekati berdasarkan dua hal (Campbell, 1976; Sumawan dan Tahira, 1993; Milligan *et al*., 2006), yaitu: 1) kesejahteraan subjektif dan 2) kesejahteraan objektif. Kesejahteraan dialamatkan bagi tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Pada tingkat individu, perasaan bahagia atau sedih, kedamaian atau kecemasan jiwa, dan kepuasan atau ketidakpuasan merupakan indikator subjektif dari kualitas hidup. Pada tingkat keluarga, kecukupan kondisi perumahan (dibandingkan standar), seperti ada tidaknya air bersih, merupakan contoh indikator objektif. Kepuasan anggota keluarga mengenai kondisi rumah merupakan indikator subjektif. Pada tingkat masyarakat, beberapa contoh dari indikator objektif di antaranya adalah angka kematian bayi, angka pengangguran dan tuna wisma. Kesejahteraan subjektif diukur dari tingkat kebahagiaan dan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Pendekatan ini merupakan ukuran kesejahteraan yang banyak digunakan di negara maju termasuk Amerika Serikat.

Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut (Sawidak, 1985). Tingkat kepuasan yang terkait emosional akan mempengaruhi aspek tingkah laku individu untuk menilai kepuasan pada variabel-variabel lainnya seperti kepuasan pada kualitas kehidupan (Currivan, 1999; Lambert *et al*., 2001; Robbins dan Judge, 2007; Falkenburg dan Schyns, 2007). Nilai kepuasan emosional juga akan meningkatkan kinerja dan

kontribusi individu pada lingkungannya (Lock, 1976; Viswesvaran dan Ones, 2000; Butler dan Rose, 2011).

Sayogyo (1984) mengkaji kesejahteraan dan mendefinisikan kesejahteraan keluarga sebagai penjabaran delapan jalur pemerataan dalam trilogi pembangunan sejak Repelita III, yaitu: 1) peluang berusaha; 2) peluang bekerja; 3) tingkat pendapatan; 4) tingkat pangan, sandang, perumahan; 5) tingkat pendidikan dan kesehatan; 6) peran serta; 7) pemerataan antar daerah, desa/kota; dan 8) kesamaan dalam hukum. Mirrowsky dan Ross (1989) mengkaji kajian kesejahteraan dengan penyakit, kesakitan, kesulitan ekonomi yang dihubungkan dengan depresi. Kepuasan hidup sebagai bagian dari dimensi kesejahteraan meliputi kesehatan, penerimaan terhadap kecukupan ekonomi, pertolongan (dukungan sosial), dan interaksi sosial. Penelitian Bane dan Ellwood (1994); Coward *et al*. (1994); Scott dan Buttler (1997), yang menganalisis kombinasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif. Kesejahteraan subjektif digunakan dalam penelitian ini sebagai konstruk yang lebih global dikaitkan dengan beragam dimensi lingkungan yang melengkapi fasilitas dan pelayanan transportasi, pewaratan kesehatan, perumahan, jasa kesehatan mental, jasa ekonomi, dan kesempatan untuk menjadi relawan. Digunakan beragam indikator kesehatan mental (seperti moral dan depresi) yang menilai kualitas pengalaman individu (*the inner-experience*), sedangkan kompetensi personal berkaitan dengan aspek kesehatan, status keuangan, dan lingkungan yang memberikan dukungan pribadi.

Bryant (1990) menyatakan bahwa organisasi ekonomi analisis perilaku ekonomi rumah tangga (orang yang bertempat tinggal dalam atap yang sama dan pengelolaan keuangan yang sama, serta terdiri dari keluarga). Kajian organisasi ekonomi dalam keluarga menggunakan *demand* terhadap barang strategis sebagai indikator kesejahteraan. Ukuran lainnya kesejahteraan adalah proporsi pengeluaran untuk pangan. Menurut Bubolz dan Sontag (1993), kesejahteraan merupakan terminologi lain dari kualitas hidup manusia (*quality of human life*), yaitu suatu keadaan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasinya nilai- nilai hidup. Zeitlin *et al*., (1995) menggunakan istilah kesehatan sosial keluarga dan kesejahteraan sosial keluarga bagi keluarga yang dapat melahirkan individu (anak) dengan pertumbuhan dan perkembangan yang baik.

Menurut Whithaker dan Federico (1997), pengertian kesejahteraan sosial merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut. Seseorang yang mempunyai kekurangan kemampuan mungkin memiliki kesejahteraan yang rendah, kurangnya kemampuan dapat berarti kurang mampu untuk mencapai fungsi tertentu sehingga kurang sejahtera. Terdapat beragam pengertian mengenai kesejahteraan, karena lebih bersifat subjektif dimana setiap orang dengan pedoman, tujuan dan cara hidupnya yang berbeda-beda akan memberikan nilai-nilai yang berbeda pula tentang kesejahteraan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan (Sianipar, 1997).

Menurut Sumarti (1999), perbedaan status sosial budaya dan spesialisas kerja akan menghasilkan persepsi kesejahteraan yang berbeda pula. Terdapat

kelompok masyarakat yang menggunakan ukuran kesejahteraan bersumber pada simbol kekuasaan budaya-politik, sementara monetisasi ekonomi menghantarkan kalangan masyarakat pada umumnya untuk lebih menggunakan ukuran kesejahteraan ekonomi dibandingkan ukuran kesejahteraan sosial. Skoufias *et al*., (2000) menyatakan bahwa pengukuran kesejahteraan bersifat subjektif manakala berkaitan dengan aspek psikologis yaitu diukur dari kebahagiaan dan kepuasan. Mengukur kesejahteraan secara objektif menggunakan patokan tertentu yang relatif baku, seperti menggunakan pendapatan per kapita, dengan mengasumsikan terdapat tingkat kebutuhan fisik untuk semua orang hidup layak. Ukuran yang sering digunakan adalah kepemilikan uang, tanah, atau aset.

Pada prinsipnya aspek yang dapat diamati dalam menganalisis kesejahteraan hampir sama, yaitu mencakup dimensi: pendapatan, pengeluaran untuk konsumsi, status pekerjaan, kondisi kesehatan, serta kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan kebutuhan dasar (seperti air, sanitasi, perawatan kesehatan dan pendidikan). Sedang menurut Rambe (2004), kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warganegara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Berdasarkan tingkat ketergantungan dari dimensi standar hidup (*standard of living*) masyarakat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dibedakan kedalam satu sistem kesejahteraan (*well-being*) dan dua subsistem, yakni: 1) subsistem sosial; dan 2) subsistem ekonomi, dengan beberapa faktor di antaranya kesejahteraan manusia, kesejahteraan sosial, konsumsi, tingkat kemiskinan, dan aktivitas ekonomi (World Bank: Santamarina *et al*., 2004). Di negara-negara maju, seperti Canada menggunakan 19 indikator kualitas hidup masyarakat (*quality of life*) yang tersebar ke dalam empat subsistem, yakni: 1) Indikator ekonomi: a) GDP perkapita, b) pendapatan perkapita, c) inovasi, d) lapangan kerja, e) melek huruf; dan f) tingkat pendidikan; 2) Indikator kesehatan: a) usia harapan hidup, b) status kesehatan, c) tingkat kematian bayi (IMR), dan d) aktivitas fisik; (3) Indikator lingkungan: a) kualitas udara, b) kualitas air, c) *biodiversity*, dan d) lingkungan yang sehat; dan 4) Indikator keamanan dan keselamatan masyarakat: a) sukarela, b) *diversity*, c) berpartisipasi dalam aktivitas budaya, d) berpartisipasi dalam kegiatan politik, dan e) keamanan dan keselamatan (Sharpe, 2004).

Menurut penelitian Sugiharto (2007) indikator yang digunakan Biro Pusat Statistik (BPS) untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu: a) tinggi; b) sedang; c) rendah. Indikator pengeluaran digolongkan menjadi 3 item yaitu: a) tinggi; b) sedang; c) rendah. Indikator tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) permanen; b) semi Permanen; dan c) non permanen. Indikator fasilitas tempat tinggal

yang dinilai terdiri dari 12 item, yaitu pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah. Dari 12 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) lengkap; b) cukup; dan c) kurang. Indikator kesehatan anggota keluarga digolongkan menjadi

3 item yaitu: a) bagus; b; cukup; dan c) kurang. Indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari 5 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan, dan alat kontrasepsi. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) mudah; b) cukup; dan c) sulit. Indikator kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan terdiri dari 3 item yaitu biaya sekolah,

jarak ke sekolah, dan proses penerimaan. Dari 3 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) mudah; b) cukup; dan c) sulit. Indikator kemudahan mendapatkan transportasi terdiri 3 item, yaitu ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan kendaraan. Dari 3 item tersebut kemudian akan di digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) mudah; b) cukup; dan c) sulit. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggunakan kriteria tahapan kesejahteraan keluarga untuk mengukur kesejahteraan (Sugiharto, 2007). Lima pengelompokkan tahapan keluarga sejahtera menurut BKKBN adalah sebagai berikut:

u) Keluarga pra sejahtera, adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai keluarga sejahtera tahap I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, sandang, pangan, papan, dan kesehatan;

v) Keluarga sejahtera tahap I, adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Indikator yang digunakan, yaitu :

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut.
2. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
4. Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.
5. Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber-KB dibawa ke sarana/petugas kesehatan;

w) Keluarga sejahtera tahap II, yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera I, harus pula memenuhi syarat sosial psikologis 6 sampai 14 yaitu :

76. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
77. Paling kurang, sekali seminggu keluarga

menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk.

78. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru per tahun.
79. Luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi tiap penghuni rumah.
80. Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat.
81. Paling kurang 1 (satu) orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap.
82. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin.
83. Seluruh anak berusia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini.
84. Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih pasangan usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil);

x) Keluarga sejahtera tahap III, yaitu keluarga yang memenuhi syarat 1 sampai 14 dan dapat pula memenuhi syarat 15 sampai 21, syarat pengembangan keluarga yaitu :

85. Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
86. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.
87. Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.
88. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
89. Mengadakan rekreasi bersama diluar rumah paling kurang 1 kali/6 bulan.
90. Dapat memperoleh berita dari surat kabar/TV/majalah.
91. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai engan kondisi daerah setempat;

y) Keluarga sejahtera tahap III plus, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kriteria 1 sampai 21 dan dapat pula memenuhi kriteria 22 dan 23 kriteria pengembangan keluarganya yaitu:

92. Secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.
93. Kepala Keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan/yayasan/institusi masyarakat

Terdapat beberapa penelitian menggunakan kesejahteraan sebagai konstuk dengan berbagai definisi dan ragam indikatornya. Bradbury *et al*., (1979) melakukan penelitian untuk menguji model hipotesis apakah perubahan jaminan pendapatan tambahan dan bantuan umum berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga dengan kepala keluarga wanita. Ukuran kesejahteraan ekonomi menggunakan ukuran pendapatan yang kemudian digunakan dalam menentukan

garis kemiskinan sebagai indikator kesejahteraan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan ukuran pendapatan dan garis kemiskinan, kesejahteraan ekonomi dengan kepala keluarga wanita dengan tanggungan anak adalah paling rendah jika dibandingkan dengan tanpa anak. Dunst dan Triviette (1988), meneliti hubungan dukungan sosial dan kesehatan serta kesejahteraan dengan menggunakan indeks kesejahteraan psikologi (Bradburn dan Caplovitz, 1965) dan indeks kesejahteraan individu (Dunst dan Triviette, 1986).

Penelitian Nurmawati (1994) menunjukkan bahwa keluarga sejahtera memiliki keragaan yang lebih baik dalam semua variabel penelitian dibandingkan keluarga pra-sejahtera. Besar keluarga sejahtera lebih sedikit dari keluarga pra-sejahtera, pendapatan per kapita keluarga pra-sejahtera lebih rendah dari keluarga sejahtera, pendapatan keluarga sejahtera dan pra sejahtera lebih tinggi dari kriteria kemiskinan. Persentase pengeluaran pangan keluarga pra-sejahtera lebih besar dari keluarga sejahtera, pengetahuan gizi ibu dari keluarga pra-sejahtera lebih rendah dari keluarga sejahtera, status gizi balita baik dari keluarga sejahtera lebih baik dari status gizi balita keluarga pra-sejahtera. Febrero dan Schwartz (1995), mengkaji kesejahteraan dalam kaitannya dengan perilaku konsumsi di keluarga, khususnya menyoroti perilaku *altruistik* dari sebagian anggota keluarga dari sudut pandang ahli ekonomi terhadap perilaku konsumsi di keluarga. Anggota keluarga *altruistik* melakukan serangkaian perilaku pengorbanan yang menyebabkan peningkatan kesejahteraan bagi anggota lainnya dalam keluarga.

Hasil kajian sebaliknya menunjukkan bahwa peningkatan sumber daya bagi anggota keluarga yang egoistik berakibat terhadap penurunan kesejahteraan anggota keluarga lainnya, khususnya yang altruistik. Sedang Narayan *et al*. (2000), dalam bukunya "*Voices of The Poor. Can Anyone Hear Us*?" mengkaji kemiskinan (*poverty*) di berbagai negara serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam kajian tersebut digunakan beberapa konsep atau istilah kesejahteraan sebagai sisi lain pengukuran kemiskinan seperti kesejahteraan material dan kesejahteraan psikologi. Khomsan *et al*. (1997) melakukan penelitian identifikasi indikator kemiskinan dan menggunakan kriteria BKKBN dengan indikator keluarga sejahtera sebagai penentuan sampling dengan pertimbangan bersifat operasional, memperhatikan aspek kualitatif dan kuantitatif, data tersedia karena dilakukan pendataan secara reguler sehingga memudahkan untuk sampling penelitian. Hasil kajian menyimpulkan bahwa apapun indikator yang dipilih, akan mengandung misklasifikasi saat uji akurasi dengan menggunakan indikator lain sebagai acuan standarnya. Misklasifikasi tergantung dari definisi kemiskinan yang digunakan. Sebuah indikator akan tergantung dari definisi operasional yang digunakannya, dan terbuka bagi kritik yang dilakukan pihak lain karena menggunakan ruang lingkup definisi yang berbeda.

Pudjirahayu (1999) menggunakan indikator keluarga sejahtera BKKBN sebagai dasar sampling penelitian dengan menggunakan kriteria kemiskinan pendapatan rumah tangga, menunjukkan terdapat misklasifikasi rumah tangga miskin baik di pedesaan maupun perkotaan (versi BKKBN) menjadi tidak miskin menurut kriteria BPS. Namun ketika menggunakan kriteria BPS yaitu pengeluaran rumah tangga, menunjukkan tingkat kesesuaian 81-82 persen kriteria menurut

BKKBN dan BPS. Penelitian Rambe (2004), mengkaji akurasi (sensitifitas dan spesifisitas) empat indikator kemiskinan: BPS, BKKBN, pengeluaran pangan, dan ukuran subjektif. Hasil kajian menunjukkan bahwa dari keempat indikator kesejahteraan yang diteliti, indikator keluarga sejahtera BKKBN dianggap paling baik karena selain mudah dalam pengoperasiannya hingga ke level administrasi terendah dan dengan cepat dapat mengklasifikasikan keluarga miskin. Indikator KS dan indikator pengeluaran pangan memiliki spesifisitas yang tinggi (63,3 persen) dibandingkan indikator BPS dan indikator subjektif.

Menurut Banks dan Henry (1993) bahwa usaha untuk meningkatkan kesempatan kerja ditentukan tingkat kepentingan individu untuk bekerja. Meskipun beberapa penelitian menyimpulkan situasi tidak bekerja akan berakibat negatif dan menyakitkan pada kondisi psikologis individu dan lingkungan (Furnham, 1982; Liem dan Rayman, 1982; Vinokur dan Caplan, 1987; Dooley dan Catalano, 1988; Frost dan Clayson, 1991; Klein *et al*., 1992; Banks dan Henry, 1993; Wanberg dan Marchese, 1994; Sheeran *et al*., 1995; Vinokur dan Schul, 1997; Kinicki *et al*., 2000), beberapa peneliti menemukan bahwa individu tidak bekerja yang mendapakan bantungan dari lingkungan sosialnya cenderung untuk menjadi malas dan tidak sepenuhnya berkeinginan untuk meningkatkan kesempatan kerja (Tanner, 1995; Dickson dan Tannner, 1996; Casee, 1997). Beberapa penelitian juga menemukan bahwa keinginan untuk memanfaatkan kesempatan kerja akan meningkat jika ada kesempatan kerja yang memadai untuk meningkatkan pendapatan (Gueron, 1987; Hagen dan Lurie, 1995; Halter, 1996; Henly dan Danziger, 1996; Mills, 1996; Edin dan Lein, 1997; Opulente dan Mattaini, 1997; Schneider, 2000).

Becker (1993) dalam suatu penelitian di Amerika Serikat menemukan bahwa mengikuti pendidikan menengah dan pendidikan tinggi langsung meningkatkan tingkat pendapatan seseorang meskipun masih terdapat biaya langsung dan tidak langsung, menyesuaikan dengan latar belakang keluarga dan kemampuan individu. Becker berpendapat bahwa peningkatan pendapatan ini adalah hasil dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berpikir kritis diperoleh melalui kegiatan pendidikan. Namun, terdapat perbedaan yang jelas antara lulusan SMA dan lulusan perguruan tinggi dalam pendapatan karena tingkat pendidikan yang berbeda. Selain itu, perbedaan juga terjadi pada lulusan perguruan tinggi dan mereka yang putus kuliah. Becker (1993) menyimpulkan bahwa "putus kuliah" tidak memiliki kemampuan lebih besar dari lulusan SMA.

Selanjutnya, menurut Becker, kemampuan dari yang lulus kuliah bervariasi di seluruh kelompok berdasarkan perbedaan sosial demografinya. Ia menemukan bahwa tingkat pendapatan untuk penduduk perkotaan, kulit putih, lulusan perguruan tinggi, dan laki-laki lebih tinggi dari tingkat pendapatan untuk penduduk pedesaan, kulit berwarna, perempuan, dan putus kuliah. Beberapa penelitian berkaitan dengan faktor-faktor hambatan memperoleh kesempatan kerja mendapatkan diantaranya mengasuh anak, transportasi, kesehatan yang buruk, kesehatan mental yang buruk, cacat fisik, kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan zat, dan pengaruh negatif dari teman sebaya, bahkan ras sering dikutip sebagai penghalang untuk bekerja (Edin dan Lein, 1997). Sebuah studi Pearlmutter dan Bartle (2003) menemukan bahwa ibu-ibu bekerja marah tentang kurangnya pilihan mengasuh anak,

terutama ibu-ibu yang bekerja di industri jasa yang kadang bekerja malam bahkan akhir pekan. Juga, banyak ibu membutuhkan merawat anak sakit atau merawat anak cacat (Lens, 2002). Menurut penelitian Zippay dan Rangarajan (2007), 78 persen ibu bekerja mengandalkan perawatan anak informal oleh keluarga atau teman. Mengasuh anak telah terbukti mempengaruhi jumlah jam kerja. Mengasuh anak mengakibatkan penurunan jumlah jam kerja (Press *et al*., 2005; Joo, 2008).

Dalam beberapa penelitian lainnya, pengalaman kerja (pekerjaan yang dilakukan tenaga kerja sebelumnya) dilaporkan menjadi prediktor kerja. Tahun yang dihabiskan di pekerjaan sebelumnya sangat penting untuk mendapatkan pekerjaan baru dan tetap bekerja (Cheng, 2002;. Lee *et al*., 2004). Selain itu, mereka yang bekerja di sektor pekerjaan informal yang kurang mungkin untuk dipekerjakan (Lee *et al*., 2004). Kemampuan untuk memiliki fasilitas yang mendukung, seperti telepon, transportasi, dan dukungan sosial juga penting untuk mencapai dan mempertahankan pekerjaan. Misalnya, individu yang tidak bekerja yang memiliki telepon lebih mungkin untuk dipekerjakan (Latimer, 2004). Kemungkinan dipekerjakan lebih rendah bagi mereka yang belum pernah bekerja, sementara kurangnya pengalaman kerja sebelumnya dikaitkan dengan pendapatan yang lebih rendah (Dworsky dan Courtney, 2007). Modal sosial muncul sebagai pelengkap dari modal manusia (tingkat pendidikan dan keterampilan kerja individu yang ditawarkan kepada pemberi kerja). Modal sosial, seperti modal manusia, memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas dalam kesempatan kerja, tetapi secara khusus mengacu pada hubungan sosial daripada tingkat pendidikan atau keahlian teknis (Harris, 1993; Putnam, 1995; Schneider, 2006). Coleman (1988) menyatakan bahwa modal sosial dan modal manusia adalah kombinasi relasional yang memungkinkan tercapainya tujuan tertentu dari keadaan tidak akan mungkin. Schneider (2002) mengacu pada modal sosial sebagai hubungan sosial dan pola kepercayaan yang memungkinkan orang untuk mendapatkan akses ke sumber daya seperti layanan pemerintah atau pekerjaan, sementara Li (2004) menunjukkan dalam bentuk pengaturan sosial sebagai sumber potensi yang dapat digunakan untuk mengejar tujuan ekonomi dan sosial. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa akumulasi modal sosial berpengaruh pada hasil sosial dan ekonomi yang positif. Contohnya, modal sosial yang tinggi telah meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, mengurangi kemiskinan dan konflik dalam keluarga, peningkatan tabungan dan aset, dan peningkatan akses investasi (Yusuf, 2008; Brisson, 2009; George dan Chaze, 2009).

Sejalan dengan hal tersebut, terdapat hubungan positif antara modal sosial dan kemajuan karir dan pemanfaatan teknologi (Manturuk *et al*., 2009). Modal sosial juga dikaitkan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan, modal sosial dapat membantu dalam upaya orang berpenghasilan rendah 'untuk meningkatkan kesejahteraan, mendapatkan pekerjaan yang aman dan manfaat lainnya seperti tunjangan anak dan pelayanan kesehatan (Lévesque, 2005; Parisi *et al*., 2003; Schneider, 2002). Modal sosial yang rendah terkait dengan rendahnya kesejahteraan dan kerawanan pangan (Henderson dan Tickamyer, 2008). Di sisi lain, Pichler dan Wallace (2009), serta Seo (2005), menunjukkan bahwa modal sosial memiliki sedikit pengaruh pada kesejahteraan ekonomi pada populasi yang diteliti. Penelitian lain (Livermore dan Neustrom, 2003: Adato *et al*., 2006; Chantarat dan Barrett, 2008)

justru menghasilkan temuan bahwa modal sosial memiliki pengaruh yang merugikan pada berbagai indikator kesejahteraan ekonomi, termasuk mobilitas ekonomi, pekerjaan, dan produktivitas

Transportasi juga ditemukan untuk menjadi penghalang untuk mencapai dan mempertahankan kerja (Brooks *et al*., 2001; Pandey *et al*., 2004). Selain itu, orang-orang dengan transportasi lebih mungkin untuk memiliki pekerjaan tetap, dan kepemilikan kendaraan bekerja adalah prediktor kerja (Latimer, 2004; Lee *et al*., 2004; Weaver *et al*., 2007). Satu studi menemukan bahwa berdasarkan rata- rata nasional, sebesar 91 persen rumah tangga pedesaan tidak memiliki kendaraan dari (Pandey *et al*., 2004). Bahkan pekerjaan entry-level yang terutama terletak di pinggiran kota tidak terjangkau transportasi umum (Lens, 2002). Hambatan lain untuk memperoleh kesempatan kerja meliputi kesehatan yang buruk dan kesehatan mental, cacat fisik, dan kekerasan dalam rumah tangga. Satu studi menemukan bahwa kesehatan bukanlah prediktor signifikan dari kesempatan kerja, namun penelitian lain menemukan bahwa pekerja yang kesehatannya rendah kurang mungkin untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang lebih rendah dibandingkan dengan kesehatan baik (Dworsky dan Courtney, 2007; Weaver *et al*., 2007; Kyoung dan Yoon, 2008).

Selain itu, orang-orang dengan depresi kurang mungkin untuk dipekerjakan (Lee *et al*., 2004). Kecacatan juga ditemukan secara negatif terkait dengan pekerjaan dan penghasilan (Kim, 2000; Dworsky dan Courtney, 2007). Mereka yang cacat lebih mungkin untuk memiliki pekerjaan sementara meskipun dengan pendapatan yang lebih rendah (Latimer, 2004). Akhirnya, Lee *et al*. (2004) menemukan bahwa orang-orang dengan sejarah kekerasan dalam rumah tangga mungkin untuk mendapatkan kesempatan kerja.

E. Latihan

1. Apakah perbedaan Jenis Kesejahteraan dalam Ekonomi Kesejahteraan ?
2. Sebutkan alasannya mengapa bisa keduanya terjadi dalam perkembangan teori ekonomi kesejahteraan ?

z) Kunci Jawaban

1. Terjadinya peningkatan kualitas masyarakat akan berdampak terhadap peningkatan produktifitas mereka. Hidayat dalam Delyuzer (2012) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia sebagai subjek pembangunan disamping dapat menentukan tinggi rendahnya produktifitas juga akan menentukan keberhasilan pembangunan dan produktifitas adalah motor penggerak bagi pembangunan ekonomi. Jadi dapat dikatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dicerminkan pada kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Menurut Tjiptoherijanto (2008), Faktor yang mempengaruhi kualitas masyarakat secara luas adalah faktor pendapatan, faktor pendidikan dan faktor kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan pendapatan memberikan gambaran pada peningkatan kualitas masyarakat secara signifikan.

2. Menurut Sumarti (1999), perbedaan status sosial budaya dan spesialisas kerja akan menghasilkan persepsi kesejahteraan yang berbeda pula. Terdapat kelompok masyarakat yang menggunakan ukuran kesejahteraan bersumber pada simbol kekuasaan budaya-politik, sementara monetisasi ekonomi menghantarkan kalangan masyarakat pada umumnya untuk lebih menggunakan ukuran kesejahteraan ekonomi dibandingkan ukuran kesejahteraan sosial. Skoufias *et al*., (2000) menyatakan bahwa pengukuran kesejahteraan bersifat subjektif manakala berkaitan dengan aspek psikologis yaitu diukur dari kebahagiaan dan kepuasan. Mengukur kesejahteraan secara objektif menggunakan patokan tertentu yang relatif baku, seperti menggunakan pendapatan per kapita, dengan mengasumsikan terdapat tingkat kebutuhan fisik untuk semua orang hidup layak. Ukuran yang sering digunakan adalah kepemilikan uang, tanah, atau aset.

Daftar Pustaka

Boediono, Dr., Ekonomi Internasional dan Nasional, BPFE, Yogyakarta, 2014 diakses 9 September 2020

Halwani, Hendra. Dra. M.H., dan Tjiptoharijanto, Prijono, H. Dr., Perdagangan Internasional, Pendekatan Ekonomi Kesejahteraan Makro & Mikro, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.

Tambunan, Tulus T.H., Dr., Perekonomian dan Ekonomi Kesejahteraan Indonesia,, Teori dan temuan Empiris, Ghalia Indonesia, 2017

MODUL EKONOMI KESEJAHTERAAN

(KAK 357)

MODUL 13

PENGERTIAN METODE EDGEWORTH

DISUSUN OLEH

Erlina Puspitaloka Mahadewi, SE, MM, MBL (5661)

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2022

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari Modul ini, diharapkan Mahasiswa mampu :

4. Memahami dan mempelajari definisi Metode Edgeworth dalam Ekonomi Kesejahteran
5. Menguraikan konsep dasar Pengertian, dan Permasalahan Metode Edgeworth dalam Ekonomi Kesejahteran dan Jenis Kesejahteraan dalam Ekonomi Kesejahteraan

B. Uraian dan Contoh

Visi dan Misi UEU

Universitas Esa Unggul mempunyai visi menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Universitas Esa Unggul menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan
2. Menciptakan suasana akademik yang kondusif
3. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan

Topik Perkuliahan : Pengertian Metode Edgeworth (dalam Ekonomi Kesejahteraan)

Latar Belakang Metode Edgeworth

Pindyck (2005) mendefinisikan pasar Kesehatan berbasisi oligopoli sebagai pasar dalam Ekonomi Kesejahteraan di dunia dengan hanya sedikit perusahaan menguasai kebanyakan atau seluruh total produksi. Produk yang dihasilkan perusahaan dalam pasar oligopoli bersifat homogen atau sejenis dan mungkin terdapat diferensiasi antar produk perusahaan. Dalam beberapa pasar oligopolistik, beberapa atau seluruh perusahaan memperoleh laba yang besar dalam jangka panjang karena adanya hambatan untuk masuk (barriers to entry) yang mengakibatkan sulitnya perusahaan-perusahaan baru untuk memasuki pasar. Hambatan masuk yang terdapat dalam pasar oligopoli diakibatkan oleh adanya skala ekonomi. Skala ekonomi berhubungan dengan penurunan biaya untuk memproduksi satu unit produk dikarenakan bertambahnya jumlah produk yang diproduksi per periode. Sehingga perusahaan yang lebih dahulu berada dalam pasar akan mencapai nilai efisiensi yang lebih tinggi dan akan menjadi ancaman bagi perusahaan baru yang akan memasuki pasar. Selain itu, paten dan akses terhadap teknologi serta perlunya uang untuk memperkenalkan nama dan reputasi pasar juga mungkin menghalangi masuknya calon-calon pesaing. Hal-hal tersebut adalah hambatan masuk yang alami yang terdapat dalam pasar oligopoli. Selain dari

hambatan masuk yang alami, perusahaan-perusahaan yang sudah ada mungkin saja mengambil tindakan-tindakan strategis untuk menghalangi keinginan masuk perusahaan baru. Tindakan-tindakan strategis yang mungkin dilakukan adalah dengan mengancam akan membanjiri pasar dan mendorong harga turun jika perusahaan-perusahaan baru masuk.

Pengelolaan suatu perusahaaan yang bergerak di Kesehatan dalam pasar oligopoli menjadi rumit karena keputusan penetapan harga, output, iklan dan investasi melibatkan pertimbangan-pertimbangan strategis yang penting. Sedikitnya jumlah perusahaan yang bersaing dalam pasar menyebabkan masing-masing perusahaan harus berhati-hati dalam mempertimbangkan bagaimana tindakan-tindakannya akan mempengaruhi para pesaing dan bagaimana para pesaingnya mungkin akan bereaksi. Setiap perusahaan harus mempertimbangkan perilaku dari perusahaan pesaing untuk menentukan reaksi kebijakan yang terbaik bagi perusahaan tersebut. Hal tersebut mengisyaratkan adanya hubungan saling ketergantungan dalam pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi (interdependence) antar masing-masing perusahaan. Dalam pasar oligopoli, suatu perusahaan menetapkan harga atau output berdasarkan pertimbangan-pertimbangan strategis berkenaan dengan perilaku para pesaingnya, pada saat yang sama, keputusan-keputusan pesaing bergantung pada keputusan perusahaan yang pertama tersebut. Oleh sebab itu, perusahaan dalam pasar oligopoli biasanya tidak melakukan persaingan harga karena akan direspon oleh pesaingnya sehingga memicu perang harga. Oligopolis biasanya lebih memilih persaingan non-harga (nonprice competition) seperti diferensiasi produk, iklan, dan pemberian layanan (Salvatore, 2003).

Dasar untuk menentukan ekuilibrium dalam pasar Kesehatan berbasis oligopoli adalah asumsi bahwa para pengusaha akan melakukan hal terbaik yang dapat dilakukan dengan memperhitungkan apa yang yang sedang dilakukan para pesaingnya. Konsep tersebut digagas oleh ahli matematika, John Nash pada tahun 1951, sehingga disebut ekuilibrium Nash. Pasar oligopoli dibedakan menjadi dua jenis, yaitu cooperative oligopoly dan noncooperative oligopoly. Cooperative oligopoly adalah pasar oligopoli di mana perusahaan-perusahaan di dalamnya melakukan kerja sama untuk memaksimisasi keuntungan bersama-sama (joint profit) yang biasanya dilakukan dalam bentuk kartel. Sedangkan noncooperative oligopoly adalah pasar oligopoli di mana perusahaan-perusahaan di dalamnya tidak saling bekerja sama melainkan berdiri sendiri (independent) untuk memaksimisasi keuntungannya. Dalam pasar oligopoli dikenal istilah duopoli yang merupakan bentuk paling sederhana dari oligopoli, di mana dalam suatu industri hanya terdapat dua perusahaan. Terdapat sedikitnya enam model duopoli yang umum diketahui yaitu : model duopoli Cournot, Stackelberg, Chamberlin, Bertrand, Edgeworth dan Sweezy. Model-model duopoli tersebut adalah bagian dari noncooperative oligopoly.

Model Cournot

Ahli ekonomi Augustin Cournot pada tahun 1838 memperkenalkan model sederhana duopoli yang dinamakan model Cournot. Akan tetapi hasil karya tersebut tidak banyak menarik perhatian hingga pada tahun 1897 hasil karya tersebut dipublikasikan kembali dalam bahasa inggris dan menarik perhatian para ekonom (Sherbet, 1987). Augustin Cournot melakukan observasi pada kompetisi dalam pasar duopoli spring water, di mana pembeli membawa wadah masingmasing 26 sehingga tidak ada biaya produksi yang menjadi pertimbangan. Karakteristik dari pasar duopoli yang diobservasi tersebut adalah sebagai berikut (Arga, 2008):

- Terdapat lebih dari satu perusahaan dan produk yang dihasilkan bersifat homogen – Perusahaan-perusahaan di dalam pasar tidak saling bekerja sama – Perusahaan-perusahaan memiliki market power

- Perusahaan dalam pasar jumlahnya tetap dan tidak berubah-ubah.

Terdapat tindakan strategis (strategic behavior) 1 yang dilakukan oleh perusahan Model Cournot adalah model duopoli, di mana kedua perusahaan memproduksi suatu barang yang homogen. Masing-masing perusahaan memperlakukan output pesaingnya sebagai sesuatu yang tetap, dan semua perusahaan memutuskan secara bersamaan berapa banyak produk yang harus diproduksi. Dalam model ini digunakan asumsi dasar bahwa setiap perusahaan akan berusaha memaksimumkan profitnya dengan harapan bahwa output decision-nya tidak akan mempengaruhi keputusan pesaingnya. 1 Strategic behavior adalah serangkaian aksi-reaksi terkait tindakan strategis yang dilakukan perusahaan dalam industri.

Keputusan Output Perusahaan

1 Sumber : Pyndick, Mikroekonomi, 2005 menjelaskan perilaku perusahaan duopoli di mana perusahaan 1 akan memaksimalkan labanya dengan memperkirakan jumlah produksi perusahaan

3. Jika perusahaan 1 mengira perusahaan 2 tidak akan berproduksi (0) maka kurva permintaan perusahaan 1 adalah kurva permintaan pasar. Output yang memaksimalkan laba perusahaan 1 adalah titik di mana MR1(0) berpotongan dengan MC1 yaitu 50 unit. Jadi, jika perusahaan 1 mengira bahwa perusahaan 2 memproduksi 0 maka seharusnya perusahaan 1 memproduksi 50 unit. Kemudian jika perusahaan 1 mengira perusahaan 2 akan memproduksi 50 unit maka kurva permintaan perusahaan 1 bergeser ke kiri D1(50) sehingga maksimalisasi laba perusahaan 1 adalah 25 unit. Akhirnya jika perusahaan 1 mengira perusahaan 2 akan memproduksi 75 unit, perusahaan 1 hanya akan memproduksi 12,5 unit. MR1(50) P1 12,5 25 50 MC1 D1(0) MR1(0) MR1(75) D1(75) D1(50) Q1 28 Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara output yang memaksimalkan laba suatu perusahaan dan jumlah yang dikirannya akan diproduksi pesaingnya, yang disebut sebagai kurva reaksi. Secara

matematis, perilaku perusahaan dalam model Cournot dapat dijelaskan sebagai berikut.

Untuk dapat melihat hasil yang diperoleh dengan model Cournot, akan lebih menarik jika dibandingkan dengan hasil yang diperoleh jika perusahaan spring water tersebut merupakan monopolis, di mana pendapatan monopolis tersebut adalah : , sehingga Total output dari duopoli terbukti lebih besar dibandingkan dengan output perusahaan monopoli sedangkan harganya lebih rendah . Hal tersebut dapat membuktikan bahwa konsumen memperoleh manfaat yang lebih besar dari duopoli dibandingkan dengan monopoli. Sumber : Pyndick, Mikroekonomi, 2005 dimodifikasi menjelaskan bahwa kurva reaksi perusahaan :

1. menunjukkan berapa banyak yang akan diproduksinya sebagai fungsi dari berapa besar perusahaan itu mengira perusahaan 2 akan berproduksi. Begitu pula dengan perusahaan

2. Kurva reaksi perusahaan 2 menunjukkan outputnya sebagai fungsi dari seberapa besar perusahaan itu mengira perusahaan 1 akan berproduksi.

Ekuilibrium Cournot, masing-masing perusahaan dengan tepat mengasumsikan jumlah yang akan diproduksi pesaingnya dan dengan demikian memaksimalkan labanya sendiri. Hal tersebut menyebabkan tidak satu perusahaan pun akan berpindah dari ekuilibrium ini. Ekuilibrium Cournot merupakan contoh dari ekuilibrium Nash. Asumsi yang berlaku dalam model Cournot bahwa output pesaingnya adalah tetap akan rasional jika kedua perusahaan tersebut memilih outputnya hanya sekali saja karena pada saat itulah outputnya tidak dapat berubah. Selain itu, asumsi tersebut akan rasional jika keduanya berada dalam ekuilibrium Cournot karena pada saat itulah tidak satu perusahaan pun mempunyai insentif untuk mengubah outputnya.

Model Cournot akan sesuai dengan perilaku duopolis dalam industri yang terdiri atas perusahaan-perusahaan yang identik dan tidak satupun di antaranya lebih unggul atau dalam kepemimpinan. Perilaku persaingan usaha yang cenderung mengikuti model Cournot terjadi dalam industri pembibitan ayam pedaging sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiyono (2006). Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian berjudul Estimasi Bentuk Persaingan Usaha dan Perilaku Kolusi pada Industri Pembibitan Ayam Pedaging di Indonesia adalah mengestimasi bentuk perilaku persaingan usaha dan perilaku kolusi perusahaan-perusahaan pembibitan ayam pedaging di Indonesia. Berdasarkan pendekatan conjectural variation, disimpulkan bahwa perusahaan pembibitan ayam pedaging di Indonesia cenderung mengikuti model persaingan Cournot karena dalam menentukan tingkat produksi yang memaksimalkan keuntungannya, masing-masing 32 perusahaan selalu memperhitungkan tingkat produksi output perusahaan pembibit lainnya. Selain itu, perusahaan-perusahaan pembibit pun cenderung tidak saling melakukan koordinasi (independen) dalam proses penentuan output yang memaksimalkan keuntungannya.

Model Chamberlin

Model Chamberlin dicetuskan oleh Edward Chamberlin dalam karyanya The Theory of Monopolistic Competition pada tahun 1933 (Sherbet, 1987). Berbeda dengan model Cournot yang menetapkan tingkat output untuk memaksimisasi keuntungan dan menganggap output perusahaan pesaing sebagai sesuatu yang tetap, dalam model Chamberlin perusahaan-perusahaan mengakui adanya hubungan saling ketergantungan ketika menetapkan output yang akan diproduksi. Oleh karena itu, kedua perusahaan akan membagi jumlah output yang akan diproduksi seolah-olah pasar tersebut dilayani oleh seorang monopolis. Dengan cara tersebut, kedua perusahaan akan memperoleh bagian dari keuntungan monopoli. Dalam model Chamberlin, perusahaan menyadari bahwa berbagi keuntungan monopoli adalah hal terbaik yang dapat dilakukan (Lipczynski, 2005). Solusi yang ditawarkan dalam model Chamberlin tidak di dasarkan atas suatu kolusi antar perusahaan melainkan di dasarkan atas asumsi masing-masing perusahaan menyadari bahwa konsep ideal monopoli dapat dicapai melalui tindakan independen yang kemudian dibagi dengan pesaingnya. Dengan cara ini, kedua perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan model Cournot. Hal tersebut dapat dibuktikan secara matematis dengan 33 menghitung dan membandingkan nilai penerimaan yang diperoleh perusahaan dalam industri monopoli, industri dalam model Cournot dan industri dalam model Chamberlin. Penerimaan dalam model Cournot dihitung dengan menggunakan nilai output (Q) dan harga (P) yang memberikan penerimaan optimum dalam model Cournot

Hal tersebut telah membuktikan bahwa model Chamberlin dapat memberikan penerimaan yang lebih besar dari pada penerimaan dalam model Cournot. Dengan menggunakan kurva reaksi perusahaan dalam model Cournot, perbedaan output yang dihasilkan antara model Cournot dan Chamberlin akan digambarkan dalam Gambar 2.3. 34 Gambar 2.3 Ekulibrium Cournot dan Ekuilibrium Chamberlin Sumber : Lipczynski, 2005 dimodifikasi Titik A pada Gambar 2.3 oleh Lipczynski (2005) disebut sebagai Chamberlin's joint profit maximization, di mana merepresentasikan nilai output yang memaksimumkan profit jika perusahaan lain menjadi monopolis. Jumlah output yang memaksimumkan profit masing-masing perusahaan dalam model Chamberlin adalah sedangkan dengan model Cournot output masing-masing perusahaan akan lebih besar yakni .

Model Stackelberg

Model duopoli Stackelberg pertama kali diperkenalkan oleh Heinrich Freiherr Von Stackelberg (1934) yang merupakan ekonom asal Jerman. Model duopoli Stackelberg adalah model duopoli di mana satu perusahaan menetapkan Ekuilibrium Cournot Q1 Q2 Kurva Reaksi Perusahaan 1 Q1*(Q2) Kurva Reaksi Perusahaan 2 Q2*(Q1) A 35 outputnya sebelum perusahaan lainnya. Perusahaan yang membuat keputusan terlebih dahulu disebut sebagai leader, sementara perusahan yang membuat keputusan terakhir disebut follower. Hal tersebut menyebabkan model duopoli Stackelberg dikenal juga sebagai model Leader-Follower.

Ilustrasi untuk model Stackelberg dimisalkan perusahaan leader menetapkan outputnya terlebih dahulu, dan kemudian perusahaan follower setelah mengamati output perusahaan leader akan mengambil keputusan outputnya. Menjadi perusahan yang bertindak lebih dahulu (leader) akan memberi keunggulan bagi perusahaan tersebut. Hal tersebut dapat terjadi karena langkah mengumumkan lebih dulu akan menciptakan suatu fait accompli2 sehingga apapun yang dilakukan pesaing, output perusahaan tersebut akan tetap besar. Dalam model Stackelberg, perusahaan leader berperilaku seperti monopolis yang menetapkan outputnya tanpa memperhatikan perusahaan pesaingnya. Sedangkan follower akan bereaksi mengkikuti tindakan leader pada waktu yang berbeda. Perbedaan waktu inilah yang menyebabkan leader menikmati keuntungan yang disebut sebagai first mover advantage dalam model Stackelberg (Arga, 2008).

Pesaing akan memaksimalkan laba dengan menerima besarnya tingkat output perusaan tersebut sebagai suatu kenyataan yang harus dihadapi dan menetapkan tingkat output yang rendah. Hal tersebut harus dilakukan pesaing karena akan menjadi tidak rasional jika pesaing memproduksi output dalam jumlah besar, yang artinya akan mendorong harga turun dan mengakibatkan kedua perusahaan merugi. Model Stackelberg adalah gambaran perilaku 2 Fait accompli adalah suatu keadaan (sisa pasar) yang harus diterima pesaing sebagai akibat dari tindakan perusahaan leader. 36 oligopolistik yang akan sesuai dengan industri yang didominasi oleh perusahaan besar yang biasanya menjadi yang terdepan dalam memperkenalkan produkproduk baru atau menetapkan harga. Penelitian mengenai model Stackelberg pernah dilakukan oleh Oktavianingsih (2013) untuk menentukan model atau theory yang memberikan peningkatan paling signifikan terhadap profit, menghasilkan harga yang optimal bagi produk ritel pada industri oleh-oleh, menganalisis jumlah profit maksimum, dan menentukan biaya iklan yang harus dikeluarkan oleh manufaktur maupun ritel. Model yang dibangun terbentuk dalam tiga skenario, yaitu Stackelbergmanufacturer game, ketika manufaktur mengambil keputusan terlebih dahulu yang kemudian diikuti oleh ritel ; cooperation, saat manufaktur dan ritel saling bekerja sama ; dan Nash game, manufaktur dan ritel sama sekali tidak melakukan interaksi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model yang paling memberikan peningkatan profit terhadap sistem aktual adalah model Stackelbergmanufacturer game.

Model Bertrand Joseph Bertrand

Model ini diulas oleh seorang ahli ekonomi Prancis yang mengembangkan Model Bertand pada tahun 1883. Seperti halnya model Cournot, model Bertrand berlaku pada perusahaan–perusahaan yang memproduksi suatu barang yang homogen dan mengambil keputusannya pada saat yang sama. Namun dalam model Bertrand, yang harus ditentukan oleh perusahaan adalah keputusan harga bukan jumlah output perusahaan. Melalui model ini, Bertrand mengkritik model duopoli yang dikembangkan oleh Cournot. Ia tidak setuju dengan 37 anggapan Cournot bahwa harga ditentukan oleh pasar dan perusahaan hanya menentukan output tanpa

menentukan harga. Sehingga Bertand beranggapan bahwa model Cournot gagal dalam menjelaskan mekanisme penetapan harga (Arga, 2008).

Model Oligopoli Bertrand

Model ini disebut juga sebagai price-setting oligopoly karena yang ditentukan perusahaan adalah harga. Hal tersebut yang membedakan model Bertrand dengan model Cournot, Stackelberg maupun Chamberlin, di mana dalam ketiga model tersebut yang ditentukan adalah output sementara harga ditetapkan oleh pasar. Terdapat beberapa asumsi yang digunakan dalam model Bertrand, yaitu sebagai berikut :

-Terdapat minimal dua perusahaan dengan produk yang homogen.

-Perusahaan di dalam industri tidak saling bekerja sama.

-Perusahaan memiliki marginal cost yang sama dan konstan

-Terdapat strategic behavior antar perusahaan

-Perusahaan bersaing dalam harga sedangkan demand diatur oleh pasar

-Konsumen akan membeli semua produk dari perusahaan yang menetapkan harga lebih murah, namun jika harganya sama maka output yang terjual terbagi rata pada semua perusahaan.

Dengan asumsi bahwa barang yang diproduksi perusahaan adalah homogen, konsumen akan memilih barang yang lebih murah. Oleh karena itu, jika kedua perusahaan mengenakan harga yang berbeda maka perusahaan yang menetapkan harga lebih rendah akan menguasai pasar sehingga perusahaan dengan harga yang lebih tinggi tidak akan menjual apapun. Jika perusahaan 38 menetapkan harga yang sama, maka konsumen tidak akan peduli produk yang akan dibelinya berasal dari perusahaan mana sehingga masing-masing perusahaan akan menyuplai separuh dari pasar. Gambar 2.4 Kurva Reaksi Harga Model Bertrand Sumber : Pyndick, Mikroekonomi, 2005 Dalam model Bertrand, hubungan output antar perusahaan adalah positif. Artinya, jika suatu perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan lainnya akan berusaha menurunkan harga pula. Ketika kedua perusahaan saling bersaing, maka kurva reaksi kedua perusahaan akan berpotongan di titik A, yaitu titik ekuilibrium harga kedua perusahaan atau yang dikenal sebagai Nash Equilibrium dengan harga sebesar $4. Lain halnya jika kedua perusahaan memutuskan untuk tidak lagi bersaing dan justru melakukan kerja sama atau kolusi, maka mereka dapat menetapkan harga yang jauh lebih tinggi daripada kedua perusahaan tidak melakukan kolusi A B Ekuilibrium Nash P1 $6 $4 $4 $6 P2 Ekuilibrium Kolusi Kurva Reaksi Perusahaan 1 Kurva Reaksi Perusahaan 2 39 yaitu sebesar $6, yang dalam Gambar 2.3 ditunjukkan oleh titik B atau disebut juga ekuilibrium kolusi. Model Bertrand yang berbasis oligopoly price-setting pernah digunakan Lisytowatie (2010) untuk menganalisa kondisi pasar industri asuransi kendaraan bermotor dikaitkan dengan dikeluarkannya regulasi tarif referensi (PMK 74/PMK.010/2007) yang diharapkan dapat menjadi solusi dari gejolak “perang tariff” yang terjadi dalam industri asuransi Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut

menyimpulkan bahwa kondisi industri asuransi kendaraan bermotor dalam kondisi pasar yang kompetitif dan berdasarkan perolehan Premi Netto yang cenderung mengalami kenaikan merefleksikan bahwa industri asuransi kendaraan bermotor dalam kondisi yang menguntungkan bagi para pelaku pasar walaupun ditengah kondisi ”perang tarif”. Hal tersebut menunjukan bahwa regulasi tarif referensi yang diatur PMK No. 74 Tahun 2007 tidak menjadi urgent untuk dilakukan.

Model Edgeworth

Model Edgeworth adalah modifikasi dari model Bertrand, di mana Edgeworth (1897) menyatakan bahwa ada kemungkinan perusahaan tunduk pada keterbatasan kapasitas produksi (Lipczynski, 2005). Asumsi yang digunakan dalam model Edgeworth adalah (Salvatore, 2007):

-Terdapat dua perusahaan yang menjual barang homogen dengan biaya 0.

-Setiap perusahaan menghadapi kurva permintaan garis lurus yang sama.

- Produksi masing-masing perusahaan terbatas sehingga satu perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan pasarnya.

Setiap perusahaan, dalam memaksimumkan keuntungannya, mengasumsikan bahwa perusahaan lain mempertahankan harganya pada tingkat yang konstan. Dalam model Edgeworth tidak akan dijumpai ekulibrium yang stabil sebagaimana yang terdapat dalam model Bertrand. Dengan adanya asumsi keterbatasan kapasitas produksi, perusahaan akan lebih leluasa meningkatkan harga produknya tanpa takut kehilangan seluruh konsumennya karena perusahan saingannya pun tidak akan mampu memenuhi seluruh permintaan pasar. Gambar 2.5 Price-Setting Dalam Model Duopoli Edgeworth Sumber : Lipczynski, Industrial Organization, 2005 Ekuilibrium Bertrand berada di titik N, yaitu ketika output yang dihasilkan sebesar ½Q dengan harga PC.

Sedangkan dalam model Edgeworth tidak ada MCA=MCB Market demand Quantity Price, Cost P1 PC M R N S ¼QC ½QC QC 41 ekuilibrium yang stabil melainkan harga akan terus berfluktuasi. Dicontohkan apabila perusahaan A tidak dapat memproduksi lebih dari ½QC sementara permintaan pasar adalah QC, maka perusahaan B akan dapat menetapkan harga yang lebih tinggi yaitu diantara PC dan M, dan produknya akan tetap terjual meskipun dengan harga yang lebih tinggi. Dalam Gambar 2.4, MN menunjukkan residual demand function perusahaan B. Segitiga PCMN adalah bagian dari fungsi permintaan pasar yang tidak dapat dipenuhi perusahaan A. Untuk dapat memaksimumkan keuntungan dengan residual demand function perusahaan B, perusahaan B harus menetapkan harga sebesar P1 dan memproduksi output sebanyak ¼QC.

Keputusan perusahaan A memproduksi ½QC dengan harga PC dan keputusan perusahaan B memproduksi ¼QC dengan harga P1 juga bukan merupakan ekuilibrium yang stabil karena perusahaan memiliki insentif untuk menaikkan harganya menjadi sama dengan B, yaitu P1. Dengan menaikkan harga, perusahaan A memproduksi output 2 kali lebih banyak dari perusahaan B dan juga memperoleh profit 2 kali lebih banyak dari perusahaan B. Menyadari hal tersebut, perusahaan B

kemudian menurunkan harga dan meningkatkan outputnya pada batas maksimum kapasitasnya yaitu ½QC sehingga menurunkan output perusahaan A. Untuk menyikapi hal tersebut, perusahaan A menurunkan harganya sehingga mampu meningkatkan output dan profit-nya. Aksi pemotongan harga ini akan terus berlanjut hingga harga kembali ke PC dan kedua perusahaan memproduksi dengan kapasitas penuh di tingkat yang sama yaitu, ½QC. Namun 42 tidak berhenti sampai di sini karena perusahaan memiliki insentif untuk kembali menaikkan harganya sehingga harga akan terus berfluktuasi. 2.1.2.6 Model Sweezy Sweezy (1939) mengembangkan modelnya hampir bersamaan dengan Hall dan Hitch (1939). Model Sweezy berusaha menjelaskan kekakuan harga (price rigidity) yang menjadi ciri khas pasar oligopolistik (Lipczynski, 2005). Hal tersebut dapat terjadi karena kolusi implisit cenderung mudah pecah, sehingga perusahaan-perusahaan oligopolistik mempunyai keinginan yang kuat akan stabilitas terutama dalam hal harga. Perusahaan-perusahaan merasa enggan mengubah harga meskipun biaya atau permintaannya berubah. Ketika biaya turun atau terjadi penurunan permintaan, perusahaan enggan untuk menurunkan harga karena khawatir jika pesaingnya keliru dalam menanggapi dan menerimanya sebagai isyarat babak baru peperangan harga. Sebaliknya jika biaya atau permintaan naik, perusahaan enggan menaikkan harga karena khawatir jika perusahaan-perusahaan pesaingnya mungkin tidak akan menaikkan harga.

The Kinked Demand Curve S/Q P* Q* MR MC MC' D Q 43 Sumber : Pyndick, Mikroekonomi, 2005 Kekakuan harga adalah dasar model kurva permintaan kaku (kinked demand curve) dalam oligopoli, yaitu model oligopoli di mana masing-masing perusahaan menghadapi suatu permintaan yang kaku pada harga yang sekarang berlaku (P*). Pada harga yang lebih tinggi, permintaan akan sangat elastis karena perusahaan tersebut percaya jika ia menaikkan harganya di atas P*, perusahaan lain tidak akan mengikutinya dan oleh sebab itu perusahaan tersebut akan kehilangan pangsa pasarnya. Sebaliknya pada harga yang lebih rendah permintaan tidak elastis. Jika perusahaan menurunkan harga di bawah P* maka perusahaan lain akan mengikutinya karena tidak ingin kehilangan pangsa pasar mereka. Karena kurva permintaan perusahaan tersebut kaku, kurva penerimaan marjinal (MR) terputus.

Akibatnya, biaya perusahaan tersebut dapat berubah tanpa menyebabkan perubahan harga. Penjelasan kekakuan harga ini berasal dari dilema narapidana dan dari keinginan perusahaan-perusahaan menghindari persaingan harga yang sama-sama menghancurkan mereka sendiri.

Hasil penelitian Wicaksono (2014) menyimpulkan bahwa model oligopoli Sweezy terbentuk pada industri telekomunikasi seluler di Indonesia tahun 2012. Hal tersebut dilihat dari jumlah pemain dalam industri yang relatif sedikit (10 perusahaan), barang yang ditawarkan bersifat homogen yang terdiferensiasi, dan terjadi persaingan non-harga, akibat dari aksi-reaksi antar perusahaan sehingga bentuk kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan dalam pasar oligopolis adalah patah atau kinked demand curve.

Berdasarkan penjelasan mengenai beberapa model duopoli, model duopoli dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan sifatnya yaitu model of output detemination dan model of price detemination. Perusahaan dalam model of output detemination akan menentukan berapa banyak output yang harus diproduksi dan harga ditentukan oleh pasar. Sedangkan perusahaan dalam model of price detemination perusahaan akan menentukan harga dan menjual berapapun jumlah output yang dihasilkan pada tingkat harga tersebut. Model duopoli yang termasuk model of output detemination adalah model duopoli Cournot, Stackleberg, dan Chamberlin. Sedangkan model duopoli yang termasuk model of price detemination adalah model duopoli Bertrand, Edgeworth dan Sweezy.

Proses pembangunan memerlukan pendapatan nasional yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Di banyak negara syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan yang tetap adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi merupakan sesuatu yang dibutuhkan. Walaupun begitu pertumbuhan ekonomi yang bagus menjadi tidak akan berarti bagi penurunan masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan adanya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Wongdesmiwati, 2009).

Inflasi merupakan indikator yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Inflasi akan menimbulkan beberapa akibat buruk kepada individu, masyarakat dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Salah satu akibat penting dari inflasi adalah cenderung menurunkan taraf kemakmuran segolongan besar masyarakat. Sebagian besar para pelaku kegiatan ekonomi terdiri dari para pekerja yang bergaji tetap. Inflasi biasanya berlaku lebih cepat dari kenaikan upah para pekerja. Oleh sebab itu upah riil para pekerja akan merosot disebabkan oleh inflasi dan keadaan ini berarti tingkat kemakmuran segolongan besar masyarakat mengalami kemerosotan (Sukirno, 2002).

Kebijakan upah minimum juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Upah minimum adalah upah bulanan yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Kebijakan upah minimum merupakan salah satu strategi pemerintah menanggulangi kemiskinan, dengan menghitung kebutuhan dasar seperti, pangan, sandang, dan perumahan, sekaligus sebagai jaring pengaman sosial dengan menghitung kebutuhan pendidikan dasar dan jasa transportasi.

Gagasan upah minimum yang sudah dimulai dan dikembangkan sejak awal tahun 1970-an bertujuan untuk mengusahakan agar dalam jangka panjang besarnya upah minimum paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL). Kebutuhan hidup layak adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, nonfisik maupun sosial untuk satu bulan. Sebagaimana diatur dalam Permenakertrans No 17 Tahun 2005, sehingga diharapkan dapat menjamin tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta keluarga sekaligus dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan buruh. Jika kebutuhan hidup layak dapat terpenuhi, maka kesejahteraan pekerja meningkat dan terbebas dari masalah kemiskinan (Sumarsono, 2003). Permasalahan kemiskinan merupakan

permasalahan yang kompleks dan bersifat multi dimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (M. Nasir, dkk 2008). Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat sebagai pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan. Adanya permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenaiPertumbuhan ekonomi secara umum dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Ragional Bruto (PDRB), Investasi,Inflasi,pajak dan retribusi, pinjaman dan pelayanan bidang ekonomi. Khusus untuk nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB. Sehingga selain PDRB ada indikator lain untuk mengukur tingkat kesejahteraan umum dan PDRB menjadi bagian dari ukuran ini. Ukuran ini menjelaskan pelbagai indikator yang ada, ukuran itu adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) paling tepat dipakai untuk mengukur profil kesejahteraan umum. Indeks pembangunan Manusia (IPM) adalah Indeks yang digunakan untuk menggambarkan capaian disektor kesejahteraan masyarakat secara agregat, karena indeks ini menangkap perkembangan di sektor ekonomi dan sektor sosial sekaligus. Di dalam indeks ini, kesejahteraan tidak hanya ditilik melalui perspektif ekonomi semata sebagaimana lazim terekam dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, tetapi juga diteropong via capaian disektor sosial, yakni pemdidikan dan kesehatan. Dalam hal yang terakhir, Tingkat Melek huruf (TMH) dan Tingkat Harapan Hidup (THH) adalah dua indikator yang lazim termaktub dalam konstruksi IPM. Sebagai Pemerintah baik pusat maupun daerah tidak terkecuali Pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka ingin mencapai peningkatan IPM (Indeks pembangunana Manusia) ini telah membuat fokus fokus pekerjaan sehingga berbagai macam program dan kegiatan bisa dibuat dan dilaksanakan. Fokus-fokus itu adalah : Pertama, Fokus Kesejahteraan dan pemerataan Ekonomi yang memiliki Indikator ; Pertumbuhan Ekonomi, Pengendalian Inflasi, PDRB Perkapita, Indeks Gini yang rendah, Pemerataan Pendapatan, Penurunan penduduk miskin dan Kriminalitas yang semakin menurun. Kesemua Indikator ini memiliki ukurannya masing masing dan bisa dijadikan sarana evaluasi apakah Pemerintah sukses atau gagal dalam mengurus rakyatnya. Fokus yang kedua adalah Fokus Kesejahteraan Masyarakat. Fokus yang kedua ini juga memiliki Indikator yaitu ; Angka Melek Huruf, Angka rata-rata lama sekolah, Angka partisipasi kasar, Angka pendidikan yang ditamatkan dan Angka Partisipasi Murni. Indikator ini tergabung dalam Fokus Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Pendidikan. Selanjutnya Fokus Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Kesehatan memiliki Indikator ; Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Angka Usia Harapan Hidup, Persentase balita gizi buruk. Fokus yang ketiga adalah Fokus Seni Budaya dan Olahraga yang memiliki Indikator Jumlah grup kesenian yang ada, jumlah gedung kesenian yang ada, jumlah klub olahraga yang ada dan jumlah gedung olahraga

yang ada. Indikator indicator ini sangat luas dan menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam artikel-artikel berikutnya.

Namun ada yang sedikit menarik dan menggelitik ketika kita melihat mengapa ada Fokus Seni Budaya dan Olahraga yang juga termasuk dalam ukuran ukuran kesejahteraan. Jawabanya cukup panjang dan mungkin menarik untuk sedikit kita diskusikan pada tulisan ini. Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Secara mudah dapat kita gambarkan ketika kita melihat Negara-negara maju yang masyarakatnya relatif sudah sejahatera dalam hal ini sebagai contoh adalah Negara Negara Eropa barat dan skandinavia. Biasanya Negara tersebut masyarakatnya sangat mengapresiasi seni. Hal ini dibuktikan dengan begitu banyaknya galeri seni, gedung kesenian, teater dan festival-festival kesenian yang dilaksanakan sepanjang tahun. Selain tinggi apresiasi seninya biasanya mereka juga memiliki prestasi dibidang olahraga pada level ditingkat dunia. Kenyataan lain yang bisa kita lihat masyarakat sejahtera tersebut sudah tidak memikirkan lagi untuk pemenuhan kebutuhan pokok karena sudah terpenuhi. Oleh karena itu waktu yang tersedia bisa disediakan sebahagian untuk menikmati kesenian dan olahraga. Diharapkan dengan fokus terhadap 3 (tiga) bidang tersebut dengan berbgai indicator indicator tersebut maka pendapatan masyarakat akan meningkat,

Tingkat Melek huruf (TMH) juga meningkat dan Tingkat Harapan Hidup (THH) juga akan terus naik. sehingga ketika konstruksi IPM ini sebagai ukuran kesejahteraan meningkat IPM juga akan meningkat. Paradigma yang mengatakan bahwa kesejahteraan itu hanya ditangkap disektor ekonomi saja otomatis gugur karena indeks pembangunan manusia (IPM) telah menjawabnya dengan menggambarkan capaian disektor kesejahteraan masyrakat secara agregat. Sektor ekonomi dan sektor sosial sekaligus digambarkan dalam indeks ini sehingga kesejahteraan umum dapat diukur dengan cakupan yang luas. Indeks pembangunan manusia (IPM) juga mampu menjelaskan ukuran-ukuran dalam infrastruktur dan kelembagaan yang dibentuk oleh pemerintah hal inilah yang menyebabkan IPM mampu mendapatkan gambaran capaian pembangunan dalam sector ekonomi dan sosial. Bukankah kesejahteraan adalah amanah dari konstitusi dan tujuan dari Negara ini, dimana “Mencerdaskan Kehidupan bangsa” & “Memajukan Kesejahteraan Umum” akan selalu terpatri dan abadi dalam pembukaan konstitusi Negara ini. Ketika Indikator telah dirumuskan, tantangan berikutnya adalah eksekusi dan Implemtasinya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk atau rasio gini (*gini ratio*) di Indonesia pada Maret 2020 mencapai 0,381 atau melebar ketimbang rasio gini September 2019 sebesar 0,380. BPS menyatakan bahwa ingkat ketimpangan pengeluaran sebenarnya membaik bila dibandingkan dengan rasio gini Maret 2019 sebesar 0,382. Meski begitu, realisasi rasio gini Maret 2020 tetap perlu menjadi perhatian. Selama periode Maret 2015 hingga

Maret 2019 telah terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia. Namun, *gini ratio* naik lagi pada Maret 2020. Untuk diketahui, angka koefisien rasio gini berkisar 0 hingga 1. Koefisien 0 menandakan tingkat pengeluaran merata sempurna, sedangkan koefisien I menunjukkan ketimpangan yang sempurna, rasio gini di daerah perkotaan pada Maret 2020 tercatat 0,393. Angka rasio itu itu meningkat ketimbang rasio gini September 2019 sebesar 0,391 dan Maret 2019 sebesar 0,392. Rasio gini pada daerah pedesaan juga melebar menjadi 0,317 pada Maret 2020 dibandingkan dengan September 2019 sebesar 0,315. Meski begitu, nilai rasio gini tersebut tidak berubah bila disbandingkan dengan Maret 2019 sebesar 0,317. Berdasarkan provinsi, rasio gini tertinggi Maret 2020 berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebesar 0,434. Sementara itu, rasio gini terendah tercatat di Provinsi Bangka Belitung sebesar 0,262. BPS juga mencatat setidaknya terdapat delapan provinsi dengan angka rasio gini lebih tinggi ketimbang rasio gini nasional di antaranya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,434. Kemudian, Gorontalo sebesar 0,408, Jawa Barat 0,403, dan DKI Jakarta 0,399. Selain itu, ada Papua dengan rasio gini sebesar 0,392, Sulawesi Tenggara 0,389, Sulawesi Selatan 0,389, dan Papua Barat sebesar 0,382.

Kualitas sumber daya manusia tidak terlepas dari produktifitas kerja dari sumber daya manusia tersebut, karena sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari produktifitas kerjanya (Siregar, 2009). Terjadinya peningkatan kualitas masyarakat akan berdampak terhadap peningkatan produktifitas mereka. Hidayat dalam Delyuzer (2012) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia sebagai subjek pembangunan disamping dapat menentukan tinggi rendahnya produktifitas juga akan menentukan keberhasilan pembangunan dan produktifitas adalah motor penggerak bagi pembangunan ekonomi. Jadi dapat dikatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dicerminkan pada kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Menurut Tjiptoherijanto (2008), Faktor yang mempengaruhi kualitas masyarakat secara luas adalah faktor pendapatan, faktor pendidikan dan faktor kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan pendapatan memberikan gambaran pada peningkatan kualitas masyarakat secara signifikan.

Pembangunan Manusia (IPM). IPM ini terdiri dari tiga komponen yaitu : Pertama, pendidikan, yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama bersekolah. Kedua, derajat kesehatan yang terbaca dari angka harapan hidup. Ketiga, pendapatan penduduk yang diukur dengan tingkat daya beli masyarakat (purchasing power parity). Komponen pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi dalam sumber daya manusia yang memberikan sumbangan langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ketrampilan dan produktifitas karena pendidikan berfungsi menyiapkan salah satu input dalam proses produksi yaitu tenaga kerja agar dapat kerja dengan produktif karena kualitasnya dan pada umumnya orang yang mempunyai pendidikan lebih tinggi akan mempunyai wawasan yang lebih luas terutama penghayatan akan pentingnya produktivitas. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia haruslah dimulai dari bawah, yaitu dari pendidikan dasar sehingga sejak dini manusia mempunyai otonomi berfikir sendiri dan mampu bersikap mandiri. Berdasarkan

penilaian UNDP (1990) kualitas SDM Indonesia atau tingkat Provinsi juga diukur melalui IPM (human development index).

Komponen kesehatan juga menjadi salah satu dimensi penting sebagai refleksi kualitas sumber daya manusia. Sehingga sangat memungkinkan sekali apabila derajat kesehatan diperbaiki akan berpengaruh secara langsung terhadap kemampuan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan derajat kesehatan suatu penduduk tercermin dari penurunan angka kematian bayi, perbaikan status gizi serta peningkatan umur harapan hidup penduduk karena semakin tinggi kesadaran mereka akan pentingnya hidup sehat, pada akhirnya akan memperpanjang usia harapan hidup. Angka harapan hidup di Provinsi Jambi mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2002 dari 63,5 tahun meningkat pada tahun 2014 menjadi 69,6 tahun. Dan angka kematian bayi di Provinsi Jambi turun dari 56 jiwa per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2002 menjadi 21 jiwa per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2014. Hal ini mencerminkan derajat kesehatan penduduk Jambi yang kian membaik. Komponen Pendapatan masyarakat yang diukur dengan tingkat daya beli masyarakat (purchasing power parity) akan mempengaruhi kemampuan manusia dalam mengakses kehidupan yang layak atau melakukan pengeluaran untuk kesehatan, pendidikan ketrampilan serta pemenuhan kebutuhan fisik minimum. Dengan kata lain akan menggambarkan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Semakin meningkatnya konsumsi rill perkapita maka daya beli masyarakat juga semakin tinggi. Hal ini menunjukan adanya peningkatan kualitas masyarakat karena peningkatan daya beli dan konsumsi memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan lebih baik lagi. Akibat lain dari tidak terpenuhinya kebutuhan SDM yang berkualitas adalah masuknya SDM dari wilayah lain diluar Provinsi Jambi yang dapat membuat tersingkirnya SDM lokal karena kalah dalam bersaing. Penduduk yang tidak berkualitas relative sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, bahkan kurang beruntung mendapatkan pekerjaan (pengangguran). Oleh sebab itu, perlu campur tangan pemerintah untuk meningkatkan kualitas penduduk, melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kondisi faktor-faktor dari Indeks Mutu Hidup Masyarakat.

Menurut Wijaya Kuslin (2008) peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Provinsi Jambi seluruhnya mencakup pembangunan manusia, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pembangunan manusia sebagai insan, menekankan harkat, martabat, hak dan kewajiban manusia, yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia. lndeks Mutu Hidup (Physical Quality of Life Indexes) Pada tahun 1979, Morris D. Morris dalam Lincolin Arsyad (2010) memperkenalkan satu indikator alternatif dalam mengukur kinerja pembangunan suatu negara yaitu Indeks Mutu Hidup (IMH) atau Physical Quality of Life Indexes (PQLI). Ada tiga indikator utama yang dijadikan acuan pada indeks ini yaitu a) Angka Kematian Bayi, b) Angka Harapan Hidup suatu umur, dan c) Angka Melek

Huruf Orang Dewasa. Berdasarkan setiap indikator tersebut dilakukan pemeringkatan terhadap kinerja pembangunan suatu negara, kinerja tersebut diberi skor antara 1 sampai 100, angka 1 melambangkan kinerja terburuk dan angka 100 melambangkan kinerja terbaik. Untuk indikator harapan hidup, batas atas (upper limit) 100 ditetapkan 80 tahun (harapan hidup tertinggi pada saat studi tersebut dilakukan dicapai oleh swedia). Sedangkan batas bawah (lower limit) adalah 28 tahun (tingkat harapan hidup terendah di Guinea-Bissau pada tahun 1950). Antara batas atas dan batas bawah itulah, tingkat harapan hidup suatu negara diperingkatkan dengan skor antara 1 sampai 100. Demikian pula untuk tingkat kematian bayi, batas atasnya 9 kematian per 1000 kelahiran (juga dicapai Swedia pada tahun 1973). Sedangkan batas bawahnya adalah 229 kematian per 1000 kelahiran (tingkat kematian bayi tertinggi, di Gabon).

Komponen ketiga IMH yakni Angka Melek Huruf, Merupakan indikator yang penting karena merupakan ukuran kesejahteraan dan taraf keterampilan yang diperlukan dalam proses pembangunan. Jadi keseluruhannya itu paling penting kaitannya adalah dengan kemampuannya berproduksi yang bermuara pada pendapatan secara khusus dan dengan pertumbuhan ekonomi secara umum. Dalam melihat kualitas sumber daya manusia perlu kiranya dijelaskan beberapa pengertian dan istilah yang digunakan dalam komponen IMH, yaitu sebagai berikut : 1. Angka kematian bayi (IMR) yaitu sebesar probabilita bayi meninggal sebelum usia satu tahun per 1000 kelahiran hidup. Untuk indeks IMR diperoleh dengan rumus: 22,2 229 IMR IKB. Dimana : IKB = Indeks Kematian Bayi IMR = Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup 229 = Tingkat kematian bayi maksimum 2,22 = pembagi yang jika terdapat tingkat kematian bayi terendah yaitu 9 bayi per 1000 kelahiran, maka akan didapatkan indeks = 100 2. Angka Harapan Hidup (Eo) yaitu data yang digunakan adalah data umur harapan hidup. Untuk mencari indeks harapan hidup suatu umur digunakan rumus. Dimana: IHH = Indeks Harapan Hidup Eo = Angka harapan hidup suatu umur 28 = Tingkat harapan hidup terendah 0,39 = Angka yang menunjukkan bahwa bila terjadi kenaikan umur harapan hidup sebesar 0,39 tahun, maka akan menghasilkan 1 poin angka indeks 3. Angka Melek Huruf yaitu menunjukan angka perbandingan antara persentase penduduk usia dewasa (15 tahun keatas) yang melek huruf terhadap jumlah penduduk Usia Dewasa (15 Tahun keatas). Indeks Melek Huruf digunakan rumus lain.

Fergusson *et al*., (1981); Martin (2006) menyatakan bahwa terminologi yang sering digunakan dalam penelitian yang membahas teori kesejahteraan adalah *standard living*, *well-being*, *welfare*, dan *quality of life*. Menurut Just *et al*., 1982, dalam kajian ekonomi kesejahteraan yang bertujuan untuk menolong masyarakat membuat pilihan yang lebih baik, kesejahteraan seseorang dilihat dari *willingness to pay* saat individu atau masyarakat berperan sebagai konsumen. Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Menurut Pigou (1960), teori ekonomi kesejahteraan adalah bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang. Kesejahteraan dapat didekati berdasarkan dua hal (Campbell, 1976; Sumawan dan Tahira, 1993; Milligan *et al*., 2006), yaitu: 1) kesejahteraan subjektif dan 2) kesejahteraan objektif. Kesejahteraan

dialamatkan bagi tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Pada tingkat individu, perasaan bahagia atau sedih, kedamaian atau kecemasan jiwa, dan kepuasan atau ketidakpuasan merupakan indikator subjektif dari kualitas hidup. Pada tingkat keluarga, kecukupan kondisi perumahan (dibandingkan standar), seperti ada tidaknya air bersih, merupakan contoh indikator objektif. Kepuasan anggota keluarga mengenai kondisi rumah merupakan indikator subjektif. Pada tingkat masyarakat, beberapa contoh dari indikator objektif di antaranya adalah angka kematian bayi, angka pengangguran dan tuna wisma. Kesejahteraan subjektif diukur dari tingkat kebahagiaan dan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Pendekatan ini merupakan ukuran kesejahteraan yang banyak digunakan di negara maju termasuk Amerika Serikat.

Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut (Sawidak, 1985). Tingkat kepuasan yang terkait emosional akan mempengaruhi aspek tingkah laku individu untuk menilai kepuasan pada variabel-variabel lainnya seperti kepuasan pada kualitas kehidupan (Currivan, 1999; Lambert *et al*., 2001; Robbins dan Judge, 2007; Falkenburg dan Schyns, 2007). Nilai kepuasan emosional juga akan meningkatkan kinerja dan kontribusi individu pada lingkungannya (Lock, 1976; Viswesvaran dan Ones, 2000; Butler dan Rose, 2011).

Sayogyo (1984) mengkaji kesejahteraan dan mendefinisikan kesejahteraan keluarga sebagai penjabaran delapan jalur pemerataan dalam trilogi pembangunan sejak Repelita III, yaitu: 1) peluang berusaha; 2) peluang bekerja; 3) tingkat pendapatan; 4) tingkat pangan, sandang, perumahan; 5) tingkat pendidikan dan kesehatan; 6) peran serta; 7) pemerataan antar daerah, desa/kota; dan 8) kesamaan dalam hukum. Mirrowsky dan Ross (1989) mengkaji kajian kesejahteraan dengan penyakit, kesakitan, kesulitan ekonomi yang dihubungkan dengan depresi. Kepuasan hidup sebagai bagian dari dimensi kesejahteraan meliputi kesehatan, penerimaan terhadap kecukupan ekonomi, pertolongan (dukungan sosial), dan interaksi sosial. Penelitian Bane dan Ellwood (1994); Coward *et al*. (1994); Scott dan Buttler (1997), yang menganalisis kombinasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif. Kesejahteraan subjektif digunakan dalam penelitian ini sebagai konstruk yang lebih global dikaitkan dengan beragam dimensi lingkungan yang melengkapi fasilitas dan pelayanan transportasi, pewaratan kesehatan, perumahan, jasa kesehatan mental, jasa ekonomi, dan kesempatan untuk menjadi relawan. Digunakan beragam indikator kesehatan mental (seperti moral dan depresi) yang menilai kualitas pengalaman individu (*the inner-experience*), sedangkan kompetensi personal berkaitan dengan aspek kesehatan, status keuangan, dan lingkungan yang memberikan dukungan pribadi.

Bryant (1990) menyatakan bahwa organisasi ekonomi analisis perilaku ekonomi rumah tangga (orang yang bertempat tinggal dalam atap yang sama dan pengelolaan keuangan yang sama, serta terdiri dari keluarga). Kajian organisasi ekonomi dalam keluarga menggunakan *demand* terhadap barang strategis sebagai indikator kesejahteraan. Ukuran lainnya kesejahteraan adalah proporsi pengeluaran untuk pangan. Menurut Bubolz dan Sontag (1993), kesejahteraan merupakan

terminologi lain dari kualitas hidup manusia (*quality of human life*), yaitu suatu keadaan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasinya nilai- nilai hidup. Zeitlin *et al*., (1995) menggunakan istilah kesehatan sosial keluarga dan kesejahteraan sosial keluarga bagi keluarga yang dapat melahirkan individu (anak) dengan pertumbuhan dan perkembangan yang baik.

Menurut Whithaker dan Federico (1997), pengertian kesejahteraan sosial merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut. Seseorang yang mempunyai kekurangan kemampuan mungkin memiliki kesejahteraan yang rendah, kurangnya kemampuan dapat berarti kurang mampu untuk mencapai fungsi tertentu sehingga kurang sejahtera. Terdapat beragam pengertian mengenai kesejahteraan, karena lebih bersifat subjektif dimana setiap orang dengan pedoman, tujuan dan cara hidupnya yang berbeda-beda akan memberikan nilai-nilai yang berbeda pula tentang kesejahteraan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan (Sianipar, 1997).

Menurut Sumarti (1999), perbedaan status sosial budaya dan spesialisas kerja akan menghasilkan persepsi kesejahteraan yang berbeda pula. Terdapat kelompok masyarakat yang menggunakan ukuran kesejahteraan bersumber pada simbol kekuasaan budaya-politik, sementara monetisasi ekonomi menghantarkan kalangan masyarakat pada umumnya untuk lebih menggunakan ukuran kesejahteraan ekonomi dibandingkan ukuran kesejahteraan sosial. Skoufias *et al*., (2000) menyatakan bahwa pengukuran kesejahteraan bersifat subjektif manakala berkaitan dengan aspek psikologis yaitu diukur dari kebahagiaan dan kepuasan. Mengukur kesejahteraan secara objektif menggunakan patokan tertentu yang relatif baku, seperti menggunakan pendapatan per kapita, dengan mengasumsikan terdapat tingkat kebutuhan fisik untuk semua orang hidup layak. Ukuran yang sering digunakan adalah kepemilikan uang, tanah, atau aset. Pada prinsipnya aspek yang dapat diamati dalam menganalisis kesejahteraan hampir sama, yaitu mencakup dimensi: pendapatan, pengeluaran untuk konsumsi, status pekerjaan, kondisi kesehatan, serta kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan kebutuhan dasar (seperti air, sanitasi, perawatan kesehatan dan pendidikan). Sedang menurut Rambe (2004), kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warganegara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Berdasarkan tingkat ketergantungan dari dimensi standar hidup (*standard of living*) masyarakat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dibedakan kedalam satu sistem kesejahteraan (*well-being*) dan dua subsistem, yakni: 1) subsistem sosial; dan 2) subsistem ekonomi, dengan beberapa faktor di antaranya kesejahteraan manusia, kesejahteraan sosial, konsumsi, tingkat kemiskinan, dan aktivitas ekonomi (World Bank: Santamarina *et al*., 2004). Di negara-negara maju, seperti Canada menggunakan 19 indikator kualitas hidup masyarakat (*quality of life*) yang tersebar ke dalam empat subsistem, yakni: 1) Indikator ekonomi: a) GDP perkapita, b) pendapatan perkapita, c) inovasi, d) lapangan kerja, e) melek huruf; dan

f) tingkat pendidikan; 2) Indikator kesehatan: a) usia harapan hidup, b) status kesehatan, c) tingkat kematian bayi (IMR), dan d) aktivitas fisik; (3) Indikator lingkungan: a) kualitas udara, b) kualitas air, c) *biodiversity*, dan d) lingkungan yang sehat; dan 4) Indikator keamanan dan keselamatan masyarakat: a) sukarela, b) *diversity*, c) berpartisipasi dalam aktivitas budaya, d) berpartisipasi dalam kegiatan politik, dan e) keamanan dan keselamatan (Sharpe, 2004).

Menurut penelitian Sugiharto (2007) indikator yang digunakan Biro Pusat Statistik (BPS) untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu: a) tinggi; b) sedang; c) rendah. Indikator pengeluaran digolongkan menjadi 3 item yaitu: a) tinggi; b) sedang; c) rendah. Indikator tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) permanen; b) semi Permanen; dan c) non permanen. Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item, yaitu pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah. Dari 12 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) lengkap; b) cukup; dan c) kurang. Indikator kesehatan anggota keluarga digolongkan menjadi

3 item yaitu: a) bagus; b; cukup; dan c) kurang. Indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari 5 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan, dan alat kontrasepsi. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) mudah; b) cukup; dan c) sulit. Indikator kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan terdiri dari 3 item yaitu biaya sekolah,

jarak ke sekolah, dan proses penerimaan. Dari 3 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) mudah; b) cukup; dan c) sulit. Indikator kemudahan mendapatkan transportasi terdiri 3 item, yaitu ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan kendaraan. Dari 3 item tersebut kemudian akan di digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) mudah; b) cukup; dan c) sulit. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggunakan kriteria tahapan kesejahteraan keluarga untuk mengukur kesejahteraan (Sugiharto, 2007). Lima pengelompokkan tahapan keluarga sejahtera menurut BKKBN adalah sebagai berikut:

1. Keluarga pra sejahtera, adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai keluarga sejahtera tahap I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, sandang, pangan, papan, dan kesehatan;
2. Keluarga sejahtera tahap I, adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, tetapi belum dapat memenuhi

kebutuhan yang lebih tinggi. Indikator yang digunakan, yaitu :

a. Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut.
b. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
c. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
d. Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.
e. Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber-KB dibawa ke sarana/petugas kesehatan;

Keluarga sejahtera tahap II, yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera I, harus pula memenuhi syarat sosial psikologis 6 sampai 14 yaitu :

a. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
b. Paling kurang, sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk.
c. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru per tahun.
d. Luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi tiap penghuni rumah.
e. Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat.
f. Paling kurang 1 (satu) orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap.
g. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin.
h. Seluruh anak berusia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini.
i. Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih pasangan usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil);

Keluarga sejahtera tahap III, yaitu keluarga yang memenuhi syarat 1 sampai 14 dan dapat pula memenuhi syarat 15 sampai 21, syarat pengembangan keluarga yaitu :

a. Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
b. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.
c. Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.
d. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
e. Mengadakan rekreasi bersama diluar rumah paling kurang 1 kali/6 bulan.
f. Dapat memperoleh berita dari surat kabar/TV/majalah.
g. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang

sesuai engan kondisi daerah setempat;

Keluarga sejahtera tahap III plus, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kriteria 1 sampai 21 dan dapat pula memenuhi kriteria 22 dan 23 kriteria pengembangan keluarganya yaitu:

a. Secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.
b. Kepala Keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan/yayasan/institusi masyarakat

Terdapat beberapa penelitian menggunakan kesejahteraan sebagai konstuk dengan berbagai definisi dan ragam indikatornya. Bradbury *et al*., (1979) melakukan penelitian untuk menguji model hipotesis apakah perubahan jaminan pendapatan tambahan dan bantuan umum berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga dengan kepala keluarga wanita. Ukuran kesejahteraan ekonomi menggunakan ukuran pendapatan yang kemudian digunakan dalam menentukan garis kemiskinan sebagai indikator kesejahteraan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan ukuran pendapatan dan garis kemiskinan, kesejahteraan ekonomi dengan kepala keluarga wanita dengan tanggungan anak adalah paling rendah jika dibandingkan dengan tanpa anak. Dunst dan Triviette (1988), meneliti hubungan dukungan sosial dan kesehatan serta kesejahteraan dengan menggunakan indeks kesejahteraan psikologi (Bradburn dan Caplovitz, 1965) dan indeks kesejahteraan individu (Dunst dan Triviette, 1986).

Penelitian Nurmawati (1994) menunjukkan bahwa keluarga sejahtera memiliki keragaan yang lebih baik dalam semua variabel penelitian dibandingkan keluarga pra-sejahtera. Besar keluarga sejahtera lebih sedikit dari keluarga pra-sejahtera, pendapatan per kapita keluarga pra-sejahtera lebih rendah dari keluarga sejahtera, pendapatan keluarga sejahtera dan pra sejahtera lebih tinggi dari kriteria kemiskinan. Persentase pengeluaran pangan keluarga pra-sejahtera lebih besar dari keluarga sejahtera, pengetahuan gizi ibu dari keluarga pra-sejahtera lebih rendah dari keluarga sejahtera, status gizi balita baik dari keluarga sejahtera lebih baik dari status gizi balita keluarga pra-sejahtera. Febrero dan Schwartz (1995), mengkaji kesejahteraan dalam kaitannya dengan perilaku konsumsi di keluarga, khususnya menyoroti perilaku *altruistik* dari sebagian anggota keluarga dari sudut pandang ahli ekonomi terhadap perilaku konsumsi di keluarga. Anggota keluarga *altruistik* melakukan serangkaian perilaku pengorbanan yang menyebabkan peningkatan kesejahteraan bagi anggota lainnya dalam keluarga.

Hasil kajian sebaliknya menunjukkan bahwa peningkatan sumber daya bagi anggota keluarga yang egoistik berakibat terhadap penurunan kesejahteraan anggota keluarga lainnya, khususnya yang altruistik. Sedang Narayan *et al*. (2000), dalam bukunya "*Voices of The Poor. Can Anyone Hear Us*?" mengkaji kemiskinan (*poverty*) di berbagai negara serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam kajian tersebut digunakan beberapa konsep atau istilah kesejahteraan sebagai sisi lain pengukuran kemiskinan seperti kesejahteraan material dan kesejahteraan

psikologi. Khomsan *et al*. (1997) melakukan penelitian identifikasi indikator kemiskinan dan menggunakan kriteria BKKBN dengan indikator keluarga sejahtera sebagai penentuan sampling dengan pertimbangan bersifat operasional, memperhatikan aspek kualitatif dan kuantitatif, data tersedia karena dilakukan pendataan secara reguler sehingga memudahkan untuk sampling penelitian. Hasil kajian menyimpulkan bahwa apapun indikator yang dipilih, akan mengandung misklasifikasi saat uji akurasi dengan menggunakan indikator lain sebagai acuan standarnya. Misklasifikasi tergantung dari definisi kemiskinan yang digunakan. Sebuah indikator akan tergantung dari definisi operasional yang digunakannya, dan terbuka bagi kritik yang dilakukan pihak lain karena menggunakan ruang lingkup definisi yang berbeda.

Pudjirahayu (1999) menggunakan indikator keluarga sejahtera BKKBN sebagai dasar sampling penelitian dengan menggunakan kriteria kemiskinan pendapatan rumah tangga, menunjukkan terdapat misklasifikasi rumah tangga miskin baik di pedesaan maupun perkotaan (versi BKKBN) menjadi tidak miskin menurut kriteria BPS. Namun ketika menggunakan kriteria BPS yaitu pengeluaran rumah tangga, menunjukkan tingkat kesesuaian 81-82 persen kriteria menurut BKKBN dan BPS. Penelitian Rambe (2004), mengkaji akurasi (sensitifitas dan spesifisitas) empat indikator kemiskinan: BPS, BKKBN, pengeluaran pangan, dan ukuran subjektif. Hasil kajian menunjukkan bahwa dari keempat indikator kesejahteraan yang diteliti, indikator keluarga sejahtera BKKBN dianggap paling baik karena selain mudah dalam pengoperasiannya hingga ke level administrasi terendah dan dengan cepat dapat mengklasifikasikan keluarga miskin. Indikator KS dan indikator pengeluaran pangan memiliki spesifisitas yang tinggi (63,3 persen) dibandingkan indikator BPS dan indikator subjektif.

Menurut Banks dan Henry (1993) bahwa usaha untuk meningkatkan kesempatan kerja ditentukan tingkat kepentingan individu untuk bekerja. Meskipun beberapa penelitian menyimpulkan situasi tidak bekerja akan berakibat negatif dan menyakitkan pada kondisi psikologis individu dan lingkungan (Furnham, 1982; Liem dan Rayman, 1982; Vinokur dan Caplan, 1987; Dooley dan Catalano, 1988; Frost dan Clayson, 1991; Klein *et al*., 1992; Banks dan Henry, 1993; Wanberg dan Marchese, 1994; Sheeran *et al*., 1995; Vinokur dan Schul, 1997; Kinicki *et al*., 2000), beberapa peneliti menemukan bahwa individu tidak bekerja yang mendapakan bantungan dari lingkungan sosialnya cenderung untuk menjadi malas dan tidak sepenuhnya berkeinginan untuk meningkatkan kesempatan kerja (Tanner, 1995; Dickson dan Tannner, 1996; Casee, 1997). Beberapa penelitian juga menemukan bahwa keinginan untuk memanfaatkan kesempatan kerja akan meningkat jika ada kesempatan kerja yang memadai untuk meningkatkan pendapatan (Gueron, 1987; Hagen dan Lurie, 1995; Halter, 1996; Henly dan Danziger, 1996; Mills, 1996; Edin dan Lein, 1997; Opulente dan Mattaini, 1997; Schneider, 2000).

Becker (1993) dalam suatu penelitian di Amerika Serikat menemukan bahwa mengikuti pendidikan menengah dan pendidikan tinggi langsung meningkatkan tingkat pendapatan seseorang meskipun masih terdapat biaya langsung dan tidak langsung, menyesuaikan dengan latar belakang keluarga dan kemampuan individu.

Becker berpendapat bahwa peningkatan pendapatan ini adalah hasil dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berpikir kritis diperoleh melalui kegiatan pendidikan. Namun, terdapat perbedaan yang jelas antara lulusan SMA dan lulusan perguruan tinggi dalam pendapatan karena tingkat pendidikan yang berbeda. Selain itu, perbedaan juga terjadi pada lulusan perguruan tinggi dan mereka yang putus kuliah. Becker (1993) menyimpulkan bahwa "putus kuliah" tidak memiliki kemampuan lebih besar dari lulusan SMA.

Selanjutnya, menurut Becker, kemampuan dari yang lulus kuliah bervariasi di seluruh kelompok berdasarkan perbedaan sosial demografinya. Ia menemukan bahwa tingkat pendapatan untuk penduduk perkotaan, kulit putih, lulusan perguruan tinggi, dan laki-laki lebih tinggi dari tingkat pendapatan untuk penduduk pedesaan, kulit berwarna, perempuan, dan putus kuliah. Beberapa penelitian berkaitan dengan faktor-faktor hambatan memperoleh kesempatan kerja mendapatkan diantaranya mengasuh anak, transportasi, kesehatan yang buruk, kesehatan mental yang buruk, cacat fisik, kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan zat, dan pengaruh negatif dari teman sebaya, bahkan ras sering dikutip sebagai penghalang untuk bekerja (Edin dan Lein, 1997). Sebuah studi Pearlmutter dan Bartle (2003) menemukan bahwa ibu-ibu bekerja marah tentang kurangnya pilihan mengasuh anak, terutama ibu-ibu yang bekerja di industri jasa yang kadang bekerja malam bahkan akhir pekan. Juga, banyak ibu membutuhkan merawat anak sakit atau merawat anak cacat (Lens, 2002). Menurut penelitian Zippay dan Rangarajan (2007), 78 persen ibu bekerja mengandalkan perawatan anak informal oleh keluarga atau teman. Mengasuh anak telah terbukti mempengaruhi jumlah jam kerja. Mengasuh anak mengakibatkan penurunan jumlah jam kerja (Press *et al*., 2005; Joo, 2008).

Dalam beberapa penelitian lainnya, pengalaman kerja (pekerjaan yang dilakukan tenaga kerja sebelumnya) dilaporkan menjadi prediktor kerja. Tahun yang dihabiskan di pekerjaan sebelumnya sangat penting untuk mendapatkan pekerjaan baru dan tetap bekerja (Cheng, 2002;. Lee *et al*., 2004). Selain itu, mereka yang bekerja di sektor pekerjaan informal yang kurang mungkin untuk dipekerjakan (Lee *et al*., 2004). Kemampuan untuk memiliki fasilitas yang mendukung, seperti telepon, transportasi, dan dukungan sosial juga penting untuk mencapai dan mempertahankan pekerjaan. Misalnya, individu yang tidak bekerja yang memiliki telepon lebih mungkin untuk dipekerjakan (Latimer, 2004). Kemungkinan dipekerjakan lebih rendah bagi mereka yang belum pernah bekerja, sementara kurangnya pengalaman kerja sebelumnya dikaitkan dengan pendapatan yang lebih rendah (Dworsky dan Courtney, 2007). Modal sosial muncul sebagai pelengkap dari modal manusia (tingkat pendidikan dan keterampilan kerja individu yang ditawarkan kepada pemberi kerja). Modal sosial, seperti modal manusia, memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas dalam kesempatan kerja, tetapi secara khusus mengacu pada hubungan sosial daripada tingkat pendidikan atau keahlian teknis (Harris, 1993; Putnam, 1995; Schneider, 2006). Coleman (1988) menyatakan bahwa modal sosial dan modal manusia adalah kombinasi relasional yang memungkinkan tercapainya tujuan tertentu dari keadaan tidak akan mungkin. Schneider (2002) mengacu pada modal sosial sebagai hubungan sosial dan pola kepercayaan yang memungkinkan orang untuk mendapatkan akses ke sumber daya seperti layanan pemerintah atau

pekerjaan, sementara Li (2004) menunjukkan dalam bentuk pengaturan sosial sebagai sumber potensi yang dapat digunakan untuk mengejar tujuan ekonomi dan sosial. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa akumulasi modal sosial berpengaruh pada hasil sosial dan ekonomi yang positif. Contohnya, modal sosial yang tinggi telah meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, mengurangi kemiskinan dan konflik dalam keluarga, peningkatan tabungan dan aset, dan peningkatan akses investasi (Yusuf, 2008; Brisson, 2009; George dan Chaze, 2009).

Sejalan dengan hal tersebut, terdapat hubungan positif antara modal sosial dan kemajuan karir dan pemanfaatan teknologi (Manturuk *et al*., 2009). Modal sosial juga dikaitkan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan, modal sosial dapat membantu dalam upaya orang berpenghasilan rendah 'untuk meningkatkan kesejahteraan, mendapatkan pekerjaan yang aman dan manfaat lainnya seperti tunjangan anak dan pelayanan kesehatan (Lévesque, 2005; Parisi *et al*., 2003; Schneider, 2002). Modal sosial yang rendah terkait dengan rendahnya kesejahteraan dan kerawanan pangan (Henderson dan Tickamyer, 2008). Di sisi lain, Pichler dan Wallace (2009), serta Seo (2005), menunjukkan bahwa modal sosial memiliki sedikit pengaruh pada kesejahteraan ekonomi pada populasi yang diteliti. Penelitian lain (Livermore dan Neustrom, 2003: Adato *et al*., 2006; Chantarat dan Barrett, 2008) justru menghasilkan temuan bahwa modal sosial memiliki pengaruh yang merugikan pada berbagai indikator kesejahteraan ekonomi, termasuk mobilitas ekonomi, pekerjaan, dan produktivitas

Latihan Soal

1. Apakah ciri khas perbedaan Model Edgeworth dalam Ekonomi Kesejahteraan ?
2. Sebutkan alasannya mengapa bisa terjadi dalam perkembangan teori ekonomi kesejahteraan ?

Kunci Jawaban

1. Model Edgeworth adalah modifikasi dari model Bertrand, di mana Edgeworth (1897) menyatakan bahwa ada kemungkinan perusahaan tunduk pada keterbatasan kapasitas produksi (Lipczynski, 2005). Asumsi yang digunakan dalam model Edgeworth adalah (Salvatore, 2007):

   -Terdapat dua perusahaan yang menjual barang homogen dengan biaya 0.

   -Setiap perusahaan menghadapi kurva permintaan garis lurus yang sama.

   - Produksi masing-masing perusahaan terbatas sehingga satu perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan pasarnya.

   Setiap perusahaan, dalam memaksimumkan keuntungannya, mengasumsikan bahwa perusahaan lain mempertahankan harganya pada tingkat yang konstan. Dalam model Edgeworth tidak akan dijumpai ekulibrium yang stabil sebagaimana yang terdapat dalam model Bertrand. Terjadinya peningkatan kualitas masyarakat akan berdampak terhadap peningkatan produktifitas mereka. Hidayat dalam Delyuzer (2012) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia sebagai subjek

pembangunan disamping dapat menentukan tinggi rendahnya produktifitas juga akan menentukan keberhasilan pembangunan dan produktifitas adalah motor penggerak bagi pembangunan ekonomi. Jadi dapat dikatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dicerminkan pada kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Menurut Tjiptoherijanto (2008), Faktor yang mempengaruhi kualitas masyarakat secara luas adalah faktor pendapatan, faktor pendidikan dan faktor kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan pendapatan memberikan gambaran pada peningkatan kualitas masyarakat secara signifikan.

2. Menurut Sumarti (1999), perbedaan status sosial budaya dan spesialisas kerja akan menghasilkan persepsi kesejahteraan yang berbeda pula. Terdapat kelompok masyarakat yang menggunakan ukuran kesejahteraan bersumber pada simbol kekuasaan budaya-politik, sementara monetisasi ekonomi menghantarkan kalangan masyarakat pada umumnya untuk lebih menggunakan ukuran kesejahteraan ekonomi dibandingkan ukuran kesejahteraan sosial. Skoufias *et al*., (2000) menyatakan bahwa pengukuran kesejahteraan bersifat subjektif manakala berkaitan dengan aspek psikologis yaitu diukur dari kebahagiaan dan kepuasan. Mengukur kesejahteraan secara objektif menggunakan patokan tertentu yang relatif baku, seperti menggunakan pendapatan per kapita, dengan mengasumsikan terdapat tingkat kebutuhan fisik untuk semua orang hidup layak. Ukuran yang sering digunakan adalah kepemilikan uang, tanah, atau aset.

Daftar Pustaka

Boediono, Dr., Ekonomi Internasional dan Nasional, BPFE, Yogyakarta, 2014 diakses September 2020

Halwani, Hendra. Dra. M.H., dan Tjiptoharijanto, Prijono, H. Dr., Perdagangan Internasional, Pendekatan Ekonomi Kesejahteraan Makro & Mikro, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.

Tambunan, Tulus T.H., Dr., Perekonomian dan Ekonomi Kesejahteraan Indonesia,, Teori dan temuan Empiris, Ghalia Indonesia, 2017

MODUL EKONOMI KESEJAHTERAAN

(KAK 357)

MODUL 14

DIAGRAM PARETO IMPLIKASI DAN KASUS

DISUSUN OLEH

Erlina Puspitaloka Mahadewi, SE, MM, MBL (5661)

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2022

M. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari Modul ini, diharapkan Mahasiswa mampu :

1. Memahami dan mempelajari definisi Diagram Pareto dalam Ekonomi Kesejahteran
2. Menguraikan konsep dasar Pengertian, Implikasi Diagram Pareto dalam Ekonomi Kesejahteran dan Jenis Kesejahteraan dalam Ekonomi Kesejahteraan

N. Uraian dan Contoh

1. Visi dan Misi UEU

Universitas Esa Unggul mempunyai visi menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Universitas Esa Unggul menetapkan misi-misi sebagai berikut :

m. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan
n. Menciptakan suasana akademik yang kondusif
o. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan

2. **Topik Perkuliahan :** Diagram Pareto Implikasi dan Kasus

O. Latar Belakang Metode Edgeworth

Diagram Pareto

Diagaram ini dikembangkan oleh Vilfredo Frederigo Samoso pada akhir abad ke-19 merupakan pendekatan logic dari tahap awal pada proses perbaikan suatu situasi yang digambarkan dalam bentuk histogram yang dikenal sebagai konsep vital few and the trivial many untuk mendapatkan menyebab utamanya. Diagram Pareto telah digunakan secara luas dalam kegiatan kendali mutu untuk menangani kerangka proyek; proses program; kombinasi pelatihan, proyek dan proses, sehingga sangat membantu dan memberikan kemudahan bagi para pekerja dalam meningkatkan mutu pekerjaan.

Pareto chart sangat tepat digunakan jika menginginkan hal-hal seperti menentukan prioritas karena keterbatasan sumberdaya, menggunakan kearifan tim secara kolektif, menghasilkan consensus atau keputusan akhir, dan menempatkan keputusan pada data kuantitatif Diagram Pareto (Pareto Charts) Heizer (2001:92)

Diagram Pareto memiliki peranan penting dalam proses perbaikan kualitas. Prinsip diagram Pareto adalah dengan aturan 80/20 yang diadaptasi oleh Joseph Juran, yaitu 80% dari masalah (ketidaksesuaian) disebabkan oleh penyebab (cause) sebesar 20%. Diagram Pareto membantu pihak manajemen mengidentifikasi area kritis (area yang paling banyak mengakibatkan masalah) yan membutuhkan perhatian lebih dengan cepat. Diagram Pareto adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya kejadian. Masalah yang paling banyak terjadi ditunjukkan oleh grafik batang yang pertama yang tertinggi serta ditempatkan pada sisi paling kiri dan seterusnya sampai masalah yang paling sedikit terjadi ditunjukkan oleh grafik batang terakhir yang terendah serta ditempatkan pada sisi paling kanan. Penggunaan diagram pareto biasanya dokombinasikan dengan penggunaan lembar periksa (check sheet).

Diagram Pareto juga mengidentifikasi hal yang penting, serta alternatif pemecahan yang akan membawa perbaikan secara substansial dalam kualitas. Diagram ini juga memberikan pedoman dalam menempatkan sumber – sumber yang terbatas untuk aktivitas pemecahan masalah. Diantara manfaat diagram Pareto terdapat berbagai kegunaan lain, yaitu :

a. Untuk menetapkan masalah utama dalam kualitas.

b. Untuk menentukan setiap masalah secara komparatif terhadap masalah keseluruhan.

c. Untuk menunjukan tingkat perbaikan sesudah perbaikan tersebut. Dilakukan pada bagian – bagian yang terbatas.

d. Untuk menentukan perbandingan setiap masalah sebelum dan sesudah tindakan perbaikan dilakukan.

Langkah – langkah membuat diagram Pareto:

a. Menentukan rata – rata dari kualifikasi data, contoh berdasar penyebab masalah, tipe ketidaksesuaian atau hal lain yang khusus.

b. Menentukan sejauh mana kepentingan relatif yang akan diputuskan, apakah akan berdasar pada nilai finansial atau frekuensi dari kejadian.

c. Urutkan kategori prioritas dari yang terpenting sampai ke prioritas yang memiliki kepentingan terbawah.

d. Menghitung nilai frekuensi kumulatif dari kategori data berdasarkan urutannya. 20

e. Membuat diagram batang untuk menunjukan kepentingan relatif dari masing – masing permasalahan dalam urutan angka. identifikasiakn sebab utama yang membutuhkan perhatian lebih.

Diagram Sebab Akibat (Cause Effect Diagram)

Diagram Sebab Akibat dikembangkan oleh Ishikawa Ph.D sering disebut diagram Ishikawa. Karena bentuk dari diagram ini yang menyerupai tulang ikan maka sering disebut juga diagram Tulang Ikan (Fishbone Diagram). Diagram ini pada dasarnya digunakan untuk mengidentifikasikan masalah dan menunjukkan kumpulan dari sebab akibat yang disebut sebagai faktor serta akibat yang ditimbulkannya yang disebut sebagai karakteristik mutu. Kegunaan dari diagram ini adalah untuk menemukan faktor – faktor yang merupakan sebab pada suatu masalah. Jika suatu proses stabil maka diagram akan memberikan petunjuk pada penyebab yang akan diperiksa untuk perbaikan proses. Prinsip yang dipakai dalam membuat diagram Sebab Akibat ini adalah sumbang saran (brainstorming).

Terdapat tiga macam jenis dari aplikasi diagram Sebab Akibat yang sering dipakai, yaitu:

a. Cause Enumeration (berdasar jenis penyebab)

b. Dispersion Analysis (berdasar faktor utama 4M1E yaitu Man, Machine, Material, Method Environment)

c. Process Analysis (berdasar proses yang dilalui)

Langkah-langkah pembuatan diagram sebab akibat:

1. Menentukan masalah yang diamati
2. Mencari faktor utama yang berpengaruh atau mempunyai akibat pada masalah tersebut.
3. Mencari faktor – faktor yang lebih terperinci yang berpengaruh pada faktor utama tersebut.
4. Dari diagram yang sudah lengkap kemudian dicari penyebab – penyebab utama dengan menganalisa data yang ada.

B. Langkah – langkah Perbaikan Proses

Setelah diketahui jenis kecacatan yang paling dominan dan penyebab – penyebab yang menyebabkan terjadinya cacat, penulis mencoba untuk memberikan ide – ide solusi perbaikan untuk perusahaan. Tenner dan DeToro (1992:85) mengemukakan suatu model perbaikan proses yang terdiri dari enam langkah, antara lain sebagai berikut:

Langkah 1 : Mendefinisikan masalah dalam konteks proses Aktivitas yang spesifik dalam langkah pertama ini adalah: 22 a. Identifikasi output b.

Identifikasi konsumen c. Definisi kebutuhan konsumen d. Identifikasi proses yang menghasilkan output ini e. Identifikasi pemilik proses

Langkah 2 : Identifikasi dan dokumentasi proses Diagram alir (flowchart) merupakan alat yang umum dipergunakan untuk mendeskripsikan proses. Pembuatan diagram alir dari proses akan memungkinkan kita untuk melakukan empat aktivitas perbaikan berikut:

a. Mengidentifikasi peserta (participants) dalam proses, berdasarkan nama, posisi, atau organisasi

b. Memberikan kepada semua peserta dalam proses suatu pemahaman umum tentang semua langkah dalam proses dan peranan individual mereka

c. Mengidentifikasi inefisiensi, pemborosan, dan langkah-langkah redundant (berlebihan atau tidak perlu) dalam proses d. Menawarkan suatu kerangka kerja untuk mendefinisikan pengukuran proses

Langkah 3: Mengukur performansi Pengukuran performansi dapat dilakukan pada tiga tingkat, yaitu: proses, output, dan outcome

Langkah 4: Memahami mengapa masalah dalam konteks proses bisa terjadi mengapa suatu masalah terjadi dan agar langkah-langkah menuju perbaikan proses menjadi efektif dan efisien, kita dapat mengajukan tiga pertanyaan dasar berikut: a. Apa yang menjadi area utama (masalah utama) dalam proses itu? b. Apa yang menjadi akar penyebab masalah dalam proses itu? c. Apa yang merupakan sumber variasi dari proses itu?

Langkah 5: Mengembangkan dan menguji ide-ide.

Langkah 6: Implementasi solusi dan evaluasi. Langkah 6 dilanjutkan dengan pengukuran dan evaluasi efektifitas dari proses yang diperbaiki itu.

Berdasarkan informasi ini, kemudian dijadikan umpan balik (feedback) untuk melaksanakan perbaikan proses selanjutnya, sehingga akan diperoleh suatu perbaikan proses secara terus-menerus (continuous process improvement).

Langkah 1: Definisi Masalah

Langkah 2: Identifikasi dan Dokumentasi Masalah

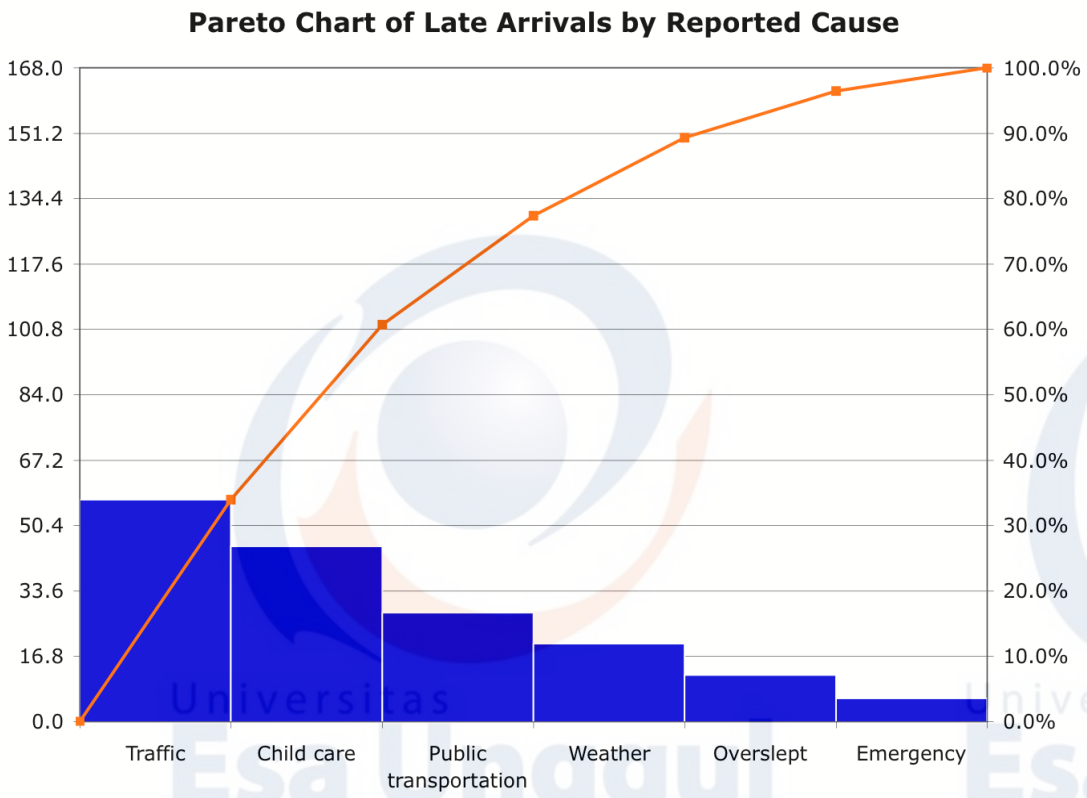
Langkah 3: Mengukur Performansi

Langkah 4: Memahami Mengapa?

Langkah 5: Mengembangkan dan Menguji Ide-Ide

Model Perbaikan Proses Pareto Chart

adalah salah satu jenis chart yang terdiri dari grafik balok dan juga garis. Penamaannya sendiri diambil dari nama orang yang menemukannya yaitu Vilfredo Pareto. Pada chart ini, value individu direpresentasikan oleh balok dalam urutan yang menurun dan jumlah total kumulatif direpresentasikan oleh garis.



Sumbu vertical yang ada di sebelah kiri adalah *frecuency of occurrence*, tetapi hal ini dapat merepresentasikan cost atau unit pengukuran lainnya yang cukup penting. Sedangkan sumbu vertical yang terdapat pada sebelah kanan adalah persentase kumulatif dari jumlah total occurrences, total cost, atau jumlah total dari suatu unit yang diukur. Karena alasan-alasan tersebut disusun dalam urutan yang menurun, maka fungsi kumulatifnya adalah fungsi concave atau parabolik cekung. Jika melihat contoh yang ada pada gambar, untuk mengurangi jumlah dari arriving yang terlambat sebanyak 80%, maka kita cukup menyelesaikan tiga masalah pertama.

Tujuan dari pareto chart adalah untuk memperjelas faktor yang paling penting (atau yang paling besar) dari beberapa faktor yang ada. Dalam quality control, hal ini

sering kali merepresentasikan sumber defect yang paling sering ditemui, jenis defect yang paling sering muncul, ataupun alasan-alasan yang paling sering muncul saat terdapat complain dari konsumen, dan banyak lagi hal lain yang sejenis. Wilkinson pada tahun 2006 merancang sebuah algoritma untuk memproduksi batas yang masih dapat ditolerasi (acceptable limit) berdasarkan ilmu statistik untuk masing-masing balok pada Pareto chart. Hal ini memiliki kesamaan juga dengna confidence interval.

Pareto chart dapat dibuat dengan program spreadsheet sederhana seperti OpenOffice Calc, Microsoft Excel, dan software tool yang khusus untuk statistik yang bekerja sebaik onile quality chart generator. Pareto chart juga termasuk ke dalam tujuh tools dasar dari quality control.

Manfaat Diagram Pareto

Diagram Pareto merupakan metode standar dalam pengendalian mutu untuk mendapatkan hasil maksimal atau memilih masalah-masalah utama dan lagi pula dianggap sebagai suatu pendekatan sederhana yang dapat dipahami oleh pekerja tidak terlalu terdidik, serta sebagai perangkat pemecahan dalam bidang yang cukup kompleks. Diagram Pareto merupakan suatu gambar yang mengurutkan klasifikasi data dari kiri ke kanan menurut urutan ranking tertinggi hingga terendah. Hal ini dapat membantu menemukan permasalahan yang terpenting untuk segera diselesaikan (ranking tertinggi) sampai dengan yang tidak harus segera diselesaikan (ranking terendah). Selain itu, Diagram Pareto juga dapat digunakan untuk mem¬bandingkan kondisi proses, misalnya ketidaksesuaian proses, sebelum dan setelah diambil tindakan perbaikan terhadap proses

Diagram Pareto dibuat berdasarkan data statistik dan prinsip bahwa 20% penyebab bertanggungjawab terhadap 80% masalah yang muncul atau sebaliknya. Kedua aksioma tersebut menegaskan bahwa lebih mudah mengurangi bagian lajur yang terletak di bagian kiri diagram Pareto daripada mencoba untuk menghilangkan secara sistematik lajur yang terletak di sebelah kanan diagram. Hal ini dapat diartikan bahwa diagram Pareto dapat menghasilkan sedikit sebab penting untuk meningkatkan mutu produk atau jasa. Keberhasilan penggunaan diagram Pareto sangat ditentukan oleh partisipasi personel terhadap situasi yang diamati, dampak keuangan yang terlihat pada proses perbaikan situasi dan penetapan tujuan secara tepat. Faktor lain yang perlu dihindari adalah jangan membuat persoalan terlalu kompleks dan juga jangan terlalu mencari penyederhanaan pemecahan.

Tahapan penggunaan dari Diagram Pareto adalah mencari fakta dari data ciri gugus kendali mutu yang diukur, menentukan penyebab masalah dari tahapan sebelumnya dan mengelompokkan sesuai dengan periodenya, membentuk histogram evaluasi dari kondisi awal permasalahan yang ditemui, melakukan rencana dan pelaksanaan perbaikan dari evaluasi awal permasalahan yang ditemui, melakukan

standarisasi dari hasil perbaikan yang telah ditetapkan dan menentukan tema selanjutnya.

Prinsip Diagram Pareto

Prinsip Pareto juga dikenal sebagai aturan 80/20 dengan melakukan 20% dari pekerjaan bisa menghasilkan 80% manfaat dari pekerjaan itu. Aturan 80/20 dapat diterapkan pada hampir semua hal, seperti: 80% dari keluhan pelanggan timbul 20% dari produk atau jasa, 80% dari keterlambatan jadwal timbul 20% dari kemungkinan penyebab penundaan, 20% dari produk atau account untuk layanan, 80% dari keuntungan Anda, 20% dari-tenaga penjualan menghasilkan 80% dari pendapatan perusahaan Anda, atau 20% dari cacat sistem penyebab 80% masalah nya. Prinsip Pareto untuk seorang manajer proyek adalah mengingatkan untuk fokus pada 20% hal-hal yang materi, tetapi tidak mengabaikan 80% masalah. Berikut Hukum Pareto dalam bentuk visual:



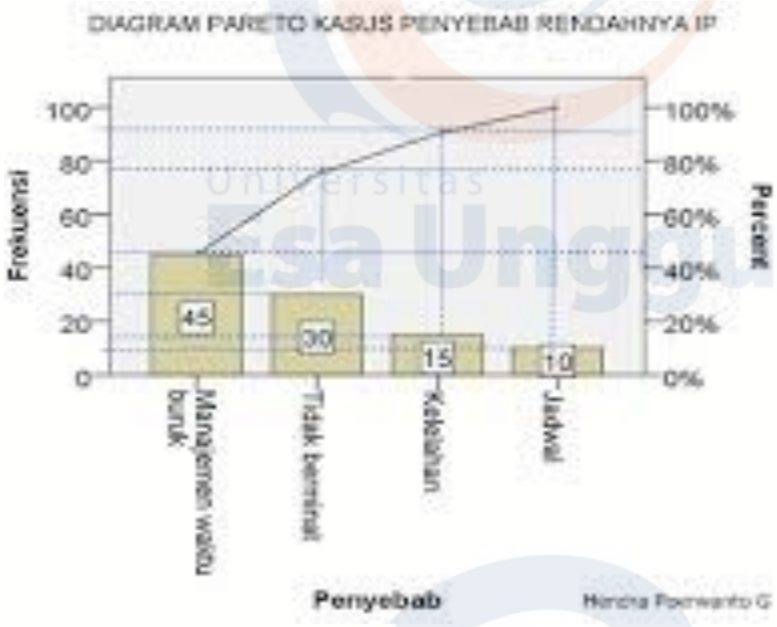
Umumnya Diagram Pareto merupakan diagram batang tempat batang tersebut diurutkan mulai dari yang terbanyak sampai terkecil. Diagram Pareto memiliki banyak aplikasi dalam bisnis dan pekerjaan. Demikian halnya Diagram Pareto dapat diaplikasikan dalam kontrol kualitas. Ini adalah dasar bagi diagram Pareto, dan salah satu alat utama yang digunakan dalam pengendalian kualitas total dan Six Sigma.Satu persatu masalah di breakdown berdasarkan kategori masing – masing. item Diagram Pareto yaitu : 1) Apa (what). Apa saja yang menjadi penyebab masalah tersebut, 2) Kapan (when).Kapan masalah tersebut paling sering muncul, 3) Dimana (where). Dimana masalah tersebut paling sering muncul, 4) Siapa (who).Siapa orang atau kelompok yang mengalami paling banyak masalah, 5) Mengapa (why). Mengapa masalah tersebut banyak terjadi, 6) Bagaimana (how). Bagaimana masalah tersebut bisa terjadi, 7) Berapa biayanya (how much), 8) Masalah mana yang biayanya paling besar? / atau berapa besar biasa yang sudah ditimbulkan?

Cara Membuat Diagram Pareto

Ada delapan tahap yang tercakup dalam pembuatan diagram Pareto, seperti :1) kumpulkanlah sebanyak mungkin data yang menunjukkan sifat dan frekuensi peristiwa tersebut, 2) tentukan kategori yang akan digunakan untuk menganilisa data tersebut, 3) alokasikan frekuensi peristiwa menjadi kategori yang berbeda, 4) hitunglah frekuensi tersebut ke dalam prosentase, 5) buatlah diagram batang. 6) kemudian urutkanlah diagram batang tersebut mulai dari yang terbanyak, 7) ceklah dampak pareto dalam diagram batang tersebut, 8) apabila dampak pareto jelas, ambil tindakan pada item / fakto yang paling umum.

Namun demikian, penyusunan Diagram Pareto dapat juga menggunakan tujuh langkah berikut ini 1). Menentukan metode atau arti dari pengklasifikasian data, misalnya berdasarkan masalah, penyebab jenis ketidaksesuaian, dan sebagainya. 2). Menentukan satuan yang digunakan untuk membuat urutan karakteristik karakteristik tersebut, misalnya rupiah, frekuensi, unit, dan sebagainya. 3). Mengumpulkan data sesuai dengan interval waktu yang telah ditentukan. 4). Merangkum data dan membuat rangking kategori data tersebut dari yaang terbesar hingga yang terkecil. 5). Menghitung frekuensi kumulatif atau persentase kumulatif yang digunakan. 6). Menggambar diagram batang, menunjukkan tingkat kepentingan relatif masing- masing masalah. 7). Mengidentifikasi beberapa hal yang penting untuk mendapat perhatian.

Contoh Diagram Pareto



Contoh di atas adalah contoh sederhana dari sebuah diagram pareto dengan menggunakan sampel data frekuensi relatif dari penyebab IP rendah. Ini memungkinkan kita untuk melihat 20% dari kasus yang menyebabkan 80% dari

masalah dan dimana upaya kita harus difokuskan untuk mencapai peningkatan terbesar.

Pengertian Diagram Pareto dan Cara Membuatnya

Diagram Pareto merupakan salah satu tools (alat) dari QC 7 Tools yang sering digunakan dalam hal pengendalian Mutu. Pada dasarnya, Diagram Pareto adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Urutannya mulai dari jumlah permasalahan yang paling banyak terjadi sampai yang paling sedikit terjadi. Dalam Grafik, ditunjukkan dengan batang grafik tertinggi (paling kiri) hingga grafik terendah (paling kanan).

Dalam aplikasinya, Diagram Pareto atau sering disebut juga dengan Pareto Chart ini sangat bermanfaat dalam menentukan dan mengidentifikasikan prioritas permasalahan yang akan diselesaikan. Permasalahan yang paling banyak dan sering terjadi adalah prioritas utama kita untuk melakukan tindakan.

Sebelum membuat sebuah Diagram Pareto, data yang berhubungan dengan masalah atau kejadian yang ingin kita analisis harus dikumpulkan terlebih dahulu.

Pada umumnya, alat yang sering digunakan untuk pengumpulan data adalah dengan menggunakan Check Sheet atau dikenal dengan Lembar Periksa.

Langkah-langkah dalam membuat Diagram Pareto adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasikan permasalahan yang akan diteliti dan penyebab-penyebab kejadian.
   (Contoh Permasalahan : Tingginya tingkat Cacat di Produksi Perakitan PCB, Penyebabnya : Solder Short, No Solder, Missing, Solder Ball dan Solder Crack)
2. Menentukan Periode waktu yang diperlukan untuk analisis (misalnya per Bulanan, Mingguan atau per harian)
3. Membuat catatan frekuensi kejadian pada lembaran periksa (check sheet)
4. Membuat daftar masalah sesuai dengan urutan frekuensi kejadian (dari tertinggi sampai terendah).
5. Menghitung Frekuensi kumulatif dan Persentase kumulatif
6. Gambarkan Frekuensi dalam bentuk grafik batang
7. Gambarkan kumulatif Persentase dalam bentuk grafik garis
8. Intepretasikan (terjemahkan) Pareto Chart tersebut
9. Mengambil tindakan berdasarkan prioritas kejadian / permasalahan
10. Ulangi lagi langkah-langkah diatas meng-implementasikan tindakan improvement (tindakan peningkatan) untuk melakukan perbandingan hasil.

Langkah 3

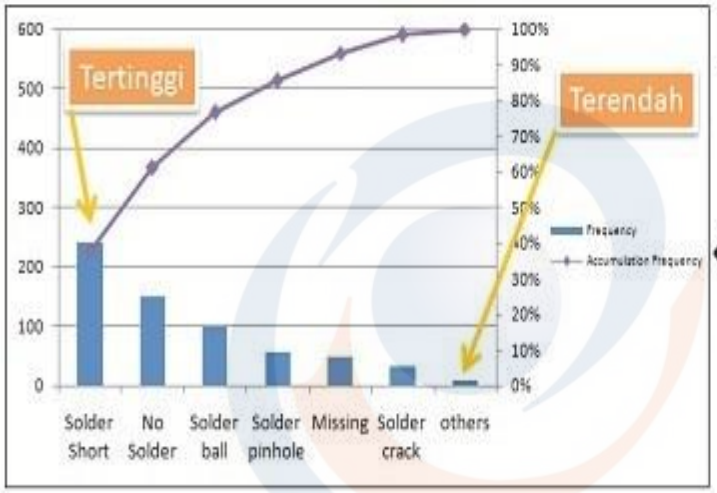
Monthly Line Rejection (Sept 2015)

Reject Item	Frequency	Percentage from Total
Solder Short	222	33%
No Solder	198	30%
Missing	49	7%
Solder crack	33	5%
Solder pinhole	57	9%
Solder ball	99	15%
others	10	1%
Total	668	100%

Langkah 4 dan 5

Monthly Line Rejection (Sept 2015)

Reject Item	Frequency	Accumulation Frequency	Percentage from Total	Accumulation Frequency
Solder Short	222	222	33%	33%
No Solder	198	420	30%	63%
Solder ball	99	519	15%	78%
Solder pinhole	57	576	9%	86%
Missing	49	625	7%	94%
Solder crack	33	658	5%	99%
others	10	668	1%	100%
Total	668		100%	



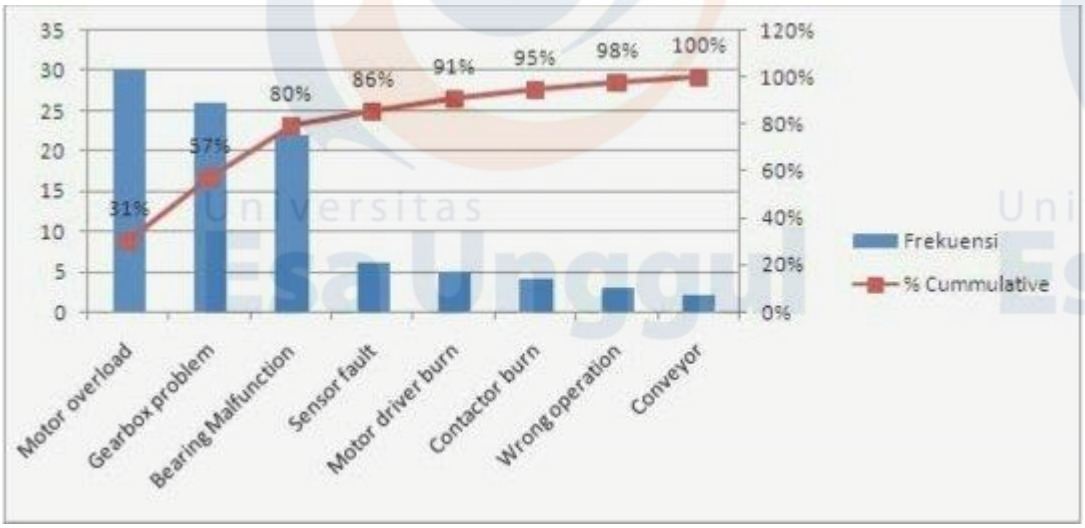
Langkah 6 dan 7

Inilah bentuk Pareto Chart

ilmumanajemenindustri.com

Beda Pareto dan Histogram ?

Diagram Pareto adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Urutannya mulai dari jumlah permasalahan yang paling banyak terjadi sampai yang paling sedikit terjadi. Jadi dengan Diagram Pareto, kita dapat langsung mengetahui mana saja masalah yang dominan (prioritas).



(Sumber gambar: Contoh Diagram Pareto*)*

Diagram pareto juga berguna untuk memperjelas faktor yang paling penting (atau yang paling besar) dari beberapa faktor yang ada.

Pareto membantu kita untuk memusatkan perhatian pada salah satu masalah utama yang harus segera diperbaiki. Setelah melakukan perbaikan, kita dapat melakukan analisis ulang dengan diagram pareto, sehingga kita dapat mengetahui keefektifan dari perbaikan yang telah dilakukan.

Sedangkan diagram histogram adalah diagram yang cukup mudah untuk dilakukan (lebih mudah dari membuat pareto). Ini merupakan diagram awal yang berguna untuk mengetahui penyebaran data yang ada.

Histogram akan mempermudah kita untuk melihat dan menginterpretasikan data



(Sumber gambar: Contoh Histogram*)*

Histogram juga umumnya digunakan untuk mengambarkan perkembanga nilai suatu objek penelitian dalam kurun waktu tertentu dan dapat digunakan sebagai alat pengendali proses, sehingga dapat mencegah timbulnya masalah. Intinya diagram histogram itu senjata awal, atau alat paling mudah dibuat dalam tools QCC. Sedangkan pareto adalah alat lanjutannya.

Seven tools of quality adalah alat-alat pembantu yang digunakan dalam eksplorasi kuantitatif (statistik). Menurut Girish (2013), eksplorasi kuantitatif menggunakan seven tools mencakup: a. Pareto Diagram Diagram Pareto diciptakan oleh seorang ahli ekonomi italia yang bernama Alfredo Pareto (1848-1923). Alfredo Pareto melakukan studi tentang distribusi kekayaan di Eropa. Dia menemukan bahwa ada orang-orang yang memiliki banyak uang, dan ada orang-orang yang memiliki sedikit uang. Distibusi ini tidak merata, kekayaan menjadi integral bagian dari teori ekonomi. Pyzdek (2003) mendefinisikan analisis pareto sebagai proses untuk meranking peluang potensial yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Menurut Prinsip Pareto yang dikemukan oleh Alfredo Pareto (1906) dikutip dalam Bass (2007), 80% masalah dapat disebabkan oleh 20% dari penyebabnya. Oleh karena itu, Prinsip Pareto sering disebut dengan aturan 80-20. Pareto disajikan dalam bentuk diagram. Peluang potensial yang harus diprioritaskan adalah kejadian terbanyak pada satu kategori tertentu. Contoh diagram pareto dapat dilihat pada Gambar 2.1. Gambar 2. 1 Diagram Pareto Sumber: Joseph M. Juran (1962) Menurut Besterfield (1994) pembuatan diagram pareto sangatlah sederhana. Ada enam langkah yang harus dilakukan, diantaranya :

I. Tentukan metode dari klasifikasi data : dengan masalah, penyebab ketidaksesuaian, dll.

II. II. Tentukan jika dollar (terbaik) atau frekuensi digunakan untuk mengurutkan karakteristik

III. Mengumpulkan data untuk interval waktu yang tepat

IV. Merangkum data dan mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil

V. Hitung persentase komulatif jika akan digunakan

VI. Membuat diagram dan menemukan beberapa yang penting b. Cause-and-effect diagram Cause-and-effect diagram adalah gambar yang terdiri dari garis dan symbol yang dirancang untuk mewakili hubungan yang bermakna antara sebab dan akibat. Cause-and-effect diagram dikembangkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa di tahun 1943 dan sering disebut sebagai diagram ishikawa.

Menurut Besterfield (1994) cause-and-effect diagram mempunyai kegunaan untuk :

I. Menganalisis kondisi actual untuk tujuan produk atau pengembangan kualitas, penggunaan sumber daya yang lebih efisien, dan mengurangi biaya.

II. Mengeliminasi kondisi ketidaksesuaian produk dan keluhan pelanggan

III. Standarisasi operasi yang ada dan yang diusulkan IV. Education and training dari bagian pembuat keputusan dan tindakan perbaikan. Gambar 2. 2 Cause-Effect Diagram Sumber: Pyzdek (2003)

Check Sheet

Tujuan utama dari check sheet adalah untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dengan hati-hati dan akurat oleh personel operasi. Data harus disajikan dalam bentuk form sehingga dapat dengan cepat dan mudah digunakan dan dianalisis (Besterfield, 1994). Dalam bentuk yang paling sederhana, daftar pemeriksaan adalah alat-alat yang membuat proses pengumpulan data lebih mudah dengan menyediakan penjelasan rinci dari kejadian yang mungkin terjadi. Kekuatan mereka ditingkatkan dengan besar saat digunakan berhubungan dengan alat sederhana lainnya, seperti analisis histogram dan analisis Pareto (Pyzdek, 2002).

Jenis-jenis lembar pemeriksaan adalah: i. Process Check Sheet Digunakan untuk membuat lembar distribusi frekuensi dengan mendaftar beberapa kisaran (range) nilai pengukuran dan membuat tanda pada observasi aktual pada lembar khusus. ii. Defect Check Sheet Yang dicatat disini adalah jenis-jenis cacat, serupa dengan grafik batang. Pada check sheet ini hanya membuat daftar jenis cacat yang terjadi dengan cara pengamatan. iii. Stratified Check Sheet Mencatat cacat tertentu menurut kriteria logika, membantu bila defect check sheet gagal memberikan informasi mengenai akar penyebab suatu masalah. Pengelompokan juga dapat digunakan dalam menyusun check sheet berdasarkan mesin atau proses tertentu. iv. Defect Location Check Sheet Check sheet ini berupa gambar, foto, layout diagram atau peta yang menunjukkan masalah-masalah tertentu. Dengan ini mempermudah untuk identifikasi bagian mana yang menjadi pokok suatu permasalahan yang tidak bisa dijelaskan oleh check sheet lainnya. v. Cause and Effect Diagram Check Sheet Juga bisa dibuat sebagai check sheet. Setelah diagram disiapkan, tandai bagian tertentu dan hubungkan dengan tanda panah bila 14 sesuatu terjadi pada bagian tersebut. Pendekatan ini bisa digunakan untuk data historis bila data tersedia. d. Flow

Chart Peta Proses

Merupakan gambaran grafik dari suatu proses, menunjukkan urutan tugas menggunakan versi yang dimodifikasi dari simbol bagan aliran (flowchart) standar. Peta proses pekerjaan adalah gambaran dari bagaimana orang melakukan pekerjaan mereka. Peta proses pekerjaan serupa dengan peta jalan, didalamnya ada banyak

alternatif rute untuk mencapai tujuan. Langkah langkah proses mapping adalah sebagai berikut: I. Memilih satu proses yang akan dipetakan II. Mendefinisikan proses III. Memetakan proses utama IV. Memetakan jalur alternatif V. Memetakan titik pemeriksaan VI. Menggunakan peta untuk meningkatkan proses Pemetaan proses tersebut dalam organisasi modern terbagi di antara banyak departemen yang berbeda. Suatu peta proses menyediakan gambaran terpadu dari proses alami (Pyzdek, 2002). e. Histogram Histogram grafis menunjukan kemampuan proses dan jika diinginkan, hubungan dengan spesifikasi dan nominal. Hal ini juga menunjukan bentuk dari populasi dan menunjukan jika ada kesenjangan dalam data. Selain itu histogram juga digunakan untuk menemukan variasi dalam data dan gambaran proses yang menunjukan distribusi dan frekuensi pengukuran Histogram Sumber : Girish (2013)

Control Chart

Control Chart adalah teknik yang luar biasa untuk memecahkan masalah dan menghasilakan peningkatan kualitas. Control chart digunakan untuk menganalisis suatu proses karena grafik ini dapat mendeteksi penyimpangan masalah dengan bantuan suatu standar. Standar yang berupa batas atas (Upper control limit), batas bawah (Lower control limit), batas tengah (Centerline). Gambar 2. 4 Control Chart Sumber: Alion Science and Technology (2004) g. Scatter diagram 16 Diagram pencar atau sering disebut scatter diagram merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengetahui korelasi antara penyebab yang diduga dan akibat yang timbul dari masalah tersebut.

New Seven Tools of Quality New seven tools of quality adalah alat-alat pembantu yang digunakan dalam eksplorasi kualitatif. Pengelompokkan tujuh alat kedua (seven new tools) timbul karena adanya kebutuhan untuk memecahkan permasalahan kualitatif pada tingkatan manajemen. Bagaimanapun, permintaan para konsumen tidak selalu dapat diidentifikasi dengan hanya menggunakan data numerik (Shuai dan Kun, 2013). Menurut Shuai dan Kun (2013), eksplorasi kualitatif dengan menggunakan tujuh alat manajemen atau seven new tools meliputi: I. Affinity Diagram Affinity diagram digunakan untuk mengatur beberapa objek atau masalah menjadi sesuatu yang dapat dilogika dan membuatnya menjadi sebuah sistem yang dapat mempermudah perusahaan dalam melakukan perancangan. Segala keinginan dan keluhan konsumen dapat diatur dalam affinity diagram. Contoh affinity diagram dapat dilihat pada Gambar 2.6. 17 Gambar 2. 6 Affinity Diagram Sumber : Shuai dan Kun (2013) II.

Tree Diagram

Tree diagram merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengembangkan strategi sistematik secara bertahap untuk menemukan solusi dari masalah yang ada

Arrow Diagram

Arrow diagram adalah suatu alat yang bertujuan untuk membuat suatu sajian dalam tahapan-tahapan dari sebuah proses yang diperlukan untuk melengkapi sebuah proyek. Diagram Sumber ; Shuai dan Kun (2013) IV. PDPC (Process Decision Program Chart) PDPC merupakan suatu alat yang digunakan untuk menyiapkan tindakan cadangan dalam bentuk grafik jika terjadi suatu kejadian yang tidak normal dengan kemungkinan yang sangat kecil dalam perusahaan. Contoh PDPC dapat dilihat pada Gambar 2.9. 19 Gambar 2. 9 PDPC Sumber : Kusnadi (2012) V. Relationship diagram Relationship diagram digunakan untuk menyelidiki hubunganhubungan yang terjadi antara penyebab suatu masalah dan akibat atau dampak dari masalah yang ada. Contoh relationship diagram dapat dilihat pada Gambar 2.10. Gambar 2. 10 Relationship Diagram Sumber : Shuai dan Kun (2013)

Model-model diagram diatas dan juga Pareto diadopsi oleh Becker (1993) dalam suatu penelitian di Amerika Serikat yang terkait dengan Pendidikan dan Ekonomi Kesejahteraan yang menemukan bahwa mengikuti pendidikan menengah dan pendidikan tinggi langsung meningkatkan tingkat pendapatan seseorang meskipun masih terdapat biaya langsung dan tidak langsung, menyesuaikan dengan latar belakang keluarga dan kemampuan individu. Becker berpendapat bahwa peningkatan pendapatan ini adalah hasil dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berpikir kritis diperoleh melalui kegiatan pendidikan. Namun, terdapat perbedaan yang jelas antara lulusan SMA dan lulusan perguruan tinggi dalam pendapatan karena tingkat pendidikan yang berbeda. Selain itu, perbedaan juga terjadi pada lulusan perguruan tinggi dan mereka yang putus kuliah. Becker (1993) menyimpulkan bahwa "putus kuliah" tidak memiliki kemampuan lebih besar dari lulusan SMA.

Sejalan dengan hal tersebut, terdapat hubungan positif antara modal sosial dan kemajuan karir dan pemanfaatan teknologi (Manturuk *et al*., 2009). Modal sosial juga dikaitkan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan, modal sosial dapat membantu dalam upaya orang berpenghasilan rendah 'untuk meningkatkan kesejahteraan, mendapatkan pekerjaan yang aman dan manfaat lainnya seperti tunjangan anak dan pelayanan kesehatan (Lévesque, 2005; Parisi *et al*., 2003; Schneider, 2002). Modal sosial yang rendah terkait dengan rendahnya kesejahteraan dan kerawanan pangan (Henderson dan Tickamyer, 2008). Di sisi lain, Pichler dan Wallace (2009), serta Seo (2005), menunjukkan bahwa modal sosial memiliki

sedikit pengaruh pada kesejahteraan ekonomi pada populasi yang diteliti. Penelitian lain (Livermore dan Neustrom, 2003: Adato *et al*., 2006; Chantarat dan Barrett, 2008) justru menghasilkan temuan bahwa modal sosial memiliki pengaruh yang merugikan pada berbagai indikator kesejahteraan ekonomi, termasuk mobilitas ekonomi, pekerjaan, dan produktivitas

Selanjutnya, menurut Becker, kemampuan dari yang lulus kuliah bervariasi di seluruh kelompok berdasarkan perbedaan sosial demografinya. Ia menemukan bahwa tingkat pendapatan untuk penduduk perkotaan, kulit putih, lulusan perguruan tinggi, dan laki-laki lebih tinggi dari tingkat pendapatan untuk penduduk pedesaan, kulit berwarna, perempuan, dan putus kuliah. Beberapa penelitian berkaitan dengan faktor-faktor hambatan memperoleh kesempatan kerja mendapatkan diantaranya mengasuh anak, transportasi, kesehatan yang buruk, kesehatan mental yang buruk, cacat fisik, kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan zat, dan pengaruh negatif dari teman sebaya, bahkan ras sering dikutip sebagai penghalang untuk bekerja (Edin dan Lein, 1997). Sebuah studi Pearlmutter dan Bartle (2003) menemukan bahwa ibu-ibu bekerja marah tentang kurangnya pilihan mengasuh anak, terutama ibu-ibu yang bekerja di industri jasa yang kadang bekerja malam bahkan akhir pekan. Juga, banyak ibu membutuhkan merawat anak sakit atau merawat anak cacat (Lens, 2002). Menurut penelitian Zippay dan Rangarajan (2007), 78 persen ibu bekerja mengandalkan perawatan anak informal oleh keluarga atau teman. Mengasuh anak telah terbukti mempengaruhi jumlah jam kerja. Mengasuh anak mengakibatkan penurunan jumlah jam kerja (Press *et al*., 2005; Joo, 2008).

Dalam beberapa penelitian lainnya, pengalaman kerja (pekerjaan yang dilakukan tenaga kerja sebelumnya) dilaporkan menjadi prediktor kerja. Tahun yang dihabiskan di pekerjaan sebelumnya sangat penting untuk mendapatkan pekerjaan baru dan tetap bekerja (Cheng, 2002;. Lee *et al*., 2004). Selain itu, mereka yang bekerja di sektor pekerjaan informal yang kurang mungkin untuk dipekerjakan (Lee *et al*., 2004). Kemampuan untuk memiliki fasilitas yang mendukung, seperti telepon, transportasi, dan dukungan sosial juga penting untuk mencapai dan mempertahankan pekerjaan. Misalnya, individu yang tidak bekerja yang memiliki telepon lebih mungkin untuk dipekerjakan (Latimer, 2004). Kemungkinan dipekerjakan lebih rendah bagi mereka yang belum pernah bekerja, sementara kurangnya pengalaman kerja sebelumnya dikaitkan dengan pendapatan yang lebih rendah (Dworsky dan Courtney, 2007). Modal sosial muncul sebagai pelengkap dari modal manusia (tingkat pendidikan dan keterampilan kerja individu yang ditawarkan kepada pemberi kerja).

Daftar Pustaka

(4) Boediono, Dr., Ekonomi Internasional dan Nasional, BPFE, Yogyakarta, 2014 diakses September 2020
(5) Halwani, Hendra. Dra. M.H., dan Tjiptoharijanto, Prijono, H. Dr., Perdagangan Internasional, Pendekatan Ekonomi Kesejahteraan Makro & Mikro, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
(6) Tambunan, Tulus T.H., Dr., Perekonomian dan Ekonomi Kesejahteraan Indonesia,, Teori dan temuan Empiris, Ghalia Indonesia, 2017